



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KLATEN 2022



Hj. Sri Mulyani, S.M
Bupati Klaten

H. Yoga Hardaya, S.H., M.H
Wakil Bupati Klaten

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Klaten untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjaditanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ini .

Klaten, 24 Maret 2023



PI. INSPEKTUR KABUPATEN KLATEN

FADZAR INDRIAWAN, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19701227 199103 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, karunia serta ridho-Nya, **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022** yang merupakan amanat konstitusional telah dapat diselesaikan. Penyusunan LPPD Tahun 2022 ini merupakan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun untuk mengetahui sejauh mana kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolak ukur dalam capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan demikian laporan ini berisi gambaran kinerja pelaksanaan pemerintahan yang merupakan implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten selama tahun 2022.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum memenuhi harapan kita semua, namun Pemerintah Kabupaten Klaten sudah berupaya secara optimal. Saran dan masukan dari berbagai pihak sebagai perbaikan kinerja sangat kami harapkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala upaya yang telah kami laksanakan senantiasa memperoleh petunjuk serta ridha dari Allah SWT.



DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar dan Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1
a. Undang-undang Pembentukan Daerah.....	1
b. Data Geografis Wilayah.....	2
c. Jumlah Penduduk	2
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	6
e. Jumlah perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	7
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	11
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	14
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	14
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	24
c. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja berdasarkan RPJMD	29
d. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Daerah Tahun 2022	35
e. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	37
f. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	42
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	42
a. Latar Belakang.....	42
b. Dasar Hukum.....	44
c. Kebijakan Umum	47
d. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	53
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	61
2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO.....	61
2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	68
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	68
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	68

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang	
Urusan Pemerintahan	68
2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	68
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	234
1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN	
TUGAS PEMBANTUAN	234
2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN	
TUGAS PEMBANTUAN	234
3.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DISELENGGARAKAN	
OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA	236
3.2 TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DISELENGGARAKAN	
OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA	236
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN	
STANDAR PELAYANAN MINIMAL	244
4.1 URUSAN PENDIDIKAN	244
4.2 URUSAN KESEHATAN	253
4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	280
4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	287
4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM	
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	292
4.6 URUSAN SOSIAL	308
BAB V PENUTUP.....	343

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Hal
Gambar 2.1 Perkembangan antar waktu Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten tahun 2017 – 2022.....	63
Gambar 2.2 Persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2017 – 2022.....	63
Gambar 2.3 Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten (%) Tahun 2017 – 2022.....	66
Gambar 2.4 Peringkat Kinerja sasaran strategis.....	77
Gambar 2.5 Peringkat Kinerja Regresif.....	77
Gambar 2.6 Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Klaten, Jateng, dan Nasional Klaten Tahun 2019 – 2022.....	91
Gambar 2.7 Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2021 – 2022.....	91
Gambar 2.8 Perkembangan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2018-2022	105
Gambar 2.9 Perkembangan Drainase dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2022	136
Gambar 2.10 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022	148
Gambar 2.11 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2018-2022	149
Gambar 2.12 Perkembangan APM Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	150
Gambar 2.13 Perkembangan APK Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	151
Gambar 2.14 Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun Kabupaten Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2018 – 2022.....	152

Gambar 2.15 Usia Harapan Hidup (UHH) Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2022.....	156
Gambar 2.16 PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2018–2022.....	163
Gambar 2.17 Pembagian Penduduk Berdasar Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja	165
Gambar 2.18 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018-2022.....	167
Gambar 2.19 Perkembangan IPG Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2017-2021	174
Gambar 2.20 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Klaten, Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022.....	175
Gambar 2.21 Perkembangan IDG Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2017 – 2021	177
Gambar 2.22 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2018-2022.....	182
Gambar 2.23 Peta Rawan Gerakan Tanah.....	187
Gambar 2.24 Peta Kawasan Bencana Banjir Kabupaten Klaten.....	188
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Per-Kecamatan tahun 2022	3
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Kelompok Umur Tahun 2022	3
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2022	4
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2022	6
Tabel 1.5 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Klaten	6
Tabel 1.6 Data PNS Pemerintah Kabupaten Klaten menurut Unit Kerja Tahun 2022.....	10

Tabel 1.7	
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022	12
Tabel 1.8	
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022	13
Tabel 1.9	
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022	13
Tabel 1.10	
Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026	30
Tabel 1.11	
Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2022	35
Tabel 1.12	
Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026	37
Tabel 1.13	
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022	48
Tabel 1.14	
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan kesehatan Tahun 2022	49
Tabel 1.15	
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022.....	50
Tabel 1.16	
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022.....	51
Tabel 1.17	
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Trantibum dan Damkar Tahun 2022.....	51
Tabel 1.18	
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebencanaan Tahun 2022	52
Tabel 1.19	
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2022	53
Tabel 1.20	
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten tahun 2022.....	54

Tabel 1.21	
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang	
Urusan Kesehatan Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Kesehatan	
Kabupaten Klaten tahun 2022.....	55
Tabel 1.22	
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang	
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ke Dalam	
Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Kabupaten Klaten tahun 2022.....	56
Tabel 1.23	
Integrasi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Ke Dalam	
Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Kabupaten Klaten 2022.....	57
Tabel 1.24	
Integrasi SPM Bidang Urusan Ketentraman,	
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ke Dalam	
Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	
Kabupaten Klaten tahun 2022.....	58
Tabel 1.25	
Integrasi SPM Sub Bidang Urusan Kebencanaan	
ke Dalam Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Klaten	
Kabupaten Klaten tahun 2022.....	59
Tabel 1.26	
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	
Bidang Urusan Sosial Ke Dalam Arah Kebijakan	
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan	
Anak dan Keluarga Berencana	
Kabupaten Klaten tahun 2022.....	60
Tabel 2.1	
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Klaten Tahun 2021 dan 2022	
beserta Persentase Perubahannya	61
Tabel 2.2	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten	
Tahun 2018-2022	62
Tabel 2.3	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	
dan Tingkat Pengangguran	
Terbuka (TPT) % di Kabupaten Klaten tahun 2018 – 2022	65
Tabel 2.4	
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klaten	
tahun 2017 – 2022	66
Tabel 2.5	
Distribusi Pendapatan Penduduk Klaten	
Tahun 2020 – 2022.....	67

Tabel 2.6	
Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif.....	69
Tabel 2.7	
Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif	69
Tabel 2.8	
Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten	
Tahun 2022	70
Tabel 2.9	
Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten	
Tahun 2022	73
Tabel 2.10	
Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten	
Tahun 2021 dan Tahun 2022 dan Capaian Kinerja Organisasi	
Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022 dibandingkan	
dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah	
Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten.....	79
Tabel 2.11	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan	
Perlindungan Masyarakat.....	84
Tabel 2.12	
Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan	
Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2018-2022.....	85
Tabel 2.13	
Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan	
Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol	
Tahun 2018-2022.....	86
Tabel 2.14	
Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum	
Tahun 2018-2022.....	87
Tabel 2.15	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan	
Kinerja Pemerintah Daerah.....	89
Tabel 2.16	
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten	
Tahun 2018-2021.....	97
Tabel 2.17	
Perkembangan Jumlah jabatan ASN	
Tahun 2018-2022.....	101
Tabel 2.18	
Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat, Bimtek dan Seminar	
Tahun 2018-2022.....	102
Tabel 2.19	
Manajemen Pengelolaan Aparatur Sipil Negara ASN	
Tahun 2018-2022.....	103

Tabel 2.20 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah.....	104
Tabel 2.21 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Mengoptimalkan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi.....	107
Tabel 2.22 Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha Tahun 2018-2022.....	108
Tabel 2.23 Pertumbuhan dan Kontribusi Industri Terhadap PDRB Tahun 2018-2022	110
Tabel 2.24 Pasar Menurut Jenisnya Tahun 2018–2022.....	111
Tabel 2.25 Pertumbuhan dan Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2018-2022	112
Tabel 2.26 Lahan Pertanian dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021 (Ha)	114
Tabel 2.27 Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2021 (Ha)	115
Tabel 2.28 Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan Tahun 2018-2022	116
Tabel 2.29 Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2018-2022	116
Tabel 2.29 Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2018-2022	116
Tabel 2.30 Produksi Perkebunan Tahun 2018-2022.....	117
Tabel 2.31 Populasi Ternak Tahun 2018-2022	117
Tabel 2.32 Produksi Susu, Daging, dan Telur Tahun 2018-2022	118
Tabel 2.33 Luas Areal Obyek Perikanan dan Jenisnya Tahun 2018-2022	119

Tabel 2.34	
Perkembangan Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan	
Tahun 2018-2022	119
Tabel 2.35	
Pertumbuhan dan Kontribusi Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB	
Tahun 2018-2022	120
Tabel 2.36	
Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata	
Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan	
Wisatawan Mancanegara (Wisman)	
Tahun 2018-2022	122
Tabel 2.37	
Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD	
Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022	123
Tabel 2.38	
Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya	
di Kabupaten Klaten Tahun 2022	124
Tabel 2.39	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Meningkatkan Investasi Daerah	130
Tabel 2.40	
Jumlah Investasi PMA dan PMDN	
Tahun 2018-2022	130
Tabel 2.41	
Perkembangan Realisasi PMDN	
Tahun 2018-2022	131
Tabel 2.42	
Perkembangan Realisasi PMA	
Tahun 2018-2022	131
Tabel 2.43	
Program Pendukung Pencapaian Sasaran	
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah	133
Tabel 2.44	
Kondisi Jalan di Kabupaten Klaten	
Tahun 2018-2022	134
Tabel 2.45	
Kondisi Jembatan di Kabupaten Klaten	
Tahun 2018-2022	135
Tabel 2.46	
Kondisi Drainase di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022	136
Tabel 2.47	
Perkembangan Kondisi Daerah Irigasi (DI)	
Tahun 2018-2022	137
Tabel 2.48	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Meningkatnya Capaian <i>Universal Access</i> (100-0-100)	139

Tabel 2.49 Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Tahun 2018-2022	140
Tabel 2.50 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terkendalnya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang.....	142
Tabel 2.51 Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang Tahun 2018-2022	143
Tabel 2.52 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas Penyelenggaraan angkutan	144
Tabel 2.53 Sarana dan Prasarana Fasilitas Perlengkapan Jalan Tahun 2018 – 2022.....	145
Tabel 2.54 Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) Tahun 2018-2022	146
Tabel 2.55 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing	147
Tabel 2.56 Perkembangan Kegiatan Seni Budaya Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022	153
Tabel 2.57 Jumlah Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Seni Budaya Tahun 2018-2022	154
Tabel 2.58 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.....	156
Tabel 2.59 Ketersediaan Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan	157
Tabel 2.60 Cakupan Komplikasi kebidanan yang Ditangani	157
Tabel 2.61 Cakupan Penanganan Gizi.....	158
Tabel 2.62 Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk	159
Tabel 2.63 Cakupan Pelayanan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk	160

Tabel 2.64	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	162
Tabel 2.65	
Penduduk Usia Kerja Berumur 15 Tahun Ke atas	
Menurut Jenis Kegiatan Utama	
Tahun 2018-2022	165
Tabel 2.66	
Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Klaten	
Tahun 2022	169
Tabel 2.67	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak.....	173
Tabel 2.68	
Perkembangan Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin	
Klaten, Jateng dan Nasional Tahun 2017-2021.....	175
Tabel 2.69	
Sumbangan Pendapatan Perempuan	
Tahun 2017-2021	176
Tabel 2.70	
Indikator Indeks Pemberdayaan Gender.....	176
Tabel 2.71	
Komponen Pembentuk IDG Menurut Jenis Kelamin	
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021.....	178
Tabel 2.72	
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	
Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Klaten 2018-2022.....	178
Tabel 2.73	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	180
Tabel 2.74	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah serta Limbah dan	
Bahan Beracun Berbahaya (B3)	184
Tabel 2.75	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.....	186
Tabel 2.76	
Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah	
Kabupaten Klaten Tahun 2022	186
Tabel 2.77	
Perkembangan Kejadian Bencana Tahun 2018-2022	189
Tabel 2.78	
Tingkat Efisiensi Sumber Daya	191

Tabel 2.79	
Rasio Efektifitas Sumber Daya	212
Tabel 2.80	
Efektifitas Sumber Daya	214
Tabel 2.81	
Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Target Kinerja	216
Tabel 3.1	
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022.....	238
Tabel 4.1	
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022	245
Tabel 4.2	
Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan.....	248
Tabel 4.3	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan	249
Tabel 4.4	
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan tahun 2022	251
Tabel 4.5	
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022	251
Tabel 4.6	
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022	252
Tabel 4.7	
Kendala yang dihadapi Bidang Pendidikan.....	252
Tabel 4.8	
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022	257
Tabel 4.9	
Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022	265
Tabel 4.10	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022	266
Tabel 4.11	
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan tahun 2022	276
Tabel 4.12	
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022	277
Tabel 4.13	
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022	278

Tabel 4.14	Kendala yang dihadapi Bidang Kesehatan.....	278
Tabel 4.15	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022.....	281
Tabel 4.16	Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	283
Tabel 4.17	Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum	283
Tabel 4.18	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022.....	284
Tabel 4.19	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022	285
Tabel 4.20	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022.....	285
Tabel 4.21	Kendala yang dihadapi Bidang Pekerjaan Umum	286
Tabel 4.22	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022.....	288
Tabel 4.23	Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	289
Tabel 4.24	Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat.....	289
Tabel 4.25	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022	291
Tabel 4.26	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022.....	291
Tabel 4.27	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022.....	291
Tabel 4.28	Kendala yang dihadapi Bidang Perumahan Rakyat	292

Tabel 4.29	
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM	
Sub Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
Tahun 2022	295
Tabel 4.30	
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM	
Sub Bidang Urusan Kebakaran Tahun 2022	296
Tabel 4.31	
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM	
Sub Bidang Urusan Kebencanaan Tahun 2022	297
Tabel 4.32	
Realisasi Capaian SPM Sub Bidang Urusan Ketentraman	
dan Ketertiban Umum Tahun 2022	299
Tabel 4.33	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM	
Sub Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
Tahun 2022	299
Tabel 4.34	
Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Urusan	
Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022	300
Tabel 4.35	
Realisasi Capaian SPM Sub Bidang Urusan Kebakaran Tahun 2022	300
Tabel 4.36	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM	
Sub Bidang Urusan Kebakaran Tahun 2022	300
Tabel 4.37	
Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Urusan	
Kebakaran Tahun 2022	301
Tabel 4.38	
Realisasi Capaian SPM Sub Bidang Urusan Kebencanaan	
Tahun 2022	301
Tabel 4.39	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM	
Sub Bidang Urusan Kebencanaan Tahun 2022	302
Tabel 4.40	
Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Urusan	
Kebencanaan Tahun 2022	303
Tabel 4.41	
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM	
Sub Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
Tahun 2022	304
Tabel 4.42	
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM	
Sub Bidang Urusan Kebakaran Tahun 2022	304

Tabel 4.43	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Sub Bidang Urusan Kebencanaan Tahun 2022	305
Tabel 4.44	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Bidang Urusan Ketentruman dan Ketertiban Umum Tahun 2022.....	305
Tabel 4.45	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Bidang Urusan Kebakaran Tahun 2022	306
Tabel 4.46	Dukungan Personil ASN Pemenuhan SPM Sub Bidang Urusan Kebencanaan Tahun 2022	306
Tabel 4.47	Kendala yang dihadapi Bidang Trantibumlinmas Sub Bidang Urusan Trantibum dan Damkar.....	306
Tabel 4.48	Kendala yang dihadapi Bidang Trantibumlinmas Sub Bidang Urusan Kebencanaan	308
Tabel 4.49	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2022	312
Tabel 4.50	Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2022	320
Tabel 4.51	Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial Tahun 2022	321
Tabel 4.52	Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial Tahun 2022	328
Tabel 4.53	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Sosial Tahun 2022	329
Tabel 4.54	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Urusan Sosial Tahun 2022	330
Tabel 4.55	Kendala yang dihadapi Bidang Sosial Tahun 2022	331
Tabel 4.56	Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022	332
Tabel 4.57	Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2022	333

Tabel 4.58	
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022.....	335
Tabel 4.59	
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022.....	336
Tabel 4.60	
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Bidang Urusan Trantibum dan Damkar Tahun 2022.....	337
Tabel 4.61	
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Bidang Urusan Kebencanaan Tahun 2022	340
Tabel 4.62	
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2022	341

LAMPIRAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022

- 1. LAMPIRAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM DAN JENIS BELANJA TAHUN 2022**
- 2. LAMPIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022**
- 3. LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME**
- 4. LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 PENJELASAN UMUM

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sebagai wilayah daerah otonom dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dalam bidang pemerintahan, maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, dimana jabatan Kepala Daerah dipangku oleh Fungsionalis, sehingga Bupati tidak lagi merangkap sebagai Kepala Daerah. Kemudian dalam pelaksanaannya diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Desember 1957 Nomor : Pem.10/2/18, yang membentuk jabatan baru di lingkungan pamong praja, yaitu Pedjabat Bupati atau disingkat Pd. Bupati yang dipangku oleh Patih setempat. Patih inilah sebagai Kepala *Corps* Pamong Praja yang sehari-harinya disertai tugas-tugas Pemerintahan Pusat, sedangkan Bupati diberikan kedudukan sebagai Bupati dp (diperbantukan) Residen (Surakarta) yang bertempat tinggal di Daerah Swatantra Tingkat II (Kabupaten) Klaten, sejak tanggal 1 Agustus 1958. Disamping itu juga masih ada pejabat yang disebut Kepala Daerah, yang dalam prakteknya bertindak atas nama Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah Swatantra yang bersangkutan yang menjalankan tugas-tugas otonomi dan *medebewind*, sehingga ada dualisme jabatan.

Pada Tahun 1959 terbitlah Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, yang menetapkan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, dan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh sebuah badan yang bernama Badan Pemerintahan Harian. Disamping itu, Penetapan Presiden ini juga memuat tentang penyerahan tugas-tugas Pemerintahan Umum kepada Pemerintahan Daerah. Namun demikian peraturan tersebut baru direalisasikan pada Tahun 1963 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 jo. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963. Sehingga dengan diterbitkannya peraturan tersebut berdampak dihapusnya dualisme dalam Pemerintahan Daerah, dimana telah disatukan kembali Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan bekas Pamong Praja ke dalam *corps* Pemerintahan Daerah. Bersama dengan itu, maka hapuslah pula Pemerintahan Kawedanan dengan Wedananya dan beralih sebagai fungsionaris pembantu/penghubung Bupati Kepala Daerah. Dengan demikian, maka Kantor Pemerintah Daerah dan Kantor Pamong Praja juga disatukan lagi pada satu tempat. Kemudian untuk

menyempurnakan struktur Pemerintahan Daerah, maka pada tahun 1965 diterbitkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.

Melihat sejarah-sejarah yang terjadi di Kabupaten Klaten seperti di atas, maka tim penggali Hari Jadi Kabupaten Klaten memilih tanggal pendirian benteng Klaten sebagai hari dan tanggal kelahiran Kabupaten Klaten. Hal ini didasarkan pada peristiwa awal munculnya nama Klaten dalam sumber sejarah (dasar nomenklatur) dan asas kontinuitas peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di Klaten. Di samping itu dukungan sumber sejarah tertulis tentang pendirian Benteng Klaten juga menjadi dasar dipilihnya tanggal 28 Juli 1804 sebagai hari lahirnya Kabupaten Klaten dan telah ditetapkan dengan Perda Nomor 12 tahun 2007, tanggal 18 Juni 2007 tentang Hari Jadi Kabupaten Klaten.

b. Data Geografis Wilayah

1. Batas Administrasi

Kabupaten Klaten terletak antara 7°32`19” Lintang Selatan sampai 7°48`33” Lintang Selatan dan antara 110°26`14” Bujur Timur sampai 110°47`51” Bujur Timur dengan batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Klaten sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali,
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo,
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY),
dan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY)

2. Luas Wilayah

Secara administratif Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan dengan luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai 70.152,02 ha atau seluas 2,15 % dari luas Provinsi Jawa Tengah (3.254.412 ha).

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten semester I tahun 2022 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sebanyak 1.277.455 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 635.278 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 642.177 jiwa. Jumlah penduduk di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Per-Kecamatan
Tahun 2022

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PRAMBANAN	25.660	26.048	51.708
2	GANTIWARNO	19.259	19.383	38.642
3	WEDI	25.866	26.195	52.061
4	BAYAT	31.926	31.808	63.734
5	CAWAS	28.492	29.183	57.675
6	TRUCUK	39.812	39.406	79.218
7	KEBONARUM	9.749	10.059	19.808
8	JOGONALAN	29.431	29.571	59.002
9	MANISRENGGO	21.383	21.849	43.232
10	KARANGNONGKO	18.204	18.601	36.805
11	CEPER	32.340	32.575	64.915
12	PEDAN	23.441	23.434	46.875
13	KARANGDOWO	21.449	21.879	43.328
14	JUWIRING	29.097	29.266	58.363
15	WONOSARI	31.284	31.615	62.899
16	DELANGGU	20.853	21.269	42.122
17	POLANHARJO	20.180	20.769	40.949
18	KARANGANOM	22.954	23.435	46.389
19	TULUNG	26.862	27.086	53.948
20	JATINOM	30.119	30.067	60.186
21	KEMALANG	19.685	19.917	39.602
22	NGAWEN	23.029	22.840	45.869
23	KALIKOTES	18.463	18.530	36.993
24	KLATEN UTARA	23.777	24.203	47.980
25	KLATEN TENGAH	20.199	20.908	41.107
26	KLATEN SELATAN	21.764	22.281	44.045
TOTAL		635.278	642.177	1.277.455

*Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten
Tahun 2023 (Jumlah Penduduk Semester I berdasarkan data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2022)*

Berdasarkan kelompok umur penduduk di Kabupaten Klaten, 68,91% penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu antara umur 15 – 64 tahun yang mencapai 880.347 jiwa. Sedangkan 21,24% lainnya yaitu 271.359 jiwa merupakan penduduk usia non produktif dari usia 0-14 tahun dan 9,84% atau 125.749 jiwa adalah penduduk usia 65 tahun ke atas. Rincian jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten
Menurut Kelompok Umur Tahun 2022

NO	USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (JIWA)	%
1	0 - 4 tahun	40.802	38.262	79.064	6,19
2	5 - 9 tahun	47.944	44.470	92.414	7,23
3	10 - 14 tahun	51.124	48.757	99.881	7,82
4	15 - 19 tahun	46.205	44.132	90.337	7,07
5	20 - 24 tahun	47.472	45.122	92.594	7,25
6	25 - 29 tahun	46.469	44.197	90.666	7,10

NO	USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (JIWA)	%
7	30 - 34 tahun	43.345	42.237	85.582	6,70
8	35 - 39 tahun	48.221	47.533	95.754	7,50
9	40 - 44 tahun	49.420	48.478	97.898	7,66
10	45 - 49 tahun	45.149	45.615	90.764	7,11
11	50 - 54 tahun	42.582	45.340	87.922	6,88
12	55 - 59 tahun	38.142	43.556	81.698	6,40
13	60 - 64 tahun	31.808	35.324	67.132	5,26
14	65 - 69 tahun	23.338	25.592	48.930	3,83
15	70 - 74 tahun	14.973	17.657	32.630	2,55
16	>= 75 tahun	18.284	25.905	44.189	3,46
JUMLAH		635.278	642.177	1.277.455	100

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten
Tahun 2023 (Jumlah Penduduk Semester I berdasarkan data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2022)

Kondisi penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan jenis pekerjaannya sangat beragam. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Klaten memiliki mata pencaharian sebagai buruh harian lepas sebanyak 344.103 jiwa, kemudian jumlah terbanyak kedua adalah penduduk dengan status pelajar/ mahasiswa sebanyak 257.415 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2022

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	AKUNTAN	6	6	12
2	ANGGOTA BPK	2	0	2
3	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	36	9	45
4	ANGGOTA DPRD PROVINSI	0	2	2
5	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA	1.685	2.122	3.807
6	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	1	0	1
7	APOTEKER	23	147	170
8	ARSITEK	31	3	34
9	BELUM/TIDAK BEKERJA	106.692	100.123	206.815
10	BIARAWATI	3	18	21
11	BIDAN	0	735	735
12	BUPATI	0	1	1
13	BURUH HARIAN LEPAS	203.163	140.940	344.103
14	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	64	26	90
15	BURUH PETERNAKAN	144	39	183
16	BURUH TANI/PERKEBUNAN	16.062	14.123	30.185
17	DOKTER	210	352	562
18	DOSEN	410	335	745
19	GURU	3.309	7.062	10.371
20	IMAM MESJID	13	0	13
21	INDUSTRI	205	106	311

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
22	JURU MASAK	16	30	46
23	KARYAWAN BUMD	290	187	477
24	KARYAWAN BUMN	1.782	1.051	2.833
25	KARYAWAN HONORER	1.673	2.348	4.021
26	KARYAWAN SWASTA	71.485	51.782	123.267
27	KEPALA DESA	330	30	360
28	KEPOLISIAN RI	1.506	72	1.578
29	KONSTRUKSI	226	18	244
30	KONSULTAN	67	10	77
31	MEKANIK	736	2	738
32	MENGURUS RUMAH TANGGA	28	136.536	136.564
33	NELAYAN/PERIKANAN	25	1	26
34	NOTARIS	28	33	61
35	PARAJI	3	13	16
36	PARANORMAL	6	2	8
37	PASTOR	27		27
38	PEDAGANG	8.170	11.935	20.105
39	PEGAWAI NEGERI SIPIL	8.705	7.817	16.522
40	PELAJAR/MAHASISWA	134.261	123.154	257.415
41	PELAUT	403	7	410
42	PEMBANTU RUMAH TANGGA	7	360	367
43	PENATA BUSANA	5	17	22
44	PENATA RAMBUT	12	52	64
45	PENATA RIAS	14	150	164
46	PENDETA	111	8	119
47	PENELITI	12	2	14
48	PENGACARA	54	5	59
49	PENSIUNAN	8.893	4.385	13.278
50	PENTERJEMAH	7	2	9
51	PENYIAR RADIO	3	1	4
52	PENYIAR TELEVISI	0	1	1
53	PERANCANG BUSANA	3	11	14
54	PERANGKAT DESA	2.046	484	2.530
55	PERAWAT	348	1.336	1.684
56	PERDAGANGAN	4.028	6.076	10.104
57	PETANI/PEKEBUN	11.541	8.852	20.393
58	PETERNAK	477	145	622
59	PIALANG	4	3	7
60	PROMOTOR ACARA	1	0	1
61	PSIKIATER/PSIKOLOG	1	10	11
62	SENIMAN	225	74	299
63	SOPIR	2.593	1	2.594
64	TABIB	14	2	16
65	TENTARA NASIONAL INDONESIA	1.636	15	1.651
66	TRANSPORTASI	404	11	415
67	TUKANG BATU	2.023	2	2.025
68	TUKANG CUKUR	77	4	81
69	TUKANG GIGI	18	2	20

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
70	TUKANG JAHIT	563	1.823	2.386
71	TUKANG KAYU	3.627	2	3.629
72	TUKANG LAS/PANDAI BESI	321	5	326
73	TUKANG LISTRIK	85	1	86
74	TUKANG SOL SEPATU	33	5	38
75	USTADZ/MUBALIGH	55	9	64
76	WAKIL BUPATI	1	0	1
77	WARTAWAN	74	11	85
78	WIRASWASTA	34.136	17.133	51.269
	TOTAL	635.278	642.177	1.277.455

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten
Tahun 2023 (Jumlah Penduduk Semester I berdasarkan data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2022)

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2022 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sebanyak 1.277.455 jiwa sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 1.276.030 jiwa sehingga pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,11%. Jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Klaten pada tahun 2021-2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk
di Kabupaten Klaten tahun 2021-2022

Penduduk (Jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)
2021	2022	2021-2022
1.276.030	1.277.455	0,11

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten
Tahun 2023 (Jumlah Penduduk Semester I berdasarkan data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2022)

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Klaten terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa dan 10 Kelurahan. Jumlah Desa/Kelurahan di tiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.5.

Tabel 1.5
Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan
di Kabupaten Klaten

No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KELURAHAN
1	Kecamatan Prambanan	16	
2	Kecamatan Gantiwarno	16	
3	Kecamatan Wedi	19	
4	Kecamatan Bayat	18	
5	Kecamatan Cawas	20	
6	Kecamatan Trucuk	18	
7	Kecamatan Kebonarum	7	
8	Kecamatan Jogonalan	18	
9	Kecamatan Manisrenggo	16	

No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KELURAHAN
10	Kecamatan Karangnongko	14	
11	Kecamatan Ceper	18	
12	Kecamatan Pedan	14	
13	Kecamatan Karangdowo	19	
14	Kecamatan Juwiring	19	
15	Kecamatan Wonosari	18	
16	Kecamatan Delanggu	16	
17	Kecamatan Polanharjo	18	
18	Kecamatan Karanganom	19	
19	Kecamatan Tulung	18	
20	Kecamatan Jatinom	17	1
21	Kecamatan Kemalang	13	
22	Kecamatan Ngawen	13	
23	Kecamatan Kalikotes	7	
24	Kecamatan Klaten Utara	6	2
25	Kecamatan Klaten Tengah	3	6
26	Kecamatan Klaten Selatan	11	1
		391	10
	JUMLAH DESA DAN KELURAHAN	401	

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, bidang kepemudaan dan olah raga serta bidang Pariwisata;
 3. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 8. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta bidang perdagangan;
 9. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi;
 10. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan statistik;
 11. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
 12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
 13. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 14. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 15. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
 17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- e. Badan Daerah terdiri atas :
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan,

penelitian dan pengembangan;

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas sedang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A melaksanakan sub urusan bencana.

Selain Perangkat Daerah sebagaimana diatas juga dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah sejumlah 26 (dua puluh enam) Kecamatan, yang terdiri dari :

1. Kecamatan Prambanan;
2. Kecamatan Gantiwarno;
3. Kecamatan Wedi;
4. Kecamatan Bayat;
5. Kecamatan Cawas;
6. Kecamatan Trucuk;
7. Kecamatan Kebonarum;
8. Kecamatan Jogonalan;
9. Kecamatan Manisrenggo;
10. Kecamatan Karangnongko;
11. Kecamatan Ceper;
12. Kecamatan Pedan;
13. Kecamatan Karangdowo;
14. Kecamatan Juwiring;
15. Kecamatan Wonosari;
16. Kecamatan Delanggu;
17. Kecamatan Polanharjo;
18. Kecamatan Karanganom;
19. Kecamatan Tulung;
20. Kecamatan Jatinom;
21. Kecamatan Kemalang;
22. Kecamatan Ngawen;
23. Kecamatan Kalikotes;
24. Kecamatan Klaten Utara;
25. Kecamatan Klaten Tengah;
26. Kecamatan Klaten Selatan.

Dalam wilayah kecamatan dibentuk 10 (sepuluh) Kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang meliputi :

1. Kelurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom.
2. Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara;
3. Kelurahan Barenglor, Kecamatan Klaten Utara;
4. Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah;
5. Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah;

6. Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah;
7. Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah;
8. Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah;
9. Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah;
10. Kelurahan Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan;

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten, Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2022 sebanyak 8.211 PNS. Dengan rincian jumlah PNS laki-laki sebanyak 3.045 PNS dan jumlah PNS perempuan sebanyak 5.166 PNS. Rincian data PNS di Pemerintah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.6
Data PNS Pemerintah Kabupaten Klaten
menurut Unit Kerja Tahun 2022

No	Unit Kerja	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Sekretariat Daerah	142	81	61
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	32	25	7
3	Satuan Polisi Pamong Praja	39	36	3
4	Inspektorat	61	29	32
5	Dinas Pendidikan	4.778	1.537	3.241
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	40	23	17
7	Dinas Kesehatan	1.575	291	1.284
8	DISSOSP3APPKB	38	18	20
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36	15	21
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24	16	8
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16	9	7
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	120	89	31
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	30	17	13
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	26	19	7
15	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	35	26	9
16	Dinas PU dan Penataan Ruang	191	158	33
17	Dinas Perhubungan	47	34	13
18	Dinas Lingkungan Hidup	129	115	14
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	197	113	84
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	28	11	17

No	Unit Kerja	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	42	28	14
22	BPKPAD	81	48	33
23	BAPPEDALITBANG	30	16	14
24	BPBD	25	18	7
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18	14	4
26	Kec. Klaten Utara	22	12	10
27	Kec. Klaten Tengah	36	17	19
28	Kec. Klaten Selatan	16	5	11
29	Kec. Wedi	18	9	9
30	Kec. Ngawen	13	6	7
31	Kec. Kalikotes	17	10	7
32	Kec. Kebonarum	15	9	6
33	Kec. Delanggu	16	10	6
34	Kec. Juwiring	15	9	6
35	Kec. Wonosari	19	13	6
36	Kec. Ceper	18	11	7
37	Kec. Jatinom	17	11	6
38	Kec. Karangnom	12	7	5
39	Kec. Tulung	17	12	5
40	Kec. Polanharjo	16	12	4
41	Kec. Prambanan	20	10	10
42	Kec. Kemalang	14	12	2
43	Kec. Karangnongko	16	12	4
44	Kec. Jogonalan	14	6	8
45	Kec. Gantiwarno	13	8	5
46	Kec. Manisrenggo	17	14	3
47	Kec. Pedan	11	9	2
48	Kec. Cawas	15	6	9
49	Kec. Trucuk	12	8	4
50	Kec. Karangdowo	18	12	6
51	Kec. Bayat	14	9	5
	TOTAL	8.211	3.045	5.166

Sumber : BKPSDM Kabupaten Klaten tahun 2023

f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

1) Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Pada tahun 2022 Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten ditargetkan sebesar Rp2.550.512.308.850,00 dan realisasi pendapatan sebesar Rp2.587.693.432.935,00 Sehingga dari pendapatan tersebut terealisasi sebesar 101,46% dari target yang telah ditentukan. Adapun rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.7
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
PENDAPATAN DAERAH	2.550.512.308.850	2.587.693.432.935	101,46
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	329.129.377.686	358.048.103.989	108,79
Pajak Daerah	134.000.000.000	146.179.152.569	109,09
Retribusi Daerah	15.315.007.116	17.152.918.048	112
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.299.813.008	18.641.433.357	130,36
Lain-lain PAD yang Sah	165.514.557.562	176.074.600.015	106,38
PENDAPATAN TRANSFER	2.208.342.931.164	2.214.576.328.946	100,28
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.010.535.463.628	1.982.237.746.675	98,59
Dana Perimbangan	1.619.893.801.628	1.591.689.816.675	98,26
Dana Insentif Daerah (DID)	11.209.129.000	11.209.129.000	100
Dana Desa	379.432.533.000	379.338.801.000	99,98
Pendapatan Transfer Antar Daerah	197.807.467.536	232.338.582.271	117,46
Pendapatan Bagi Hasil	180.475.467.536	218.303.369.271	120,96
Bantuan Keuangan	17.332.000.000	14.035.213.000	80,98
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.040.000.000	15.069.000.000	115,56
Pendapatan Hibah	13.040.000.000	15.069.000.000	115,56
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0

Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2023 (data per tanggal 24 Februari 2023)

2) Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.020.031.884.691,28 dan dapat direalisasikan Rp2.527.619.332.474,28 atau mencapai 83,7%, yang rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.8
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
BELANJA DAERAH	3.020.031.884.691,28	2.527.619.332.474,28	83,7
BELANJA OPERASI	2.044.963.721.077,28	1.619.377.441.227,28	79,19
Belanja Pegawai	1.264.328.985.289	965.541.425.166	76,37
Belanja Barang dan Jasa	704.866.372.948,28	583.404.693.292,28	82,77
Belanja Subsidi	2.000.000.000	1.795.750.000	89,79
Belanja Hibah	59.258.362.840	57.905.772.769	97,72
Belanja Bantuan Sosial	14.510.000.000	10.729.800.000	73,95
BELANJA MODAL	292.081.947.049	246.670.020.742	84,45
Belanja Modal Tanah	2.266.890.000	1.853.240.700	81,75
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.270.623.892	63.015.807.876	83,72
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.694.754.994	65.909.190.529	84,83
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	128.975.611.400	107.441.269.466	83,3
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.874.066.763	8.450.512.171	107,32
BELANJA TIDAK TERDUGA	25.945.719.619	7.794.077.100	30,04
Belanja Tidak Terduga	25.945.719.619	7.794.077.100	30,04
BELANJA TRANSFER	657.040.496.946	653.777.793.405	99,5
Belanja Bagi Hasil	19.216.016.946	16.621.066.005	86,5
Belanja Bantuan Keuangan	637.824.480.000	637.156.727.400	99,9

Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2023 (data per tanggal 24 Februari 2023)

3) Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Total pendapatan, total belanja, total pembiayaan dan SILPA tahun 2022 serta SILPA tahun sebelumnya di Kabupaten Klaten secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.9
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
PENDAPATAN DAERAH	2.550.512.308.850	2.587.693.432.935	101,46
BELANJA DAERAH	3.020.031.884.691,28	2.527.619.332.474,28	83,7
SURPLUS / (DEFISIT)	- 469.519.575.841,28	60.074.100.460,72	-12,79

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	493.720.575.841,28	493.720.575.841,28	100
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	493.720.575.841,28	493.720.575.841,28	100
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	24.201.000.000	24.201.000.000	100
Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.000.000.000	100
Penyertaan Modal Daerah	9.201.000.000	9.201.000.000	100
PEMBIAYAAN NETTO	469.519.575.841,28	469.519.575.841,28	100
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	529.593.676.302	

Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2023 (data per tanggal 24 Februari 2023)

4) Realisasi Anggaran berdasarkan Urusan, Program dan Jenis Belanja

Realisasi anggaran berdasarkan urusan, program dan Jenis Belanja dapat dilihat dalam Lampiran Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022.

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan dan Kualitas Hidup

Kesejahteraan dan kualitas hidup berkaitan erat dengan masalah sosial, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, pengangguran, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, akses disabilitas, pemberdayaan pemuda. Tujuan yang diharapkan dari peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup adalah pengurangan kemiskinan. Masalah kemiskinan menjadi isu strategis paling utama, karena kondisi ekonomi akan berpengaruh terhadap kualitas sosial budaya dan ekologi. Terlebih lagi dengan adanya Pandemi Covid-19 yang semakin menambah jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Oleh sebab itu pada tahun awal RPJMD akan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Peningkatan pelayanan kesehatan terutama untuk pemulihan kasus penyakit menular maupun tidak menular akibat Pandemi Covid-19. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam bentuk peningkatan sarana/fasilitas kesehatan, penyediaan obat dan sarana pendukung medis, ketersediaan tenaga medis, jaminan kesehatan untuk masyarakat

miskin, hingga pengelolaan terhadap limbah medis yang semakin meningkat akibat Pandemi Covid-19.

Pemerataan kualitas pendidikan dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, tenaga pendidik yang memiliki kompetensi, kurikulum yang inovatif untuk membentuk jiwa kreatif dan inovatif siswa, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran serta ketersediaan jaringan infrastruktur pendukungnya. Dengan pemerataan kualitas pendidikan ke semua wilayah maka akan mendorong keberhasilan peningkatan pendidikan. Harapannya, akan muncul sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif dan inovatif, sehingga memiliki jiwa kemandirian yang tinggi.

Kesetaraan gender merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kaitan itu, pembangunan daerah harus memenuhi prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan selayaknya memberikan akses dan manfaat yang memadai bagi orang dewasa, pemuda dan anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, kelompok rentan seperti kaum disabilitas, untuk berpartisipasi dalam pembangunan, untuk mendapatkan akses dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan secara adil.

2. Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (KSPN-BYP), dan Antisipasi Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta

Infrastruktur dan konektivitas wilayah adalah pengelompokan isu permasalahan yang berasal dari permasalahan terkait pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman. Infrastruktur antara lain meliputi jaringan jalan, jaringan pelayanan air minum aman dan berkelanjutan, sanitasi sehat, pengurangan sampah dari sumbernya, pengolahan limbah industri dan limbah B3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan jalan akan mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas antar wilayah, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sedangkan peningkatan ketersediaan dan kualitas air minum, sanitasi, sampah dan limbah akan meningkatkan kualitas kesehatan manusia dan kualitas lingkungan hidup. Pemanfaatan energi baru terbarukan juga menjadi tujuan penyediaan jaringan energi.

Permasalahan infrastruktur dan konektivitas juga terkait dengan penyediaan sarana hunian dan pendukungnya, bagaimana menyediakan rumah layak huni dan peningkatan kualitas permukiman. Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah yang sudah disusun juga menjadi salah satu permasalahan terkait dengan perwujudan infrastruktur dan rencana pola ruang yang sesuai dengan dokumen perencanaan.

Isu tata ruang di Kabupaten Klaten lebih mengutamakan konsep tata ruang untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah utara, tengah dan selatan. Diharapkan dengan adanya rencana struktur ruang kabupaten dapat menumbuhkan pusat-pusat kegiatan di wilayah utara dan selatan akan pemeratakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten baik dari segi fisik, ekonomi, maupun sosial. Sedangkan dengan adanya rencana pola ruang akan dapat mengarahkan lokasi pembangunan sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Dengan ditetapkannya Kawasan Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (KSPN-BYP) merupakan program super prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 pada nomor urut ke 2 (dua), yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Borobudur dan sekitarnya (Jawa Tengah), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Lombok (Nusa Tenggara Barat), Tanjung Kelayang (Bangka-Belitung), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Morotai (Maluku Utara), Manado-Likupang-Bitung (Sulawesi Utara), dan Raja Ampat (Papua Barat), dan telah disusun perencanaan secara terpadu berupa Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT) atau *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) dan telah dibuatnya rencana *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP) atau Program Pembangunan Pengembangan Pariwisata yang Berintegrasi dan Berkelanjutan (BP3B) dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan adanya rencana pengembangan program tersebut perlu adanya kerjasama yang terpadu dari berbagai sektor baik infrastruktur, pariwisata, pertanian, perindustrian, perdagangan, sosial, budaya, jasa, Bumdes dan lain-lain, dengan memperhatikan potensi lokal yang dimiliki dan melibatkan masyarakat. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung wisata baik domestik maupun mancanegara dan menjadi daerah tujuan wisata yang bukan hanya sebagai daerah ampiran, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian lokal serta dapat menarik investor untuk menanamkan sahamnya sehingga investasi dapat meningkat dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak pada pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Sebagai daerah penyangga Kawasan Strategi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (KSPN-BYP) yaitu wilayah kecamatan Prambanan meliputi Desa Bugisan, Kebondalem Kidul, Kebondalem Lor, Pereng, Kokosan, Sengon, Taji, Kemudo dan Desa Tlogo dengan potensi

utama obyek wisata Candi Prambanan, Candi Plaosan dan Candi Sojiwan.

Sebagai tarikan atau kawasan strategi pendukung untuk menghidupkan kawasan strategi Solo-Sangiran, untuk Wilayah Tengah yaitu Jogonalan dan Kebonarum dan Ngawen dengan potensi wisata Heritage PG. Gondang Baru dan Agrowisata. Untuk Wilayah Timur yaitu Kecamatan Wedi, Gantiwarno, Bayat, Cawas dan Juwiring dengan potensi wisata Wisata Kerajinan (Keramik), Wisata Budaya (Lurik dan Batik) dan Wisata Agro (Tembakau). Wilayah Utara meliputi Kecamatan Karanganom, Jatinom, Polanharjo, Tulung, Manisrenggo dan Kemalang, sebagai tarikan/kawasan pendukung untuk menghidupkan kawasan strategis Merapi - Merbabu dengan potensi wisata Wisata Air dan Agrowisata (Agropolitan dan Minapolitan).

Posisi KSPN Prambanan dan sekitarnya yang terletak dalam kawasan Joglosemarkerto sehingga diperlukan adanya aksesibilitas konektivitas, akomodasi dan amenitas yang mampu mendukung pengembangan kawasan wisata Joglosemarkerto. Aksesibilitas konektivitas, akomodasi dan amenitas menjadi kunci di dalam pengembangan KSPN di Jawa Tengah.

Pembangunan kawasan strategis di Kabupaten Klaten selain pembangunan KSPN Prambanan dan sekitarnya, antara lain KSN Merapi dan sekitarnya, *Geo Heritage* Bayat dan Rawa Jombor, agropolitan dan minapolitan. Kawasan Candi Prambanan telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya dunia oleh *UNESCO* yang termuat dalam dokumen *Nomination File World Heritage List* No.C-642 tahun 1991. Melihat urgensi kawasan tersebut, PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) juga telah menetapkan Kawasan Candi Prambanan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan sosial budaya.

Dalam rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Klaten menetapkan Kecamatan Prambanan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, permukiman perkotaan, pariwisata, pertanian, industri, pelayanan perekonomian dan sosial untuk skala regional. Dengan penetapan Kecamatan Prambanan menjadi PKL tentunya dimaksudkan agar Kecamatan Prambanan berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Klaten yang melayani aktivitas skala regional terutama wilayah kecamatan yang ada di sekitarnya. Perkembangan yang terjadi di Kecamatan Prambanan sebenarnya sudah sesuai dengan rumusan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW. Saat ini Kecamatan Prambanan terus tumbuh menjadi pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Klaten. Berbagai fasilitas dengan skala pelayanan regional

juga telah berkembang. Selain itu, banyaknya investasi yang akan masuk di Kecamatan Prambanan juga akan dapat memicu pertumbuhan kawasan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam RTRW.

Sesuai arahan dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, wilayah Kabupaten Klaten termasuk dalam pengembangan jalan bebas hambatan Yogyakarta-Solo (II/6) yang melalui wilayah Kecamatan Polanharjo, Karangnom, Ngawen, Kebonarum, dan Prambanan.

Jalan tol Solo-Yogyakarta membentang dari wilayah Kecamatan Gamping di Kabupaten Sleman, DIY di sebelah barat hingga ke Kecamatan Banyudono Boyolali di sebelah timur. Di bagian timur, jalan tol akan tersambung di Simpang Susun Colomadu dan akan tersambung ke Jalan Tol Semarang-Solo dan Jalan Tol Solo-Ngawi. Sedangkan di barat, jalan tol akan terhubung ke Bandara Internasional Yogyakarta yang menjadi bagian Jalan Tol Yogyakarta-Cilacap. Tol ini dibangun melayang (*elevated*) di sepanjang Ring Road Utara Yogyakarta, kemudian berlanjut sepanjang Selokan Mataram hingga sampai ke simpang susun di daerah Maguwoharjo.

Dari simpang susun Purwomartani, jalan ini berbelok ke utara lalu timur laut menuju wilayah Kabupaten Klaten di sekitar perbatasan Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Manisrenggo. Dari sana jalan tol melewati beberapa kecamatan di Kabupaten Klaten yaitu Kecamatan Jogonalan, Karangnongko, Kebonarum, Ngawen, Karangnom, Klaten Utara, Ceper, Polanharjo dan Delanggu. Kemudian jalan tol melewati wilayah Kabupaten Boyolali di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Sawit. *Exit tol* yang melalui Kabupaten Klaten berada di Desa Kuncen Kecamatan Ceper; Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen; Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo; dan Desa Somopuro, Kecamatan Jogonalan.

Dengan adanya pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta akan berdampak pada perubahan pola ruang pada lokasi yang akan dijadikan jalur jalan tol dan di sekitar exit tol. Di mana sebagian besar lahan yang digunakan sebagai jalur jalan tol berupa lahan pertanian. Total lahan terdampak jalan tol di wilayah Kabupaten Klaten sebanyak 4.071 bidang dengan luasan 377,5 hektare. Inlet-outlet jalan tol di Kabupaten Klaten melalui:

- Desa Kuncen, Kecamatan Ceper;
- Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen;
- Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo; dan
- Desa Somopuro, Kecamatan Jogonalan.

3. Kondusivitas Wilayah

Permasalahan terkait ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah masih tingginya tingkat pelanggaran K3 maupun pelanggaran perda. Oleh sebab itu perlu kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan menaati peraturan, di samping perlu adanya personil untuk pelaksanaan penertiban, pengawasan dan penegakan perda.

Kondusivitas wilayah juga terkait dengan permasalahan nasionalisme kebangsaan, toleransi beragama yang juga mempengaruhi kondisi sosial budaya dan kehidupan beragama. Peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya dan kehidupan beragama menjadi bagian penting dalam pembangunan kondusivitas wilayah dalam rangka meningkatkan kerukunan masyarakat di Kabupaten Klaten dengan meningkatkan komunikasi antar masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor perwujudan kondusivitas wilayah, sebagai bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan.

4. Tata Kelola Pemerintahan, Klaten *Smart City*, dan Inovasi Daerah

Isu strategis yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan adalah pelayanan publik belum seluruhnya terakses dengan mudah, peningkatan akuntabilitas kinerja, penggunaan sistem data dan informasi belum terintegrasi. Klaten *Smart City* berkaitan dengan permasalahan pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi dan informatika, persandian, kearsipan dan pelayanan umum. Perwujudan Klaten *Smart City* bertujuan untuk membangun keterbukaan data dan informasi yang mudah diakses bagi masyarakat yang membutuhkan, serta membangun masyarakat yang cerdas dan tanggap terhadap globalisasi.

Kelitbangan dan inovasi adalah pengelompokan permasalahan terkait dengan pelaksanaan riset, penelitian, inovasi dan kreativitas masyarakat. Pada saat ini inovasi dan kreativitas menjadi hal penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan untuk meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mewujudkan Klaten *Smart City* dan Inovasi Daerah perlu adanya dukungan dan komitmen, serta kemitraan dengan lembaga kelitbangan, lembaga penunjang inovasi, lembaga pendidikan, dunia usaha dan masyarakat.

5. Daya Saing Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Kontribusi sektor perdagangan, pariwisata, industri dan UMKM saat ini cenderung mengalami penurunan, terlebih dengan adanya Pandemi Covid-19. Penurunan sektor ekonomi berdampak pada pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu perlu upaya-upaya inovatif dalam membangkitkan kembali sektor perekonomian supaya tidak mengalami penurunan.

Investasi dan penanaman modal merupakan salah satu penggerak pertumbuhan pembangunan (*engine of growth of development*). Terlebih dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan sebagian kegiatan industri tidak dapat beroperasi, dan semakin berkurangnya investasi. Oleh sebab itu perlu menjaga eksistensi kegiatan industri yang sudah ada, kemudian meningkatkan iklim yang kondusif supaya investor tertarik untuk berinvestasi ke Kabupaten Klaten.

Di samping itu potensi lokal lain yang juga perlu dikembangkan di Kabupaten Klaten adalah produk unggulan daerah yang mana produk unggulan ini telah dilaksanakan pengembangannya melalui sistem atau pola klaster UMKM. Klaster UMKM yang ada di Kabupaten Klaten ada 11 (sebelas) klaster dan yang termasuk dalam produk unggulan ada 7 (tujuh) klaster yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/84 Tahun 2016 sebanyak 7 Produk Unggulan Daerah antara lain Batik, Lurik, Konveksi, Keramik, Logam, Tembakau (Asepan dan Rajangan), dan mebel.

Dalam masa Pandemi Covid-19 ini sebagian besar klaster unggulan dimaksud mengalami kesulitan dalam hal pemasaran, permodalan, produksi serta penyediaan bahan baku. Untuk itu guna meningkatkan kontinuitas produksi produk unggulan daerah di Kabupaten Klaten yang akan mendukung daya saing daerah diperlukan upaya strategis pengembangan produk-produk unggulan dimaksud, di samping itu dalam peningkatan daya saing UMKM juga diperlukan adanya fasilitasi untuk Hak Paten dan Merk Dagang, sehingga harapannya produk tersebut dapat bersaing dengan produk luar negeri, sehingga dapat meningkatkan produk ekspor.

Selanjutnya untuk kondisi pangan di Kabupaten Klaten saat ini berada pada kondisi surplus khususnya untuk komoditas beras, namun indikasinya ketersediaan pangan semakin menurun akibat berkembangnya aktivitas masyarakat yang membutuhkan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan budidaya. Oleh sebab itu perlu menjaga ketahanan pangan masyarakat melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (yang melarang alih fungsi LP2B), pemberian insentif dan disinsentif untuk LP2B misal dengan keringanan pajak, bantuan pupuk, obat tanaman, sarana pertanian, penyediaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani, penerapan sistem agribisnis. Walaupun dari sisi konsumsi pangan penduduk sudah baik, akan tetapi untuk tahun 2020 mengalami penurunan, sehingga masih perlu adanya peningkatan diversifikasi pangan agar masyarakat tidak hanya

tergantung pada satu jenis bahan pokok saja guna mengantisipasi terjadinya krisis pangan dan untuk mempertahankan ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan.

Guna mendukung ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan perlu dikembangkan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Klaten adalah pertanian baik pertanian tanaman pangan, hortikultura, buah-buahan maupun tanaman perkebunan. Padi merupakan salah satu produk unggulan bidang pertanian di Kabupaten Klaten, varietas padi unggulan lokal yang saat ini sedang dikembangkan yaitu varietas jenis padi Rajalele Srinuk dan Srinar. Selain itu terdapat potensi lain yang bisa dikembangkan varietas unggulan lokal seperti jagung, kedelai. Dan bibit unggul durian sebagai durian khas Klaten, dll.

Pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting dan strategis serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi daerah baik untuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Kabupaten Klaten sangat kaya akan potensi hasil produksi pertanian, dan potensi terbesar adalah bidang tanaman pangan dengan komoditas padi dan jagung yang sampai saat ini Kabupaten Klaten masih menjadi salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Tengah.

Dulu Kabupaten Klaten memiliki komoditas unggulan yang menjadi kebanggaan Kabupaten Klaten yaitu berupa varietas padi Rojolele. Namun seiring perjalanan waktu, padi Rojolele mulai menghilang dan hanya sedikit sekali petani yang mau menanam, dikarenakan membutuhkan waktu tanam yang lebih lama yaitu sekitar 4-5 bulan. Oleh karena itu diperlukan sentuhan teknologi yang dapat memperbaiki lama waktu tanam dan tinggi tanaman dapat diperpendek. Untuk itu guna membangkitkan kembali masa kejayaan tersebut telah dilakukan pemurnian varietas padi Rojolele bekerjasama dengan Badan tenaga Nuklir Republik Indonesia (Batan RI) sejak tahun 2012.

Uji multi lokasi dilakukan melalui pengembangan demplot di desa Gempol Kecamatan Karangnom, Desa Sekaran Kecamatan Wonosari, Desa Glagah Wangi Kecamatan Polanharjo dan Desa Tlobong Kecamatan Delanggu, serta saat ini telah dilaksanakan berbagai uji lainnya, seperti uji hama penyakit, uji kualitas hasil, uji aroma dan uji rasa sehingga memunculkan varietas baru yang diberi nama Srinar dan Srinuk, dan saat ini masih dalam proses pengurusan Hak Paten sedang dalam tahap uji substansi serta proses pengembangan dan budidaya oleh masyarakat. Untuk menjaga kemurnian kualitas benih, produksi benih Rojolele saat ini hanya dilaksanakan oleh UPT ATP Klaten, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten. Sedangkan untuk proses penanaman dan menjamin ketersediaan stok produksi beras di

laksanakan oleh kelompok-kelompok tani tertentu yang ditunjuk dan dalam pengawasan langsung Dinas Pertanian.

Selanjutnya untuk pemasaran, dalam rangka menjamin pemasaran hasil produksi padi Rojolele ini, pemerintah Kabupaten Klaten membantu penyalurannya melalui Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021, agar para ASN dan pegawai BUMD Kabupaten Klaten diminta untuk memasyarakatkan beras rojolele Srinar dan Srinuk milik petani, dimana mekanisme pembelian melalui Perusda Aneka Usaha Klaten.

Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk dapat mempercepat pengembangan komoditas padi Rojolele menjadi produk unggulan daerah, selain diperlukan komitmen dan membangun kesadaran para petani agar mau menanam dan mengembangkan varietas tersebut, juga diperlukan pola pendampingan, pembinaan dan penyuluhan secara lebih intensif.

Sedangkan untuk sektor perikanan, di Kabupaten Klaten telah dibentuk Klaster Minapolitan Jilid I yang terkenal dengan sebutan Kalungharjo, yang meliputi Kecamatan Karangnom, Tulung dan Polanharjo dengan komoditas unggulan ikan Nila Merah. Kawasan Minapolitan tersebut bisa dikembangkan menjadi Kota Wisata karena telah didukung dengan adanya wisata kuliner, wisata edukasi, pancingan dan souvenir. Untuk itu perlu strategi untuk peningkatan daya tarik wisata, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM, pengembangan kawasan wisata, penyiapan moda transportasi serta promosi dan pemasaran. Sedangkan untuk Minapolitan Jilid II meliputi kecamatan Klaten Selatan, Ngawen dan Kebonarum.

Untuk komoditas perkebunan, Kabupaten Klaten mempunyai produk unggulan berupa Tembakau Rajangan dan Tembakau Asepan. Produksi tanaman untuk tembakau tersebut di wilayah Klaten banyak dibudidayakan di Kecamatan Prambanan, Gantiwarno, Trucuk, Manisrenggo dan sebagian wilayah Jogonalan.

Namun demikian di dalam pelaksanaan pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Klaten sampai saat ini masih ditemui berbagai permasalahan utama, antara lain: rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pertanian, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, terbatasnya terhadap akses sumber daya produktif, belum berkembangnya sentra agribisnis, rendahnya produktivitas, nilai tambah ekonomi dan daya saing, terbatasnya sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya dalam memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat.

6. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Pembangunan yang dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan sesuai dengan potensi dan sumber dayanya, secara tidak langsung akan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dalam melestarikan kualitas lingkungan, berbagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup perlu dilakukan yang dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya perencanaan, kemungkinan dampak buruk di lingkungan sekitar bisa diantisipasi terlebih dahulu, sehingga kerusakan lingkungan dapat dikurangi atau bahkan dicegah sama sekali.

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Klaten ditetapkan untuk kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor, dan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi. Kawasan rawan bencana gerakan tanah merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah longsor/bergerak, karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak atau wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.

Berdasarkan kriterianya, kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Klaten merupakan daerah yang rentan terhadap gerakan tanah dan termasuk kawasan gerakan tanah dengan tingkat menengah dan tinggi. Kejadian bencana tanah longsor diakibatkan karena kondisi geomorfologi terutama faktor kemiringan lereng, kondisi batuan maupun tanah penyusun lereng dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Selain itu, adanya aktivitas yang tidak terkendali seperti eksploitasi alam. Sedangkan menurut Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2016, Kawasan rawan bencana gunung api adalah kawasan yang pernah terlanda atau diidentifikasi berpotensi terancam bahaya erupsi gunung api baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya rawan bencana tersebut perlu upaya mitigasi bencana yang efektif untuk dapat mengurangi resiko dampaknya.

Upaya mitigasi bencana dalam rangka penanganan banjir, perlu upaya pembangunan dan pemeliharaan prasarana sumber daya air pada daerah rawan banjir di Kabupaten Klaten yang meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, Gantiwarno, Juwiring, Karangdowo, Pedan, Prambanan, Trucuk, Wedi, dan Wonosari. Penanganan banjir dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, operasi irigasi, pengadaan sarana prasarana pengelolaan irigasi, pembangunan embung, pemeliharaan dan rehabilitasi embung, pemeliharaan dan penataan kawasan waduk, serta rehabilitasi kawasan sumber air. Penguatan talud/tebing sungai juga dilakukan sesuai dengan kewenangan kabupaten.

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**. Visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2016-2021.

Makna yang terkandung dalam visi Pembangunan Daerah sebagai berikut: **Kabupaten Klaten**, suatu nama daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maju, merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.

- Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.
- Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya.
- Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.
- Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

Mandiri, perwujudan kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan_tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.

Sejahtera, perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat

secara fisik maupun non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan Tata Nalunan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kedepan.

Strategi Pembangunan Daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

1. Mewujudkan Tata Nalunan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian. Misi pertama ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan, dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas). Sasaran yang ingin diciptakan, yaitu: terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan pengendalian konflik sosial dan kesadaran politik masyarakat;
- b. Meningkatkan penegakan perda dan pemberdayaan linmas;
- c. Meningkatkan kinerja pemadaman kebakaran.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Professional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti Korupsi. Misi kedua ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance), dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 2 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah, dan
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan kematangan organisasi perangkat daerah;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta ekstensifikasi dengan penciptaan sumber-sumber pendapatan baru;
- c. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- d. Meningkatkan pengawasan intern dan pengawasan khusus, serta pengendalian risiko;
- e. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- f. Memperkuat inovasi dan tata kelola kelitbangan dalam mendukung pencapaian prioritas daerah;
- g. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang Smart City;
- h. Meningkatkan pemanfaatan persandian dalam pengamanan informasi;
- i. Meningkatkan implementasi pengembangan single data Kabupaten Klaten;
- j. Mengoptimalkan penerapan merit sistem dalam manajemen kepegawaian;
- k. Meningkatkan ASN yang berkualitas;
- l. Meningkatkan sinergitas peran dunia usaha dalam pembangunan daerah;
- m. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- n. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- o. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan;
- p. Meningkatkan layanan kearsipan dan pengelolaan arsip secara baku di seluruh Perangkat Daerah;
- q. Meningkatkan kualitas layanan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- r. Meningkatkan kualitas layanan sekretariat DPRD kepada DPRD.

3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan

Daerah Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan. Misi ketiga ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan, dengan indikator kinerja tujuan adalah pertumbuhan ekonomi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 2 hal, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi dan
- 2) Meningkatnya investasi daerah.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan destinasi wisata, optimalisasi promosi dan pemasaran, serta pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan;
- c. Mengembangkan industri kecil berbahan baku lokal yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing;
- d. Mengembangkan usaha mikro dan koperasi melalui pembinaan dan pemberdayaan manajemen usaha, teknologi produksi dan pemasaran produk melalui e-commerce untuk menunjang Smart City;
- e. Peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana prasarana dan pengendalian bencana pertanian;
- f. Peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap, pengembangan produk olahan ikan dan meningkatkan tingkat konsumsi ikan;
- g. Meningkatkan investasi sesuai rencana induk penanaman modal daerah terutama pada sektor pertanian, pariwisata dan potensi investasi dengan adanya jalan tol.

4. Mewujudkan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas sesuai

Rencana Tata Ruang Wilayah. Misi keempat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah, dengan indikator kinerja tujuan adalah 1) Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik dan 2) Rasio konektivitas. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 4 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas pembangunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026
- 2) Meningkatnya capaian universal access (100-0- 100)
- 3) Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang;

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan pembangunan jalan dan penataan sistem drainase untuk menunjang konektivitas dan pengembangan wilayah;
- b. Meningkatkan penyediaan infrastruktur sumberdaya air untuk menunjang irigasi pertanian;
- c. Meningkatkan kualitas bangunan gedung guna mendukung pelayanan publik bagi masyarakat;
- d. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap air bersih;
- e. Meningkatkan akses sanitasi dan perilaku higienis;
- f. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh;
- g. Peningkatan kualitas penataan ruang dan penataan bangunan dan lingkungannya;
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas angkutan terintegrasi.

5. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Berbudaya, dan Responsif Gender. Misi kelima ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran, dengan indikator kinerja tujuan adalah 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 2) Persentase Penduduk Miskin; dan 3) Indeks Pembangunan Gender. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 4 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing;
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- 3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan
- 4) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs;
- b. Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan;
- c. Meningkatkan aktualisasi budaya dalam kehidupan masyarakat;
- d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis keluarga;
- e. Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat;
- f. Meningkatkan kegemaran dan budaya olahraga dikalangan masyarakat;
- g. Meningkatkan pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana;
- h. Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- i. Meningkatkan kemandirian desa melalui pembangunan desa terpadu dan pengembangan BUMDes;
- j. Menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian (skill) sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja;
- k. Fasilitasi dan penguatan partisipasi dunia usaha dalam pembangunan daerah;
- l. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan.

6. Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Misi keenam ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 3 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan,
- 2) Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3);
- 3) Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan pemenuhan ruang terbuka hijau;
- c. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan;
- d. Memperkuat kapasitas dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan masa darurat bencana, dan penanganan pasca bencana.

c. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja berdasarkan RPJMD

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 meliputi 6 tujuan dan 14 sasaran, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.10

MISI, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA RPJMD KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Misi 1 : mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berahlak dan berkepribadian	Tujuan 1.1: Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkepribadian berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan.		Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks	NA	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73	0,75	0,75	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Sasaran 1.1.1: Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	%	91,60	92,00	92,40	92,80	93,20	93,60	94,00	94,00	1.05. Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi.	Tujuan 2.1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	57,74	57,74*	60,01	60,62	64	66	70	70	Seluruh Urusan	
		Sasaran 2.1.1: Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	NA	NA	81	81	82	83	83	83	6.01. Pengawasan	
			Peringkat/ Nilai SAKIP	Nilai	62,07	62,07	62	62,5	63	64	65	65	4.01 Sekretariat Daerah 5.01 Perencanaan 5.05 Penelitian dan Pengembangan	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Opini Laporan Keuangan	Opin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	5.02. Keuangan Daerah 6.01 Pengawasan
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,0	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,0	2.16. Komunikasi dan Informatika 2.21 Persandian 2.20 Statistik
			Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	NA	NA	180	200	225	250	260	260	5.03 Kepegawaian 5.04 Pendidikan dan Pelatihan
		Sasaran 2.1.2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81,88	NA	82	82,5	83	83,5	84	84	2.12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.23 Perpustakaan 2.24. Kearsipan 7.01 Kecamatan 4.02 Sekretariat DPRD
Misi 3 : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	Tujuan 3.1: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan		Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,18	1,03	2,52	3,51	4,45	5,13	5,47	5,47	Seluruh Urusan
		Sasaran 3.1.1: Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	(1,21)	0,05	1,47	2,24	3,38	3,84	4,09	4,09	3.31. Perindustrian 2.17. Koperasi dan UMKM
			Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	(4,79)	(0,85)	1,24	1,79	2,29	3,43	3,96	3,96	3.30 Perdagangan
			Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	2,12	2,52	2,63	2,68	2,88	3,04	3,14	3,14	3.27 Pertanian 3.25 Kelautan dan Perikanan
			Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	2,59	2,84	3,13	3,44	3,79	4,16	4,58	4,58	3.26 Pariwisata

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Sasaran 3.1.2: Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi PMDN	%	-64	NA	10	10	10	10	10	50	2.18 Penanaman Modal
			Persentase peningkatan investasi PMA	%	-59	NA	1	1	1	1	1	5	2.18 Penanaman Modal
Misi 4: Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah	Tujuan 4.1: Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah		Infrastruktur wilayah kondisi baik	%	74,58	75,45	76,11	76,72	77,18	77,51	77,72	77,72	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Rasio konektivitas	Rasio	0,09	0,09	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
		Sasaran 4.1.1: Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	90,08	90,86	91,06	91,26	91,46	91,66	91,86	91,86	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase drainase dalam kondisi baik	%	61,44	61,45	61,47	61,48	61,50	61,51	61,52	61,52	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	36,17	39,2	41,5	43,6	44,9	45,6	46,2	46,2	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sasaran 4.1.2: Meningkatnya capaian universal access (100-0-100)	Persentase capaian <i>universal access</i> (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	97,21	97,76	98,32	98,87	99,43	99,99	100,00	100,00	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Sasaran 4.1.3: Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang;	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	88	88,2	88,4	88,6	88,8	89,0	89,2	89,2	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.10 Pertanahan
		Sasaran 4.1.4: Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan;	Kinerja Lalu Lintas (<i>Level Of Service</i>)	Nilai	0,65	0,64	0,62	0,61	0,58	0,56	0,54	0,54	2.15. Perhubungan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Misi 5 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender	Tujuan 5.1: Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,56	75,56*	76,46	76,88	77,30	77,73	78,15	78,15	1.01. Pendidikan 1.02. Kesehatan	
			Persentase Penduduk Miskin	%	12,89	12,89*	12,49	11,69	11,09	10,49	9,89	9,89	Semua Urusan	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,17	96,42*	96,66	96,90	97,14	97,38	97,62	97,62	2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Sasaran 5.1.1: Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,25	13,25*	13,52	13,62	13,73	13,84	13,94	13,94	1.01. Pendidikan	
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,58	8,58*	8,64	8,72	8,80	8,88	8,96	8,96	1.01. Pendidikan	
			Persentase pemajuan kebudayaan	%	10,9	NA	5	5	5	5	5	5	25	2.22 Kebudayaan
		Sasaran 5.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,78	76,78*	76,84	76,89	76,93	76,98	77,02	77,02	1.02. Kesehatan 2.09 Pangan 2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.19. Pemuda dan Olahraga	
		Sasaran 5.1.3: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	%	90,32	65	67,5	68	68,5	69	69,5	69,5	69,5	1.06. Sosial
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,46	5,31	5,16	4,97	4,50	4,25	4,25	4,25	4,25	2.07. Tenaga Kerja
			Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6854	0,6874	0,6894	0,6934	0,6934	0,6956	0,6974	0,6974	0,6974	2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Sasaran 5.1.4: Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indek	72,35	72,68	73,34	73,67	74,00	74,33	74,66	74,66	74,66	2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	NA	710	725	740	755	770	785	785	785	2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Misi 6 : Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Tujuan 6.1: Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	52,85	54,35	54,68	55,01	55,34	55,67	55,99	55,99	2.11. Lingkungan Hidup
		Sasaran 6.1.1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas air	Indeks	36,15	36,39	36,63	36,87	37,11	37,35	37,59	37,59	2.11. Lingkungan Hidup
			Indeks kualitas udara	Indeks	76,82	77,31	77,80	78,29	78,78	79,27	79,76	79,76	2.11. Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	42,54	42,72	42,90	43,08	43,26	43,44	43,62	43,62	2.11. Lingkungan Hidup
		Sasaran 6.1.2: Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	56,95	58,95	59,95	61,95	63,95	65,95	66,95	66,95	2.11. Lingkungan Hidup
		Sasaran 6.1.3: Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	1.05. Ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat

d. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Daerah Tahun 2022

Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan berdasarkan sasaran strategis, serta didukung Program Prioritas agar lebih sistematis dan terukur ditentukanlah target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah Daerah. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergisitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ditetapkan mengacu pada RKPD 2022. Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2022 sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 1.11
Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2022

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)		Satuan (4)	Target (5)
1	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	1.1	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (Ipoleksosbud) yang diselesaikan	%	100
		1.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100
2	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	2.1	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	71
		2.2	Peringkat/ Nilai SAKIP	Nilai	62
		2.3	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP
		2.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,2
		2.5	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	202
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82
4	Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonom	4.1	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	1,47
		4.2	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	1,24
		4.3	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	1,63
		4.4	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	3,13

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
5	Meningkatnya investasi daerah	5.1	Persentase peningkatan investasi PMDN	%	50
		5.2	Persentase peningkatan investasi PMA	%	1
6	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	6.1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	91,06
		6.2	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	61,47
		6.3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	41,5
7	Meningkatnya capaian universal acces (100-0-100)	7.1	Persentase capaian <i>universal access</i> (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	98,32
8	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang	8.1	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	88,40
9	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan	9.1	Kinerja Lalu Lintas (<i>Level Of Service</i>)	Nilai	0,62
10	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	10.1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,52
		10.2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,85
		20.3	Persentase pemajuan kebudayaan	%	5
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	11.1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76.84
12	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	12.1	Persentase PMKS yang tertangani	%	67,5
		12.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,16
		12.3	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7034
13	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	13.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	73,34
		13.2	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	725
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	14.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	36,63
		14.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	77,80
		14.3	Indeks Kualitas Lahan Tutupan	Indeks	42,90

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
15	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	15.1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	59,95
16	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	16.1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,92

Sumber: RKPD Kabupaten Klaten 2022.

e. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.12
Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPJMD
Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan
1.04.03	Program Kawasan Permukiman
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
1.04.06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
1.06.06	Program Penanganan Bencana
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja
2.07.05	Program Hubungan Industrial
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
2.10.06	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk
2.12.03	Program Pencatatan Sipil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
2.17.08	Program Pengembangan UMKM
2.18	Usuran Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2.19	Usuran Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
2.20	Usuran Pemerintahan Bidang Statistik
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
2.21	Usuran Pemerintahan Bidang Persandian
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
2.22	Usuran Pemerintahan Bidang Kebudayaan
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman
2.23	Usuran Pemerintahan Bidang Perpustakaan
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan
2.24	Usuran Pemerintahan Bidang Kearsipan
2.24.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
3	Usuran Pemerintahan Pilihan
3.25	Usuran Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
3.26	Usuran Pemerintahan Bidang Pariwisata
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3.27	Usuran Pemerintahan Bidang Pertanian
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor
3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
3.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
4.01	Sekretariat Daerah
4.01.01	Program Administrasi Umum
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan
4.02	Sekretariat DPRD
4.02.01	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
5.01	Perencanaan
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02	Keuangan
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
5.03	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah
5.03.03	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05	Penelitian dan Pengembangan
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
6.01	Inspektorat Daerah
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
7	Unsur Kewilayahan
7.01	Kecamatan
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
8	Unsur Pemerintahan Umum
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

f. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2022 terlampir dalam Lampiran Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022.

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

a. Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Standar Pelayanan Minimal ditegaskan sebagai prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan dasar pada urusan wajib yang berpedoman pada SPM dengan memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar. Prioritas diawali dengan komitmen dalam bentuk program, kegiatan dan anggaran.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bentuk kepedulian negara pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara sekaligus wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan bidang sosial namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran- ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Urgensi Pemerintah daerah Kabupaten Klaten menerapkan SPM antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat
2. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Penerapan SPM
3. Sebagai indikator peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, melalui peningkatan standar hidup yang lebih baik
4. Menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat

Mengingat pentingnya penyelenggaraan pelayanan dasar pada urusan wajib, Bupati Klaten mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Kabupaten Klaten dengan membentuk Tim Penerapan SPM Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 102.1.1/293 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penerapan SPM di Kabupaten Klaten. SPM merupakan kolaborasi dari berbagai sisi sehingga keanggotaan Tim Penerapan SPM terdiri dari berbagai unsur yang diharapkan dapat bersinergi untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten. Tim Penerapan SPM Kabupaten Klaten saat ini telah melakukan inisiasi untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM di

Kabupaten Klaten Tahun 2023-2027 yang sudah memasuki tahapan finalisasi akhir.

Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 masih berlanjut di tahun 2021. Kematian akibat Covid-19 bulan Juni hingga Agustus 2021 meningkat sangat tajam. Saat ini pandemi telah lebih terkendali. Per 13 September 2021, kasus aktif Covid-19 di Indonesia berada di bawah 100 ribu. Namun, pemerintah menyadari risiko ketidakpastian masih sangat tinggi. Varian virus baru masih bermunculan di berbagai belahan dunia. Kebijakan pemerintah disusun dengan terus memperhatikan perkembangan pandemi. Upaya pengendalian pandemi yang komprehensif akan menjadi fokus dan prioritas pemerintah, baik di tahun ini maupun tahun depan. Belanja pemerintah tahun 2022 diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan yang diikuti dengan perlindungan kepada masyarakat dan dunia usaha, utamanya usaha kecil, termasuk upaya mendukung pemulihan ekonomi.

Tantangan yang dihadapi dalam mencapai target Pencapaian SPM tahun 2022 tidak lagi terkendala oleh kondisi Pandemi, karena kasus Covid-19 sudah mulai menurun. Pertemuan tatap muka sudah diperbolehkan meskipun masih harus menaati protokol kesehatan, sasaran sudah mulai tidak khawatir mendatangi fasilitas pelayanan. Meskipun kasus Covid-19 pada tahun 2022 tidak sebesar tahun 2021, anggaran yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan logistik pemenuhan mutu SPM.

Upaya Pemerintah dalam menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi dan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar/esensial sekaligus menyelesaikan permasalahan kesehatan, masih terus dilakukan. Pemerintah berusaha mengendalikan penularan penyakit Covid-19, di sisi lain juga mengejar pencapaian target vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat mulai usia 12 tahun sampai lansia. Sementara itu pelayanan kesehatan esensial terus diupayakan agar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

Program dan kegiatan terkait koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi penerapan SPM dilaksanakan baik dengan metode daring maupun luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal

- Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
 20. Keputusan Bupati Klaten Nomor 102.1.1/293 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten.

c. Kebijakan Umum

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, menyebutkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Klaten yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA”**. Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Kabupaten Klaten**, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Maju**, diartikan sebagai perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik. Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata. Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya. Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil. Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan
3. **Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.
4. **Sejahtera**, yang dimaksud sejahtera adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupun non fisik, yaitu

meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Muatan Standar Pelayanan Minimal telah terintegrasi ke dalam Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Klaten yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan 6 (enam) bidang urusan, baik dalam rencana penerapan maupun capaian SPM. Berikut ini tabel program/kegiatan untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah terintegrasi di dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

Tabel 1.13
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022

MISI KE-5	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)
Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Berbudaya, dan Responsif Gender	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	1. Pengelolaan Pendidikan 2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. APK PAUD b. APM SD/MI/ Paket A c. APM SMP/MTs/Paket B d. APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 e. Persentase Guru memenuhi kualifikasi S1/D.IV	a. 80,90 b. 88,70 c. 71,35 d. 1,50 e. 88,10

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026

Tabel 1.14
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan
SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

MISI ke-5	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil	100
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100

				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026

Tabel 1.15
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

MISI ke-4	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)
Mewujudkan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah Yang Berkualitas Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang merata dan memperhatikan Tata Ruang Wilayah.	Meningkatkannya Capaian Universal Access (100-0-100)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Layak	94,02
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak Dan Aman	1,27

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026

Tabel 1.16
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung
Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022

MISI ke-4	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)
Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah.	Meningkatnya capaian universal access (100-0-100)	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	100

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026

Tabel 1.17
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Trantibum dan Damkar
Tahun 2022

MISI ke-1	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)
Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian	Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkepribadian berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	42
				Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	100
				Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	92
				Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan	100

				akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	65
				Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit
				Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026

Tabel 1.18
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebencanaan
Tahun 2022

MISI KE-6	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)
Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	72,78

				Persentase kelompok relawan bencana yang aktif	50
				Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	61

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

Tabel 1.19
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang
Urusan Sosial Tahun 2022

MISI KE- 5	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender.	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.	1. Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti	65,5
			2. Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

d. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2022 diarahkan untuk “Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Pengembangan Potensi Lokal.” Penekanan “Pemulihan Ekonomi” mengandung makna bahwa kemampuan daerah dalam mengembalikan perekonomian daerah yang terkontraksi akibat pandemi covid-19 yang terjadi di Tahun 2020. Pemulihan ekonomi di tahun 2022 diarahkan melalui peningkatan kualitas infrastruktur di semua sektor. Sedangkan makna “Pengembangan Potensi Lokal” diarahkan untuk pengembangan/optimalisasi sektor/produk unggulan daerah yang mampu mendorong perekonomian daerah.

Arah kebijakan tahun 2022 yang menjadi prioritas pembangunan untuk Urusan wajib Pelayanan dasar, khususnya yang terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi :

1. Bidang Urusan Pendidikan :

Tabel 1.20
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan Ke
Dalam Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2022

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 2. Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 3. Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1. Menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal PAUD 2. Menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal Pendidikan Dasar 3. Menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal Pendidikan Kesetaraan	1. Pencanangan Gerakan ayo sekolah untuk PAUD; dan Pendataan ulang penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang tidak sekolah 2. Penyediaan Sarana dan prasarana PAUD 3. Identifikasi penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah dan sudah tidak sekolah 4. Meningkatkan fasilitas pendidikan kesetaraan

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pendidikan Klaten Tahun 2021-2026

Berdasarkan Tabel 1.19 di atas menggambarkan bahwa orientasi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Pendidikan untuk menerapkan dan mencapai target SPM Bidang Pendidikan yang telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di tahun 2022 dan telah dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA 2022 untuk Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp.178.711.750.000,- dan Program Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp.13.215.000.000,-

2. Bidang Urusan Kesehatan :

1. Strategi

- a. Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak;
- b. Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi;
- c. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
- d. Peningkatan koordinasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang memenuhi standar;
- e. Peningkatan kuantitas dan kualitas kesehatan pemukiman tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan;

- f. Peningkatan mutu sediaan farmasi, makanan minuman, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan;
- g. Meningkatkan akses pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat.

2. Kebijakan

- 1) Menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak balita;
- 2) Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular serta mengendalikan faktor resiko penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan surveilans;
- 3) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara aktif mandiri;
- 4) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan cara meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat utamanya penduduk miskin dengan pelayanan kesehatan dasar yang mudah, murah dan terjangkau oleh masyarakat di Puskesmas dan jaringannya;
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan dukungan peningkatan manajemen, sarana prasarana, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan;
- 6) Meningkatkan kemitraan dengan lintas sektoral terkait;
- 7) Optimalisasi pelayanan kesehatan.

Strategi dan Kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan Misi Daerah dalam RPJMD Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.21
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Kesehatan Ke
Dalam Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
Tahun 2022

Prioritas	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Angka Kematian Bayi (Akb) Per 1.000 Kelahiran hidup	Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita; ▪ Optimalisasi penanganan penyakit, peningkatan edukasi terkait permasalahan kesehatan; ▪ Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana kesehatan; ▪ Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan
	Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup	Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Balita	
	Kasus Kematian Ibu	Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
		Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	
	Indeks Keluarga Sehat	Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	
		Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	
Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			

		Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
		Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
		Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	
		Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
		Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menerapkan dan mencapai target SPM Dinas Kesehatan selain telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di Tahun 2022, juga telah dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA untuk program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp. 9.723.426.535,-

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 1.22
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2022

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur	Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik	Menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Penyediaan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pengembangan dan peningkatan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan.
		Menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	Penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan sanitasi, dan peningkatan penyediaan akses sanitasi.

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2021– 2026

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menerapkan dan mencapai target SPM Pekerjaan Umum, selain telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di Tahun 2022, juga telah dituangkan di dalam

Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA untuk Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp 3.948.212.000,- dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp 4.049.942.000,-

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat :

Tabel 1.23
Integrasi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Tahun 2022

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui pemugaran (rehabilitasi), peremajaan (revitalisasi) dan permukiman kembali (relokasi)
		Menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menerapkan dan mencapai target SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, selain telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di Tahun 2022, juga telah dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA untuk Program Pengembangan Perumahan dengan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp 290.000.000,-

5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat:

Tabel 1.24
Integrasi SPM Sub Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Damkar Dalam Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten Tahun 2022

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengkoordinasian penyusunan Perkada sebagai tindak lanjut Perda yang mengandung sanksi ▪ Optimalisasi pelaksanaan patroli ▪ Meningkatkan kuantitas anggota Satpol PP, dan Pemberdayaan petugas linmas
		Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Meningkatkan kuantitas dan kompetensi anggota Damkar
			Meningkatkan sarana prasarana pemadam kebakaran

Sumber : Dokumen Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menerapkan dan mencapai target SPM Sub Bidang urusan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Damkar, selain telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di Tahun 2022, juga telah dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA untuk program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 2.975.738.640,-, dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran Rp. 1.261.762.652,-

Tabel 1.25
Integrasi SPM Sub Bidang Urusan Kebencanaan ke Dalam Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Klaten Tahun 2022

Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Utama	Strategi penerapan SPM	Arah kebijakan
Kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana;	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Menjamin Terpenuhinya SPM pelayanan informasi rawan bencana	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana serta peningkatan kualitas jalur evakuasi bencana, dan pelayanan informasi kebencanaan;
		Menjamin Terpenuhinya SPM pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; ▪ Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
		Menjamin Terpenuhinya SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanganan pasca bencana; ▪ Peningkatan kerjasama dan pembinaan relawan

Sumber : Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menerapkan dan mencapai target SPM Sub bidang Kebencanaan, selain telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di Tahun 2022, juga telah dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA untuk program Penanggulangan Bencana Rp. 2.467.858.500,-

6. Bidang Urusan Sosial

Arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang berkaitan dengan urusan sosial dalam Penerapan SPM sebagai berikut :

- Peningkatan rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar; penguatan terhadap fungsi rumah singgah serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- Penyempurnaan sistem perlindungan sosial termasuk didalamnya optimalisasi, verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara terpadu dan lintas sektor.

Muatan Standar Pelayanan Minimal telah terintegrasi ke dalam Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Klaten yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan 6 (enam) bidang urusan, terutama terkait bidang urusan Sosial baik dalam rencana penerapan maupun capaian SPM. Berikut ini tabel program/kegiatan

untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah terintegrasi di dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

Tabel 1.26
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial
Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten
Tahun 2022

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran;	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	1. Peningkatan rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar; penguatan terhadap fungsi rumah singgah serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. 2. Penyempurnaan sistem perlindungan sosial termasuk didalamnya optimalisasi, verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 3. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara terpadu dan lintas sektor
		Menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	
		Menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	
		Menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	
		Menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	

Sumber : Dokumen Renstra Dissosp3appkb Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan Tabel di atas menggambarkan bahwa orientasi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten untuk menerapkan dan mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial yang telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di tahun 2022. Selain itu juga, penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial telah dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA untuk Program Rehabilitasi Sosial dengan pagu indikatif tahun 2022 sebesar Rp 2.050.267.000,- sedangkan Program Penanganan Bencana dengan pagu indikatif tahun 2022 sebesar Rp 623.034.000,-

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam Pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro Kabupaten Klaten Tahun 2022 menggunakan indikator kinerja makro sebagaimana Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Klaten Tahun 2021 dan 2022 beserta Persentase Perubahannya

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Th. 2021	Capaian Kinerja Th. 2022	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,12	76,95	1,09
2	Angka Kemiskinan	13,49	12,33	-8,59
3	Angka Pengangguran	5,48	4,31	-21,35
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,82	5,90	54,45
5	Pendapatan Per Kapita*	Rp. 12.017.000	Rp. 12.522.000	4,2
<i>*menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita dikarenakan BPS tidak merilis data Pendapatan per Kapita</i>				
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)*	19,59	19,17	-2,14
<i>*Dikarenakan Gini Ratio Kabupaten tidak dirilis oleh BPS, data menggunakan Ketimpangan Pendapatan (kriteria Bank Dunia) dengan menggunakan data Distribusi Pendapatan 40% penduduk pendapatan rendah (bawah)</i>				

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten sudah mencapai 76,12 pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 76,95. Capaian IPM di Kabupaten Klaten yang sebesar 76,95 di atas IPM Jawa Tengah yang sebesar 72,79 dan IPM nasional yang sebesar 72,91.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang disusun dari 3 (tiga) komponen esensial untuk kehidupan manusia. yaitu: (i) Usia hidup panjang dan sehat diukur dengan Usia Harapan Hidup, (ii) Pengetahuan (knowledge) yang diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah dan

Angka Harapan Lama Sekolah, (iii) Standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran Riil Per kapita. Adapun Hasil penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten
Tahun 2018-2022

Indikator IPM	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Usia Harapan Hidup (tahun)	76,67	76,68	76,78	76,86	76,95
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,13	13,24	13,25	13,39	13,40
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,24	8,31	8,58	8,81	9,09
Pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)	11.738	12.074	11.921	12.017	12.522
IPM	74,79	75,29	75,56	76,12	76,95

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023

Selama periode 2021 - 2022, beberapa komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan. Usia Harapan Hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun, Usia Harapan hidup saat lahir di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dari 76,86 tahun pada tahun 2021 menjadi 76,95 tahun pada tahun 2022.

Dimensi pengetahuan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pada tahun 2022, kedua indikator ini meningkat dibanding tahun 2021. Angka Harapan Lama Sekolah meningkat dari 13,39 tahun pada tahun 2021 menjadi 13,40 tahun pada tahun 2022. Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 8,81 tahun pada tahun 2021 menjadi 9,09 tahun pada tahun 2022.

Dimensi yang mewakili standar hidup layak, direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Klaten per tahun mengalami kenaikan dari Rp12.017.000,- pada tahun 2021 menjadi Rp12.522.000,- pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari dua tahun pandemi COVID-19 melanda Kabupaten Klaten, pengeluaran per kapita pada tahun 2021 dan 2022 meningkat kembali setelah di tahun 2020 mengalami penurunan.

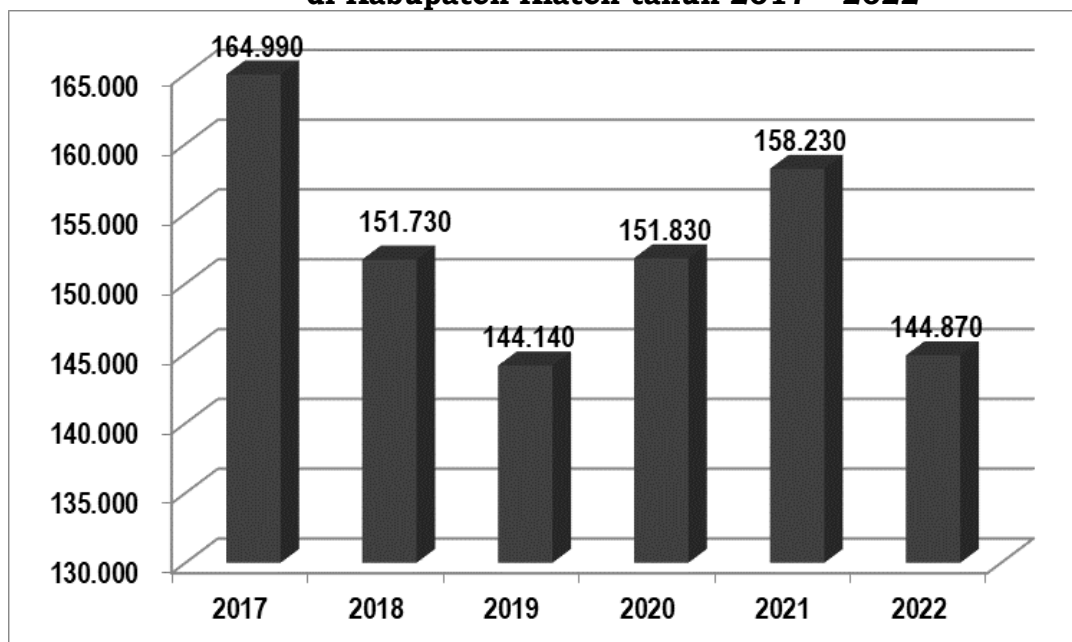
2.1.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang

memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan.

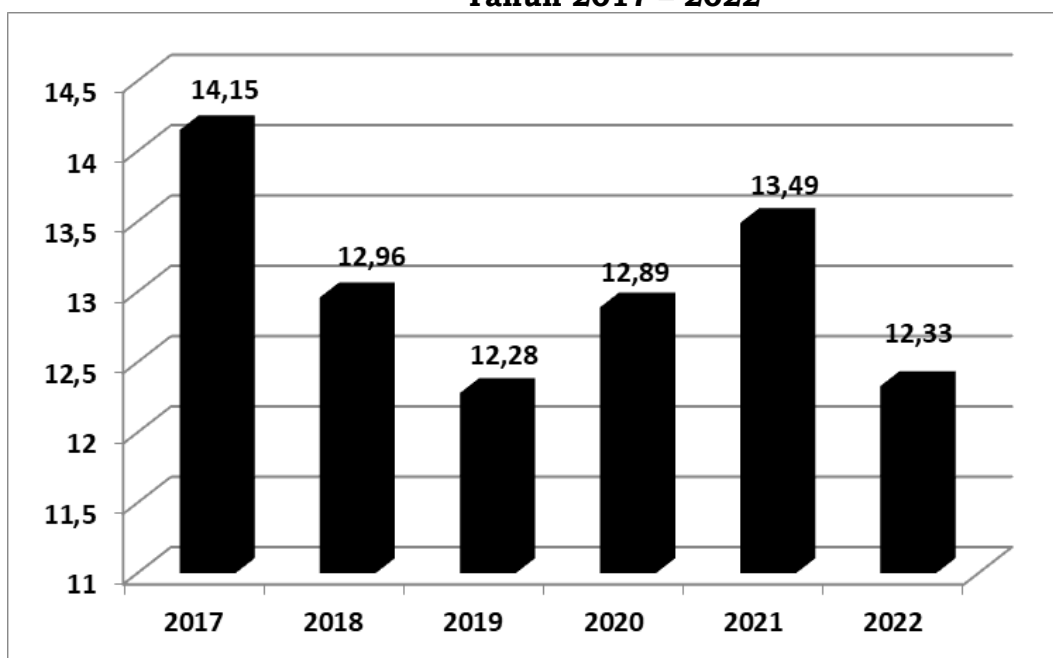
Berdasarkan hasil survey dari BPS, pengukuran garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada Tahun 2022 sebesar Rp458.872,00 sedangkan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) pada Tahun 2022 sebanyak 144.870 jiwa dengan persentase 12,33%. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada rentang tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 dan gambar 1.2.

Gambar 2.1
Perkembangan antar waktu Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten tahun 2017 – 2022



Sumber : BPS Kabupaten Klaten dan BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Gambar 2.2
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2017 – 2022



Sumber: BPS Kabupaten Klaten dan BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan di Kabupaten Klaten pada tahun 2021-2022 menunjukkan grafik penurunan yang signifikan, Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 158.230 jiwa turun menjadi 144.870 jiwa pada tahun 2022. Demikian pula dengan Persentase penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 13,49% turun menjadi sebesar 12,33% pada tahun 2022.

Penurunan Jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan di Kabupaten Klaten menunjukkan kinerja positif Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menanggulangi kemiskinan. Strategi Penanggulangan Kemiskinan yang telah dilakukan di Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai berikut :

1) Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat

- Dengan Program Unggulan **Klaten Tangkis** melalui Fasilitasi BLT DBHCHT bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok, Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar dan Orang Dengan Kecacatan Berat, Pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat, BLT DD dan lain-lain
- Dengan Program Unggulan **Klaten Subur** melalui Program Subsidi Bunga bagi UKM terdampak Covid-19

2) Peningkatan Pendapatan Masyarakat

- Dengan Program Unggulan **Klaten Laris** melalui Pemberdayaan UMKM dan fasilitasi kemudahan perizinan
- Dengan Program Unggulan **Klaten Tangkis** melalui Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE), Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa dan lain-lain
- Dengan Program Unggulan **Klaten Cetar** melalui Penumbuhan Wirausaha Baru Industri termasuk rintisan start up business, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dan lain-lain

3) Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan

- Dengan Program Unggulan **Klaten Tangkis** melalui Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Daerah, Fasilitasi dan Penguatan Partisipasi Dunia Usaha dalam Pembangunan Klaten "Dunia Usaha mBangun Klaten" dan lain-lain
- Dengan Program Unggulan **Klaten Mantab** melalui Pembangunan RTLH, Sanitasi, Air Minum dan Air Limbah, Jalan, Jembatan dan lain-lain
- Dengan Program Unggulan **Klaten Mapan** melalui program Ketahanan Pangan dan Pertanian

- Dengan Program Unggulan **Klaten Laris** melalui rehab/pembangunan pasar rakyat, Promosi penggunaan produk dalam negeri (promosi penggunaan produk UMKM guna mendukung program Cinta Produk Lokal dan lain-lain

2.1.3 Angka Pengangguran

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten pada tahun 2022 sebesar 4,31%. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten pada tahun 2022 mengalami penurunan 1,17% jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 5,48%. Hal ini dikarenakan menurunnya kasus covid 19 pada Tahun 2022 sehingga kebijakan PPKM mulai diperloggar dan aktivitas perekonomian masyarakat mulai kembali normal.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2022 sebesar 68,66% atau mengalami peningkatan 1,77% jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 66,89%. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Klaten pada Tahun 2018 – 2022 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam Tabel 2.3

Tabel 2.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %
dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %
di Kabupaten Klaten tahun 2018 – 2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	67,14	69,10	68,33	66,89	68,66
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,14	3,54	5,46	5,48	4,31

Sumber : BPS Kabupaten Klaten dan BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

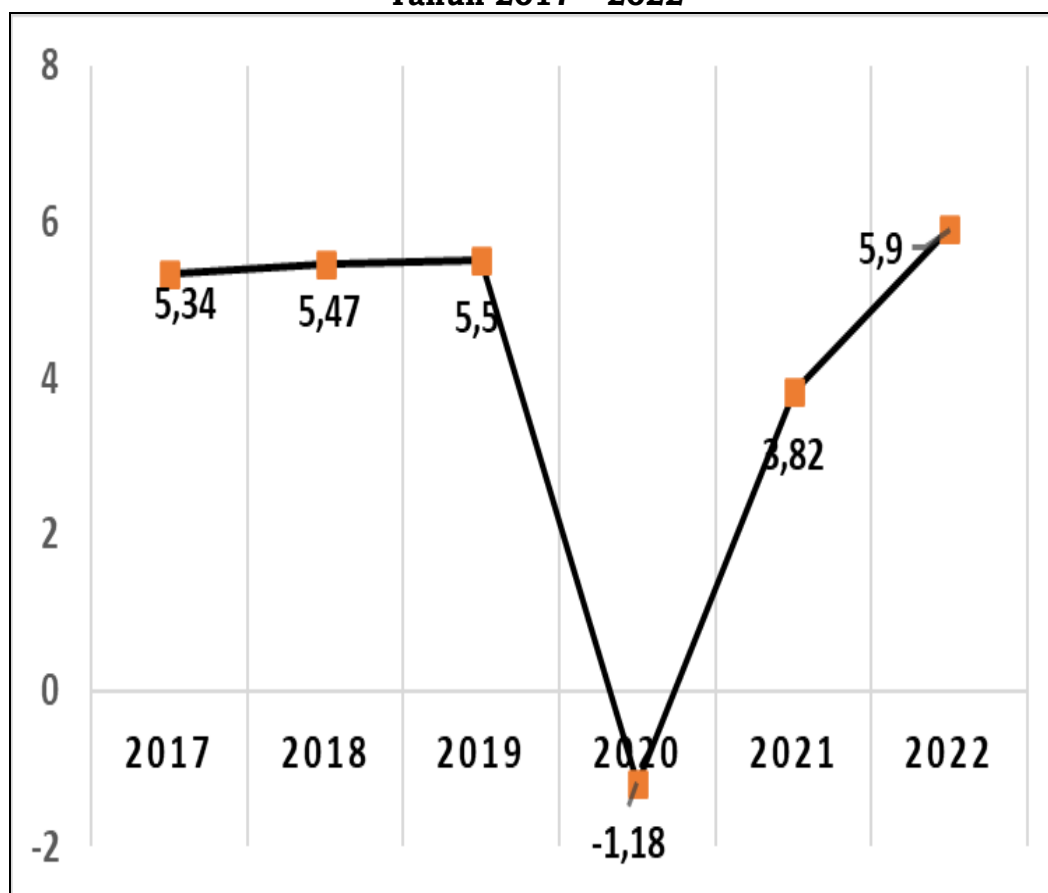
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Klaten, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2022 menunjukkan kinerja positif sebesar 5,9%. Capaian tersebut meningkat jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang sebesar 3,82%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang sebesar 5,9% menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Klaten mampu tumbuh dan pulih setelah pandemi Covid-19.

Capaian Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten yang sebesar 5,9% di atas Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang sebesar 5,31% dan

Pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,31%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten selama tahun 2017-2022 dapat dilihat dalam gambar 2.3

Gambar 2.3
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten (%)
Tahun 2017 – 2022



Sumber : BPS Kabupaten Klaten tahun 2023

2.1.5 Pendapatan Per Kapita

Perhitungan pendapatan per kapita tidak dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga data pendapatan per kapita menggunakan pendekatan Pengeluaran Per Kapita. Pengeluaran per Kapita Kabupaten Klaten tahun tahun 2021 sebesar Rp12.017.000,00 meningkat mejadi Rp12.522.000,00 pada tahun 2022 atau meningkat sebesar Rp505.000,00 Adapun data pengeluaran per kapita Kabupaten Klaten tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klaten tahun 2017 – 2022

Tahun	Pengeluaran Per Kapita (Dalam Rupiah)
2017	11.369.000
2018	11.738.000
2019	12.074.000
2020	11.921.000
2021	12.017.000
2022	12.522.000

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2023

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Dikarenakan Gini Ratio Kabupaten tidak dirilis oleh Badan Pusat Statistik, data ketimpangan pendapatan menggunakan pendekatan Ketimpangan Pendapatan (kriteria Bank Dunia). Menurut kriteria Bank Dunia, penduduk digolongkan menjadi tiga kelas, yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Penghitungan kriteria Bank Dunia tersebut menggunakan data pengeluaran dengan pertimbangan bahwa data pengeluaran lebih teliti daripada data pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan sebagai pendekatan dari pendapatan. Persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah dapat digunakan untuk menilai tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- a) Jika penduduk pada golongan 40 persen berpendapatan/berpengeluaran rendah menerima kurang dari 12 persen dari seluruh pendapatan maka dikategorikan ketimpangan tinggi
- b) Jika penduduk pada golongan 40 persen berpendapatan/berpengeluaran rendah menerima 12 sampai 17 persen dari seluruh pendapatan maka dikategorikan ketimpangan sedang.
- c) Jika penduduk pada golongan 40 persen berpendapatan/berpengeluaran rendah menerima lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan maka dikategorikan ketimpangan rendah,

Data Distribusi pendapatan Penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan kriteria Bank Dunia dari Tahun 2020 s/d 2022 bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tersaji dalam Tabel berikut :

Tabel 2.5
Distribusi Pendapatan Penduduk Klaten
Tahun 2020 – 2022

Distribusi Pendapatan	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
40% penduduk pendapatan rendah (bawah)	20,13	19,59	19,17
40% penduduk pendapatan sedang (tengah)	37,47	36,78	35,46
20% penduduk pendapatan tinggi (atas)	42,40	43,63	44,98

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pada tahun 2022, distribusi pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Klaten sebesar 19,17%, 40 persen penduduk berpendapatan sedang sebesar

35,46% dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi sebesar 44,98%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kategori ketimpangan di Kabupaten Klaten pada tahun 2022 masuk kategori ketimpangan rendah dikarenakan penduduk pada golongan 40 persen berpendapatan/berpengeluaran rendah menerima lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan.

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah. Laporan capaian kinerja urusan Pemerintahan Daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Data dan informasi Indikator Kinerja Kunci Keluaran beserta dengan Capaian Kinerja Indikator Kunci Keluaran dapat dilihat dalam Lampiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022.

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Data dan informasi Indikator Kinerja Kunci Hasil beserta dengan Capaian Kinerja Indikator Kunci Hasil dapat dilihat dalam Lampiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022.

2.2.3 Indikator Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Data dan informasi Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan beserta dengan Capaian Kinerja Indikator Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dapat dilihat dalam Lampiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022.

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah Daerah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya sebagai upaya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas sumber daya yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak dari pelaksanaan pembangunan Daerah.

Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip good governance dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi Pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik. Oleh karena itu pentingnya pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan telah mampu mengatasi permasalahan pembangunan, dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Salah satu dasar rujukan yang diacu adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terutama terkait dengan penentuan skala nilai peringkat kinerja sebagai bahan penilaian dari masing-masing sasaran strategis. Adapun skala nilai peringkat kinerja sebagaimana dimaksud, dapat disajikan pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7

Tabel 2.6
Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,01$	Sangat Tinggi	
2	$75,01 \leq 90,00\%$	Tinggi	
3	$65,01 \leq 75,00\%$	Sedang	
4	$50,01 \leq 65,00\%$	Rendah	
5	$\leq 50,00\%$	Sangat Rendah	

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

Tabel 2.7
Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$< 50,00\%$	Sangat Tinggi	
2	$50,01\% - 65,00\%$	Tinggi	
3	$65,01\% - 75,00\%$	Sedang	
4	$75,01\% - 90,00\%$	Rendah	
5	$> 90,01\%$	Sangat Rendah	

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan berdasarkan sasaran strategis, serta didukung Program Prioritas agar lebih sistematis dan terukur ditentukanlah target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah Daerah. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergisitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ditetapkan mengacu pada RKPD 2022. Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.8

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	1.1	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (Ipoleksosbud) yang diselesaikan	%	100
		1.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100
2	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	2.1	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	71
		2.2	Peringkat/ Nilai SAKIP	Nilai	62
		2.3	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP
		2.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,2
		2.5	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	202
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82
4	Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonom	4.1	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	1,47
		4.2	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	1,24
		4.3	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	1,63

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		4.4	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	3,13
5	Meningkatnya investasi daerah	5.1	Persentase peningkatan investasi PMDN	%	50
		5.2	Persentase peningkatan investasi PMA	%	1
6	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	6.1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	91,06
		6.2	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	61,47
		6.3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	41,5
7	Meningkatnya capaian universal acces (100-0-100)	7.1	Persentase capaian <i>universal access</i> (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	98,32
8	Terkendalnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang	8.1	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	88,40
9	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan	9.1	Kinerja Lalu Lintas (<i>Level Of Service</i>)	Nilai	0,62
10	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	10.1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,52
		10.2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,85
		20.3	Persentase pemajuan kebudayaan	%	5
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	11.1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76.84
12	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	12.1	Persentase PMKS yang tertangani	%	67,5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		12.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,16
		12.3	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7034
13	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	13.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	73,34
		13.2	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	725
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	14.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	36,63
		14.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	77,80
		14.3	Indeks Kualitas Lahan Tutupan	Indeks	42,90
15	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	15.1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	59,95
16	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	16.1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,92

Sumber: RKPD Kabupaten Klaten 2022.

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, capaian indikator kinerja organisasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.9

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	1.1	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (<i>Ipoleksosbud</i>) yang diselesaikan	%	100	100	100,00
		1.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	95,89	95,89
2	Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah	2.1	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	71	75,91	106,92
		2.2	Peringkat/ Nilai SAKIP	Nilai	62	65,14	105,06
		2.3	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100
		2.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,2	N/A	N/A
		2.5	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	202	258	127,72
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82	83,46	101,78
4	Mengoptimalkan Sektor Unggulan Dalam Pertumbuhan Ekonomi	4.1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	1,47	3,91	265,99
		4.2	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	1,24	4,03	325
		4.3	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	1,63	1,61	98,77
		4.4	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	3,13	64,14	2049,20
5	Meningkatnya Investasi Daerah	5.1	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	%	50	158	316,00
		5.2	Persentase Peningkatan Investasi PMA	%	1	139	13900,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
6	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah	6.1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	91,06	91,11	100,05
		6.2	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	61,47	61,99	100,85
		6.3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	41,5	44,91	108,22
7	Meningkatnya Capaian Universal Acces (100-0-100)	7.1	Persentase Capaian <i>Universal Access</i> (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	98,32	97,68	99,35
8	Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang	8.1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	88,40	95,03	107,50
9	Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalulintas Penyelenggaraan Angkutan	9.1	Kinerja Lalu Lintas (<i>Level Of Service</i>)	Nilai	0,62	0,62	100,00
10	Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing	10.1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,52	13,40	99,11
		10.2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,85	9,09	102,71
		10.3	Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	5	5	100,00
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	11.1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,84	76,95	100,14
12	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	12.1	Persentase PMKS yang tertangani	%	67,5	87,39	129,46
		12.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,16	4,31*)	116,50
		12.3	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7034	0,7034	100,00
13	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak	13.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	73,34	71,88	98,01
		13.2	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	725	629,80	86,87

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	14.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	36,63	47,69	130,19
		14.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	77,80	87,85	112,92
		14.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	42,90	42,55	99,19
15	Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah Serta Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3)	15.1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	59,95	56,08	93,54
16	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	16.1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,92	0,94	102,17

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022.

*) Angka Sementara

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 16 (enam belas) sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran 34 (*tiga puluh empat*) yang terdiri dari: 33 (*tiga puluh tiga*) indikator yang sifatnya progresif, dan 1 (*satu*) indikator yang sifatnya regresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

A. Indikator Progresif, dengan hasil:

a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria Sangat Tinggi (atau interval nilai realisasi kinerja $\geq 90,01$) sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 91,18%, diantaranya:

- 1) Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (Ipoleksosbud) yang diselesaikan;
- 2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan;
- 3) Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI);
- 4) Peringkat/ Nilai SAKIP;
- 5) Opini Laporan Keuangan;
- 6) Indeks Penerapan Sistem Merit ASN;
- 7) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 8) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan;
- 9) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan;
- 10) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan;
- 11) Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata;
- 12) Persentase Peningkatan Investasi PMDN;
- 13) Persentase Peningkatan Investasi PMA;
- 14) Persentase jalan dalam kondisi mantap;
- 15) Persentase drainase dalam kondisi baik;

- 16) Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik;
- 17) Persentase Capaian Universal Access (kumuh, air minum dan sanitasi);
- 18) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang;
- 19) Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service);
- 20) Harapan Lama Sekolah (HLS);
- 21) Rata-rata Lama Sekolah (RLS);
- 22) Persentase Pemajuan Kebudayaan;
- 23) Usia Harapan Hidup (UHH);
- 24) Persentase PMKS yang Tertangani;
- 25) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- 26) Indeks Desa Membangun (IDM);
- 27) Indeks Kualitas Air;
- 28) Indeks Kualitas Udara;
- 29) Indeks Kualitas Tutupan Lahan;
- 30) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); dan
- 31) Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

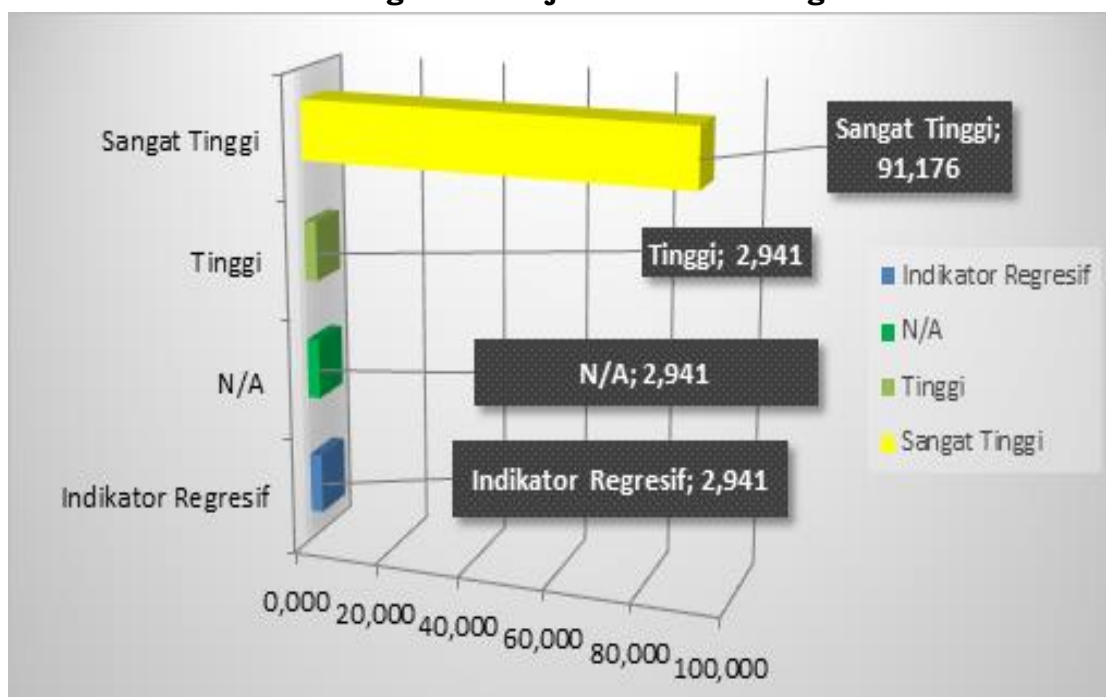
b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan ***Kriteria Tinggi***, atau interval nilai realisasi kinerja **75,01 ≤ 90,00** sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 2,94%, diantaranya:

- 1) Skor Kabupaten Layak Anak.

c. Ada 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mempunyai nilai kinerja baik di tahun 2021 sebesar 2,74 sehingga di tahun 2022 tidak diikuti penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena yang diikuti dalam penilaian Indeks SPBE bagi instansi dengan nilai di bawah 2,60.

Berdasarkan Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan ***Skala Nilai Peringkat Kinerja*** sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diperoleh hasil sebagaimana Gambar 2.4

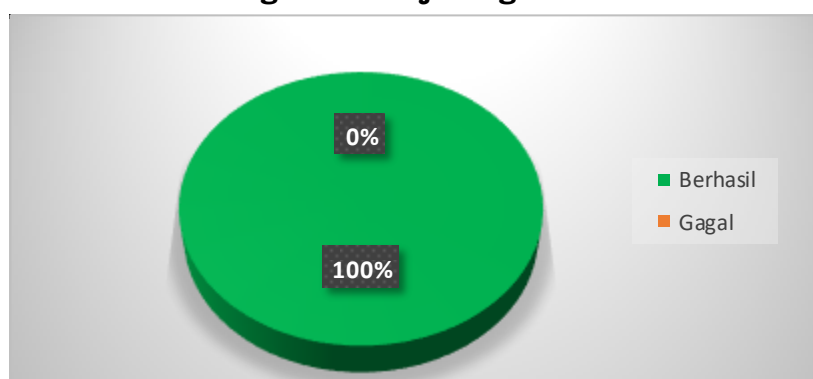
Gambar 2.4
Peringkat Kinerja Sasaran Strategis



B. Indikator Regresif, dengan hasil:

Indikator regresif dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria *Tercapai (Berhasil Menekan) atau sangat tinggi*, dengan nilai realisasi kinerja skala <50,00% sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Gambar 2.5
Peringkat Kinerja Regresif



Berdasarkan *Capaian Kinerja Organisasi* Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan *Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif* maka diperoleh hasil sebagaimana Gambar 2.5

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran capaian dilakukan dengan mengukur capaian kinerja Tahun 2022 dibanding Tahun 2021. Tabel Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.10

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2022 terhadap target kinerja pada tahun terakhir RPJMD 2026. Dalam mengukur capaian kinerja tahun berkenaan dengan target dalam RPJMD juga dengan membandingkan dengan capaian saat awal RPJMD (Tahun 2021) maupun capaian kinerja tahun sebelumnya Tahun 2019 dan 2020

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021 dibandingkan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten dapat disajikan dalam Tabel 2.10

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021 dan Tahun 2022 dan
Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022 dibandingkan
dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)/(10)*100
1	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (Ipoleksosbud) yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	92,00	92,24	91,60	100	95,89	95,89	100	95,80
2	Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	74,54	N/A	N/A*	71	75,91	106,92	83,00	91,46
		Peringkat/Nilai SAKIP	62,88	61,32	62,07	62	65,14	105,06	65	100,22
		Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,74	3	3	3,2	N/A	N/A	4	N/A
		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	78	77,5	78	202	258	127,72	260	99,23
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,17	81,31	81,88	82	83,46	101,78	84,00	99,36

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				2019	2020	Target	Realisasi	%		
4	Mengoptimalkan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	3,68	6,50	-1,20	1,47	3,91	265,99	4,09	95,60
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5,65	4,31	-4,79	1,24	4,03	325	3,96	101,77
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	1,14	0,52	2,12	1,63	1,61	98,77	3,14	51,27
		Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	3,12	31,03	-47,35	3,13	64,14	2.049,20	4,58	1400,44
5	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	733	97	-64	50	158	316,00	50	156,00
		Persentase Peningkatan Investasi PMA	319	272	-59	1	139	13900,00	5	1.340
6	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	90,86	86,02	90,08	91,06	91,11	100,05	91,86	99,18
		Persentase drainase dalam kondisi baik	61,45	61,21	61,44	61,47	61,99	100,85	61,52	100,76
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	40,89	33,47	36,17	41,5	44,91	108,22	46,2	97,21
7	Meningkatnya Capaian Universal Acces (100-0-100)	Persentase capaian <i>universal access</i> (kumuh, air minum dan sanitasi)	97,76	N/A	97,21	98,32	97,68	99,35	100	97,68

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				2019	2020	Target	Realisasi	%		
8	Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	88,20		88,00	88,40	95,03	107,50	89,20	106,54
9	Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalulintas Penyelenggaraan Angkutan	Kinerja Lalu Lintas (<i>Level Of Service</i>)	0,52	0,52	0,52	0,62	0,62	100	0,54	114,81
10	Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,39	13,24	13,25	13,52	13,40	99,11	13,94	96,13
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,81	8,31	8,58	8,85	9,09	102,71	8,96	101,45
		Persentase Pemajuan Kebudayaan	N/A	N/A	10,9	5	5	100	25	20,00
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	76,86	76,68	76,78	76,84	76,95	100,14	77,02	99,91

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				2019	2020	Target	Realisasi	%		
12	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	97,27	62,26	90,32	67,5	87,39	129,46	69,5	125,74
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,48	3,54	5,46	5,16	4,31	116,50	4,25	101,41
		Indeks Desa Membangun (IDM)	0,671	0,621	0,6854	0,7034	0,7034	100,00	0,6974	100,86
13	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)*	69,42	60,25	72,35	73,34	71,88*)	98,01	74,66	96,28
		Skor Kabupaten Layak Anak**	Madya 650	Madya (650)	Madya (650)	725	629,80**)	86,87	785	80,13
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Air	55,9	28,46	36,16	36,63	47,69	130,19	37,59	126,87
		Indeks Kualitas Udara	84,95	82,29	76,82	77,80	87,85	112,92	79,76	110,14
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	42,54	83,3	42,54	42,90	42,55	99,19	43,62	97,56
15	Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah serta Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	58,95	N/a	56,95	59,95	56,08	93,54	66,95	83,76

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				2019	2020	Target	Realisasi	%		
16	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,92	N/A	0,92	0,92	0,94	102,17	0,92	102,17

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2022 (data setelah reuiu Inspektorat Kabupaten Klaten)

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan terhadap setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut

1) Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Ukuran keberhasilan terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diukur dengan indikator: 1) Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (*Ipoleksosbud*) yang diselesaikan, dan 2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan. Adapun capaian sasaran: *Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat* disajikan pada Tabel 2.11

Tabel 2.11
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (<i>Ipoleksosbud</i>) yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	92,00	92,24	91,60	100	95,89	95,89	100	95,80

Sumber: Bakesbangpol, dan Satpol PP, Update Terakhir 11 Januari 2023.

Berdasarkan Capaian ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana tabel di atas, persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya yang diselesaikan pada tahun 2022 adalah 100 %, capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Konflik yang terjadi di tahun 2022 adalah kenakalan remaja yang sebanyak 2 (dua) kali. Keduanya terjadi pada saat kerusuhan suporter sepakbola dengan waktu yang berbeda dan semuanya bisa diselesaikan. Meski bisa dikatakan konflik yang terjadi sedikit tetapi tetap harus waspada mengingat mendekati Tahun 2024 adalah tahun politik, maka isu-isu negatif terkait ideologi, politik,

ekonomi, sosial dan budaya semakin meningkat. Cakupan penegakan Perda pada tahun 2021 mencapai 92,00% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 95,89% (dari sebanyak 146 kasus penegakan Perda dan yang diselesaikan sebanyak 140 kasus), kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sudah sangat baik. Mengingat juga luas wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta untuk menekan Angka Kriminalitas menjadi penting dalam menjaga kondusivitas daerah.

Berbagai permasalahan yang dihadapi bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan, diantaranya :

1. Penyakit Masyarakat

Data yang tersaji tentang berbagai penyakit masyarakat didapatkan berdasarkan Hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), data tersebut adalah mengenai data pelacuran dan peredaran minuman keras/beralkohol. Salah satu jenis penyakit masyarakat yang menonjol yaitu kasus pelacuran dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 kasusnya bersifat fluktuatif, data kondisinya disajikan pada Tabel 2.12

Tabel 2.12
Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil Operasi Penertiban					
			PGOT		PSK /WTS	Pasangan Tidak Resmi	Anjal/punk	
			Pria	Wanita			Pria	Wanita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2018	15	8	6	10	78	18	7
2	2019	20	12	5	12	37	38	8
3	2020	16	17	15	6	54	31	17
4	2021	21	31	10	9	53	12	4
5	2022	16	9	15	11	23	4	4
SANKSI								
<ul style="list-style-type: none"> - Bagi WTS/PSK dan Anjal wanita langsung dikirim ke Barehsos WANODYATAMA Surakarta selama 6 bulan. - Bagi Anjal pria dikirim ke PPSA Mandiri Semarang. - Bagi PGOT yang terjaring diserahkan ke Rumah Singgah Klaten guna <i>assesment</i> dan tindak lanjut. - Bagi Pasangan tidak resmi diwajibkan wajib lapor pembinaan sebanyak 20 kali di SATPOL PP 								

Sumber: SATPOL PP DAN DAMKAR, Update Terakhir 11 Januari 2023.

Berdasarkan Tabel sebagaimana tersebut di atas, trend pelanggaran Peraturan Daerah khususnya masalah penyakit masyarakat bersifat fluktuatif jumlahnya dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan:

- a. Tingkat kesadaran hukum warga masyarakat yang rendah;
- b. Kurangnya sosialisasi peraturan daerah dimaksud sampai kepedesaan/pelosok;

- c. Gaya hidup dan kemajuan teknologi mendorong masyarakat dan remaja melakukan perbuatan yang cenderung kriminal dan mengganggu ketertiban umum; dan
- d. Penerapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan daerah belum mampu membuat efek jera para pelanggar.

Sementara itu Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/Beralkohol selama tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.13

Tabel 2.13
Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil Operasi Penertiban			
			Ciu	Vodka	Anggur putih	Anggur merah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2018	0	0	0	0	0
2	2019	2	0	24 botol	7 botol	14 botol
3	2020	4	0	45 botol	18 botol	138 botol
4	2021	1	0	47 botol	0	44 botol
5	2022	1	0	10 botol	0	24 botol
SANKSI						
- Barang bukti miras diserahkan ke Polres guna pemusnahan terpadu;						
- Para pelaku pelanggaran dilakukan tipiring oleh Penyidik Polres Klaten.						

Sumber: SATPOL PP, Update Terakhir 11 Januari 2023.

Berdasarkan Tabel sebagaimana tersebut di atas, minuman keras/beralkohol yang ditemukan berdasarkan hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) jumlahnya juga bersifat fluktuatif. Hal ini tergantung pada situasi sosial budaya masyarakat yang sering kali menjadi baluran tindak kriminal yang mengiringinya.

2. Ancaman Terorisme

Adanya potensi ancaman Terorisme, Konflik SARA (baik Vertikal maupun Horizontal) dan gerakan yang bersifat radikalisme yang kadang bersifat laten serta kenakalan remaja perlu dicegah, sebelum ancaman itu terjadi. Kondisi permasalahan ketentraman umum selama tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum
Tahun 2018-2022

No	Jenis Permasalahan	Tahun (Jumlah Kejadian)				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ancaman Terorisme	-	1	-	1	-
2.	Konflik Sara	1	1	8	-	-
3.	Gerakan Radikalisme	2	1	-	-	-
4.	Kenakalan remaja	4	1	-	8	2

Sumber: BAKESBANGPOL, Update Terakhir 11 Januari 2023.

Berdasarkan Tabel sebagaimana tersebut di atas, jenis permasalahan ketentraman umum di Kabupaten Klaten secara umum mengalami penurunan. Gerakan radikalisme Kabupaten Klaten pada tahun 2022 tidak ada, karena intensifnya kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama untuk meminimalisir permasalahan radikalisme. Namun kenakalan remaja masih ditemui, karena tingginya mobilitas sosial anak muda dan yang mudah lepas kontrol, mendorong untuk berbuat asosial. Upaya yang dilakukan Bakesbangpol lebih bersifat persuasif atau mencegah sebelum permasalahan ketentraman umum terjadi.

3. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dirumuskan: *Jumlah kriminalitas tertangani/jumlah penduduk X 10.000 (Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)* maka diperoleh data angka kriminalitas sebagai berikut:

- a. Tahun 2018 :1,89.
Jumlah kriminalitas tertangani 248 kasus dibagi jumlah penduduk 1.314.781 jiwa dikali 10.000
- b. Tahun 2019 : 2,73
Jumlah kriminalitas tertangani 361 kasus dibagi jumlah penduduk 1.323.609 jiwa dikali 10.000
- c. Tahun 2020 : 1,19
Jumlah kriminalitas tertangani 158 kasus dibagi jumlah penduduk 1.330.802 jiwa dikali 10.000.
- d. Tahun 2021 : 1,80
Jumlah kriminalitas tertangani 230 kasus dibagi jumlah penduduk 1.276.030 jiwa dikali 10.000.
- e. Tahun 2022 : 1,75

Jumlah kriminalitas tertangani 223 kasus dibagi jumlah penduduk 1.277.455 jiwa dikali 10.000. (Sumber BAKESBANGPOL, Update Terakhir 13 Januari 2023.)

Angka Kriminalitas belum bisa ditekan, hal ini disebabkan beberapa permasalahan, diantaranya: 1). Bentuk dan modus kejahatan (tindak pidana) pun terus berkembang, sehingga penanganannya pun harus beda. 2). Selain itu meningkatnya tindak kriminal disebabkan persoalan seperti, ekonomi, sosial, konflik dan rendahnya kesadaran hukum, kemajuan teknologi informasi yang mendorong terjadinya bentuk-bentuk tindak yang didasari ataupun tidak. 3). Selain itu rendahnya ketaatan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati karena kurangnya sosialisasi, dan terbatasnya sumber daya manusia aparaturnya penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: **Terwujudnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** dengan dukungan program, diantaranya:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Permasalahan:

1. Total pelanggaran K3 pada tahun 2022 sebanyak 1.282 pelanggaran, diantaranya: pelanggaran reklame, perijinan usaha, Menara telekomunikasi, PKL dan bangunan liar;
2. Belum optimalnya rasio petugas Satuan Polisi Pamong Praja, pada tahun 2022 sebesar 0,3 per 10.000 penduduk dengan jumlah penduduk sebanyak 1.267.272 jiwa; dan
3. Menurunnya pemahaman nilai-nilai Pancasila pada generasi muda dan semakin meningkatnya penyebaran ajaran anti Pancasila.
4. Menurunnya tingkat toleransi antar kelompok masyarakat dengan adanya kejadian terorisme setiap tahunnya, meski kejadiannya tidak terjadi di wilayah Kabupaten Klaten namun warga Klaten menempati peringkat pertama dalam jumlah eks napiter terbanyak di Indonesia.

Solusi:

Adapun faktor penentu keberhasilan untuk meningkatkan pelayanan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi guna menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mentaati peraturan daerah yang berlaku melalui program komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).
3. Pembumih nilai-nilai Pancasila (usia sekolah dan masyarakat umum) secara masif dan berkesinambungan/berkelanjutan dan kerjasama dengan semua stakeholder, untuk sedini mungkin memberi pemahaman yang komprehensif tentang bahaya ajaran radikalisme.
4. Sosialisasi moderasi beragama dan pluralisme budaya Indonesia, baik di sekolah maupun masyarakat umum untuk menangkal paham-paham intoleransi yang mengarah pada perbuatan terorisme.

2) Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah

Untuk mendukung pencapaian sasaran *Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong transparansi penggunaan anggaran dengan penguatan pengawasan rencana pembangunan, disamping perlu adanya laporan pertanggungjawaban yang transparan.

Ukuran keberhasilan meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan kinerja Pemerintah Daerah diukur dengan indikator: 1) Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI), 2) Peringkat/Nilai SAKIP, 3) Opini Laporan Keuangan, 4) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan 5) Indeks Penerapan Sistem Merit ASN. Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah* tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.15

Tabel 2.15
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	74,54	N/A	N/A*	71	75,91	106,92	83,00	91,46

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
2	Peringkat/ Nilai SAKIP	62,88	61,3 2	62,0 7	62	65,14	105,0 6	65	100,22
3	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,74	3	3	3,2	N/A	N/A	4	N/A
5	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	78	77,5	78	202	258	127,7 2	260	99,23

Sumber : Inspektorat Daerah, Setda Bagian Organisasi, BPKPAD, Diskominfo, BKPSDM. Update Terakhir 12 Januari 2023.

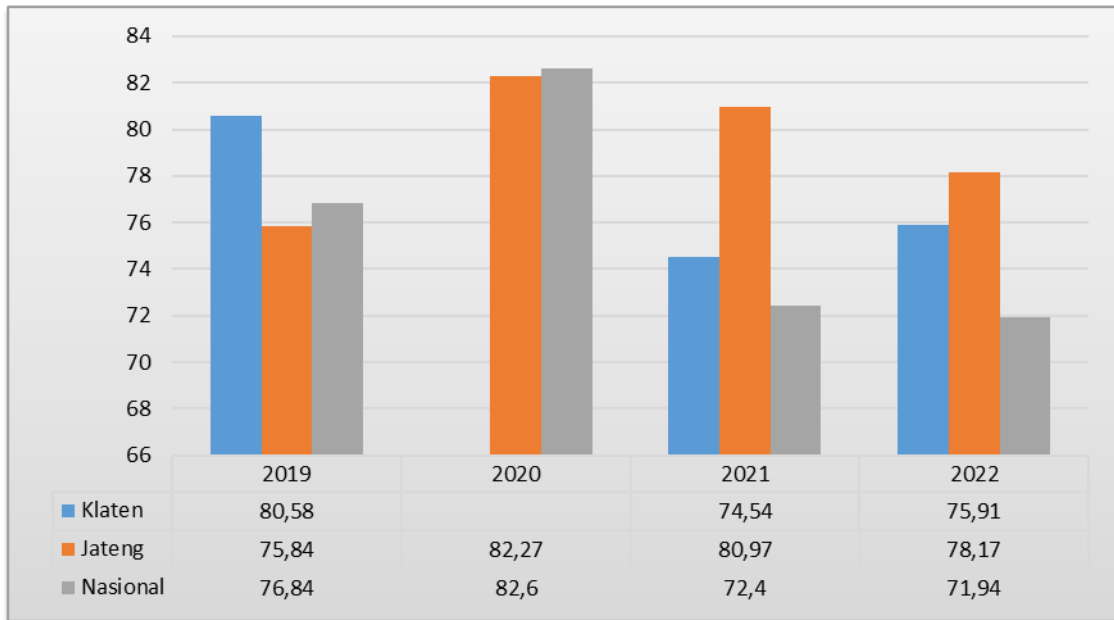
Capaian sasaran: *Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah* yang diukur dengan indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Daerah. Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi Pemerintah Daerah, yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan *expert/ahli* dari beragam kalangan. Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.

Hasil survei berbentuk angka, yang menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100; semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di Pemerintah Daerah tersebut, juga semakin baik. Adapun Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) seluruh Pemerintah Daerah tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten Tahun 2019-2022 disajikan pada Gambar 2.6

Gambar 2.6
Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2019-2022

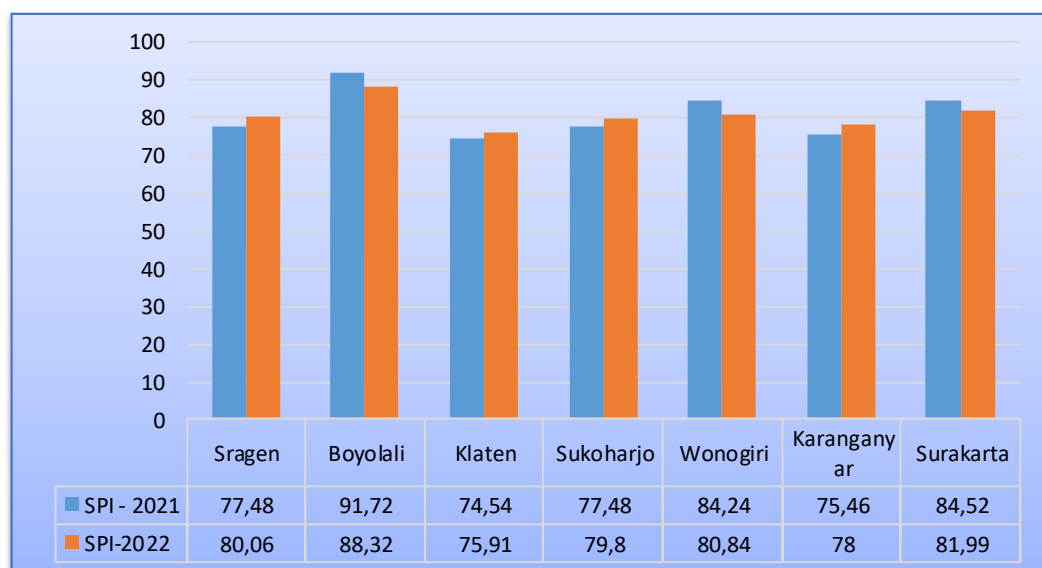


Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI), 2023.

*) SPI Klaten Tahun 2020 ditiadakan oleh KPK-RI sebagai dampak Pandemi Covid-19.

Berdasarkan rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) seluruh K/L/PD di Eks-Karesidenan Surakarta pada tahun 2021-2022 diperoleh hasil sebagaimana Gambar 2.7

Gambar 2.7
Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2021-2022



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI), 2023.

Berdasarkan Gambar 2.7 sebagaimana tersebut di atas, posisi capaian SPI-2021 Klaten (74,54) berada paling bawah di antara capaian SPI-2021 se eks-karesiden Surakarta, dan di bawah rata-rata capaian SPI-2022 Klaten (75,91), Jateng (78,17), dan di atas capaian SPI-2022 Nasional (71,94). Hasil Survei

Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Klaten Tahun 2022 yang dilakukan KPK-RI dengan rekomendasi sebagai-berikut:

- 1) Secara umum, pelaksanaan tugas di instansi ini masih menghadapi beberapa risiko dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Risiko ini harus diantisipasi agar tidak meningkat.
- 2) Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian dalam bentuk gratifikasi/suap/ pemerasan ketika berhubungan dengan instansi selama 12 bulan relatif rendah. Meskipun demikian, risiko ini harus tetap diantisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang.
- 3) Risiko terkait adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih ada dalam skala menengah. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, karena biasanya terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/uang transport lokal/perjalanan dinas tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.
- 4) Risiko terjadinya penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa diyakini masih ada dalam skala menengah. Risiko ini perlu diantisipasi karena dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan *vendor* tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), risiko gratifikasi/suap dari *vendor* pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.
- 5) Risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan SDM saat promosi/mutasi diyakini masih terjadi dengan skala sedang (kisaran rata-rata nasional). Risiko ini bisa muncul karena konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi.
- 6) Risiko perdagangan pengaruh (*trading in influence*) berada dalam tingkat sedang. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, terutama karena rawan terjadi saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.
- 7) Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan di instansi ini, dan berdampak cukup efektif terhadap pembentukan perilaku antikorupsi. Sosialisasi antikorupsi perlu tetap dirancang agar efektif untuk menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.

- 8) Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator transparansi berada pada angka yang relatif baik (di atas rata-rata nasional), terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
- 9) Kalangan eksternal menilai setidaknya ada satu aspek dalam indikator transparansi dan keadilan layanan yang masih memiliki risiko yang sangat tinggi. Risiko tersebut mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan yang dilakukan dalam memberikan layanan/ melaksanakan tugas.
- 10) Meskipun upaya pencegahan korupsi di instansi ini sudah sangat baik, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi dapat meningkatkan sistem antikorupsi melalui penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Juga perlu meyakinkan pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.

Berdasarkan pada temuan permasalahan tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar Pemerintah Kabupaten Klaten dapat melakukan beberapa hal upaya pencegahan korupsi sebagai berikut:

- 1) Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.
- 2) Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, hingga tidak ada lagi pegawai yang menerima suap/gratifikasi dari pengguna layanan di instansi.
- 3) Intensifikasi, sosialisasi, serta kampanye penegakan aturan mengenai pengelolaan benturan kepentingan serta penyalahgunaan perjalanan dinas, *mark up* anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.
- 4) Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye (jika sudah ada) mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut:
(1) Proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Penguatan mekanisme *probity audit* berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang

- dan jasa. (4) Penggunaan vendor management system. (5) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan dalam proses pengadaan. (6) Proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.
 - 6) Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye (jika sudah ada) mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) Penegakan sanksi/hukuman terkait pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan intervensi yang tidak sesuai aturan berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya. (2) Adanya larangan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai aturan terhadap seluruh pegawai/pimpinan di instansi disertai contoh dari pimpinan. (3) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi. (4) Upaya peningkatan integritas bagi calon pimpinan/pejabat di instansi dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat dan secara tahunan. (5) Penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi intervensi dan benturan kepentingan sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.
 - 7) Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi.
 - 8) Mempertahankan penyediaan informasi tentang pelaksanaan tugas yang memadai, meskipun sebagian besar responden menganggap penyediaan informasi sudah baik.
 - 9) Perbaiki mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan dengan memastikan hal-hal berikut: (1) Memasukkan larangan dan sanksi terkait pelaksanaan tugas dalam kode etik di instansi dan/atau regulasi internal lainnya. (2) Internalisasi melalui pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan di instansi untuk menciptakan perilaku baru untuk melaksanakan tugas. (3) Menyusun kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi. (4) Menyusun program/kegiatan bagi calon pimpinan/pejabat di instansi untuk meningkatkan integritas dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat. (5) Membangun mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi intervensi dan benturan kepentingan sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait kinerja indikator Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan dukungan program, diantaranya:

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a) Tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dari Audit yang belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan dalam menindaklanjuti hasil temuan;
- b) Proses perencanaan, penganggaran, sampai laporan kinerja belum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
- c) Profesionalitas dan kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan; dan
- d) Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Solusi:

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang pengawasan adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dengan pembuatan regulasi, sosialisasi, koordinasi intensif, serta penguatan komitmen auditor dalam melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengawasan; dan
- b) Mensinergikan atau mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, sampai laporan kinerja dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dan menghubungkan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai.

2) Peringkat/Nilai SAKIP.

Tuntutan akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah yang harus diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan Pemerintah. Sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 mengupayakan pentingnya **Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih** yang dijabarkan ke dalam sasaran jangka menengah Daerah, yakni **Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah.**

Capaian kinerja SAKIP telah menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun. Target yang ditetapkan pada tahun 2021 sesuai dengan ranwal RPJMD 2021-2026 sebesar 62, dengan realisasi sebesar 62,88 (dengan Kategori B) dan target pada tahun 2022 dengan nilai 62 dengan realisasi nilai sebesar 65,14 (dengan Kategori B), sehingga meningkat sebesar 2,26 poin.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa ikhtisar penting terkait penilaian kinerja instansi Pemerintah di Kabupaten Klaten, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh nilai 65,14 atau dengan predikat B. Secara rinci hasil penilaian tersebut, sebagai berikut:
 - Perencanaan Kinerja nilai 21,30
 - Pengukuran Kinerja nilai 18,56
 - Pelaporan Kinerja nilai 10,73
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 14,55
2. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Pemerintah Kabupaten Klaten telah membangun akuntabilitas kinerja di semua jenjang Pemerintahan dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang mencakup: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.
4. Secara umum atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten adalah baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan ke depan, agar kinerja pada instansi Pemerintah terus mengalami peningkatan.

Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan guna meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, dengan langkah-langkah;
 - a) Mereviu dokumen perencanaan untuk melihat ketepatan dan sinkronisasi antara tujuan, sasaran, indikator kinerja untuk mencapai target pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.
 - b) Memperbaiki dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja sesuai dengan hasil reviu sebagai acuan penyusunan anggaran dengan menyusun agenda aksi daerah.
- b. Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja melalui langkah-langkah;
 - a) Menerapkan sistem pengukuran kinerja secara konsisten, dan sebagai bahan penilaian kinerja lembaga/pejabat, sekaligus sebagai pengendalian rencana.
 - b) Memastikan penerapan dan penetapan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai eselon II, III sampai pada tingkatan eselon IV.
- c. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja terhadap OPD, serta kualitas evaluasi program; dan
- d. Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berjenjang terhadap capaian kinerja baik di tingkat kabupaten maupun OPD sebagai dasar penerapan pemberian *reward and punishment* dalam rangka semakin mendorong terciptanya manajemen berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

3) Opini Laporan Keuangan

Realisasi atas target kinerja keuangan menunjukkan hasil kinerja sangat tinggi, atau menghasilkan opini penilaian *WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)*, kinerja ini merupakan komitmen bersama di semua jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan aspek akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan, transparansi penggunaan anggaran, dan tertib administrasi sebagai bagian dari fakta integritas yang telah dibangun dan diciptakan penyelenggara negara. Adapun Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018–2021 disajikan pada Tabel 2.16

Tabel 2.16
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2018–2021

Tahun	Opini BPK	Keterangan
(1)	(2)	(3)
2018	WTP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> pengendalian rekening pengelolaan KAS dan mekanisme pembayaran langsung masih lemah. Pengelolaan piutang PBB perdesaan dan perkotaan tidak tertib.
2019	WTP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> 1. Pengelolaan Rekening Pemkab dan pengelolaan kas pada Bendahara belum memadai diantaranya adanya Rekening aktif pada PT Bank Jateng, PT BPR Bank Klaten dan Bank Umum atas nama Pemkab Klaten yang tidak terdaftar dalam SK Bupati, dan Bendahara Pengeluaran yang tidak tertib. 2. Pengendalian dan penatausahaan aset tetap Pemkab belum optimal, diantaranya luas tanah bawah jalan yang belum akurat, sebanyak 684 ruas jalan lingkungan belum ditetapkan dalam SK Bupati, pembayaran pajak kendaraan bermotor belum dipenuhi, administrasi pinjam pakai dan sewa aset tetap belum tertib, serta terdapat barang hilang hasil sensus yang belum diverifikasi.
2020	WTP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> 1. Belanja dana BOS tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp.5,11 Milyar, diantaranya terdapat realisasi Belanja Honor bagi ASN senilai Rp,3,83 Milyar dan terdapat realisasi Belanja Jasa Pihak Ketiga Non Konsultasi kepada ASN dan pegawai di sekolah senilai Rp.1,28 Milyar. 2. Pengendalian pengelolaan dan penatausahaan persediaan serta sistem informasi persediaan belum memadai, diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum melaksanakan penatausahaan dan pencatatan persediaan secara tertib dan sistem informasi persediaan pada OPD Puskesmas, instalansi Farmasi Dinas Kesehatan dan RSUD Bagas Waras belum memadai. 3. Penataan usaha dan pengamanan aset tetap pemerintah Kabupaten Klaten belum optimal diantaranya terdapat tujuh bidang tanah milik desa masih tercatat pada KIB

Tahun	Opini BPK	Keterangan
(1)	(2)	(3)
		A. 12 tanah dan 24 ruas jalan lingkungan belum masuk SK Bupati, serta terdapat aset tetap milik sekolah swasta dan SMA/SMK yang masih tercatat di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
2021	WTP	<i>Paragraf penjabar berupa:</i> 1. Aset pasar rakyat berupa kios yang dikelola Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM digunakan oleh pedagang yang tidak berhak, dan digunakan untuk tempat tinggal. 2. Ketidakjelasan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan PT KBBP dalam pengelolaan Pasar Delanggu, berakibat penerimaan dan kontribusi kerjasama tidak tertagih.

*Sumber: BPKPAD, Update Terakhir 11 Januari 2023.
Catatan: Opini BPK tahun 2022 dalam Proses.*

Hasil penilaian sebagaimana tabel 2.16 tersebut di atas, berdasarkan atas Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan, serta penilaian atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan, serta penyajian laporan keuangan secara menyeluruh yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait indikator Opini Laporan Keuangan dengan dukungan Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pengelolaan keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan hasil pemeriksaan yang meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan masih ditemukan beberapa temuan penggunaan keuangan Daerah yang belum efektif dan efisien;
- b) Penyajian laporan keuangan yang dilakukan belum lengkap atas dasar prinsip akuntabilitas dan estimasi yang signifikan; dan
- c) Proporsi PAD terhadap APBD tahun 2021 sebesar 12,27%, dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 13,92% (atau naik 0,65%).

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan koordinasi semua pihak pengelola barang dan jasa daerah;
- b) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah lainnya;

- c) Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

4) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 274 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokus Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Klaten tidak termasuk *checklist* Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) yang tertuang pada Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 274 Tahun 2022 untuk wajib mengikuti pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2022.

Pemantauan dan evaluasi tahun 2022 hanya wajib bagi IPPD dengan Indeks SPBE tahun 2021 kurang dari 2,60 (Posisi Kabupaten Klaten pada 2021 Indeks SPBE mencapai 2,74). Kandidat IPPD dengan Indeks SPBE tahun 2021 lebih dari 2,60 dan mendaftarkan pengajuan/usulan dengan pertimbangan jika tersedia kuota, tetapi lebih diprioritaskan pada IPPD dengan Indeks SPBE Tahun 2021 kurang dari 2,60.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait pencapaian indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan dukungan program, diantaranya:

- a) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; dan
- b) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a) Terbatasnya sumber daya dalam pengelolaan website Daerah; dan
- b) Belum optimalnya persentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan tahun 2022 menjadi sebesar 18,18%

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki Komunikasi antara lain sebagai berikut:

- a) Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas OPD; dan
- b) Melakukan inisiasi, pembinaan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.

5) Indeks Penerapan Sistem Merit ASN

Pengertian sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada: kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Dasar hukum pelaksanaan sistem merit adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- e. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penilaian Sistem Merit Manajemen ASN meliputi 8 (delapan) Aspek terdiri dari:

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai
- b. Pengadaan Pegawai
- c. Pengembangan karier dan peningkatan kompetensi
- d. Mutasi, Rotasi dan Promosi
- e. Manajemen Kinerja
- f. Penggajian, penghargaan dan disiplin
- g. Perlindungan dan pelayanan ASN
- h. Sistem Pendukung Pelaksanaan

Penilaian Mandiri Sistem Merit di Kabupaten Klaten sudah dilaksanakan mulai tahun 2020 hasil yang diperoleh dengan skor 160,5 (atau dengan kategori buruk). Pada tahun 2021 hasil Penilaian Sistem Merit diperoleh hasil dengan skor 204,5 (atau dengan kategori kurang). Hasil penilaian sistem merit untuk tahun 2022 Kabupaten Klaten mendapatkan anugerah meritokrasi dari KASN karena keberhasilan capaian nilai Penerapan Sistem Merit pada kategori III “BAIK” dengan nilai 258 (dua ratus lima puluh delapan). Direncanakan hasil penilaian Merit Sistem Kabupaten Klaten sesuai RPJMD 2021-2026 akan bernilai baik pada tahun 2025. Berbagai komponen pendukung penilaian sistem Merit yang dilakukan, diantaranya:

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai

Jumlah jabatan pada instansi pemerintah Kabupaten Klaten untuk tahun 2022 menurun jika dibandingkan tahun 2021, penurunan disebabkan

banyaknya PNS yang memasuki pensiun tetapi formasi penggantinya belum terisi. Sebagai catatan untuk tahun 2018 s/d 2022 data Jumlah pemangku jabatan pelaksana (Fungsional Umum) digabungkan dengan data Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah. Adapun perkembangan jumlah jabatan ASN pada periode tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.17

Tabel 2.17
Perkembangan Jumlah Jabatan ASN
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	27	26	24	25	21
2	Jumlah pemangku jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	2.935	2.855	2.664	557	376
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	6.963	6.940	6.449	6.007	5483
4	Jumlah pemangku jabatan pelaksana (Fungsional Umum)	Orang	-	-	-	2.523	2331

Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, Update Terakhir 11 Januari 2023

b. Pengadaan CPNS

Secara umum proses pengadaan CASN formasi 2022 di Kabupaten Klaten sebagai berikut:

1. Tahapan pelaksanaan PPPK Guru untuk mengisi kekurangan formasi 585 telah berproses sebagai berikut :
 - a. Pengumuman seleksi 31 oktober 2022
 - b. Pendaftaran peserta 31 oktober s.d 13 November 2022
 - c. Seleksi observasi 27 November s.d 29 November 2022
 - d. Penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM 3 s.d 4 Desember 2022
 - e. Tahapan pengolahan penilaian kesesuaian hasil masih menunggu dari Panselnas.
2. Tahapan pelaksanaan PPPK Tenaga Kesehatan untuk mengisi 89 formasi :
 - a. Pengumuman seleksi 3 s.d 17 November 2022;
 - b. Pendaftaran seleksi 3 s.d 22 November 2022;
 - c. Seleksi Administrasi 3 s.d 23 November 2022;
 - d. Seleksi kompetensi 14 s.d 15 Desember 2022;
 - e. Pengumuman hasil seleksi kompetensi 30 Desember 2022;
 - f. Hasil seleksi kompetensi terisi 75 formasi.
3. Tahapan pelaksanaan PPPK Tenaga Teknis untuk mengisi 75 Formasi:
 - a. Pengumuman seleksi 21 Desember 2022;
 - b. Seleksi Administrasi 22 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023;

- c. Pengumuman hasil seleksi administrasi sampai pengumuman hasil seleksi kompetensi pada tahun 2023.

c. Pengembangan Karier dan Peningkatan Kompetensi

Pengembangan karier dan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dilakukan dengan mengikuti: diklat, bimtek dan seminar bagi ASN. Total jumlah ASN di Kabupaten Klaten tahun 2022 sebanyak 8.211 orang, sebanyak 3.513 ASN (42,78%) sudah pernah mengikuti diklat, bimtek dan seminar. Adapun perkembangan jumlah ASN yang mengikuti Diklat, Bimtek dan Seminar tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.18

Tabel 2.18
Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat, Bimtek dan Seminar
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Diklat Teknis sesuai Tupoksi	Orang	450	353	20	198	-
2	Diklat Teknis Fungsional	Orang	312	5.648	5.050	4.720	-
3	Bimbingan Teknis	Orang	58	-	-	-	-
4	Seminar dan sejenisnya	Orang	-	-	2	-	-
5	Diklat Teknis	Orang	-	-	-	-	293
6	Diklat Jabatan (Diklat latsar, Diklatpim, dan diklat fungsional)	orang	-	-	-	-	3.220
Jumlah		Orang	820	6.001	5.072	4.918	3.513

Sumber: BKPSDM, Update Terakhir 11 Januari 2023

Pelaksanaan diklat, bimtek dan seminar yang dibiayai APBD pada tahun 2022 sebanyak 3.513 atau sebesar 42,78 % dari total keseluruhan jumlah ASN sebanyak 8.211 ASN.

d. Manajemen Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Manajemen pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan untuk meningkatkan kinerja sumber daya aparatur melalui berbagai program/kegiatan yang mendukung *Performance appraisal* aparatur. *Performance appraisal* atau sering juga disebut sebagai *performance review*, *performance evaluation*, atau *employee appraisal* adalah sebuah metode dimana kinerja seorang karyawan didokumentasikan dan dievaluasi. Adapun Manajemen pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Manajemen Pengelolaan Aparatur Sipil Negara ASN
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	62	77,5	78,06	78,06	52,92
2	Indeks sistem Merit	Nilai	Na	Na	160,5	204,5	258
3	Persentase ASN yang mengikuti diklat	%	99	116	42,93	155,86	42,78
4	Persentase layanan sumber daya aparatur	%	93,75	95	104,47	95,11	-
5	Persentase Pembinaan Disiplin ASN	%	52	56	100	103,03	-
6	Persentase informasi kepegawaian yang akurat	%	90	80	98	101,20	-
7	Persentase Pengembangan Aparatur	%	83 96	77,74	90,93	-	-
8	Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi	%	-	-	-	-	213
9	Persentase Kinerja ASN bernilai baik	%	-	-	-	-	94,14
10	Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan	%	-	-	-	-	100
11	Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	247

Sumber: BKPSDM, Update Terakhir 11 Januari 2023.

Berdasarkan data informasi manajemen Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) disampaikan beberapa hal, diantaranya:

- a. Terkait tingginya persentase kualifikasi Calon ASN sesuai formasi dikarenakan lonjakan adanya penyelesaian formasi PPPK ditahun 2021 sebanyak 1.977 dari formasi yang harus diselesaikan sebanyak 2.500 PPPK dan dari CPNS sebanyak 149 CPNS. Tahun 2022 target sebesar 1000 CASN tercapai 2.126 CASN atau 212,6%;
- b. Tingginya Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah disebabkan oleh tingginya penyelesaian mutasi pengangkatan CPNS ke PNS, mutasi pengangkatan Jabatan fungsional guru, Mutasi penempatan PPPK.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait capaian indikator Indeks Penerapan Sistem Merit ASN dengan dukungan program, diantaranya:

- 1) Program Kepegawaian Daerah; dan
- 2) Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a) Masih rendahnya peningkatan pengembangan kompetensi (diklat dan sejenisnya); dan
- b) Masih rendahnya nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) Kabupaten Klaten yaitu 52,92.

Solusi:

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk mengembangkan kompetensi ASN;
- b) Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN (diklat dan sejenisnya) lewat berbagai cara (diklat dan sejenisnya) secara daring, pengembangan kompetensi kerjasama dengan instansi vertikal, pengembangan kompetensi yang diselenggarakan langsung oleh OPD (workshop, seminar, sosialisasi, magang, PKS dll);
- c) Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk mendukung SIASN BKN dalam rangka perbaikan nilai IPASN.

3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mendukung pencapaian sasaran *Meningkatnya kualitas pelayanan publik* dilakukan dengan mendorong transparansi penggunaan anggaran dengan penguatan pengawasan rencana pembangunan yang ketat, disamping perlunya laporan pertanggungjawaban yang transparan.

Ukuran keberhasilan meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya kualitas pelayanan publik* tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.20

Tabel 2.20
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9) *100
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,17	81,31	81,88	82	83,46	101,78	84,00	99,36

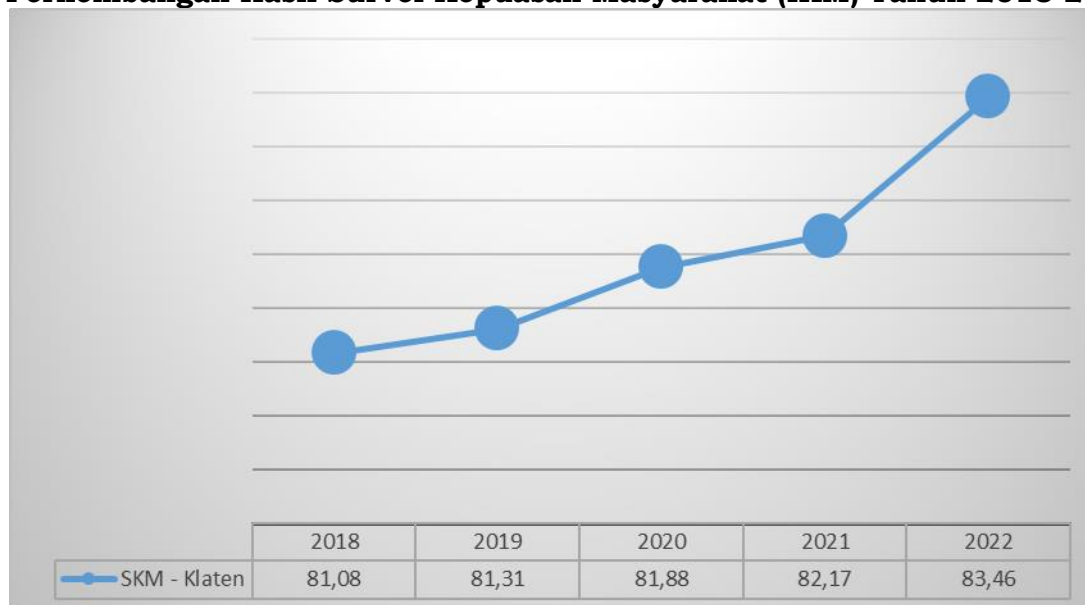
Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Organisasi, Update Terakhir 16 Januari 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dinyatakan bahwa **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)** merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pada 8 (delapan) area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditetapkan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan. Atribut kepuasan SKM dengan menggunakan 9 (sembilan) unsur layanan, diantaranya: persyaratan, prosedur, waktu, biaya/tarif, produk, kompetensi, perilaku, maklumat, dan penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Selama tahun 2018-2022 Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan hasil Capaian berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 disajikan pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8
Perkembangan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2018-2022



Sumber: Setda Bagian Organisasi, Update Terakhir 12 Januari 2023.

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa IKM dari tahun 2018-2022 menunjukkan trend meningkat, hal ini disebabkan penilaian pada setiap unsur pelayanan juga meningkat. Peningkatan signifikan didapatkan dari unsur biaya/tarif, karena pada pelayanan publik di Kabupaten Klaten sebagian besar tidak dipungut biaya (gratis). Meskipun beberapa masih ada pelayanan yang dikenakan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

seperti layanan perizinan tertentu. Unsur lainnya yang mempengaruhi kenaikan nilai IKM adalah unsur sarana prasarana yang dinilai baik oleh masyarakat. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal,

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik* dengan dukungan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan:

- a. Terbatasnya inovasi pelayanan, untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik.
- b. Terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan dan prosedur pelayanan di Unit Pelayanan dengan menempelkan Maklumat Pelayanan terutama di lingkungan penyelenggara pendidikan dan kesehatan.
- c. Belum optimalnya peningkatan kedisiplinan dengan mentaati ketentuan jam kerja pelayanan serta melayani pemohon sesuai dengan prioritas permasalahan.
- d. Belum maksimalnya meningkatkan mutu pelayanan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkompeten dan sarana prasarana yang memadai bagi pengguna pelayanan (misalnya penyediaan *Running Tape* tentang Kondisi wilayah, kawasan rawan bencana untuk memonitor situasi).

Solusi:

Pemerintah Kabupaten Klaten terus berupaya melakukan inovasi dan melengkapi sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik bagi masyarakat. Meskipun sudah dinilai baik, perlu dilakukan upaya yang lebih optimal guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga nilai IKM **B (Baik): 76,61 - 88,30** bisa ditingkatkan setiap waktu.

4) Mengoptimalkan Sektor Unggulan Dalam Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mendukung pencapaian sasaran Mengoptimalkan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi upayakan yang dilakukan adalah dengan mendorong peningkatan dan pertumbuhan sektor unggulan ekonomi Daerah.

Ukuran keberhasilan mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi diukur dengan indikator: 1) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, 2) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, 3) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan, dan 4) Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata. Adapun capaian sasaran: *Mengoptimalkan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi* disajikan pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Mengoptimalkan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	3,68	6,50	-1,20	1,47	3,91	265,99	4,09	95,60
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5,65	4,31	-4,79	1,24	4,03	325	3,96	101,77
3	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	1,14	0,52	2,12	1,63	1,61	98,77	3,14	51,27
4	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	3,12	31,03	-47,35	3,13	64,14	2.049,20	4,58	1400,44

Sumber: Disperinaker, DKUKMP, DKPP, Disbudporapar, Update Terakhir 16 Januari 2023.

*) angka sementara

Capaian sasaran: *Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi* yang diukur dengan indikator: Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan, dan Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata sebagaimana Tabel 2.21 di atas, dapat diuraikan sebagai-berikut:

1) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

Komponen pembentuk PDRB, sektor industri manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten, yaitu memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 37,70% (15.944.978,09 juta) pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 37,29% (17.382.637,68 juta).

Berdasarkan basis sebaran kecamatan, sektor industri manufaktur berdasarkan kecamatan yang menempati 5 (lima) besar adalah: (1) Kecamatan Ceper; (2) Kecamatan Trucuk; (3) Kecamatan Wedi; (4) Kecamatan Prambanan; dan (5) Kecamatan Jogonalan. Perusahaan industri besar dan sedang menurut kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022 terdiri dari berbagai bidang industri seperti industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kayu dan furniture, kertas dan percetakan, serta logam dan besi. Industri logam dan besi banyak terdapat di Kecamatan Ceper, Karanganom, Polanharjo, Delanggu, Kemalang, Wonosari, Wedi dan Prambanan. Industri kertas dan percetakan

terdapat di Kecamatan Klaten Utara dan Klaten Tengah. Industri kayu dan furniture terdapat di Kecamatan Ceper, Trucuk, Cawas, Juwiring, Ngawen dan Klaten Utara.

Secara keseluruhan pengembangan industri kecil dan menengah dilakukan melalui Pola Klaster, dimana sampai dengan saat ini terdapat 11 (sebelas) Klaster yang terdiri dari : (1) Klaster Batik yang tersebar di Kecamatan Bayat, Kalikotes, Kemalang, dan Prambanan; (2) Klaster Lurik yang tersebar di Kecamatan Bayat, Cawas, Pedan, Trucuk, Juwiring dan Karangdowo; (3) Klaster Konveksi yang tersebar di Kecamatan Wedi, Ngawen, Jogonalan, Pedan, Karanganom dan Wonosari; (4) Klaster Logam yang tersebar di Kecamatan Ceper, Karanganom, Polanharjo, Delanggu, dan Wonosari; (5) Klaster Keramik yang tersebar di Kecamatan Wedi dan Bayat; (6) Klaster Makanan Olahan yang tersebar di Kecamatan Wedi, Jogonalan, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, dan Kemalang; (7) Klaster Lereng Merapi di Kecamatan Kemalang; (8) Klaster Mebel tersebar di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Utara dan Juwiring; (9) Klaster Desa Wisata tersebar di Kecamatan Prambanan, Ngawen, Wedi, Cawas, Bayat, Polanharjo, Tulung, Karangnongko, Kebonarum dan Kemalang; (10) Klaster Handycraft tersebar di Kecamatan Ceper, Klaten Utara, Klaten selatan, Juwiring, Wonosari, Bayat, Pedan, Kemalang, Karangnongko dan Polanharjo; (11) Klaster Minapolitan yang tersebar di Kecamatan Karanganom, Tulung, Polanharjo, Klaten Selatan, Kebonarum dan Ngawen. Untuk sentra industri tembakau terdapat di Kecamatan Prambanan, Kemalang, Karangnongko, Manisrenggo, Kebonarum, Wedi, Klaten Selatan, Klaten Utara, Ngawen, Kalikotes, Tulung, Jatinom, Karanganom, Gantiwarno, Jogonalan, Trucuk, Karangdowo, Pedan, Wonosari dan Ceper.

Adapun perkembangan jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.22

Tabel 2.22
Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha
Tahun 2018-2022

Kelompok Industri		Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga	Investasi (Jutaan Rp)	Nilai Produksi (Jutaan Rp)
I	Industri Besar				
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)	90	7.607	337.874.160	1.742.048.134
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	49	5.110	250.955.188	1.157.048.530
Jumlah Sub I	2022	139	12.717	588.829.348	2.899.096.664
	2021	139	12.717	591.773.495	2.913.592.147
	2020	139	12.845	588.829.188	2.899.096.664
	2019	138	12.839	588.538.936	2.897.649.286

Kelompok Industri		Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga	Investasi (Jutaan Rp)	Nilai Produksi (Jutaan Rp)
	2018	137	12.832	588.244.960	2.896.201.908
II Industri Kecil, dan Menengah					
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)	17.606	71.661	546.177.519	2.277.622.656
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	17.092	69.605	446.074.985	1.861.496.473
Jumlah Sub II	2022	34.698	141.266	992.202.504	4.139.119.129
	2021	33.657	137.028	962.436.429	4.014.945.555
	2020	34.698	141.266	992.202.504	4.139.119.129
	2019	34.692	141.238	992.004.183	4.138.549.952
	2018	34.686	141.210	991.805.862	4.138.094.610
Jumlah Sub I + II	2022	34.837	153.983	1.581.031.852	7.038.215.793
	2021	33.796	149.745	1.554.209.924	6.928.537.702
	2020	34.837	154.111	1.581.031.692	7.038.215.793
	2019	34.830	154.077	1.580.543.119	7.036.199.238
	2018	34.823	154.042	1.580.050.822	7.034.296.518

Sumber: Disperinaker, Update Terakhir 16 Januari 2023.

Nilai produksi industri besar pada tahun 2021 sebesar Rp.2.913.592.147,- (dalam Jutaan Rp.) dengan jumlah unit sebanyak 139 unit, dan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp.2.899.096.664,- (dalam Jutaan Rp.) dengan jumlah unit usaha sebanyak 139 unit.

Sedangkan untuk industri kecil dan menengah pada tahun 2021 nilai produksinya sebesar Rp 4.014.945.555,- dengan jumlah unit usaha sebanyak 33.657 unit, sedangkan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 4.139.119.129,- unit usaha sebanyak 34.698 unit. Industri mebel dari sejumlah 1.322 unit usaha yang tergabung dalam klaster mebel yang memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) baru sedikit. Sehingga masih cukup banyak yang perlu difasilitasi dan di dorong untuk mendapatkan SVLK sebagai salah satu persyaratan ekspor mebel ke Eropa dan beberapa negara lainnya.

Di sisi lain, dari 34.830 IKM yang memiliki daya saing juga masih sedikit, sehingga masih diperlukan upaya untuk terus dapat meningkatkan daya saing bagi IKM di Kabupaten Klaten. Sehingga untuk menjaga keberlangsungan usaha dan produksi bagi Industri Kecil Menengah (IKM), berkurangnya alih transfer teknologi secara umum, produktivitas sentra industri menurun, terganggunya

supply bahan baku serta berkurangnya permintaan pasar diperlukan pelatihan industri kluster, pembinaan sentra-sentra industri daerah, perlunya diterapkan teknologi industri yang tepat guna serta peningkatan daya saing industri melalui fasilitasi SNI dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Adapun perkembangan perindustrian berdasarkan pertumbuhan dan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Klaten selama Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.23

Tabel 2.23
Pertumbuhan dan Kontribusi Industri Terhadap PDRB
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertumbuhan Industri	%	0,03	1,47	8,03	1,62	0,48
2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,19	34,50	37,79	37,69	37,69*)

Sumber: Disperinaker, Update Terakhir 16 Januari 2023.

*) angka sementara

Pertumbuhan industri di Kabupaten Klaten dari tahun 2018-2022 cenderung tetap walaupun di tahun 2019 meningkat, namun di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1). meningkatkan koordinasi pembangunan industri dengan dinas/lembaga lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan fiskal dan pembiayaan sektor industri; 2). implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); 3). perbaikan kemudahan perizinan, promosi investasi, dan fasilitasi pemberian insentif investasi; dan 4) penguatan daya beli masyarakat.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait urusan perindustrian untuk mendukung sasaran: Mengoptimalkan *sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi* dengan dukungan program, diantaranya:

- a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; dan
- b) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perindustrian adalah sebagai berikut:

- a) Belum pulihnya kondisi perindustrian akibat Pandemi Covid-19, pada tahun 2021 pertumbuhan industri 1,62%, dan pada tahun 2022 turun menjadi 0,48%;

- b) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB cenderung stagnan pada kisaran angka 37,70 pada tahun 2022;
- c) Masih rendahnya unit usaha mebel yang memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sehingga perlu difasilitasi dan didorong untuk mendapatkan SVLK sebagai salahsatu syarat ekspor mebel ke eropa; dan
- d) Masih rendahnya Industri Kecil Menengah (IKM) yang memiliki daya saing sehingga masih diperlukan upaya meningkatkan daya saing IKM.

Solusi:

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang perindustrian adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b) Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c) Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar; dan
- d) Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha IKM.

2) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lain yang peranannya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 di sektor perdagangan menyebabkan omset penjualan menurun dikarenakan banyaknya UMKM yang tutup dan tidak beroperasi lemahnya tingkat perlindungan konsumen. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan pedagang kaki lima beserta kelembagaannya. Hal ini dapat diantisipasi dengan fasilitasi pameran untuk produk UMKM, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih Cinta Produk Lokal, menerapkan Sistem Penjualan Sistem Online, fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha. Gambaran pasar menurut jenisnya disajikan pada Tabel 2.24.

**Tabel 2.24
Pasar Menurut Jenisnya
Tahun 2018–2022**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Toko Swalayan	Toko	556	573	604	705	759
2	Pasar Umum/Rakyat	Pasar	85	85	85	85	91

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Pasar Hewan	Pasar	12	12	12	12	10
4	Pasar Buah	Pasar	1	1	1	1	1
5	Pasar Sepeda	Pasar	4	4	4	4	1
6	Pasar Ikan	Pasar	1	1	1	1	0
7	Lain-Lain/Pasar Burung	Pasar	3	3	3	3	2
8	Pasar Klitikan	Pasar	1	1	1	1	1
	Jumlah		662	679	710	811	865

Sumber: DKUKMP, Update Terakhir 12 Januari 2023.

Disamping itu dari sejumlah 51 pasar tradisional milik Pemerintah Daerah masih banyak yang belum direvitalisasi sampai dengan tahun 2021 baru 20 pasar (39,21 % dari 51 pasar tradisional milik pemerintah daerah).

Adapun perkembangan perdagangan berdasarkan pertumbuhan dan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Klaten selama Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.25

Tabel 2.25
Pertumbuhan dan Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertumbuhan Perdagangan	%	4,17	4,31	-4,79	5,65	4,03
2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	16,48	16,17	15,38	15,55	15,26

Sumber: BPS, 2023.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait urusan perdagangan untuk mendukung sasaran: *Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi* dengan dukungan program, diantaranya:

- a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- b) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- c) Program Pengembangan Ekspor;
- d) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
- e) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perdagangan adalah sebagai berikut:

- a) Menurunnya cakupan pembinaan kelompok dan bina usaha informal mulai tahun 2021 hanya pada kisaran 1,99%, sementara peningkatan jumlah toko swalayan pada tahun 2022 naik sebanyak 7,66% (atau dari 705 unit usaha pada tahun 2021 menjadi 759 unit usaha tahun 2022) akan menjadi ancaman bagi toko klontong; dan
- b) Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif, dengan indikasi persentase pasar rakyat/tradisional yang direvitalisasi sampai dengan tahun 2021 baru 20 pasar (39,21 % dari 51 pasar tradisional milik pemerintah daerah).

Solusi:

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang perdagangan adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah; dan
- b) Revitalisasi pasar-pasar tradisional milik pemerintah daerah.

3) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan

Luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 70.152 Km². Pada Tahun 2021 berdasarkan pemakaian di lahan pertanian untuk penggunaan lahan sawah 31.708,4 Ha dan untuk lahan bukan sawah sebesar 6.573,2 Ha. Sedangkan untuk lahan bukan pertanian seluas 31.870,4 Ha. Menurut sistem penggunaan air di Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa sawah dengan sistem pengairan teknis seluas 18.628,5 Ha, sistem pengairan setengah teknis seluas 9.627,16 Ha; sistem pengairan sederhana seluas 1.991,6 Ha, serta sistem tadah hujan seluas 1.615,7 Ha. Kondisi Lahan Pertanian Menurut Kecamatan Tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.26

Tabel 2.26
Lahan Pertanian dan Luas Wilayah Kecamatan
di Kabupaten Klaten Tahun 2021 (Ha)

No	Kecamatan	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian	Luas Wilayah
		Sawah	Bukan Sawah		
a	b	d	c	e	f
1	Prambanan	1.214,2	11,7	1.383,6	2.609,5
2	Gantiwarno	1.607,2	155,0	882,3	2.644,5
3	Wedi	1.538,7	18,0	1.069,0	2.625,7
4	Bayat	807,9	784,1	2.617,8	4.209,8
5	Cawas	2.135,1	46,0	1.412,4	3.593,5
6	Trucuk	1.869,2	2,0	1.597,4	3.468,6
7	Kalikotes	707,1	8,0	695,8	1.410,9
8	Kebonarum	701,7	2,0	337,9	1.041,6
9	Jogonalan	1.464,1	1,0	1.294,2	2.759,3
10	Manisrenggo	1.428,0	138,3	1.494,0	3.060,3
11	Karangnongko	722,8	850,5	1.375,9	2.949,2
12	Ngawen	1.016,3	8,0	821,2	1.845,5
13	Ceper	1.400,5	7,0	1.169,2	2.576,7
14	Pedan	833,5	444,3	722,1	1.999,9
15	Karangdowo	2.043,7	69,0	968,0	3.080,7
16	Juwiring	1.930,2	12,0	1.147,9	3.090,1
17	Wonosari	2.122,0	14,0	1.204,1	3.340,1
18	Delanggu	1.248,5	1,0	753,5	2.003,0
19	Polanharjo	1.730,0	92,0	699,6	2.521,6
20	Karanganom	1.621,7	11,0	929,0	2.561,7
21	Tulung	1.664,9	466,3	1.312,8	3.444,0
22	Jatinom	570,1	1.540,4	1.600,5	3.711,0
23	Kemalang	25,1	1.847,8	4.146,2	6.019,1
24	Klaten Selatan	760,4	2,9	745,8	1.509,1
25	Klaten Tengah	273,0	1,0	685,5	959,5
26	Klaten Utara	272,5	39,9	805,0	1.117,4
Jumlah 2021		31.708,4	6.573,2	31.870,4	70.152,0
2020		31.771,1	6.574,5	27.210,4	65.556,0
2019		31.863,0	6.578,0	27.115,0	65.556,0
2018		31.943,0	6.579,0	27.034,0	65.556,0
2017		33.021,0	6.581,0	25.954,0	65.556,0

Sumber: DKPP, Update Terakhir 30 Januari 2023.

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berubah dan cenderung mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk, dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan berhubungan dengan lahan sawah dan lahan kering. Adapun Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya Tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.27

Tabel 2.27
Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian
Menurut Kecamatan dan Penggunaannya
di Kabupaten Klaten Tahun 2021 (Ha)

No	Kecamatan	Dari Sawah dan Tegalan	Peruntukan Bangunan Tanah				Jumlah
			Perumahan	Industri	Perusahaan	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prambanan	5,86	4,55	1,12		0,19	5,86
2	Gantiwarno	0,33	0,33	-			0,33
3	Wedi	2,40	2,18			0,22	2,40
4	Bayat	0,56	0,56				0,56
5	Cawas	0,97	0,57			0,40	0,97
6	Trucuk	1,13	0,78	0,33		0,02	1,13
7	Kalikotes	0,96	0,96				0,96
8	Kebonarum	0,63	0,63				0,63
9	Jogonalan	2,93	2,93				2,93
10	Manisrenggo	1,82	1,82				1,82
11	Karangnongko	0,14	0,14				0,14
12	Ngawen	2,84	2,84				2,84
13	Ceper	2,66	1,12	1,35		0,18	2,66
14	Pedan	2,71	1,99	0,72			2,71
15	Karangdowo	0,22	0,21			0,01	0,22
16	Juwiring	4,52	2,33	2,19			4,52
17	Wonosari	4,83	3,65	1,18			4,83
18	Delanggu	5,95	5,49	0,46			5,95
19	Polanharjo	2,88	2,82		0,06		2,88
20	Karanganom	2,79	2,79				2,79
21	Tulung	1,02	0,87	0,15			1,02
22	Jatinom	2,67	2,64		0,03		2,67
23	Kemalang	25,78	0,36		25,42		25,78
24	Klaten Selatan	6,05	6,05				6,05
25	Klaten Tengah	4,35	4,14			0,21	4,35
26	Klaten Utara	3,73	3,35	0,38			3,73
	Jumlah	90,71	56,09	7,88	25,52	1,23	90,71

Sumber: DKPP, Update per 16 Januari 2023.

Sedangkan LP2PB (Lahan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 32.451 Ha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya peruntukan sawah lestari Daerah. Dengan adanya LP2PB tersebut, alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan dengan rata-rata perubahan lahan pertanian 56 Ha di luar LP2PB.

Untuk mengatasi perubahan lahan, dan mengganti produksi pertanian yang hilang akibat perubahan lahan pertanian dikembangkan pola pertanian terpadu, yang merupakan integrasi antara bidang tanaman pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan yang diharapkan kedepan bisa menjadi

Kawasan Agropolitan. Perkembangan luas tanam dan luas panen tanaman pangan Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.28

Tabel 2.28
Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan
Tahun 2018-2022

No	Jenis Komoditas	2018		2019		2020		2021		2022	
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)
1	Padi	76.029	73.627	74.964	73.962	73.266	70.916	73.654	73.313,30	73.802	72.067
2	Jagung	9.682	9.549	11.713	11.085	12.430	11.087	10.746	10.966,70	10.207	10.003
3	Kedelai	1.935	1.523	2.562	2.234	561	544	1.468	1.275	1.311,4	1.251,8
4	Kacang Tanah	1.224	1.067	955	909	855	876	710	713,90	696,7	630,8
5	Kacang Hijau	350	299	240	228	1978	1843	1043	1042,40	1110,6	1077
6	Ubi Kayu	822	685	435	395	1193	997	958	625,40	686,6	843,7
7	Ubi Jalar	24	20	26	21	27	25	21	19,50	46,9	12,9

Sumber: DKPP, Update per 16 Januari 2023.

Sedangkan Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.29

Tabel 2.29
Perkembangan Produksi dan Produktivitas
Tanaman Pangan Tahun 2018-2022

No	Jenis Komoditas	2018		2019		2020		2021		2022	
		Produksi (Ton)	Produktivitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kwt/ha)
1	Padi	426.028	57,87	380.268	51,41	449.093	63,33	480.024	65,58	475.550	65,26
2	Jagung	72.583	74,97	90.343	81,50	99.088	89,38	88.538	80,73	99.663	99,63
3	Kedelai	2.759	18,12	4.440	19,87	1.040	19,12	1.998	15,67	2.636	21,06
4	Kacang Tanah	1.784	14,58	1.527	16,79	1.158	13,21	1.087	15,23	1.297	20,55
5	Kacang Hijau	260	8,72	285	12,50	1.985	10,77	1.542	14,79	1.558	14,47
6	Ubi Kayu	32.224	392,11	9.778	224,99	27,296	273,81	15.155	242,32	23.816	282,28
7	Ubi Jalar	356	143,55	251	119,28	333	134,77	266	136,66	118	91,5

Sumber: DKPP, Update per 16 Januari 2023

Berdasarkan Tabel 2.28 dan Tabel 2.29 sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa rata-rata luas panen dibawah luas tanam. Hal ini disebabkan

karena adanya puso dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), terutama Wereng Batang Coklat (WBC), Tikus, Penggerek Batang dan Sundep. Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi pada tahun 2022 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021. Sedangkan Produksi Perkebunan Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.30

Tabel 2.30
Produksi Perkebunan Tahun 2018-2022

No.	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tembakau Rajangan	1.147,27	1.750,30	1,558,79	1567,45	1601,16
2	Tembakau Asepan	1.037,05	2.595,30	2.308,72	1270,83	1307,68
3	Tembakau Vorstenland	135.535	55.144	-	-	-
4	Kelapa Dalam	3.976,64	4.048.189	4.322,36	3674,01	3905,5
5	Kelapa Hibrida	49.073	29.340	29,94	26,95	35,93
6	Kelapa Deres	87.149	87,15	78,84	63,07	80,84
7	Kopi Arabica	43,32	43.320	162,20	145,98	169,25
8	Kopi Robusta	9,82	9,82	12,94	36,46	36,7
9	Cengkeh	36,5	36,5	49,75	237,73	29,95
10	Lada	9,78	11,4	17,70	19,50	19,5
11	Tebu	3.258,9	3.195,97	2.902,92	2.882,67	2.484,93

Sumber: DKPP, Update per Januari 2023.

Berdasarkan Tabel 2.30 sebagaimana tersebut di atas, komoditas andalan dan unggulan adalah Tembakau Rajangan produksi tertinggi dicapai pada Tahun 2019 sebesar 1.750,30 Ton dan Tembakau Asepan produksi tertinggi dicapai pada Tahun 2019 sebesar 2.595,30 ton. Sedangkan populasi ternak pada tahun 2018–2022 disajikan pada Tabel 2.31

Tabel 2.31
Populasi Ternak Tahun 2018-2022

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sapi Potong	100,259	102.431	104.312	105.734	70.559
2	Sapi Perah	6,284	6.433	6.807	6.783	4.618
3	Kambing	9,596	101.402	105.782	108.932	97.114
4	Domba	45,204	46.963	47.562	51.278	49.947
5	Ayam Bukan	2,245,443	2.532.676	2.109.668	2.789.664	3.531.257

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Ras					
6	Ayam Pedaging	2,475,187	3.896.788	2.489.800	3.268.129	3.867.566
7	Ayam Petelur	746,422	832.764	900.342	784.621	804.568
8	Itik	425,473	430.329	397.012	213.877	267.528
9	Burung Puyuh	519,566	535.244	363.563	327.829	427.829

Sumber: DKPP, Update per 16 Januari 2023.

Berdasarkan Tabel 2.31, hal yang menjadi catatan khusus pada tahun 2022 adalah adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berakibat populasi sapi potong, sapi perah, kambing, dan domba turun drastis dibanding tahun 2021. Sebaliknya untuk populasi ayam bukan ras, ayam pedaging, ayam petelur dan burung puyuh mengalami peningkatan. Sedangkan produksi susu, daging sapi potong dan telur pada Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.32

Tabel 2.32
Produksi Susu, Daging, dan Telur
Tahun 2018-2022

No	Jenis	Produksi (Lt/Kg/Butir)				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Susu (Liter)	4.266.718	4.978.442	4.456.373	4.630.000	4.547.617
2	Daging Sapi Potong (Kg)	2.643.076	2.775.643	2.649.317	2.267.819	2.170.370
3	Telur (Butir)	108.782.824	154.784.416	154.567.112	123.875.702	135.356.460

Sumber: DKPP, Update per 16 Januari 2023.

Berdasarkan Tabel 2.32 sebagaimana tersebut di atas perkembangan produksi susu, dan daging pada tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021, hal ini dipengaruhi kasus penyakit mulut dan kuku (PMK). Sedangkan pada tahun 2022 produksi susu turun menjadi 4.547.617 liter dibanding tahun 2021 (atau turun 1,81%), produksi daging turun menjadi 2.170.370 kilogram dibanding tahun 2021 (atau turun 4,49%), dan produksi telur naik sebanyak 135.356.460 butir dibanding tahun 2021 (atau naik 8,48%).

Kelautan dan Perikanan

Sumber daya air yang melimpah di Kabupaten Klaten mendorong petani dan masyarakat untuk berbudidaya ikan. Areal objek perikanan di Kabupaten Klaten dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu kolam, sawah, keramba, waduk, sungai dan genangan air. Adapun luas areal objek perikanan di Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel 2.33

Tabel 2.33
Luas Areal Obyek Perikanan dan Jenisnya
Tahun 2018-2022

Tahun	Kolam	Sawah	Keramba	Waduk	Sungai	Genangan Air	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2018	42,60	12,25	1,61	180	178,90	1.737,79	2.153,15
2019	46,27	0	0,314	180	178,90	1.737,79	2.143,27
2020	46,27	0	0,314	189	178,90	1.737,79	2.152,27
2021	46,27	0	0,31	190	178,90	1737,79	2.153,27
2022	46,27	0	0,31	190	178,90	1737,79	2.153,27

Sumber: DKPP, Update per Januari 2023.

Luas areal obyek perikanan dan jenisnya di Kabupaten Klaten pada tahun 2021 dan 2022 seluas 2.153,27 ha, Tingkat konsumsi ikan pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 21,88 Kg/kapita/Tahun. Adapun perkembangan produksi perikanan dan konsumsi ikan Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.34

Tabel 2.34
Perkembangan Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Produksi benih ikan	Ekor	132.814.750	137.635.312	109.000.000	113.986.913	92.923.284
Produksi perikanan (budidaya)	Ton	26.680,87	28.229,38	27.603,83	30.109,31	30.300,49
Produksi perikanan (tangkap)	Ton	516	153	184	311,82	372,86
Konsumsi ikan	kg/kapita/tahun	19,18	20,04	20,28	21,88	21,88

Sumber: DKPP, Update per Januari 2023.

Perkembangan Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan sebagaimana Tabel 2.34, Pemerintah Kabupaten Klaten menaruh perhatian besar terhadap tingkat kesejahteraan nelayan, yakni dengan meningkatkan cakupan bina kelompok nelayan. Pokdakan (Kelompok Budidaya Ikan) pada tahun 2022 sebanyak 299 Pokdakan.

Perkembangan sektor pertanian dan perikanan berdasarkan pertumbuhan dan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Klaten selama Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.35

Tabel 2.35
Pertumbuhan dan Kontribusi Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertumbuhan pertanian dan perikanan	%	2,21	0,52	2,12	1,14	1,61
2	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	%	11,36	10,50	10,93	10,45	10,08

Sumber: BPS Kabupaten Klaten. Update Data Terakhir Per 1 Maret 2023.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan untuk mendukung sasaran: *Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi* dengan dukungan program, diantaranya:

- a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- c) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
- d) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- e) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- f) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- g) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- h) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; dan
- i) Program Penyuluhan Pertanian.

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a) Luas lahan pertanian semakin menurun setiap tahunnya, karena beralih fungsi menjadi lahan terbangun/ lahan bukan pertanian;
- b) Menurunnya populasi sapi potong, sapi perah, domba, dan kambing karena adanya wabah penyakit Mulut dan Kuku (PMK);

- c) Menurunnya produktivitas padi dari 480.024 ton pada tahun 2021 menjadi 475.550 ton di tahun 2022;
- d) Menurunnya produksi bibit ikan dari 113.986.913 ekor pada tahun 2021 menjadi 92.923.284 ekor pada tahun 2022;
- e) Belum terpenuhinya standar minimal berupa sarana prasarana dan sumberdaya manusia pendukung di Agro Techno Park (ATP) Humo sebagai pusat atau pilot project pengembangan konsep pertanian terpadu, agrowisata dan agropolitan, sehingga konsep tersebut belum dapat diaplikasikan dan dilaksanakan di lapangan atau di kawasan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan;
- f) Belum optimalnya cakupan bina kelompok nelayan yang capainnya tetap selama lima tahun terakhir yaitu sebanyak 6 kelompok nelayan; dan
- g) Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di kalangan masyarakat, tingkat konsumsi ikan pada tahun 2022 sebesar 21,88.%.

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan pertanian adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian untuk mewujudkan penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan;
- b) Peningkatan penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas-varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan peningkatan intensifikasi dan diversifikasi hasil – hasil pangan;
- c) Menekan penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (*back to nature*);
- d) Penciptaan sinergitas antara program pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan; dan
- e) Peningkatan pembinaan kepada kelompok nelayan meliputi pembinaan kualitas bibit ikan, pelatihan pengolahan hasil perikanan dan pembuatan pakan ikan.

4) Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan: pada tahun 2020 sebanyak Rp.8.530.240.214,- dan pada tahun 2021 menjadi sebanyak Rp.8.804.783.428,- (atau naik sebanyak 3,21%). Pada tahun 2022 menjadi sebanyak Rp. 14.452.269.721,- (atau naik sebanyak 64,14%). Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata, selama ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan mendorong partisipasi masyarakat di bidang pariwisata dan memperbaiki regulasi kebijakan pengembangan kepariwisataan Daerah. Salah satu upaya peningkatan yang

dilakukan dengan perbaikan obyek wisata dan menarik sebanyak mungkin pengunjung.

Perkembangan jumlah obyek wisata dan pengunjung di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.36

Tabel 2.36
Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Obyek Wisata (obyek)	Pengunjung (orang)		Lama Tinggal (hari)		Rata-rata Pengeluaran (Rp.000)	
		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2018	82	2.483.945	222.373	1	1	1.000	2.000
2019	82	3.884.024	183.559	1	1	1.000	2.000
2020	82	1.399.167	22.199	1	1	900	1.500
2021	82	1.632.548	463	1	1	Na	Na
2022	89	4.777.338	60.461	1	1	1.000	1.500

Sumber: DISBUDPORAPAR, Update per 15 Januari 2023.

Berdasarkan Tabel 2.36 sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung obyek wisata pada tahun 2018-2022 mengalami kenaikan dan didominasi oleh wisatawan nusantara, sedangkan wisatawan mancanegara relatif lebih sedikit karena wisatawan mancanegara lebih banyak berkunjung ke Candi Prambanan. Hal ini disebabkan adanya penataan di beberapa obyek wisata dan naiknya jumlah pengunjung pada beberapa perayaan seperti Maleman, Syawalan dan Yaqowiyu.

Sedangkan di sisi lain lama tinggal wisatawan Nusantara rata-rata hanya satu hari dan untuk wisatawan mancanegara rata-rata hanya 0,75 hari. Hal ini disebabkan kebanyakan para wisatawan, baik Nusantara maupun mancanegara hanya sekedar berkunjung di tempat obyek wisata saja dan lebih menyukai menginap di Yogyakarta ataupun Surakarta. Demikian juga dengan rata-rata pengeluaran relatif belum begitu besar, untuk wisatawan Nusantara hanya berkisar antara Rp. 350.000,- sampai Rp.1.000.000,- dan wisatawan mancanegara berkisar Rp.500.000,- sampai Rp.2.000.000,- Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.37

Tabel 2.37
Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD
Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD total (%)		4,03	2,59	3,12	4,13
Total PAD	395.884.244.135	311.648.401.655	329.963.261.898	300.013.085.037	349.607.225.927
PAD Sektor Pariwisata	8.668.908.216	12.569.036.829	8.530.240.214	8.804.783.428	14.452.269.721
Pajak	7.454.495.216	10.184.639.829	7.478.277.694	7.967.183.669	12.265.976.721
Pajak Hotel	1.114.743.863	1.330.988.059	730.525.400	889.869.463	1.302.383.278
Hotel Bintang 3	871.100.135	1.020.244.671	587.067.925	762.651.635	1.136.795.371
Hotel Melati/Motel	243.643.728	310.743.388	143.457.475	127.217.828	165.587.907
Pajak Restoran	5.385.531.695	7.121.660.015	6.270.989.397	6.786.815.356	9.933.095.026
Rumah Makan	1.838.547.695	2.073.823.349	1.916.032.221	2.777.678.048	4.418.592.021
Catering	3.546.984.000	5.047.836.666	4.354.957.176	4.009.137.308	5.514.503.005
Pajak Hiburan	954.219.658	1.731.991.755	476.762.897	290.498.850	1.030.498.417
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	206.144.658	318.541.880	19.419.537	23.754.600	346.457.502
Permainan Ketangkasan	224.998.625	550.467.500	222.192.310	145.883.750	278.295.615
Pajak Hiburan/Pertandingan Olahraga	523.076.375	862.982.375	235.151.050	108.790.500	356.336.000
Pajak Panti Pijat, Spa, Fitnes Center				12.070.000	49.409.300
Retribusi	1.214.413.000	2.384.397.000	1.051.962.520	837.599.759	2.186.293.000
Retribusi Objek Wisata	1.214.413.000	2.384.397.000	1.051.962.520	837.599.759	2.186.293.000

Sumber: DISBUDPORAPAR, Update per 15 Januari 2023.

Berdasarkan Tabel 2.37 sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2021 sebanyak Rp.8.804.783.428,- pada tahun 2022 menjadi sebanyak Rp. 14.452.269.721,- (atau naik sebanyak 64,14%).

Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat dilihat antara lain dari produk wisata. Produk pariwisata di Kabupaten Klaten mencakup:

A. Jenis Kekayaan Wisata Alam

Kabupaten Klaten mempunyai banyak wisata alam maupun wisata buatan. Nama dan jenis obyek wisata serta lokasinya di Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel 2.38

Tabel 2.38
Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya
di Kabupaten Klaten Tahun 2022

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bukit Sidoguro	wisata pemandangan alam khas dataran tinggi dengan hiasan beberapa ornamen cantik yang cocok menjadi spot foto	Bayat
2	Makam Pandanaran	kompleks pemakaman, dan sebuah masjid tua yang sampai sekarang masih berfungsi dan digunakan untuk beribadah sholat para peziarah	Bayat
3	Bukit Cinta	spot pemandangan alam di perbukitan bayat	Bayat
4	Batu Putih	Kolam renang dan pemandangan alam	Bayat
5	Kawah Putih	Pemandangan dan spot selfy	Bayat
6	Desa Wisata Jarum	Desa wisata yang terkenal dengan sentra pembuatan batik dengan pewarna alami dan potensi kesenian budaya lainnya	Bayat
7	Desa Wisata Ngerangan	Kampung Tradisional Cikal Bakal Angkringan , kampung pecel, Joglo Tumiyono, Kampung Dolanan	Bayat
8	Makam Ki Ageng Gribig	Makam yang sekarang difungsikan sebagai tempat ziarah, yang biasanya ramai dikunjungi pada malam Jumat legi dan Jumat kliwon	Jatinom
9	Umbul Gendaren	Kolam renang alami	Jatinom
10	Jombor Permai	Rawa alami yang dipenuhi oleh wisata kuliner warung pemancingan air tawar	Jogonalan
11	Tirta Pelangi	Kolam renang buatan	Kalikotes
12	Pemandian Jolotundo	sebuah sumber mata air alami atau umbul yang keluar dari tanah	Karanganom
13	Tugu Waseso Dan Menoro Baskoro	Wisata Sejarah dan budaya peninggalan Ir. Soekarno	Karanganom
14	Candi Merak	peninggalan purbakala berupa kompleks percandian di Dukuh Candi, Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lokasi ini berada di sebelah barat laut dari wilayah Klaten, berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sleman. Candi Merak berdiri di atas lahan seluas 1.480 meter persegi. Kompleks candi terdiri atas satu bangunan induk dan tiga candi perwara. Candi ini didirikan sekitar abad ke-9-10, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram Kuno	Karangnongko
15	Umbul Brintik	kolam pemandian yang terbuka untuk umum	Kebonarum
16	Umbul Brondong	sebuah sumber mata air alami atau umbul yang keluar dari tanah dan terdapat pohon gayam yang rindang	Kebonarum
17	Umbul Pluneng Tirtomulyani	sebuah sumber mata air alami atau umbul yang keluar dari tanah	Kebonarum

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
18	Umbul Pluneng Tirtomulyono	sebuah sumber mata air alami atau umbul yang keluar dari tanah	Kebonarum
19	Kalitalang	Pemandangan Gunung Merapi dan Track Downhill	Kemalang
20	Girpasang	Wisata alam pemandangan gunung merapi dan desa terpencil dengan menggunakan gondola	Kemalang
21	Kolam Renang Tirta Indah	Kolam Renang buatan	Klaten Selatan
22	Kr Tirta Yudha Bakti	Kolam renang buatan	Klaten Selatan
23	Kolam Renang Moon	Kolam Renang Indoor	Klaten Utara
24	Kr Prilon Park	Kolam renang buatan dengan konsep resort	Klaten Utara
25	Pemandian Umbul Susuhan	wisata kolam pemandian untuk segala kalangan	Ngawen
26	Umbul Ponggok	mata air yang biasa dimanfaatkan sebagai pemandian dan snorkeling. ada dasar kolam terdapat ikan dan batu-batuan sehingga kolam Umbul Ponggok kerap digunakan sebagai lokasi foto dibawah air.	Polanharjo
27	Kampung Dolanan Sidowayah	Kampung dolanan sidowayah adalah salah satu objek wisata edukasi dan wahana outbond yang memadukan antara permainan outbond dengan permainan tradisional yang berada di kabupaten klaten.	Polanharjo
28	Umbul Siblarak	Umbul Siblarak adalah tempat wisata dengan kolam renang buatan yang dibangun di tengah kompleks persawahan	Polanharjo
29	Kolam Renang Bale Tirta	Kolam Renang Buatan dengan gaya seperti resort di bali, airnya berasal dari mata air alami	Polanharjo
30	Kolam Renang Tirta Kamandanu	Kolam renang buatan dengan standar nasional untuk event kejuaraan renang, mata airnya berasal dari sumber mata air alami	Polanharjo
31	Umbul Besuki	Kolam renang alami dengan konsep di pedesaan dan di tepi sungai dengan tempat yang rindang	Polanharjo
32	Umbul Kemanten	Kolam mata air alami berair jernih yang dikelilingi pepohonan tinggi ini adalah tempat populer untuk berenang.	Polanharjo
33	Umbul Sigedang - Kapilaler	sebuah sumber mata air alami atau umbul yang keluar dari tanah	Polanharjo
34	Kolam Renang Pancingan 100	Kolam Renang buatan, pancingan dan resto	Polanharjo
35	Rivermoon Tubing	Susur sungai menggunakan Ban dengan safety yang baik	Polanharjo
36	D'wangen/Ketjeh Resto	Resto dengan konsep dialiran sungai yang tidak deras	Polanharjo
37	Ponggok Ciblon	Kolam renang buatan dan terdapat resto	Polanharjo

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
38	Pusur Tubing	Wisata tubing di sungai pusur menyusuri sungai dengan alat tubing	Polanharjo
39	Kr Sumber Mina	Wisata kuliner dan tersedia kolam pemancingan dengan suasana pedesaan	Polanharjo
40	Kr Omah Iwak	Wisata Kuliner berupa rumah makan dan pemancingan dengan fasilitas kolam renang	Polanharjo
41	Kr Pancingan 47	Wisata memancing sebagai tempat menyalurkan hobi memancing dan tersedia fasilitas kolam renang dan rumah makan	Polanharjo
42	Kr Pancingan Luminto 1001	Wisata memancing, tempat makan, dan waterboom sebagai destinasi wisata dengan fasilitas lengkap	Polanharjo
43	Candi Plaosan	candi ini dibuat oleh Rakai Pikatan yang merupakan Raja dari Dinasti Syailendra untuk istrinya yang bernama Pramodyawardani. Spot terbaik untuk berburu sunset	Prambanan
44	Candi Sojiwan	Candi Sojiwan atau Candi Sajiwan adalah sebuah candi Buddhis yang terletak di desa Kebon Dalem Kidul, kecamatan Prambanan, kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sebuah ciri khas candi ini ialah adanya sekitar 20 relief di kaki candi yang berhubungan dengan cerita-cerita Pancatantra atau Jataka dari India.	Prambanan
45	Taman Wisata Candi Prambanan	candi Hindu yang terbesar di Indonesia dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya	Prambanan
46	Kolam Renang Galuh Tirtonirmolo	Kolam Renang buatan	Prambanan
47	Desa Wisata Bugisan	Desa wisata dengan potensi kesenian budaya sebagai produk utamanya dan terdapat situs sejarah berupa Candi Plaosan.	Prambanan
48	Desa Wisatakebondalem Kidul	Desa wisata budaya yang memiliki potensi budaya berupa situs peninggalan sejarah Candi Sojiwan, seni pertunjukan, batik, adat istiadat dan tradisi masyarakat	Prambanan
49	Makam Ronggowarsito	sebuah kompleks kuburan kuno seluas kurang lebih 100 meter persegi. Makam seorang tokoh pujangga dan peramal ulung yang sangat disegani oleh para raja-raja yang ada di tanah Jawa	Trucuk
50	Kolam Renang Tirta Kencana Miri	Kolam renang buatan	Trucuk
51	Obyek Mata Air Cokro (Omac)	Kawasan wisata yang lokasinya sejuk, bermata air jernih dan pemandangan alur sungai yang indah	Tulung
52	Umbul Pelem	wisata pemandian dan kolam renang umum	Tulung
53	Pesona Alam Tirta	Kolam Renang Buatan dengan gaya seperti resort di bali, airnya berasal dari mata air	Tulung

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
		alami	
54	Umbul Asri	Kolam renang buatan dan terdapat tempat pemancingan dan resto	Tulung
55	Aqua Regia	Kolam renang buatan	Tulung
56	Semego	Griyo dahar dan spot selfy kapal	Tulung
57	Umbil Nilo	Kolam renang alami	Tulung
58	Desa Wisata Melikan	Desa wisata melikan memiliki produk unggulan berupa gerabah dan keramik dengan ciri khas warna gerabah yang kehitaman	Wedi
59	Makam Perwito	Makam Ki Ageng Perwito, putera Syech Alim Akbar III yang bergelar Sultan Trenggono (Raja Demak Bintoro) yang merupakan senopati perang dari Kerajaan Pajang	Wonosari
60	Desa Wisata Ponggok	Umbul Ponggok, Umbil Besuki, Umbul Sigedang Kapilaler	Polanharjo
61	Desa Wisata Ngrundul	Umbul Brondong, Kerajinan Kemoceng Bulu Ayam, Bulusan	Kebonarum
62	Desa Wisata Tegalmulya	Sapu Angin, Gua Jepang	Kemalang
63	Desa Wisata Tlogowatu	Bendungan Karangkendal, Kali Manggal	Kemalang
64	Desa Wisata Pokak	Sendang Sinongko, Kolam renang, pemancingan	Ceper
65	Desa Wisata Malangjiwan	Umbul Brintik, Umbul Bethek, Sungai Tanon	Kebonarum
66	Desa Wisata Gununggajah	Bukit Cinta, Puncak Arjuna	Bayat
67	Desa Wisata Tanjung	Kerajinan Lukisan Payung	Juwiring
68	Desa Wisata Sidowayah	Umbul Sibirak, Kampung Dolanan OASE	Polanharjo
69	Desa Wisata Krakitan	Rowo Jombor, Taman Nyi Ageng Rakit, Bukit Sidoguro	Bayat
70	Desa Wisata Jimbung	Taman Bulusan, Jimbung Tebing Gebyok (JTG)	Kalikotes
71	Desa Wisata Nglinggi	Edupark Nglinggi, Pemancingan, Desa Damai	Klaten Selatan
72	Desa Wisata Karangnongko	Candi Merak, Candi Karangnongko, Embung Gayam Sewu	Karangnongko
73	Desa Wisata Glagah	Kelompok Wanita Tani Susu, Edukasi Peternakan dan Perah Susu Sapi	Jatinom
74	Desa Wisata Pasung	Agrowisata Buah Tropis, Wisata Kuliner, Pemancingan	Wedi
75	Desa Wisata Mranggen	Umbul Kroman, Kali Tempur, Sendang Gotan, Embung	Jatinom
76	Desa Wisata Soropaten	Tugu Waseso, Menoro Baskoro	Karanganom
77	Desa Wisata Kupang	Bukit Wijil, Makam Religi, Wisata Kuliner	Karangdowo

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
78	Desa Wisata Manjungan	Umbul Susuhan	Ngawen
79	Desa Wisata Krikilan	Embung Krikilan, Camping Ground	Bayat
80	Desa Wisata Karangduren	Taman Jlungut	Karangnongko
81	Desa Wisata Karangasem	Embung Karangasem	Cawas
82	Desa Wisata Sidowarno	Tatah sungging wayang, Jemparingan, Kerajinan payet	Wonosari
83	Desa Wisata Kalikotes	Taman Hidroponik, Bumi Perkemahan, Mini Ka'bah	Kalikotes
84	Soko Alas	Kolam Renang, Resto	Polanharjo
85	Janti Park	Kolam Renang, Resto, Spot Selfi	Polanharjo
86	Candramaya	Kolam Renang, Resto	Tulung
87	Munggur Park	Taman Hiburan	Delanggu
88	Kali Pancur	Kolam Renang	Ceper
89	Kr Kwanen	Kolam Renang	Manisrenggo

Sumber: DISBUDPORAPAR, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Berdasarkan Tabel 2.38, jumlah Obyek Wisata (OW) di Kabupaten Klaten sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) lokasi obyek wisata, dan tersebar di beberapa kecamatan, serta jenis wisatanya pun sangat beragam. Sehingga potensi ini perlu dijaga dan dikembangkan untuk meningkatkan daya saing daerah.

B. Jenis Kekayaan Wisata Budaya

Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain: Candi Plaosan, Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Asu (Sona), Candi Sojiwan, Candi Merak, Candi Karangnongko, Candi Sewu, Masjid Jimbung, Masjid Golo, Masjid Jawi, Makam Syech Domba, Makam Syeh Kewel, Makam Ki Ageng Gribig, Makam R Ng. Ronggowarsito, Situs Kaliworo, dan Situs Wonoboyo, Makam Sunan Pandanaran, dan Makam Kyai Mlati.

C. Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Klaten diantaranya: Monumen Juang 45 Klaten, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula Jawa Tengah di Jogonalan, Monumen Patung Kemerdekaan Soekarno, Goa Jepang dan Pesanggrahan Pakubuwono di Deles.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait urusan pariwisata untuk mendukung sasaran: *Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi* dengan dukungan program, diantaranya:

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 2) Program Pemasaran Pariwisata;
- 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pariwisata di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, serta dari sebanyak 89 jumlah obyek wisata masih didominasi wisatawan lokal;
- b) Rata-rata lama tinggal Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) hanya 1 (satu) hari; dan
- c) Belum terbentuknya kelembagaan ekonomi kreatif, rencana induk pembangunan ekonomi kreatif, pendataan ekonomi kreatif serta fasilitas sarana prasarana pendukung ekonomi kreatif.

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata; dan
- b) Peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

5) Meningkatnya Investasi Daerah

Investasi daerah merupakan instrumen utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dalam pengelolaan potensi investasi daerah agar memiliki daya tarik dan daya saing yang kompetitif. Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatkan investasi daerah upayakan yang dilakukan adalah dengan mendorong peningkatan dan pertumbuhan sektor unggulan ekonomi Daerah. Ukuran keberhasilan meningkatnya investasi daerah diukur dengan indikator: 1) Persentase peningkatan investasi PMDN, dan 2) Persentase peningkatan investasi PMA. Adapun capaian sasaran: *Meningkatkan Investasi Daerah* disajikan pada Tabel 2.39

Tabel 2.39
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatkan Investasi Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9) *100
1	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	733	97	-64	50	158	316,00	50	156,00
2	Persentase Peningkatan Investasi PMA	319	272	-59	1	139	13.900	5	1.340

Sumber: DPMPTSP, Update Terakhir 12 Januari 2023.

Capaian sasaran: Meningkatkan Investasi Daerah yang diukur dengan indikator: persentase peningkatan investasi PMDN, dan persentase peningkatan investasi PMA sebagaimana Tabel 2.39 di atas, dapat diuraikan sebagai-berikut:

Kondisi perkembangan perekonomian Kabupaten Klaten diukur dari berbagai variabel makro seperti PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi. Kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) sangat mempengaruhi kondisi perkembangan perekonomian, dan sebagai gambaran perkembangan jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022, disajikan pada Tabel 2.40

Tabel 2.40
Jumlah Investasi PMA dan PMDN
Tahun 2018-2022

Tahun	Penanaman Modal Asing				Penanaman Modal Dalam Negeri		
	Nilai Investasi (US\$)	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Kenaikan / Penurunan (%)	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Kenai kan/Pe nurunan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2018	3.091.400	41.211.500.000	39	-70	229.788.500.000	67	27
2019	11.490.893	160.872.497.498	15	272	1.914.915.766.292	870	733
2020	4.721.429	66.100.000.000	5	-59	698.896.464.253	4743	-64
2021	19.794.968	277.129.545.937	18	319	1.377.467.139.785	3984	97
2022	44.066.045	660.990.668.832	23	139	3.549.341.388.731	6273	158

Sumber: DPMPTSP, Update Terakhir 12 Januari 2023

Berdasarkan Tabel 2.40 sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah nilai investasi PMDN maupun PMA selama tahun 2018-2022 bersifat fluktuatif, pada tahun 2021 nilai investasi PMA sebesar Rp 277.129.545.937,00, tahun 2022 naik menjadi sebesar Rp 660.990.668.832,00, atau naik 139%. Begitu juga dengan pada tahun 2021 nilai investasi PMDN sebesar

Rp.1.377.467.139.785,- pada tahun 2022 naik menjadi sebesar Rp.3.549.341.388.731,- (naik 158%). Hal ini disebabkan oleh iklim usaha yang kondusif, fasilitas dan infratraktur investasi yang memadai, ketersediaan tenaga kerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal/investasi. Penanaman modal/investasi tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Perkembangan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.41

**Tabel 2.41
Perkembangan Realisasi PMDN
Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Satuan	PMDN				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	67	870	4743	3.984	6.237
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	1.793	16.772	12.980	32.845	38.441
3	Nilai Investasi (Rp. 000)	Rp.	229.788.500	1.914.915.766.	698.896.464	1.377.467.139.785	3.549.341.388.731

Sumber: DPMPTSP, Update Terakhir 12 Januari 2023

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Perkembangan investasi PMA di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 bersifat fluktuatif. Adapun perkembangan PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.42

**Tabel 2.42
Perkembangan Realisasi PMA
Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Satuan	PMA				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	39	15	5	18	23
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	561	2.087	59	4153	6.804
3	Nilai Investasi	Rp	41.211.500.000	160.872.497.498	66.100.000.000	277.129.545.937	660.990.668.832

Sumber: DPMPTSP, Update Terakhir 12 Januari 2023.

Berdasarkan Tabel 2.41 dan Tabel 2.42, dapat dilihat dari jumlah unit usaha, jumlah serapan tenaga kerja, serta nilai investasi mengalami peningkatan di tahun 2022. Hal ini disebabkan mengeliatnya sektor investasi pasca Pandemi, serta adanya kemudahan perizinan berusaha bagi sektor menengah, mikro dan kecil serta adanya kebijakan penanaman modal berupa insentif dan disinsentif. Capaian kinerja DPMPTSP ini didukung dengan program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan penanaman modal di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya jaminan kepastian dan kenyamanan berinvestasi dan berakibat investor akan mengalami risiko investasi biaya tinggi (*high cost investation*) ditunjang adanya konflik antar urusan terutama urusan penanaman modal dengan kebijakan Lahan Sawah Dilindung;
- b. Belum tersedianya informasi dan fasilitasi terkait ketersediaan lahan terutama untuk investasi industri besar; dan
- c. Penyesuaian teknis pelaksanaan perizinan di daerah dengan regulasi dari pusat.

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Klaten memaksimalkan kinerja Satgas Percepatan Realisasi Investasi dalam bentuk fasilitasi permasalahan dan kendala yang dialami perusahaan dalam proses realisasi investasi;
- b. Implementasi kebijakan penanaman modal berupa insentif dan disinsentif;
- c. Kepastian tata ruang untuk para pelaku usaha terutama industri besar;
- d. Penguatan regulasi untuk menjamin kepastian dan kenyamanan berinvestasi;
- e. Penyusunan peta potensi dan peluang investasi;
- f. Memaksimalkan strategi promosi dan kerjasamainvestasi;
- g. Memaksimalkan Mal Pelayanan Publik; dan
- h. Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

6) Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah

Ukuran keberhasilan meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur Daerah diukur dengan indikator: 1) jalan dalam kondisi mantap, 2) drainase dalam kondisi baik, dan 3) irigasi Kabupaten dalam kondisi baik. Adapun capaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah: *Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah* disajikan pada Tabel 2.43

Tabel 2.43
Program Pendukung Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	90,86	86,02	90,08	91,06	91,11	100,05	91,86	99,18
2	Persentase drainase dalam kondisi baik	61,45	61,21	61,44	61,47	61,99	100,85	61,52	100,76
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	40,89	33,47	36,17	41,5	44,91	108,22	46,2	97,21

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Update Terakhir 16 Januari 2023.

Capaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah: “*Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah*” diukur dengan indikator: Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap, Persentase Drainase dalam kondisi baik, dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik sebagaimana Tabel 2.43 di atas, dapat diuraikan sebagai-berikut:

1) Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap

Pada tahun 2022 jalan dalam kondisi mantap sebesar 91,11% dari panjang jalan 715,89 km sedangkan total panjang jalan Kabupaten Klaten dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: jalan negara sepanjang 33,52 km, jalan provinsi sepanjang 41,36 km, dan jalan kabupaten sepanjang 715,89 km. Serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 menyatakan bahwa indikator yang harus diperhatikan dalam SPM Jalan Umum harus meliputi aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata dengan penjelasan sebagai-berikut:

- a. *Aksesibilitas*, dengan indikator tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.

- b. *Mobilitas*, dengan indikator tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan. Tingkat mobilitas jaringan jalan dilihat dari rasio antara jumlah total panjang jalan yang menghubungkan semua Pusat Kegiatan terhadap jumlah total penduduk Kabupaten Klaten dalam satuan km/10.000 jiwa. Angka mobilitas tahun 2022 sebesar 5,61 km/ 10.000 jiwa.
- c. *Keselamatan*, dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, tingkat keselamatan lalu lintas pada tahun 2021 hingga 2022 sebesar 99,80%.
- d. *Kondisi jalan*, dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Adapun perkembangan kondisi jalan di Kabupaten Klaten dapat disajikan pada Tabel 2.44

Tabel 2.44
Kondisi Jalan di Kabupaten Klaten
Tahun 2018-2022

Uraian	Status Jalan							
	Tahun							
	2022	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
	Nasional	Provinsi	Kabupaten					
I	Jenis Permukaan							
	Aspal/ Hotmix/ Lapen/ Sandsheet (km)	33,52	41,36	725,29	689,66	605,19	605,19	594,92
	Berbatu/ Macadam (km)							
	Hotmix (km)							
	Kerikil (km)			2,9	2,1	11,55	11,55	7,69
	Tanah / Jalan Belum Tembus (km)							
	Beton (km)			41,44	77,87	99,14	99,14	113,29
	<i>Jumlah I</i>	33,52	41,36	769,63	769,63	715,89		
II	Kondisi Jalan							
	Baik (km)	3,9	25,76	517,27	533,56	474,26	437,36	186,35
	Persentase (%)			67,20	69,33	66,25	61,09	26,03
	Sedang (km)	29,62	15,61	140,34	128,47	170,64	223,65	465,87
	Persentase (%)			18,23	16,69	23,84	31,24	65,08
	Rusak Ringan (km)			56,86	52,04	59,44	46,20	55,98
	Persentase (%)			7,39	6,76	8,3	6,45	7,82
	Rusak Berat (km)			55,16	55,56	11,55	8,68	7,69
	Persentase (%)			7,17	7,22	1,61	1,21	1,07
	<i>Jumlah II</i>	33,52	41,37	769,63	769,63	715,89	715,89	715,89
III	Kelas Jalan							
	Kelas I (km)							
	Kelas II (km)							
	Kelas III (km)							
	Kelas III A (km)		41,36					
	Kelas III B (km)	33,52						
	Kelas III C (km)			769,63	769,63	715,89	715,89	715,89
	Kelas IV (km)							
	Kelas Tidak Dirinci							
	<i>Jumlah III (km)</i>	33,52	41,36		769,63	715,89	715,89	715,89

Sumber: DPUPR, Update Terakhir 16 Januari 2023.

Dengan berlakunya SK Bupati Klaten Nomor 611.51/208 Tahun 2020 tentang status Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Klaten, yang semula ditetapkan sebanyak 361 ruas jalan dengan SK Bupati tersebut ditetapkan menjadi 338 ruas jalan dengan panjang jalan dari 769,63 km menjadi 715,89 km. Seiring dengan berlakunya SK Bupati tersebut, jumlah jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten juga mengalami perubahan kriteria. Jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten yaitu jembatan dengan panjang bentang minimal 4 meter. Adapun jumlah dan kondisi jembatan disajikan pada Tabel 2.45

Tabel 2.45
Kondisi Jembatan di Kabupaten Klaten
Tahun 2018-2022

Uraian		Status Jembatan				
		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a	Baik (buah)	308	311	200	202	6
	Persentase (%)	90,59	91,47	63,9	64,54	1,92
b	Sedang dan Ringan (buah)	29	29	113	110	281
	Persentase (%)	8,53	8,53	36,1	35,54	89,77
c	Rusak Berat/kritis (buah)	3	0	0	1	26
	Persentase (%)	0,89	0	0	0,32	4,15
<i>Jumlah</i>		340	340	313	313	313

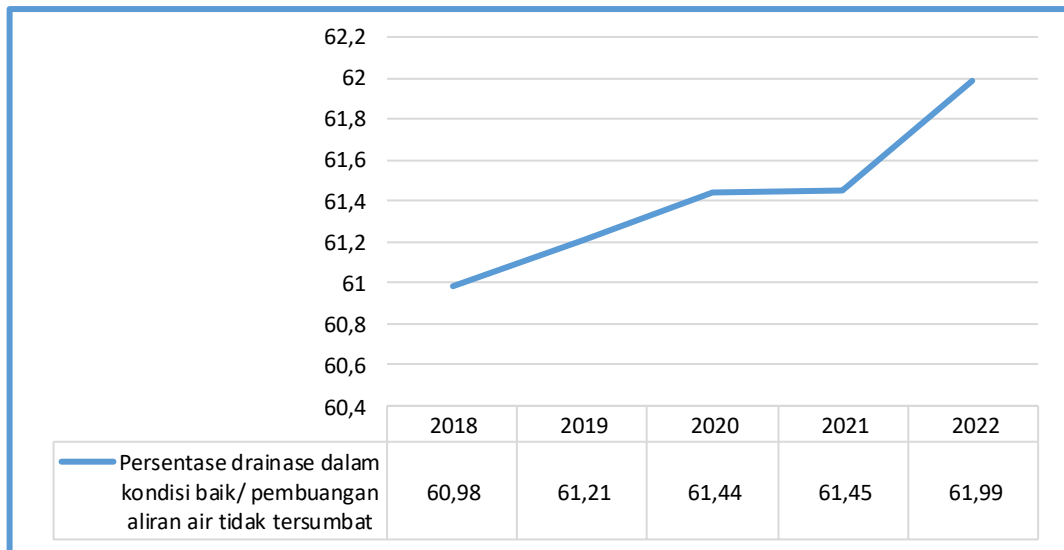
Sumber: DPUPR, Update Terakhir 16 Januari 2023.

Berdasarkan kondisi jembatan sebagaimana Tabel 2.45 di atas, kondisi jembatan pada tahun 2021: baik sebanyak 202 buah (atau 64,54% dari total jumlah jembatan), sedang dan ringan sebanyak 110 buah (atau 35,54% dari total jumlah jembatan), dan rusak berat sebanyak 1 buah (atau 0,32% dari total jumlah jembatan). Sedangkan pada tahun 2022 kondisi jembatan menjadi: baik sebanyak 6 buah (atau 1,92% dari total jumlah jembatan), sedang dan ringan sebanyak 281 buah (atau 89,77% dari total jumlah jembatan), dan rusak berat/kritis sebanyak 26 buah (atau 4,15% dari total jumlah jembatan).

2) Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

Persentase drainase dalam kondisi baik pada tahun 2018-2022 di Kabupaten Klaten menunjukkan peningkatan. Indikator drainase dalam kondisi baik dengan aliran air yang tidak tersumbat tahun 2021 sebesar 61,45%, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 61,99%. Saluran drainase ini merupakan salah satu bangunan pelengkap jalan yang memiliki fungsi mengalirkan air sehingga badan jalan tetap kering. Adapun perkembangan persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat selama tahun 2018-2022 disajikan pada Gambar 2.9

Gambar 2.9
Perkembangan Drainase dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2022



Sumber: DPUPR, Update Terakhir 16 Januari 2023.

Perkembangan drainase dalam kondisi baik berangsur-angsur ada peningkatan selama tahun 2018-2022, hal ini disebabkan adanya peningkatan jalan dan pemihakan anggaran. Kondisi drainase tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.46

Tabel 2.46
Kondisi Drainase di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022

Uraian		Kondisi Drainase				
		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a	Baik (Kilo Meter)	403,69	405,22	406,74	406,83	410,37
	Persentase (%)	60,98	61,21	61,44	61,45	61,99
b	Tidak Baik (kilo Meter)	258,32	256,79	255,27	255,18	251,65
	Persentase (%)	39,02	38,79	38,56	38,55	38,01
<i>Jumlah</i>		662,01	662,01	662,01	662,01	662,01

Sumber: DPUPR, Update Terakhir 16 Januari 2023.

Drainase dalam kondisi baik pada tahun 2022 sepanjang 410,37 KM (atau 61,99% dari total panjang drainase 662,01 KM), sedangkan drainase dalam kondisi tidak baik sepanjang 251,65 KM (atau 38,01% dari total panjang drainase 662,01 KM).

3) Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten mencakup luasan sebesar 29.713 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Berdasarkan kewenangan penanganan Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Klaten, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ada 2 (dua) DI, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. Sehingga Sungai di Kabupaten Klaten yang sering menimbulkan banjir (Sungai Dengkeng dan beberapa anak sungainya) merupakan kewenangan Pusat (Balai Besar Wilayah Sungai/BBWS) sehingga untuk penanganannya Klaten berkoordinasi dengan BBWS.

Pembangunan dan pemeliharaan prasarana sumber daya air selain digunakan untuk keperluan irigasi, juga diarahkan untuk penanganan banjir. Daerah rawan banjir di Kabupaten Klaten meliputi: Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, Gantiwarno, Juwiring, Karangdowo, Pedan, Prambanan, Trucuk, Wedi, dan Wonosari. Penanganan banjir dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, operasi irigasi, pengadaan sarana prasarana pengelolaan irigasi, pembangunan embung, pemeliharaan dan rehabilitasi embung, pemeliharaan dan penataan kawasan waduk, serta rehabilitasi kawasan sumber air. Selain itu juga dengan penguatan talud/tebing sungai, sesuai dengan kewenangan Kabupaten. Perkembangan Kondisi daerah Irigasi (DI) Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.47

Tabel 2.47
Perkembangan Kondisi Daerah Irigasi (DI)
Tahun 2018-2022

Uraian		Status Irigasi				
		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a	Baik (Ha)	9.499	9.945	10.747	12.149	13.344
	Persentase (%)	31,97	33,47	36,17	40,89	44,91
b	Sedang dan Ringan (Ha)	14.019	13.822	15.261	12.477	11.579
	Persentase (%)	47,18	46,52	51,36	41,99	38,97
c	Rusak Berat (Ha)	6.195	5.946	3.705	5.087	5.384
	Persentase (%)	20,85	20,01	12,47	17,12	18,12
	Jumlah (Ha)	29.713	29.713	29.713	29.713	29.713

Sumber: DPUPR, Update Terakhir 16 Januari 2023.

Pengelolaan irigasi dari tahun ke tahun menunjukkan trend peningkatan kondisi irigasi dalam kondisi baik. Hal ini mengingat pengelolaan sistem irigasi selalu memperhatikan kondisi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia yang wajib mendapat perhatian.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: *Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah* dengan dukungan program, diantaranya:

- a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- b) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- e) Program Pengembangan Permukiman;
- f) Program Penataan Bangunan Gedung;
- g) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; dan
- h) Program Penyelenggaraan Jalan;

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut;

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan jalan di Kabupaten Klaten, dilihat dari tingkat kerusakan jalan, pada tahun 2022 jalan rusak berat yang perlu ditangani sebesar 1,07% (7,69 km) serta 7,82% (55,98km) jalan dalam kondisi rusak sedang dan ringan yang perlu ditingkatkan kualitasnya;
- b. Masih terdapat jembatan dalam kondisi rusak berat /kritis tahun 2022 sebanyak 4,15% (25 unit) serta jembatan dalam kondisi rusak sedang dan ringan yang perlu segera mendapat penanganan sebanyak 89,77% (281 unit);
- c. Masih terdapat daerah irigasi dalam kondisi rusak berat sebanyak 18,12% (5.384 Ha) dan daerah irigasi kondisi rusak sedang dan ringan yang perlu ditingkatkan sebanyak 38,97% (11.579 Ha) di tahun 2022.

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Klaten, diantaranya:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan secara bertahap untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
- b. Pemenuhan secara bertahap kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
- c. Optimalisasi fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase).

7) Meningkatnya Capaian Universal Acces (100-0-100)

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Akan tetapi peningkatan populasi manusia dan aktivitasnya telah membawa dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air di alam. Air minum yang dikatakan layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Ukuran keberhasilan meningkatnya capaian *Universal Acces (100-0-100)* diukur dengan indikator: Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi). Adapun capaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah: *Meningkatnya Capaian Universal Acces (100-0-100)* disajikan pada Tabel 2.48

Tabel 2.48
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Capaian *Universal Acces (100-0-100)*

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase capaian <i>universal access</i> (kumuh, air minum dan sanitasi)	97,76	N/A	97,21	98,32	97,68	99,35	100	97,68

Sumber: DPUPR, dan Diperakim, Update Terakhir 16 Januari 2023.

Cakupan akses air minum di Kabupaten Klaten selama kurun waktu lima tahun terakhir (2018-2022) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Capaian tahun 2021 sebesar 92,62% meningkat menjadi 93,19% ditahun 2022 dengan perincian untuk wilayah perkotaan sebesar 93,50% dan wilayah perdesaan sebesar 84,98%. Perolehan capaian persentase capaian universal access sebesar 97,68% berdasarkan perhitungan rata-rata akumulasi cakupan akses Kumuh (99,86%), air minum (93,19%) dan sanitasi (100%). Adapun perkembangan cakupan akses Kumuh, air minum dan sanitasi di Kabupaten Klaten tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49
Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi
Tahun 2018-2022

No	Sektor	Skala	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Air Minum	Kabupaten	1.193.028	1.195.297	1.218.317	1.181.835	1.190.459
		%	89,15	91,14	81,77	92,62	93,19
		Perkotaan	464.778	483.169	487.910	462.103	1.125.360
		%	92,48	95,03	95,06	93,66	93,50
		Pedesaan	728.250	719.495	731.327	720.819	62.754
	%	87,15	88,71	89,81	92,10	84,98	
2	Sanitasi	Kabupaten	1.282.234	1.339.762	1.327.577	1.327.577	1.277.455
		%	95,82	100	100	100	100
		Perkotaan	485.515	502.572	513.253	493.395	1.203.610
		%	96,61	100	100	100	100
		Pedesaan	796.719	839.925	814.324	782.637	7.3845
	%	95,35	100	100	100	100	

Sumber : DPUPR, Terakhir 16 Januari 2023.

Sesuai RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, cakupan pelayanan air minum 100% ditargetkan tercapai pada tahun 2026. Untuk cakupan pelayanan sanitasi pada tahun 2022, Kabupaten Klaten sudah mencapai akses (dasar/ layak) 100%, dan ditargetkan untuk peningkatan dari akses layak menjadi akses aman air limbah domestik, yaitu fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke sistem terpusat (perpipaan) atau tangki septik yang disedot secara berkala dengan lumpur yang dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: *Meningkatnya Capaian Universal Access (100-0-100)* dengan dukungan program, diantaranya:

- a) Program Kawasan Permukiman;
- b) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- dan
- d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;

Permasalahan:

Terdapat permasalahan dalam pemenuhan akses air minum yaitu sulitnya mencari sumber air di daerah lereng Merapi yang mencakup Desa Tlogowatu, Desa Tegalmulyo, Desa Sidorejo, Desa Tangkil, Desa Kendalsari dan Desa Talun yang terletak di Kecamatan Kemalang. Kemudian ada wilayah yang sumber airnya berasa asin berada di Kecamatan Cawas (Desa Bogor, Desa Pogung), Kecamatan Bayat (Desa Krikilan, Desa Ngerangan), Kecamatan Juwiring (Desa Gondangsari), Kecamatan Karangdowo (Desa Tumpukan, Desa Demangan, Desa Tambak, Desa Mungging) dan Kecamatan Pedan (Desa Kalangan, Desa Kaligawe).

Solusi:

Upaya pemenuhan target terkait air minum dan sanitasi dilakukan melalui pengembangan layanan PDAM, optimalisasi dana desa dan alokasi dana desa, CSR, DAK, hibah air minum, maupun program berbasis masyarakat seperti Pamsimas, program Kotaku, Sanimas, USRI dan program lainnya. Untuk mendukung peningkatan akses sanitasi dari dasar ke layak dan mengarah ke aman, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya bantuan jambanisasi untuk masyarakat miskin, pengadaan truk tinja, pembangunan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jomboran, serta layanan lumpur tinja terjadwal yang akan segera direalisasikan.

8) Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang

Dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang, setidaknya harus memperhatikan empat hal yaitu : (1) penduduk dan sosial; (2) ekonomi; (3) lingkungan dan (4) teknologi.

1. Sosial

Jumlah penduduk dan proyeksi jumlah penduduk ke depannya mempengaruhi banyak hal, termasuk penyediaan perumahan dan fasilitas lainnya (sekolah, pasar, rumah sakit dll).

2. Ekonomi

Setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda. Pengembangan potensi ekonomi yang berbeda memiliki kebutuhan infrastruktur yang berbeda pula.

3. Lingkungan

Dengan pembangunan yang lebih terencana, maka kondisi lingkungan dapat lebih terjaga. Selain itu, perlu selalu diingat bahwa Indonesia terletak pada kawasan *ring of fire*, sehingga setiap daerah memiliki karakteristik kebencanaan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan mitigasi bencana yang berbeda pula untuk jenis bencana yang berbeda.

4. Teknologi

Perkembangan teknologi menyebabkan perilaku dan mobilitas manusia berubah.

Ukuran keberhasilan terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang diukur dengan indikator: Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang. Adapun capaian sasaran: Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang disajikan pada Tabel 2.50

Tabel 2.50
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	88,20		88,00	88,40	95,03	107,50	89,20	106,54

Sumber: DPUPR, Update Terakhir 16 Januari 2023.

Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang di Kabupaten Klaten sebesar 4,97% sehingga untuk kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang adalah 100% dikurangi 4,97% sama dengan 95,03%

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 telah disahkan. Penetapan RTRW ini akan segera ditindaklanjuti dengan penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), sebagai penjabaran operasional RTRW Kabupaten/ Kota. Pada aspek pengendalian tata ruang, dari tahun 2018-2022 menunjukkan trend penurunan simpangan pemanfaatan ruang dari 8,22 % di tahun 2021 menurun menjadi 4,97 % pada tahun 2022. Hal ini menjadi pertanda baik, bahwa kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang semakin baik.

Adapun perkembangan hasil Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.51

Tabel 2.51
Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang
Tahun 2018-2022

Uraian		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase simpangan pemanfaatan lahan pertanian terhadap total luas rencana lahan pertanian	6	0,23	0,23	0,235	0,228
2	Persentase simpangan pemanfaatan lahan pertanian terhadap total luas wilayah	5,98	0,1	0,1	0,095	0,104
3	Persentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman terhadap total luas rencana lahan permukiman	25,06	25	25	25	2,19
4	Persentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman terhadap total luas wilayah	15,82	11	11	11	0,97
5	Persentase simpangan pemanfaatan lahan Sempadan Sungai, mata air, dan Rel KA terhadap total luas rencana lahan sempadan sungai, mata air, dan Rel KA	61,36	12	12	12	25,62
6	Persentase simpangan pemanfaatan lahan sempadan sungai dan mata air terhadap total luas wilayah	11,9	1	1	1	0,69
	Rata-rata Simpangan (%)	21,02	12,12	12,12	8,22	4,97

Sumber: DPUPR, Update Terakhir 16 Januari 2023.

Mulai tahun 2022 Penghitungan Persentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman terhadap total luas rencana lahan permukiman dan Persentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman terhadap total luas wilayah didasarkan pada kebutuhan pola ruang dalam RTRW, sedangkan Persentase simpangan pemanfaatan lahan Sempadan Sungai, mata air, dan Rel Kereta Api terhadap total luas rencana lahan sempadan sungai, mata air, dan Rel Kereta Api, ada penambahan penghitungan simpangan sepadan Rel KA dan simpangan

sempadan sungai sehingga angka menjadi besar. Pada tahun 2021 sebesar 12%, dan pada tahun 2022 menjadi 25,62%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: **Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang** dengan dukungan program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Permasalahan:

Masih adanya simpangan pemanfaatan ruang (8,22%) di tahun 2021, dan menjadi sebesar 4,97% pada tahun 2022.

Solusi:

Masih tingginya simpangan pemanfaatan ruang, maka diperlukan adanya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang holistik-integratif, serta perlu peningkatan peran kelembagaan Forum Koordinasi Penataan Ruang Daerah (FKPRD).

9) Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalulintas Penyelenggaraan Angkutan

Ukuran keberhasilan terwujudnya meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan yang efektif dan efisien diantaranya diukur dengan indikator: Kinerja Lalu Lintas (*Level Of Service*). Adapun capaian sasaran: Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan disajikan pada Tabel 2.52

Tabel 2.52
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Kinerja Lalu Lintas (<i>Level Of Service</i>)	0,52	0,52	0,52	0,62	0,62	100	0,54	114,81

Sumber: Dinas Perhubungan, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Capaian sasaran: Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan diukur dengan indikator Kinerja Lalu Lintas (*Level Of Service*) sebagaimana Tabel 2.52 di atas, capaian sasaran indikator kinerja lalu lintas kabupaten/ kota sebesar 0,62 dan tingkat realisasi sebesar 100%.

Angka tersebut sudah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,62. Tercapainya target dan indikator pada sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan didukung oleh kualitas kerjasama antara bidang – bidang yang menyelesaikan pekerjaannya sesuai tugas pokok dan fungsi.

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus, dan angkutan publik. Perkembangan Fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 berdasarkan kebutuhan dan yang terpasang disajikan pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53
Sarana dan Prasarana Fasilitas Perlengkapan Jalan
Tahun 2018 – 2022

No	Jenis Rambu	Kebutuhan	Satuan	Terpasang					Total Terpasang	%
				2018	2019	2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rambu lalu lintas biasa	3.979	buah	100	227	227	0	98	3.533	77,31
2	Rambu RPPJ	200	buah	13	0	0	0	10	150	75,00
3	Rambu Tipe F	100	buah	5	0	0	0	6	49	49,00
4	Marka Jalan	34.965	M ²	9.925	465	5715	0	2650	5848	74,86
5	Traffic Light	40	Unit	0	2	0	0	0	31	93,94
6	Guardrail	3.000	Meter	468	200	104	0	48	3288	77,55
7	Paku marka/ mata kucing	97.125	Buah	0	0	0	0	0	1685	77,12
8	Traffic cone	500	Buah	0	0	0	0	0	40	8,00
9	Deliniator	10.000	buah	0	0	0	0	0	0	0
10	Cermin Tikungan	50	buah	10	30	22	0	15	100	47,62
11	Zona Selamat sekolah	50	buah	0	5	0	0	1	9	30,00
12	Lampu kedip	20	buah	0	6	0	0	0	11	42,31
13	Rambu elektronik	40	unit	0	0	0	0	0	8	61,54
14	Water Barrier	100	buah	26	20	20	0	0	66	34,55
15	Penerangan jalan umum	14.318	unit	0	0	0	523	38	5539	38,69

Sumber: Dinas Perhubungan, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Sedangkan perkembangan kondisi sarana perhubungan/transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik. Jumlah sarana angkutan (Umum dan Pribadi) disajikan pada Tabel 2.54

Tabel 2.54
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)
Tahun 2018-2022

No	Kendaraan	Terpasang				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mobil Barang	8.878	8.591	8.072	6.829	7.233
2	Mobil Bus:	495	525	488	433	456
	Umum:	384	408	391	399	397
	<i>Besar</i>	97	88	91	84	87
	<i>Sedang</i>	248	268	215	230	234
	<i>Kecil</i>	39	52	85	85	76
	Bukan Umum	111	117	97	34	59
3	Kendaraan Khusus / Alat Berat	13	24	10	17	8
	Jumlah	9.386	9.140	8.570	7.279	7.697

Sumber: Dinas Perhubungan, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan dengan dukungan program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perhubungan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengelolaan subterminal Tipe C, kondisi terminal yang dikelola di tahun 2022 rata-rata sebesar 75-80%;
- b. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan, terlihat dari capaian rambu lalu lintas biasa yang terpasang baru 77,31% dari total kebutuhan; traffic light baru 31 unit yang terpasang (93,94%) dari total kebutuhan; rambu RPPJ terpasang 150 unit dari 200 unit kebutuhan; rambu tipe F terpasang 49 unit (49%) dari 100 unit kebutuhan yang harus terpasang;

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan perhubungan diantaranya:

- a. Peningkatan perawatan subterminal type C menuju kondisi baik;
- b. Optimilisasi pemasangan perlengkapan jalan (marka jalan, APILL, rambu, guadril, cermin tikungan, lampu penerangan jalan umum);
- c. Peningkatan jumlah *Traffic Light ATCS* yang telah terkoneksi dengan *CCRoom*.

10) Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing

Mengacu Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan dirumuskan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Serta untuk mencapai tujuan pendidikan nasional didasarkan pada pendekatan 6 (enam) pilar strategis, yakni: 1). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2). Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 3). Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life-skill*), 4). Pendidikan Keaksaraan, 5). Pengarusutamaan Gender, dan 6). Peningkatan Kualitas Pendidikan.

Ukuran keberhasilan meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing diukur dengan indikator: Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Persentase Pemajuan Kebudayaan. Adapun capaian sasaran: Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing pada tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.55

Tabel 2.55
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,39	13,24	13,25	13,52	13,40	99,11	13,94	96,13
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,81	8,31	8,58	8,85	9,09	102,71	8,96	101,45
3	Persentase Pemajuan Kebudayaan	N/A	N/A	10,9	5	5	100	25	20,00

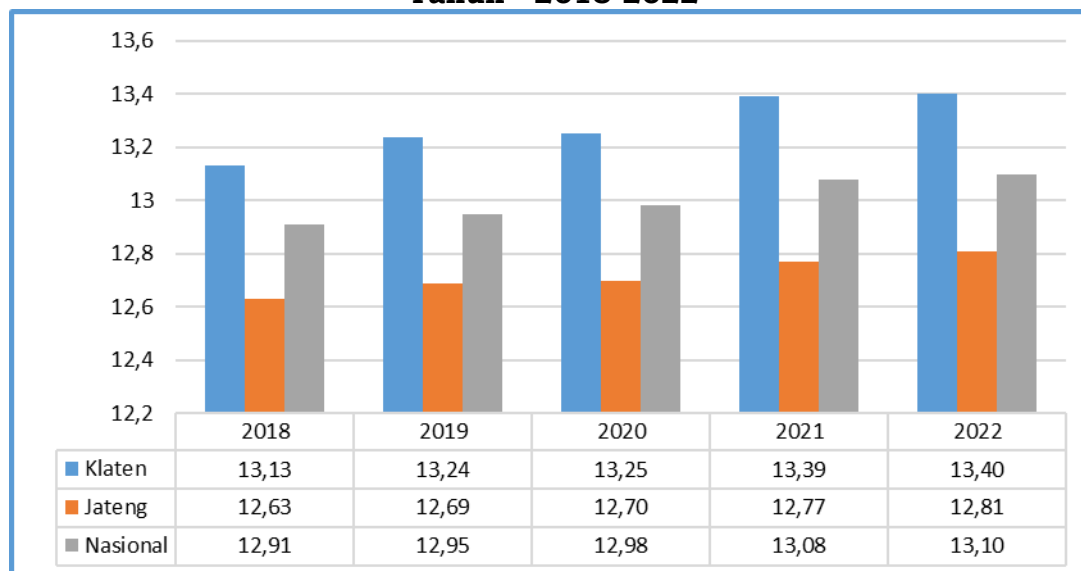
Sumber: BPS Jateng, Up date per 23 November 2022.

Capaian sasaran kinerja: Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing, pada tahun 2022, khusus indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagaimana Tabel 2.55 dapat dijelaskan sebagai-berikut:

a. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Adapun perkembangan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 disajikan pada Gambar 2.10

Gambar 2.10
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022



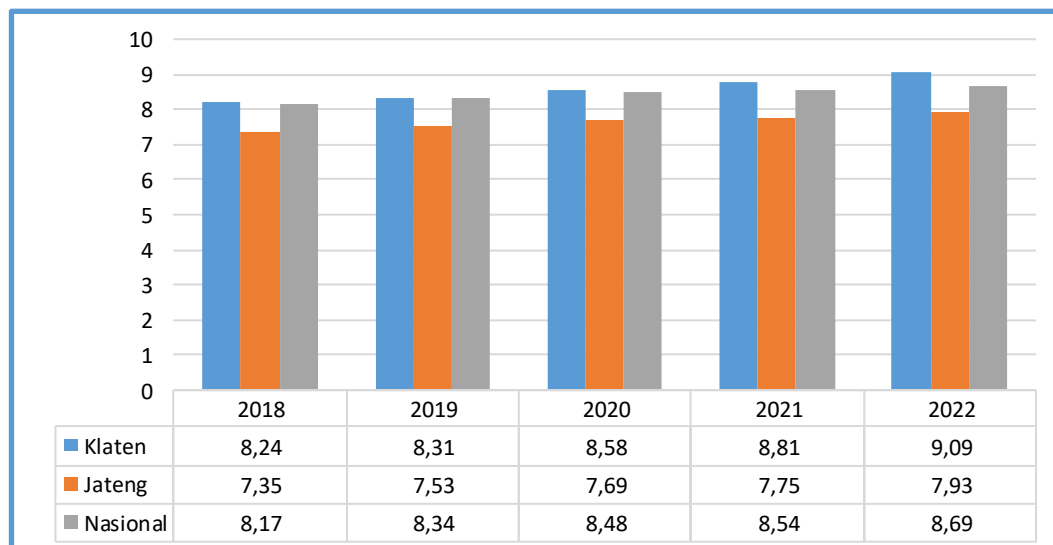
Sumber: BPS Jateng. Update Terakhir 23 November 2022.

Dari gambar tersebut di atas tampak bahwa pada Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klaten mulai tahun 2018 hingga tahun 2022 naik cukup signifikan, mulai 13,13 sampai 13,40, atau naik sebesar 0,27 poin. Capaian kinerja ini di atas rata-rata Jawa Tengah dengan Angka Harapan Lama Sekolah 12,81.

b. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years School (MYS)* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 3 tahun, sehingga lama pendidikan dasar selama 9 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Adapun perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 disajikan pada Gambar 2.11

Gambar 2.11
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Klaten, Jateng, dan Nasional
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, Update Terakhir 18 November 2022.

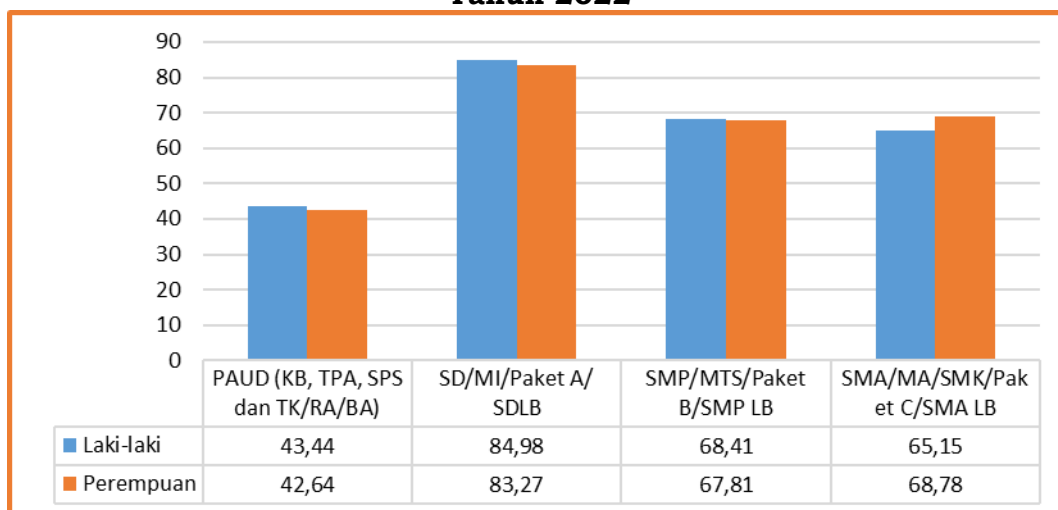
Dari gambar tersebut di atas tampak bahwa pada Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Klaten mulai tahun 2018 hingga tahun 2022 naik cukup signifikan, mulai 8,24 pada tahun 2018 sampai 9,09 pada tahun 2022, atau capaian kinerjanya di atas rata-rata Jawa Tengah maupun nasional.

Capaian sasaran kinerja: *Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing*, pada tahun 2022 sebagaimana tersebut di atas ditunjang beberapa indikator kinerja program pada urusan pendidikan, diantaranya:

a. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2017-2021 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2021 sudah mencapai 83,91%, naik menjadi 84,15% pada tahun 2022. Begitu juga dengan Jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B pada tahun 2021 sudah mencapai 72,11%, turun menjadi 68,12% pada tahun 2022 hal ini dipicu karena penduduk usia 13-15 tahun tidak semuanya berada di jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B. Sedangkan perkembangan APM menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin pada tahun 2022 disajikan pada Gambar 2.12

Gambar 2.12.
Perkembangan APM Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022



Update Terakhir 30 Januari 2023.

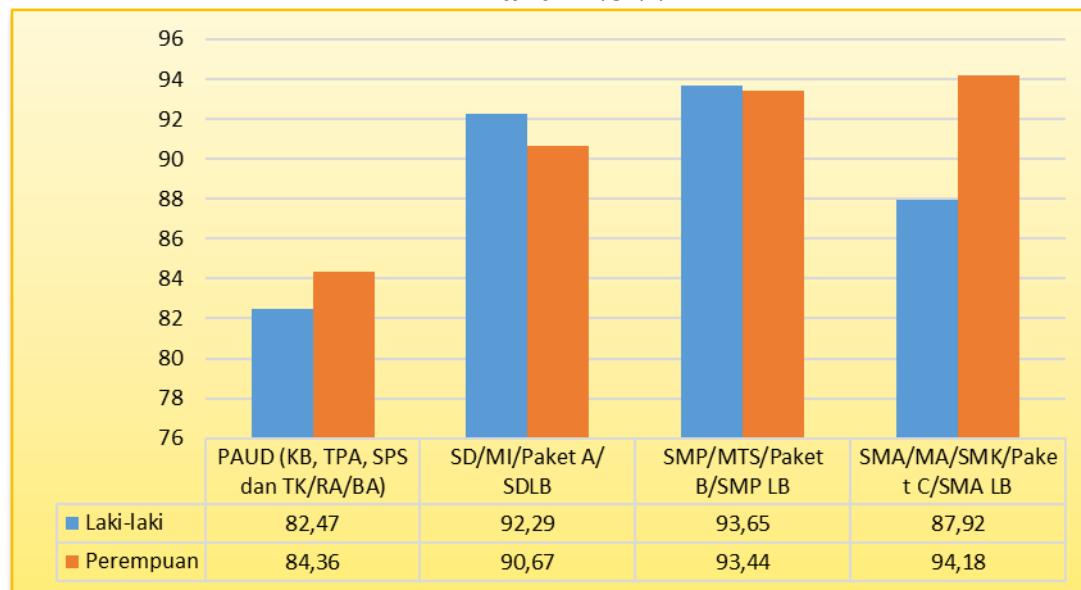
Berdasarkan Gambar 2.12, APM menurut jenjang Pendidikan dan jenis kelamin untuk semua jenjang pendidikan pada tahun 2022 APM perempuan lebih tinggi dibanding APM laki-laki kecuali jenjang SMA/MA/SMK/Paket C/SMA LB. APM PAUD (KB, TPA, SPS, dan TK/RA/BA) APM laki-laki lebih rendah dibanding APM perempuan, hal ini disebabkan anak usia 5-6 tahun yang berjenis kelamin perempuan lebih mempunyai kecenderungan untuk ingin sekolah PAUD. Sedangkan APM SD/MI/Paket A/SDLB APM laki-laki lebih tinggi dibanding APM perempuan. Sedangkan APM menurut jenjang Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B dan SMA/MA/SMK/Paket C/SMA LB, APM laki-laki lebih rendah dibanding APM perempuan, hal ini disebabkan anak usia 13-18 tahun anak laki-laki sudah mengenal dunia kerja, mereka ingin bekerja.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2018-2022 perkembangannya bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2021 mencapai 91,65%, namun pada tahun 2022 menjadi 91,50%. Begitu juga dengan jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B tumbuh dari 98,62% pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 menjadi 93,55%. Penurunan capaian kinerja di tahun 2022 belum sepenuhnya mencerminkan suatu hal yang negatif terhadap akses layanan dasar. Penurunan ini disebabkan anak usia sekolah dasar yang menempuh pendidikan di pondok pesantren, ada juga karena mengikuti orang tua yang merantau bekerja di luar daerah sehingga anak-anak tersebut tidak terdata pada layanan pendidikan dasar di Kabupaten Klaten. Namun juga diakui masih terdapat anak yang tidak sekolah karena berbagai alasan (anak berkebutuhan khusus, tidak mau sekolah, dan anak yang bekerja). Kondisi tersebut cukup mempengaruhi capaian kinerja layanan pendidikan dasar di Klaten. Sedangkan perkembangan

APK tahun 2022 menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin disajikan pada Gambar 2.13

Gambar 2.13
Perkembangan APK Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022



***Update Terakhir 30 Januari 2023.**

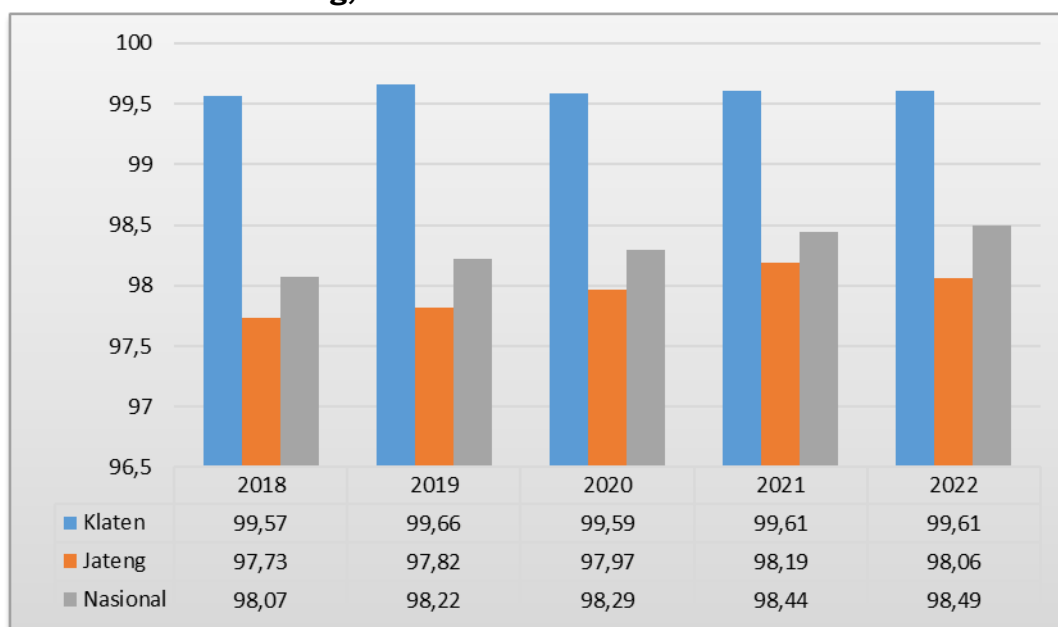
Berdasarkan Gambar 2.13, APK menurut jenjang Pendidikan dan jenis kelamin untuk semua jenjang pendidikan pada tahun 2022 APK perempuan lebih tinggi dibanding APK laki-laki kecuali SD/MI/SDLB/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B/SMP LB. APK PAUD (KB, TPA, SPS, dan TK/RA/BA) APK laki-laki lebih rendah dibanding APK perempuan, dan APK SMA/MA/SMK/Paket C/SMA LB, hal ini disebabkan anak usia 5-6 tahun yang berjenis kelamin perempuan lebih mempunyai kecenderungan untuk ingin sekolah PAUD dan untuk jenjang angka melanjutkan (AL) SMA/MA/SMK/Paket C/SMA LB lebih banyak.

c. Angka Melek Huruf

Indikator keberhasilan pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi angka buta huruf penduduk usia >15 Tahun. Beberapa langkah nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diantaranya dengan melakukan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.

Angka melek huruf pada penduduk usia lebih dari 15 Tahun dirumuskan dengan pengertian persentase penduduk usia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Adapun perkembangan angka melek huruf penduduk usia >15 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2018-2022 disajikan pada Gambar 2.14

Gambar 2.14
Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun Kabupaten Klaten,
Jateng, dan Nasional Tahun 2018-2022.



Sumber: BPS, Update Terakhir 21 Desember 2022.

Berdasarkan Gambar 2.14, Angka melek huruf pada penduduk usia lebih dari 15 Tahun posisi Klaten sudah di atas rata-rata Jawa Tengah maupun nasional penduduk yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya, dan hal ini terkait dengan mobilitas penduduk dan kondisi masyarakat.

Capaian kinerja *Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing* didukung dengan program:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program Pengembangan Kurikulum;
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- 4) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.

Permasalahan :

Urusan Pendidikan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan bagi anak usia dini, diukur dari capaian APK PAUD pada tahun 2021 mencapai angka 79,40%, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 83,38%;
- b. Pelaksanaan pendidikan dasar belum optimal, diukur dari capaian APM SD/MI/Paket A pada tahun 2021 sebesar 83,91%, pada tahun 2022 mencapai 84,14% dan jenjang Pendidikan SMP/MTs/paket B pada tahun 2021 sebesar 72,11%, sedangkan tahun 2022 turun menjadi 68,12%.
- c. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana layanan pendidikan sekolah dasar dalam kondisi layak, tahun 2021 sekolah SD/MI kondisi bangunan baik baru 71,36%, tahun 2022 mencapai 67,10%. Sedangkan sekolah SMP/ MTs dan

SMA/SMK/MA bangunan baik pada tahun 2021 sebesar 88,01%, tahun 2022 mencapai 82,70%; dan

- d. Belum optimalnya tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan basis kompetensi sesuai jenjang Pendidikan, dilihat dari guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV tahun 2021 baru 89,79%, sedangkan tahun 2022 mencapai 90,11%.

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan pendidikan dasar, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana layanan pendidikan, meliputi: rehab sedang/berat ruang kelas, maupun gedung sekolah, pengadaan sapsras laboratorium, ruang praktikum dan komputer;
- b. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pelaksanaan pelatihan dan *workshop* dalam rangka peningkatan kapasitas guru;
- c. Pengisian Kepala Sekolah dengan program guru penggerak;
- d. Meningkatkan fasilitas pendidikan kesetaraan.

Capaian sasaran kinerja: *Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing* pada tahun 2022, khusus indikator *Persentase Pemajuan Kebudayaan* dapat dijelaskan sebagai-berikut:

a) Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Kabupaten Klaten terkenal dengan seni dan budaya yang khas seperti seni tari, ketoprak, wayang, dan lainnya. Selama ini untuk meningkatkan kegiatan seni dan budaya serta kreativitas masyarakat di bidang seni dan budaya kegiatan pelestarian seni dan budaya tetap dilakukan. Selengkapnya perkembangan indikator Seni Budaya Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 dapat disajikan pada Tabel 2.56

Tabel 2.56
Perkembangan Kegiatan Seni Budaya Kabupaten Klaten
Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	event	31	40	7	1	5
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Lokasi	93	98	132	149	149
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya	0	0	1	1	14
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Situs	0	0	3	3	3

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah event yang dilaksanakan dengan pihak lain	Event	0	0	0	2	8
Jumlah Pembinaan Sanggar seni	Klpk	0	0	0	10	10
Jumlah Situs Cagar Budaya yang di Kelola Dinas	Situs	0	0	0	4	4
Jumlah Objek Cagar budaya yang di Kelola Dinas	obyek	0	0	0	26	87
Jumlah Warisan Budaya tak Benda yang ditetapkan	Sertifikat	0	0	0	2	7

Sumber : Disbudporapar, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Pada tahun 2022 kegiatan seni dan budaya mulai mendapat porsi/perhatian kebijakan untuk pengembangan seni dan budaya seiring dengan memulihnya situasi masyarakat dari masa pandemi. Hal ini dilakukan untuk menghibur sekaligus mengejar target misi pemajuan kebudayaan Daerah.

b) Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Mengingat Klaten sebagai pusat perpaduan peradaban antar kerajaan, tidak mengherankan apabila beberapa tahun terakhir ini adanya penemuan benda, situs dan kawasan cagar budaya. Sebagai langkah pelestarian benda cagar budaya, pada tahun 2021 telah dilakukan penetapan Monumen Juang 45 Klaten sebagai Taman Budaya yang didalamnya terdapat museum sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mewadahi pelaku seni dalam berkarya.

Tabel 2.57
Jumlah Sarana dan Prasana Penyelenggaraan Seni Budaya
Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Taman Budaya Kabupaten Klaten	Lokasi	0	0	0	1	1
Museum Daerah	Lokasi	0	0	0	1	1

Sumber : Disbudporapar, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Mulai tahun 2021 dengan penetapan Taman Budaya sebagai tempat untuk kegiatan seni budaya serta sebagai tempat penyimpanan, memamerkan dan memberikan edukasi tentang sejarah perkembangan peradaban di Kabupaten Klaten. Ke depan masalah pemajuan kebudayaan akan menjadi agenda Daerah dalam mewujudkan daya saing Daerah.

Capaian kinerja *Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing* dengan indikator pemajuan kebudayaan didukung dengan program:

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan;
- 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- 3) Program Pembinaan Sejarah; dan
- 4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Permasalahan :

Urusan Kebudayaan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Terbatasnya revitalisasi cagar budaya; dan
- b. Belum semua cagar budaya dikelola secara terpadu sampai dengan tahun 2022 masih sebanyak 3 cagar budaya.

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan kebudayaan, dengan peningkatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya secara masif.

11) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Serta memperhatikan ketentuan Pasal 3, dinyatakan bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Mengingat kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan.

Ukuran keberhasilan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH). Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat* disajikan pada Tabel 2.58

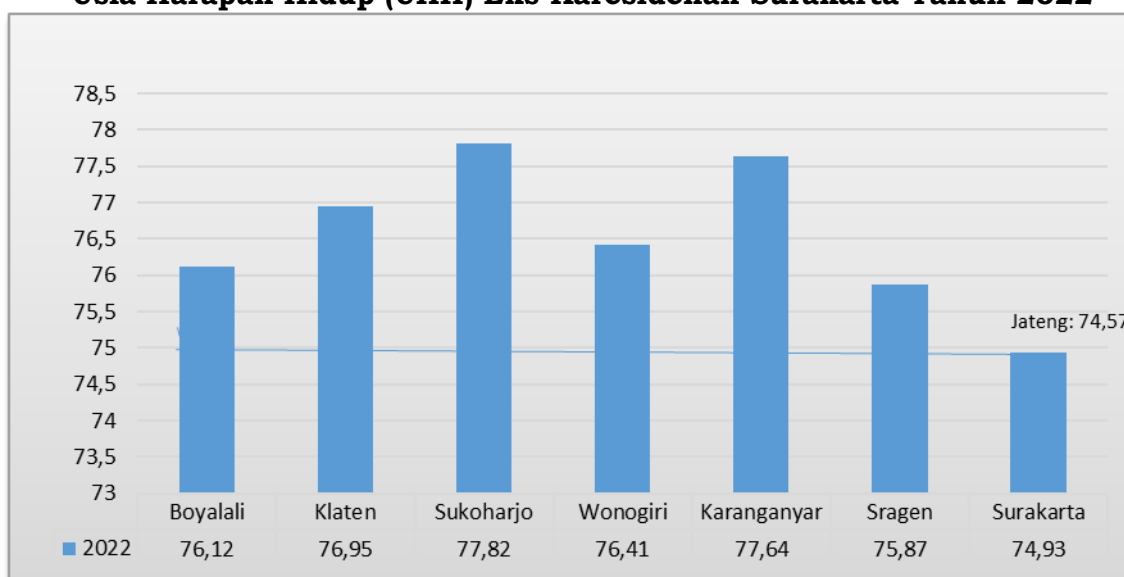
Tabel 2.58
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	76,86	76,68	76,78	76,84	76,95	100,14	77,02	99,91

Sumber: BPS Jateng, Up date per 23 November 2022.

Capaian sasaran kinerja: *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*, pada tahun 2022, sudah di atas rata-rata capaian Jawa Tengah yakni 74,57 tahun. Adapun kondisi Usia Harapan Hidup (UHH) eks-karesidenan Surakarta pada tahun 2022 dapat disajikan pada Gambar 2.15

Gambar 2.15
Usia Harapan Hidup (UHH) Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2022



Sumber: BPS Jawa Tengah, Update Terakhir 23 November 2022.

Capaian kondisi Usia Harapan Hidup di Klaten ditunjang beberapa indikator kunci, diantaranya:

1. Ketersediaan Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan

Gambaran rasio ketersediaan sarana prasarana serta tenaga kesehatan di Kabupaten Klaten sebagai salah satu indikator untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rasio posyandu per satuan balita pada setiap tahunnya meningkat dikarenakan adanya penambahan jumlah posyandu. Sedangkan rasio puskesmas, RS, dokter, dan tenaga medis disajikan pada Tabel 2.59

Tabel 2.59
Ketersediaan Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio posyandu per satuan balita	27,63	27,99	28,00	29,01	30,17
2	Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per satuan penduduk	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Rasio dokter per satuan penduduk	0,896	0,237	0,026	0,06	0,05
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,253	0,074	0,05	0,03	0,71

Sumber: Dinas Kesehatan, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Disamping Ketersediaan Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan sebagaimana Tabel 2.59 tersebut di atas, untuk mendukung capaian Usia Harapan Hidup ditunjang juga cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.

2. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di tahun 2022 sebesar 76,18%. Cakupan ini masih dibawah target karena dengan adanya pandemi banyak ibu hamil yang takut memeriksakan kehamilannya ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga komplikasi kebidanan tidak terdeteksi. Sedangkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Klaten bersifat fluktuatif. Hal ini menunjukkan masih adanya persalinan yang belum ditolong oleh tenaga kesehatan. Berikut perkembangan cakupan kebidanan di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022.

Tabel 2.60
Cakupan Komplikasi kebidanan yang Ditangani

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	89,01	83,28	84,40	82,61	76,18
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	99,98	98,99	99,99	100	99,99

Sumber; Dinas Kesehatan, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Disamping cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebagaimana Tabel 2.60 tersebut di atas, untuk mendukung capaian Usia Harapan Hidup ditunjang juga cakupan penanganan gizi.

3. Cakupan Penanganan Gizi

Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun). Dapat dilihat dari tabel bahwa Cakupan desa UCI di Kabupaten Klaten sudah tercapai 100%. Perkembangan cakupan penanganan gizi di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.61

Tabel 2.61
Cakupan Penanganan Gizi

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100
2	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	32,6

Sumber; Dinas Kesehatan, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Disamping cakupan penanganan gizi yang memiliki kompetensi kebidanan sebagaimana Tabel 2.60 tersebut di atas, untuk mendukung capaian Usia Harapan Hidup ditunjang juga cakupan pelayanan kesehatan penduduk. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan pada tahun 2022 sebesar 32,6% hal ini dikarenakan untuk definisi operasional ada perbedaan. Untuk tahun 2022 yang dimaksud Balita Gizi Buruk mendapat perawatan adalah Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan sesuai dengan Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi (PGBT). Untuk kasus gizi buruk yang mendapat penanganan sesuai PGBT baru sekitar 32,6%. Hal ini disebabkan karena baru 2 (dua) Puskesmas yang terlatih PGBT, sedangkan 32 (tiga puluh dua) puskesmas lainnya baru mendapatkan orientasi saja belum pelatihan secara keseluruhan. Kasus balita gizi buruk akan mendapatkan penanganan sesuai PGBT setelah ada pendampingan oleh dokter spesialis anak dan diteruskan oleh puskesmas.

4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk

Cakupan pelayanan kesehatan penduduk di Tahun 2022 hampir semua mengalami penurunan, sehingga untuk kedepan diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan yang tidak hanya difokuskan untuk Covid-19, tetapi juga perlu upaya peningkatan pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu hamil, bayi, balita dan peningkatan fasilitas kesehatan. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi tentang kesehatan masyarakat supaya dapat melakukan

tindakan pencegahan dan pengobatan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan penduduk selama tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	9,67	11	9,09	12,63	11,7
2	Cakupan kunjungan bayi	%	98,36	98,07	96,89	68,13	96,93
3	Cakupan puskesmas	%	130	130	130	130	130
4	Cakupan Pembantu Puskesmas	%	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
5	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	92,51	93,27	93,33	95,24	93,15
6	Cakupan pelayanan nifas	%	97,54	97,55	96,92	98,47	98,54
7	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	53,47	56,03	55,63	57,57	64,33
8	Cakupan pelayanan anak balita	%	96,17	95,77	92,71	67,75	95,97

Sumber; Dinas Kesehatan, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Berdasarkan tabel 2.62, cakupan kunjungan bayi di Tahun 2022 sudah di atas target yang ditetapkan yang artinya sasaran bayi telah dilakukan pelayanan kunjungan bayi sesuai standar dimana dipantau pertumbuhan sebanyak minimal 8 kali, dipantau perkembangan sebanyak 2 kali dan diberikan pelayanan standar pada bayi.

Cakupan kunjungan ibu hamil pada tahun 2022 sebesar 93,15 %, yang artinya masih ada ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya pertama kali lebih dari 12 minggu dan masih ada ibu dengan kehamilan yang tidak diinginkan sehingga saat hamilnya tidak dipantau oleh tenaga kesehatan.

Cakupan pelayanan nifas pada tahun 2022 sebesar 98,54 % dan kinerja ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Artinya tenaga Kesehatan sudah memberikan pelayanan nifas lengkap dari kunjungan nifas 1, 2 dan 3 sesuai dengan standar pelayanan kunjungan nifas.

Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani pada tahun 2022 sebesar 64,33 % dan ini masih dibawah target yang ditetapkan. Diharapkan tenaga kesehatan dapat mendeteksi kasus komplikasi – komplikasi neonatus sejak dini sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi.

Cakupan pelayanan anak balita pada tahun 2022 sebesar 95,97%, dengan turunnya kasus COVID, posyandu sudah mulai beroperasi dan dapat melakukan pelayanan kunjungan balita sesuai standar.

5. Cakupan Pelayanan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk

Cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten semakin menurun. Secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel perkembangan cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 (Triwulan III). Perkembangan Cakupan Pelayanan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk selama tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.63

Tabel 2.63
Cakupan Pelayanan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak/MR	%	101,3	99,8	88,4	99,7	89,5
2	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	120	320	83,33	120	240
3	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	54,1	47,0	29,33	29,8	29,5
4	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	41,0	36,5	29,98	31,7	36,6
5	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	169,6	109,7	46,04	86,3	122,7
6	Tingkat kematian karena Tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	1,9	6,7	1,96	2,6	2,9
7	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	41,0	36,5	31,44	47,2	51,1
8	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	72,7	74,7	71,63	87,6	85,6
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
10	Penderita diare yang ditangani	%	11,6	9,8	4,4	3,4	3,5
11	Angka kejadian Malaria	Per 100.000 penduduk	0,8	0,4	0,003	0,77	0,6
12	Prevalensi HIV/AIDS	%	0,011	0,012	0,011	0,01	0,01

Sumber; Dinas Kesehatan, Update Terakhir 30 Januari 2023.

Di tahun 2022 cakupan pelayanan penanganan penyakit untuk Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, Tingkat prevalensi Tuberkulosis, Tingkat kematian karena

Tuberkulosis, Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS, Penderita diare yang ditangani mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 dan beberapa hal yang mengalami penurunan yaitu Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak/MR, Cakupan balita pneumonia yang ditangani, Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS, Angka kejadian Malaria. Sedangkan Prevalensi HIV/AIDS dan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD stagnan di tahun 2021 dan 2022.

Permasalahan:

- a. Masih adanya angka kematian bayi pada tahun 2022 sebesar 11,63 per 1.000 kelahiran hidup, meningkatnya angka kematian balita tahun 2022 sebesar 1,88 per 1.000 kelahiran hidup, dan angka kematian neonatal sebesar 8,63 per 1.000 kelahiran hidup;
- b. Kasus kematian ibu pada tahun 2022 sebanyak 11 kasus, atau menurun dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 45 kasus;
- c. Belum optimalnya pemenuhan tenaga dokter dan medis yang tersedia pada pelayanan kesehatan, yaitu rasio dokter per satuan penduduk tahun 2022 sebesar 0,05 dan rasio tenaga medis per satuan penduduk 0,71;
- d. Belum semua Standar Pelayanan Minimal Kesehatan mencapai 100 %;
- e. Masih ditemukannya kasus penyakit seperti DBD, Diare, Stunting, Pneumonia dan kasus penyakit tidak menular.

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:

- a. Pengendalian Covid-19 melalui pelaksanaan vaksin, penerapan protokol kesehatan, dan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat;
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita;
- c. Optimalisasi penanganan penyakit, dan peningkatan edukasi penanganan permasalahan kesehatan masyarakat;
- d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana kesehatan;
- e. Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan.

12) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat berasaskan: kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan. Serta berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengatur bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemudian penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Mengingat kesejahteraan masyarakat sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesejahteraan masyarakat kepada seluruh masyarakat secara menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan bantuan sosial yang harus diwujudkan.

Ukuran keberhasilan meningkatnya kesejahteraan masyarakat diantaranya diukur dengan indikator: 1) Persentase PMKS yang tertangani, 2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan 3) Indeks Desa Membangun (IDM). Adapun capaian sasaran: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat disajikan pada Tabel 2.64

Tabel 2.64
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9) *100
1	Persentase PMKS yang tertangani	97,27	62,26	90,32	67,5	87,39	129,46	69,5	125,74
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,48	3,54	5,46	5,16	4,31	116,50	4,25	101,41
3	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,671	0,621	0,6854	0,7034	0,7034	100,00	0,6974	100,86

Sumber: DISSOSP3APPKB, Update terakhir 12 Januari 2022. BPS Jateng, Update per 23 November 2022. Dispermades Update per 17 Januari 2023.

1. Persentase PMKS yang Tertangani

Indikator PMKS yang tertangani dilihat dari capaian Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), persentase penanganan penyandang masalah sosial, dan Penguatan Kapasitas PSKS, dan secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

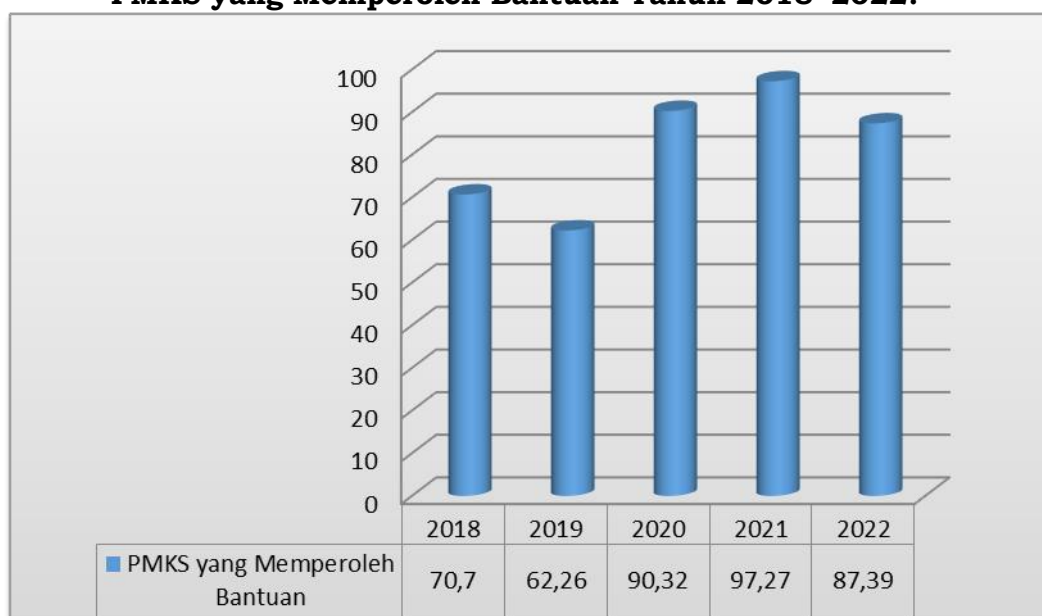
a) Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Dari 26 (dua puluh enam) jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang teridentifikasi pada tahun 2020 sebanyak 172.857 PMKS, yang terdiri dari: fakir miskin sebanyak 144.140 orang, lanjut usia terlantar sebanyak 10.433 orang, dan perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 4.561 orang. Pada tahun 2021 menjadi sebanyak 168.291 PMKS, yang terdiri dari: fakir miskin sebanyak 138.176 orang, lanjut usia terlantar sebanyak 12.218 orang, dan perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 4.561 orang. Pada tahun 2022 menjadi sebanyak 148.242 PMKS, yang terdiri dari: fakir miskin sebanyak 126.108 orang, lanjut usia terlantar sebanyak 3.114 orang, dan perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 4.561 orang.

b) Persentase Penanganan Penyandang Masalah Sosial

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten hingga saat ini. Program-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan PMKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal ini ditunjukkan kinerja layanan penanganan PMKS yang memperoleh bantuan, dan persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok ekonomi sejenis lainnya. Perkembangan PMKS yang memperoleh bantuan dapat tahun 2018–2022 disajikan pada Gambar 2.16

Gambar 2.16
PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2018–2022.



Sumber : DISSOSP3APPKB, Update per Januari 2023.

Berdasarkan Gambar 2.16, sebagaimana tersebut di atas, Pada tahun 2020 jumlah PMKS sebanyak 172.857 orang, dan mendapatkan bantuan sebanyak 156.127 orang atau sebanyak 90,32%, sedangkan pada tahun 2021 jumlah PMKS sebanyak 168.291 orang, dan mendapatkan bantuan sebanyak 163.705 orang atau sebanyak 97,27%. Kondisi tahun 2022 jumlah PMKS sebanyak 148.242 orang, dan mendapatkan bantuan sebanyak 129.546 orang atau sebanyak 87,38%. Penanganan PMKS selama ini diupayakan dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran Pemerintah Daerah, keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat dapat membuahkan hasil yang maksimal, terutama bagi keluarga rawan sosial yang jumlahnya relatif sudah semakin berkurang, namun demikian tetap harus mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak.

c) Penguatan Kapasitas PSKS

Sumber daya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam turut serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama ini telah memberikan kontribusi positif. Tercatat sebanyak 10 (sepuluh) PSKS yang telah turut andil dalam penanganan 26 (dua puluh enam) Jenis PMKS di Klaten. 10 (sepuluh) PSKS tersebut, diantaranya: 1) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 2) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 4) Karangtaruna, 5) IPSM, 6) PLKSAI, 7) Lembaga Konsultasi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (LKKKS), 8) PPDK, 9) Tim Advokasi Disabilitas, dan 10) Taruna Siaga Bencana (Tagana). Dari sebanyak 10 (sepuluh) PSKS yang telah diberdayakan sebanyak 96,01% telah mampu secara mandiri mengembangkan kapasitasnya dalam membantu penanganan PMKS.

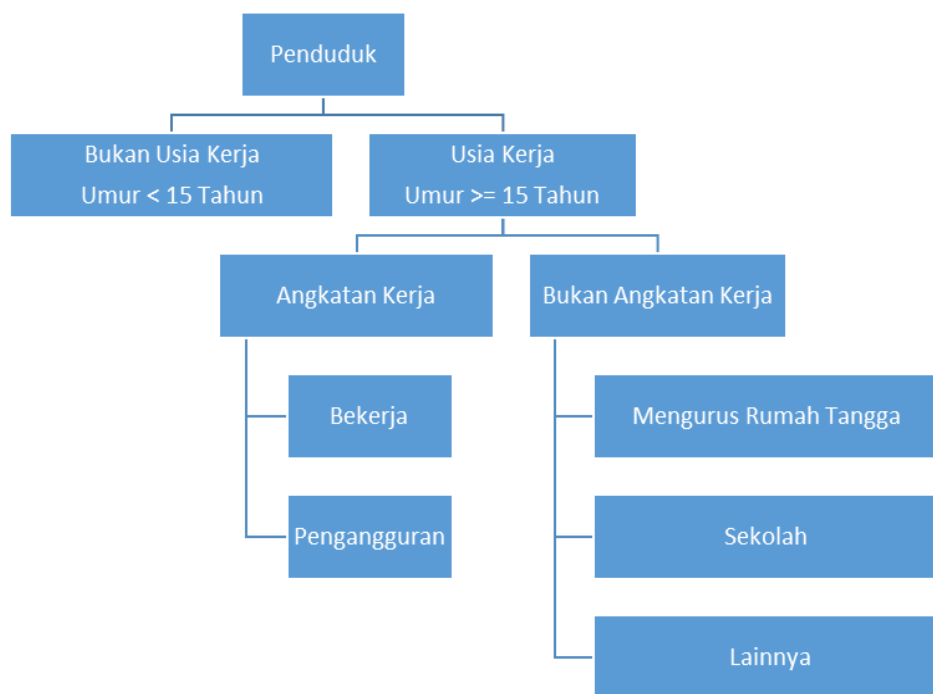
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kualitas dan efektifitas Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai korelasi positif yang cukup erat dengan suksesnya program-program pembangunan. Dalam hal ini gambaran profil SDM merupakan suatu informasi untuk mengevaluasi pembangunan ekonomi pada tahap sebelumnya, dan merencanakan tahapan pembangunan berikutnya. Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro.

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di

samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Secara teori, penduduk dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu: (i) penduduk usia kerja, dan (ii) penduduk bukan usia kerja, seperti pada Gambar 2.17

Gambar 2.17
Pembagian Penduduk Berdasarkan Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.



Sebagai gambaran penduduk Usia Kerja berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.65

Tabel 2.65
Penduduk Usia Kerja Berumur 15 Tahun Ke atas
Menurut Jenis Kegiatan Utama
Tahun 2018-2022

Jenis Pekerjaan		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Angkatan Kerja	622.450	644.689	641.245	631.245	651.177
	1 Bekerja	602.911	621.855	606.253	596.661	623.119
	2 Pengangguran	19.539	22.834	34.992	34.584	28.058
II	Bukan Angkatan Kerja	548.961	530.297	619.261	636.027	626.278
	1 Sekolah	219.862	217.464	253.946	254.733	257.415
	2 Mengurus Rumah Tangga	116.454	116.130	135.612	134.924	136.564
	3 Lainnya	212.644	196.704	229.703	246.370	232.299
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		67,14	69,10	68,33	66,89	68,66
Tingkatan Pengangguran Terbuka (TPT)		3,11	3,54	5,46	5,48	4,31

Sumber: BPS Jateng, Update Terakhir 2022. (Diolah)

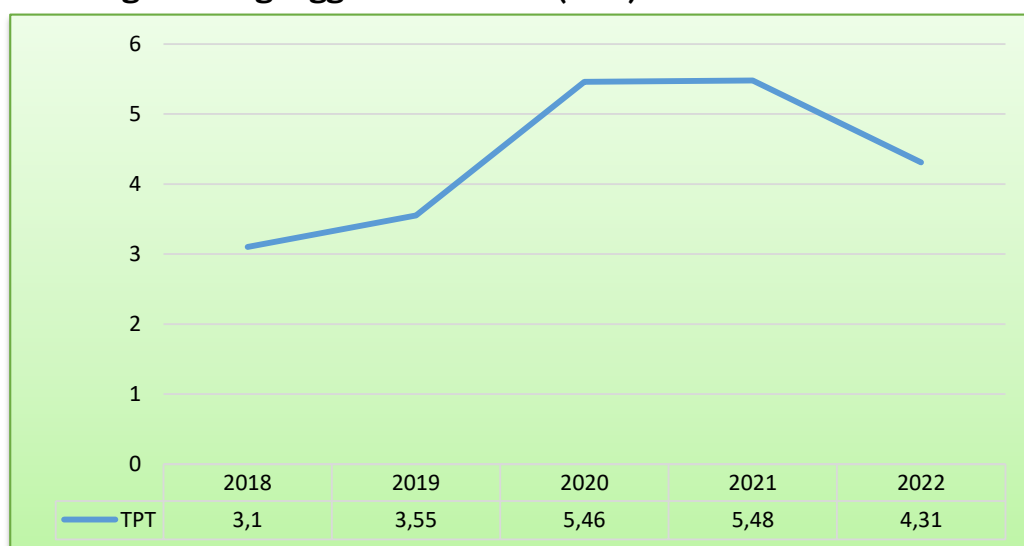
Berdasarkan Tabel 2.65 di atas diketahui bahwa jumlah angkatan kerja selama tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif. Tahun 2018 sebanyak 622.450 orang, tahun 2019 menjadi 644.689 orang, tetapi tahun 2020 turun menjadi 641.245 orang, dan tahun 2021 turun lagi menjadi 631.245 orang, dan tahun 2022 menjadi 651.177 orang. Sedangkan bukan angkatan kerja juga cenderung fluktuatif. Tahun 2018 sebanyak 548.961 orang, tahun 2019 turun menjadi 530.297 orang, tetapi tahun 2020 turun menjadi 619.261 orang, dan tahun 2021 naik menjadi 636.027 orang, dan pada tahun 2022 menjadi sebanyak 626.278 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga cenderung fluktuatif. Tahun 2019 sebesar 69,10%, tahun 2020 turun menjadi sebesar 68,33%, tahun 2021 turun lagi menjadi 66,89%, tahun 2022 menjadi 68,66%. Begitu juga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga fluktuatif. Tahun 2019 sebesar 3,54%, tahun 2020 turun menjadi sebesar 5,46%, tahun 2021 naik menjadi 5,48%, dan tahun 2022 menjadi 4,31%.

Pengertian pengangguran terbuka adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Lebih lengkapnya, BPS membagi jenis pengangguran ini menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) Orang yang sedang mencari pekerjaan atau *job seeker*.
- 2) Orang yang sedang mempersiapkan usaha.
- 3) Orang yang memilih untuk tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- 4) Orang yang sudah mendapatkan kontrak pekerjaan namun belum mulai bekerja. Selama tahun 2018-2022 tingkat pengangguran terbuka di Klaten fluktuatif, hal ini disebabkan karena keempat faktor tersebut. Adapun perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Klaten tahun 2018-2022 disajikan pada Gambar 2.18

Gambar 2.18
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, Update Terakhir 21 Desember 2022.

Berdasarkan gambar 2.18 di atas, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 sebanyak 3,1%, tahun 2019 menjadi sebanyak 3,55%, namun secara berturut-turut (tahun 2021-2022) turun, terakhir pada tahun 2021 sebesar 5,48% dan di tahun 2022 menjadi sebesar 4,31%. Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten pada tahun 2022 diperkirakan mengalami perbaikan seiring adanya program stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemulihan Ekonomi pada tahun 2022, dapat dilihat dari beberapa sektor usaha dalam bidang konstruksi, perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi yang sudah mulai bangkit dalam usahanya sehingga menyerap banyak pekerja.

3. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah pengukuran tentang klasifikasi dan status desa yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial (indeks ketahanan sosial), ekonomi (indeks ketahanan ekonomi) dan lingkungan (indeks ketahanan ekologi). Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional.

Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari dimensi:

1. modal sosial;
2. kesehatan;
3. pendidikan; dan
4. permukiman.

Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari perangkat indikator:

1. Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator jenis kegiatan ekonomi penduduk.
2. Tersedia pusat pelayanan perdagangan, yang terdiri dari indikator:
 - a) Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen);
 - b) Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket); dan
 - c) Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.
3. Akses distribusi/logistik, yang terdiri dari indikator: terdapat kantor pos dan jasa logistik.
4. Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, yang terdiri dari indikator:
 - a) Tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta);
 - b) Tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan
 - c) Akses penduduk ke kredit.

Indeks Ketahanan Ekologi terdiri dari perangkat indikator:

1. Kualitas lingkungan, yang terdiri dari indikator:
 - a) Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah, dan udara; dan
 - b) Terdapat sungai yang terkena limbah.
2. Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang terdiri dari indikator:
 - a) Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan); dan
 - b) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini).

Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi desa dalam lima status, yakni:

- (i) Desa Sangat Tertinggal;
- (ii) Desa Tertinggal;
- (iii) Desa Berkembang;
- (iv) Desa Maju; dan
- (v) Desa Mandiri.

Dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal: < 0,491
2. Desa Tertinggal: > 0,491 dan < 0,599
3. Desa Berkembang: > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju: > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri: > 0,815

Hasil analisis terhadap status desa di Kabupaten Klaten menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022, disajikan pada Tabel 2.66

Tabel 2.66
Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Klaten
Tahun 2022

No	Kecamatan/Desa	IDM	Klasifikasi	No	Kecamatan/Desa	IDM	Klasifikasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bayat			14	Kemalang		
1	BANYURIPAN	0,6751	BERKEMBANG	1	BALERANTE	0,7683	MAJU
2	BELUK	0,6462	BERKEMBANG	2	BAWUKAN	0,8056	MAJU
3	BOGEM	0,6387	BERKEMBANG	3	BUMIHARJO	0,7905	MAJU
4	DUKUH	0,7417	MAJU	4	DOMPOL	0,8057	MAJU
5	GUNUNG GAJAH	0,6756	BERKEMBANG	5	KEMALANG	0,7570	MAJU
6	JAMBAKAN	0,6632	BERKEMBANG	6	KENDALSARI	0,7237	MAJU
7	JARUM	0,6698	BERKEMBANG	7	KEPUTRAN	0,8857	MANDIRI
8	JOTANGAN	0,6640	BERKEMBANG	8	PANGGANG	0,7817	MAJU
9	KEBON	0,6883	BERKEMBANG	9	SIDOREJO	0,7683	MAJU
10	KRAKITAN	0,6684	BERKEMBANG	10	TALUN	0,8005	MAJU
11	KRIKILAN	0,6165	BERKEMBANG	11	TANGKIL	0,7997	MAJU
12	NENGAHAN	0,6752	BERKEMBANG	12	TEGALMULYO	0,7770	MAJU
13	NGERANGAN	0,7833	MAJU	13	TLOGOWATU	0,7738	MAJU
14	PASEBAN	0,7230	MAJU				
15	TALANG	0,6238	BERKEMBANG				
16	TAWANGREJO	0,6725	BERKEMBANG				
17	TEGALREJO	0,6435	BERKEMBANG				
18	WIRO	0,6792	BERKEMBANG				
2	Cawas			15	Klaten Selatan		
1	BALAK	0,7598	MAJU	1	DANGURAN	0,8075	MAJU
2	BARAN	0,6832	BERKEMBANG	2	GLODOGAN	0,7529	MAJU
3	BAREPAN	0,8530	MANDIRI	3	JETIS	0,6840	BERKEMBANG
4	BAWAK	0,6552	BERKEMBANG	4	KAJORAN	0,8094	MAJU
5	BENDUNGAN	0,7552	MAJU	5	KARANGLO	0,6840	BERKEMBANG
6	BOGOR	0,7484	MAJU	6	MERBUNG	0,7567	MAJU
7	BURIKAN	0,6968	BERKEMBANG	7	NGALAS	0,7392	MAJU
8	CAWAS	0,7583	MAJU	8	NGLINGGI	0,7914	MAJU
9	GOMBANG	0,7852	MAJU	9	SUMBEREJO	0,7727	MAJU
10	JAPANAN	0,6663	BERKEMBANG	10	TEGALYOSO	0,7603	MAJU
11	KARANGASEM	0,7946	MAJU	11	TRUNUH	0,7156	MAJU
12	KEDUNGAMPEL	0,7195	MAJU				
13	MLESE	0,6997	BERKEMBANG				
14	NANGGULAN	0,7003	BERKEMBANG				
15	PAKISAN	0,8022	MAJU				
16	PLOSOWANGI	0,6541	BERKEMBANG				
17	POGUNG	0,7203	MAJU				
18	TIRTOMARTO	0,6541	BERKEMBANG				
19	TLINGSING	0,6575	BERKEMBANG				
20	TUGU	0,7237	MAJU				
3	Ceper			16	Klaten Tengah		
1	CEPER	0,7263	MAJU	1	GUMULAN	0,7041	BERKEMBANG
2	CETAN	0,7021	BERKEMBANG	2	JOMBORAN	0,7079	MAJU
3	DLIMAS	0,6800	BERKEMBANG	3	SEMANGKAK	0,7390	MAJU
4	JAMBUKIDUL	0,6759	BERKEMBANG				
5	JAMBUKULON	0,7490	MAJU				
6	JOMBOR	0,7667	MAJU				
7	KAJEN	0,7871	MAJU				
8	KLEPU	0,7465	MAJU				
9	KUJON	0,7654	MAJU				
10	KUNCEN	0,7165	MAJU				
11	KURUNG	0,6722	BERKEMBANG				
12	MEGER	0,6665	BERKEMBANG				
13	MLESE	0,6792	BERKEMBANG				
14	NGAWONGGO	0,6060	BERKEMBANG				
15	PASUNGAN	0,6854	BERKEMBANG				
16	POKAK	0,7330	MAJU				
17	SREBEGAN	0,7381	MAJU				
18	TEGALREJO	0,6927	BERKEMBANG				
4	Delanggu			17	Klaten Utara		
1	BANARAN	0,7130	MAJU	1	BELANGWETAN	0,8137	MAJU
2	BOWAN	0,6778	BERKEMBANG	2	JEBUGAN	0,8154	MAJU
3	BUTUHAN	0,6441	BERKEMBANG	3	JONGGRANGAN	0,8132	MAJU
4	DELANGGU	0,7949	MAJU	4	KARANGANOM	0,8098	MAJU
5	DUKUH	0,7765	MAJU	5	KETANDAN	0,7962	MAJU
6	GATAK	0,8063	MAJU	6	SEKARSULI	0,7629	MAJU
7	JETIS	0,6386	BERKEMBANG				
8	KARANG	0,7581	MAJU				
9	KEPANJEN	0,8116	MAJU				
10	KRECEK	0,7060	BERKEMBANG				
11	MENDAK	0,6737	BERKEMBANG				
12	SABRANG	0,7949	MAJU				
13	SEGARAN	0,6892	BERKEMBANG				

No	Kecamatan/Desa		IDM	Klasifikasi	No	Kecamatan/Desa		IDM	Klasifikasi
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
	14	SIDOMULYO	0,6306	BERKEMBANG					
	15	SRIBIT	0,7003	BERKEMBANG					
	16	TLOBONG	0,7057	BERKEMBANG					
5	Gantiwarno				18	Manissrenggo			
	1	BATURAN	0,6460	BERKEMBANG		1	BARUKAN	0,6848	BERKEMBANG
	2	CEPORAN	0,6597	BERKEMBANG		2	BENDAN	0,7567	MAJU
	3	GENTAN	0,6587	BERKEMBANG		3	BORANGAN	0,6910	BERKEMBANG
	4	GESIKAN	0,6646	BERKEMBANG		4	KEBONALAS	0,7203	MAJU
	5	JABUNG	0,7248	MAJU		5	KECEMEN	0,6327	BERKEMBANG
	6	JOGOPRAYAN	0,6014	BERKEMBANG		6	KEPURUN	0,7289	MAJU
	7	KARANGTURI	0,6770	BERKEMBANG		7	KRANGGAN	0,7276	MAJU
	8	KATEKAN	0,6746	BERKEMBANG		8	LESES	0,6813	BERKEMBANG
	9	KERTEN	0,6640	BERKEMBANG		9	NANGSRI	0,7584	MAJU
	10	KRAGILAN	0,6824	BERKEMBANG		10	NGEMPLAKSENE NG	0,7852	MAJU
	11	MLESE	0,6613	BERKEMBANG		11	SAPEN	0,6738	BERKEMBANG
	12	MURUH	0,6497	BERKEMBANG		12	SOLODIRAN	0,7443	MAJU
	13	MUTIHAN	0,6630	BERKEMBANG		13	SUKORINI	0,7068	BERKEMBANG
	14	NGANDONG	0,6121	BERKEMBANG		14	TANJUNGSARI	0,7987	MAJU
	15	SAWIT	0,6746	BERKEMBANG		15	TASKOMBANG	0,7703	MAJU
	16	TOWANGSAN	0,7303	MAJU		16	TIJAYAN	0,6997	BERKEMBANG
6	Jatinom				19	Ngawen			
	1	BANDUNGAN	0,6327	BERKEMBANG		1	CANDIREJO	0,6625	BERKEMBANG
	2	BENKING	0,6703	BERKEMBANG		2	DRONO	0,6327	BERKEMBANG
	3	BETENG	0,6575	BERKEMBANG		3	DUWET	0,6490	BERKEMBANG
	4	BONYOKAN	0,8141	MAJU		4	GATAK	0,7044	BERKEMBANG
	5	CAWAN	0,6270	BERKEMBANG		5	KAHUMAN	0,6837	BERKEMBANG
	6	GEDAREN	0,6590	BERKEMBANG		6	KWAREN	0,7008	BERKEMBANG
	7	GLAGAH	0,6587	BERKEMBANG		7	MANJUNG	0,6695	BERKEMBANG
	8	JEMAWAN	0,6725	BERKEMBANG		8	MANJUNGAN	0,6686	BERKEMBANG
	9	KAYUMAS	0,6568	BERKEMBANG		9	MAYUNGAN	0,6813	BERKEMBANG
	10	KRAJAN	0,7486	MAJU		10	NGAWEN	0,6552	BERKEMBANG
	11	MRANGGEN	0,7013	BERKEMBANG		11	PEPE	0,6832	BERKEMBANG
	12	PANDEYAN	0,6476	BERKEMBANG		12	SENDEN	0,6816	BERKEMBANG
	13	PULUHAN	0,7030	BERKEMBANG		13	TEMPURSARI	0,6943	BERKEMBANG
	14	RANDULANANG	0,6648	BERKEMBANG					
	15	SOCOKANGSI	0,6943	BERKEMBANG					
	16	TEMUIRENG	0,6568	BERKEMBANG					
	17	TIBAYAN	0,6575	BERKEMBANG					
7	Jogonalan				20	Pedan			
	1	BAKUNG	0,7019	BERKEMBANG		1	BEJI	0,7062	BERKEMBANG
	2	DOMPYONGAN	0,6770	BERKEMBANG		2	BENDO	0,6783	BERKEMBANG
	3	GONDANGAN	0,6719	BERKEMBANG		3	JATIMULYO	0,6913	BERKEMBANG
	4	GRANTING	0,6216	BERKEMBANG		4	JETISWETAN	0,6984	BERKEMBANG
	5	JOTON	0,7273	MAJU		5	KALANGAN	0,6740	BERKEMBANG
	6	KARANGDUKUH	0,6849	BERKEMBANG		6	KALIGAWA	0,7035	BERKEMBANG
	7	KRAGUMAN	0,7440	MAJU		7	KEDEN	0,7656	MAJU
	8	NGERING	0,6906	BERKEMBANG		8	KEDUNGAN	0,7168	MAJU
	9	PAKAHAN	0,7687	MAJU		9	LEMAHIRENG	0,6790	BERKEMBANG
	10	PLAWIKAN	0,7559	MAJU		10	NGAREN	0,7425	MAJU
	11	PRAWATAN	0,7241	MAJU		11	SOBAYAN	0,8059	MAJU
	12	REJOSO	0,7244	MAJU		12	TAMBAKBOYO	0,7743	MAJU
	13	SOMOPURO	0,6835	BERKEMBANG		13	TEMUWANGI	0,7598	MAJU
	14	SUMYANG	0,7010	BERKEMBANG		14	TROKETON	0,7051	BERKEMBANG
	15	TAMBAKAN	0,6708	BERKEMBANG					
	16	TANGKISAN POS	0,6775	BERKEMBANG					
	17	TITANG	0,6162	BERKEMBANG					
	18	WONOBOYO	0,7051	BERKEMBANG					
8	Juwiring				21	Polaharjo			
	1	BOLOPLERET	0,6825	BERKEMBANG		1	BORONGAN	0,6010	BERKEMBANG
	2	BULUREJO	0,7022	BERKEMBANG		2	GLAGAHWANGI	0,6352	BERKEMBANG
	3	CARIKAN	0,6963	BERKEMBANG		3	JANTI	0,6651	BERKEMBANG
	4	GONDANGSARI	0,6590	BERKEMBANG		4	JIMUS	0,6743	BERKEMBANG
	5	JATEN	0,6362	BERKEMBANG		5	KAHUMAN	0,7032	BERKEMBANG
	6	JETIS	0,6613	BERKEMBANG		6	KAPUNGAN	0,6327	BERKEMBANG
	7	JUWIRAN	0,6592	BERKEMBANG		7	KARANGLO	0,7414	MAJU
	8	JUWIRING	0,7078	MAJU		8	KEBONHARJO	0,6441	BERKEMBANG
	9	KENAIBAN	0,6443	BERKEMBANG		9	KEPRABON	0,6602	BERKEMBANG
	10	KETTITANG	0,6624	BERKEMBANG		10	KRANGGAN	0,6795	BERKEMBANG
	11	KWARASAN	0,6802	BERKEMBANG		11	NGANJAT	0,7076	MAJU
	12	MRISEN	0,7073	MAJU		12	NGARAN	0,6852	BERKEMBANG
	13	PUNDUNGAN	0,7727	MAJU		13	POLAN	0,6849	BERKEMBANG
	14	SAWAHAN	0,7308	MAJU		14	PONGGOK	0,8102	MAJU
	15	SERENAN	0,6033	BERKEMBANG		15	SIDOHARJO	0,6759	BERKEMBANG
	16	TAJI	0,6867	BERKEMBANG		16	SIDOWAYAH	0,6775	BERKEMBANG
	17	TANJUNG	0,6629	BERKEMBANG		17	TURUS	0,6143	BERKEMBANG
	18	TLOGORANDU	0,7092	MAJU		18	WANGEN	0,7725	MAJU
	19	TRASAN	0,6910	BERKEMBANG					
9	Kalikotes				22	Prambanan			
	1	GEMBLEGAN	0,7340	MAJU		1	BRAJAN	0,7013	BERKEMBANG
	2	JIMBUNG	0,7708	MAJU		2	BUGISAN	0,7003	BERKEMBANG

No	Kecamatan/Desa		IDM	Klasifikasi	No	Kecamatan/Desa		IDM	Klasifikasi
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
	3	JOGOSETRAN	0,7002	BERKEMBANG		3	CUCUKAN	0,6821	BERKEMBANG
	4	KALIKOTES	0,7821	MAJU		4	GENENG	0,6514	BERKEMBANG
	5	KRAJAN	0,6832	BERKEMBANG		5	JOHO	0,6025	BERKEMBANG
	6	NGEMPLAK	0,7390	MAJU		6	KEBONDALEM KIDUL	0,6984	BERKEMBANG
	7	TAMBONGWETAN	0,7287	MAJU		7	KEBONDALEM LOR	0,6759	BERKEMBANG
						8	KEMUDO	0,8171	MANDIRI
						9	KOKOSAN	0,6924	BERKEMBANG
						10	KOTESAN	0,6870	BERKEMBANG
						11	PERENG	0,6687	BERKEMBANG
						12	RANDUSARI	0,6422	BERKEMBANG
						13	SANGGRAHAN	0,6908	BERKEMBANG
						14	SENGON	0,6876	BERKEMBANG
						15	TAJI	0,6554	BERKEMBANG
						16	TLOGO	0,6998	BERKEMBANG
10	Karanganom				23	Trucuk			
	1	BEKU	0,6767	BERKEMBANG		1	BERO	0,7543	MAJU
	2	BLANCERAN	0,7816	MAJU		2	GADEN	0,8152	MAJU
	3	BRANGKAL	0,7086	MAJU		3	JATIPURO	0,8102	MAJU
	4	GEMPOL	0,6835	BERKEMBANG		4	KALIKEBO	0,6959	BERKEMBANG
	5	GLEDEG	0,7040	BERKEMBANG		5	KARANGPAKEL	0,6832	BERKEMBANG
	6	JAMBAYAN	0,6422	BERKEMBANG		6	KRADENAN	0,8052	MAJU
	7	JEBLOG	0,7322	MAJU		7	MANDONG	0,7206	MAJU
	8	JUNGKARE	0,6590	BERKEMBANG		8	MIRENG	0,6944	BERKEMBANG
	9	JURANGJERO	0,6908	BERKEMBANG		9	PALAR	0,6837	BERKEMBANG
	10	KADIREJO	0,7000	BERKEMBANG		10	PLANGGU	0,6703	BERKEMBANG
	11	KARANGAN	0,6951	BERKEMBANG		11	PULUHAN	0,7187	MAJU
	12	KARANGANOM	0,7137	MAJU		12	PUNDUNGSARI	0,6427	BERKEMBANG
	13	KUNDEN	0,7184	MAJU		13	SABRANGLOR	0,6925	BERKEMBANG
	14	NGABEYAN	0,6722	BERKEMBANG		14	SAJEN	0,6727	BERKEMBANG
	15	PADAS	0,6490	BERKEMBANG		15	SUMBER	0,6963	BERKEMBANG
	16	PONDOK	0,6594	BERKEMBANG		16	TRUCUK	0,7978	MAJU
	17	SOROPATEN	0,6557	BERKEMBANG		17	WANGLU	0,7110	MAJU
	18	TARUBASAN	0,6686	BERKEMBANG		18	WONOSARI	0,7054	BERKEMBANG
	19	TROSO	0,7038	BERKEMBANG					
11	Karangdowo				24	Tulung			
	1	BABADAN	0,6922	BERKEMBANG		1	BEJI	0,6629	BERKEMBANG
	2	BAKUNGAN	0,7449	MAJU		2	BONO	0,6392	BERKEMBANG
	3	BULUSAN	0,6387	BERKEMBANG		3	COKRO	0,7800	MAJU
	4	DEMANGAN	0,6329	BERKEMBANG		4	DALANGAN	0,7819	MAJU
	5	KARANGDOWO	0,6587	BERKEMBANG		5	DALEMAN	0,8230	MANDIRI
	6	KARANGJOHO	0,6013	BERKEMBANG		6	GEDONGJETIS	0,6776	BERKEMBANG
	7	KARANGTALUN	0,6890	BERKEMBANG		7	KEMIRI	0,6870	BERKEMBANG
	8	KARANGWUNGU	0,7024	BERKEMBANG		8	KIRINGAN	0,6067	BERKEMBANG
	9	KUPANG	0,6884	BERKEMBANG		9	MAJEGAN	0,7892	MAJU
	10	MUNGGUNG	0,7095	MAJU		10	MALANGAN	0,7575	MAJU
	11	NGOLODONO	0,7040	BERKEMBANG		11	MUNDU	0,6259	BERKEMBANG
	12	PUGERAN	0,7067	BERKEMBANG		12	POMAH	0,6217	BERKEMBANG
	13	RINGINPUTIH	0,6714	BERKEMBANG		13	PUCANGMILIRAN	0,7649	MAJU
	14	SENTONO	0,7095	MAJU		14	SEDAYU	0,6176	BERKEMBANG
	15	SOKA	0,6884	BERKEMBANG		15	SOROGATEN	0,7868	MAJU
	16	TAMBAK	0,6573	BERKEMBANG		16	SUDIMORO	0,6552	BERKEMBANG
	17	TEGALAMPEL	0,6603	BERKEMBANG		17	TULUNG	0,7411	MAJU
	18	TULAS	0,6568	BERKEMBANG		18	WUNUT	0,8373	MANDIRI
	19	TUMPUKAN	0,6789	BERKEMBANG					
12	Karangnongko				25	Wedi			
	1	BANYUAENG	0,7297	MAJU		1	BIRIT	0,7033	BERKEMBANG
	2	BLIMBING	0,6457	BERKEMBANG		2	BRANGKAL	0,6994	BERKEMBANG
	3	DEMAKIJO	0,7275	MAJU		3	CANAN	0,8073	MAJU
	4	GEMAMPIR	0,7481	MAJU		4	DENGKENG	0,6313	BERKEMBANG
	5	GUMUL	0,6556	BERKEMBANG		5	GADUNGAN	0,7211	MAJU
	6	JAGALAN	0,6670	BERKEMBANG		6	JIWOWETAN	0,6641	BERKEMBANG
	7	JETIS	0,7519	MAJU		7	KADIBOLO	0,6981	BERKEMBANG
	8	JIWAN	0,6944	BERKEMBANG		8	KADILANGGON	0,7251	MAJU
	9	KADILAJO	0,7814	MAJU		9	KALIGAYAM	0,6927	BERKEMBANG
	10	KANOMAN	0,7346	MAJU		10	KALITENGAH	0,7144	MAJU
	11	KARANGNONGKO	0,7797	MAJU		11	MELIKAN	0,6362	BERKEMBANG
	12	LOGEDE	0,7219	MAJU		12	PACING	0,6643	BERKEMBANG
	13	NGEMPLAK	0,7738	MAJU		13	PANDES	0,7341	MAJU
	14	SOMOKATON	0,6883	BERKEMBANG		14	PASUNG	0,6814	BERKEMBANG
						15	PESU	0,6906	BERKEMBANG
						16	SEMBUNG	0,6944	BERKEMBANG
						17	SUKOREJO	0,6592	BERKEMBANG
						18	TANJUNGAN	0,6330	BERKEMBANG
						19	TROTOK	0,6671	BERKEMBANG
13	Kebonarum				26	Wonosari			
	1	BASIN	0,8695	MANDIRI		1	BENER	0,6495	BERKEMBANG
	2	GONDANG	0,6856	BERKEMBANG		2	BENTANGAN	0,6617	BERKEMBANG
	3	KARANGDUREN	0,6984	BERKEMBANG		3	BOLALI	0,6660	BERKEMBANG

No	Kecamatan/Desa		IDM	Klasifikasi	No	Kecamatan/Desa		IDM	Klasifikasi
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
	4	MALANGJIWAN	0,6983	BERKEMBANG		4	BOTO	0,6259	BERKEMBANG
	5	MENDEN	0,7654	MAJU		5	BULAN	0,7576	MAJU
	6	NGRUNDUL	0,6949	BERKEMBANG		6	DUWET	0,6643	BERKEMBANG
	7	PLUNENG	0,7317	MAJU		7	GUNTING	0,6703	BERKEMBANG
						8	JELOBO	0,6778	BERKEMBANG
						9	KINGKANG	0,6721	BERKEMBANG
						10	LUMBUNGKEREP	0,7003	BERKEMBANG
						11	NGREDEN	0,6576	BERKEMBANG
						12	PANDANAN	0,6724	BERKEMBANG
						13	SEKARAN	0,6644	BERKEMBANG
						14	SIDOWARNO	0,6144	BERKEMBANG
						15	SUKOREJO	0,6011	BERKEMBANG
						16	TEGALGONDO	0,7038	BERKEMBANG
						17	TELOYO	0,6552	BERKEMBANG
						18	WADUNGGETAS	0,6606	BERKEMBANG

Sumber: Dispermades, Update Terakhir 17 Januari 2023.

Berdasarkan Tabel 3.61. sebagaimana tersebut di atas, status desa di Kabupaten Klaten dengan klasifikasi IDM, dapat disimpulkan:

1. Jumlah desa yang berstatus **Mandiri** ada 6 desa (atau 1,53% dari total jumlah desa);
2. Jumlah desa yang berstatus **Maju** ada 137 desa (atau 35,04% dari total jumlah desa); dan
3. Status desa **Berkembang** sebanyak 248 desa (atau 1,53% dari total jumlah desa);

13) Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak

Peningkatan kapasitas perempuan, dan perlindungan anak merupakan salah satu tujuan/goals dari pembangunan berkelanjutan (SDGs). Penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata, serta besarnya jumlah jiwa sudah barang tentu akan terkait dengan masalah pangan, gizi, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan khusus anak menjadi hal krusial yang harus diwujudkan untuk melindungi anak. Sehingga perlunya penguatan kelembagaan anak, perlunya hak sipil dan kebebasan, serta perlindungan khusus terhadap tumbuh kembang anak perlu menjadi perhatian serius.

Data menunjukkan 14,47 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kelompok sangat rawan pangan (asupan kalori <1.400 Kkal/orang/hari), 5,38 persen prevalensi gizi kurang hal ini menunjukkan bahwa foodborne disease merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu diantisipasi bagi tumbuh kembang anak. Secara khusus, peningkatan kapasitas perempuan diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), dan Indeks Pembangunan Gender (IDG). Sedangkan kondisi umum pencapaian dan permasalahan yang dihadapi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Klaten, diantaranya terkait: (1). Penguatan kelembagaan, (2). Hak sipil dan kebebasan, (3). Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (4). Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (5). Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kreatif, serta (6). Perlindungan khusus.

Ukuran keberhasilan meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak diukur dengan indikator: 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan 2) Skor Kabupaten Layak Anak. Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak* disajikan pada Tabel 2.67

Tabel 2.67
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9) *100
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)*	69,42	60,25	72,35	73,34	71,88*)	98,01	74,66	96,28
2	Skor Kabupaten Layak Anak**	Madya 650	Madya (650)	Madya (650)	725	629,80**)	86,87	785	80,13

Sumber: *) BPS Jateng, Up date per 23 November 2022.

**) DISSOSP3APPKB, nilai April 2022

Indikator kinerja keberhasilan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

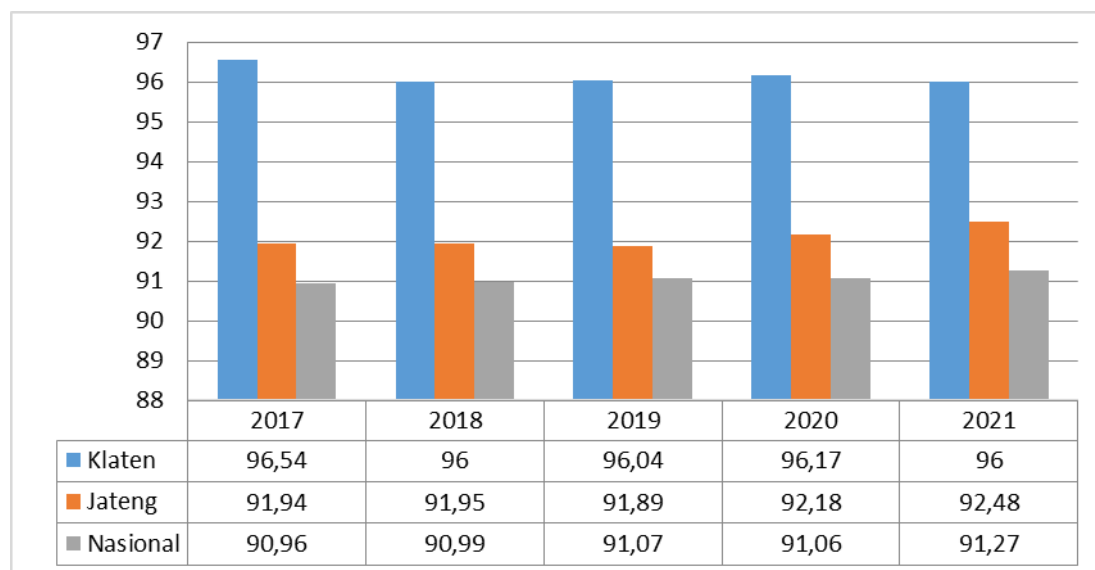
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Adapun perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) antara Klaten, Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.19

Gambar 2.19
Perkembangan IPG Klaten, Jateng, dan Nasional
Tahun 2017-2021



Sumber: BPS, 04 Maret 2022.

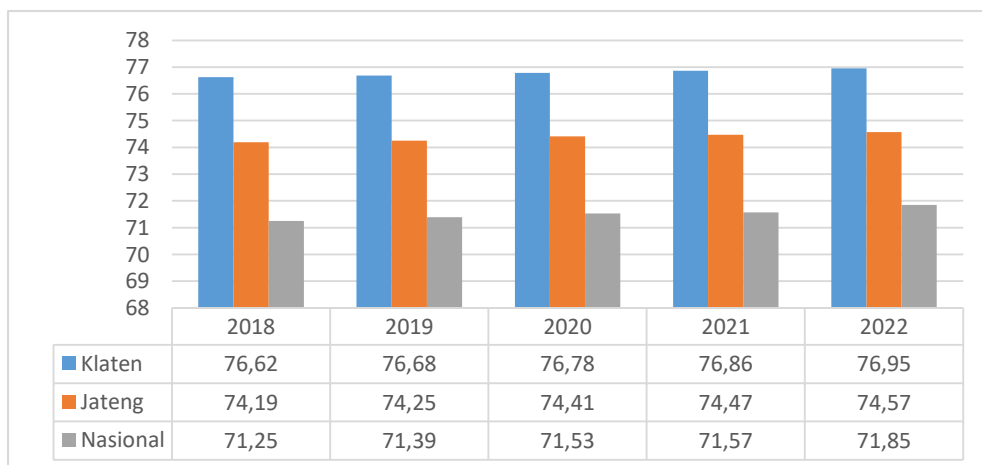
Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Dan berdasarkan Grafik 3.13. menunjukkan bahwa capaian IPG Klaten jauh lebih baik dibanding tingkat Provinsi maupun nasional, artinya kondisi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki semakin sebanding.

Adapun perkembangan Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional selama Tahun 2017-2021, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Ada perkembangan angka harapan Hidup (AHH) Klaten, Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2018-2022 disajikan pada Gambar 2.20

Gambar 2.20
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Klaten, Jateng dan Nasional
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS. Update Terakhir 18 November 2022.

Berdasarkan Gambar 2.20 di atas tampak bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Klaten naik secara konsisten setiap tahunnya. AHH tahun 2020 naik sebesar 0,1 poin dari tahun 2019, tahun 2021 naik sebesar 0,08 poin dari tahun 2020, dan pada tahun 2022 naik 0,09 poin dari tahun 2021. Sedangkan Angka Harapan Hidup Menurut Kelompok Umur di Klaten, Jawa Tengah dan Nasional disajikan pada Tabel 2.68

Tabel 2.68.
Perkembangan Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin
Klaten, Jateng dan Nasional Tahun 2017-2021

Uraian	Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin									
	Laki-laki					Perempuan				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Klaten	74,81	74,87	74,88	75,01	75,10	78,53	78,58	78,60	78,69	78,80
Jateng	72,16	72,28	72,33	72,51	72,61	76,02	76,10	76,16	76,30	76,42
Nasional	69,16	69,30	69,44	69,59	69,67	73,06	73,19	73,33	73,46	73,55

Sumber: BPS, Update Terakhir 04 Maret 2022.

Berdasarkan Tabel 2.68 di atas, Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin selama tahun 2017-2021 kondisi Kabupaten Klaten, posisinya jauh di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional baik untuk jenis kelamin perempuan maupun laki-laki, dan kondisi AHH perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki untuk semua jenjang pemerintahan dalam pencapaian kinerjanya.

Dari sisi ekonomi, pada umumnya laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab yang besar di sektor ekonomi bagi rumah tangganya dibandingkan perempuan. Namun demikian, perempuan yang terlibat di sektor ekonomi menunjukkan trend yang terus meningkat. Keterlibatan perempuan dalam

bekerja ini dikarenakan faktor ekonomi yang mengharuskan untuk bekerja atau karena adanya motivasi lain. Adapun Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.69

Tabel 2.69
Sumbangan Pendapatan Perempuan
Tahun 2017-2021

Kab/Provinsi/Nasional	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Klaten	37,76	37,77	37,81	37,72	37,78
Jateng	34,13	34,28	34,31	34,29	34,60
Nasional	36,62	36,70	37,10	37,26	37,22

Sumber: BPS, April 2022

Sumbangan Pendapatan Perempuan selama Tahun 2017-2021 kondisi Klaten secara rata-rata jauh lebih tinggi dibanding Jawa Tengah maupun Nasional hal ini mengindikasikan bahwa angka partisipasi kerja perempuan juga sudah tinggi.

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender disajikan pada Tabel 2.70

Tabel 2.70
Indikator Indeks Pemberdayaan Gender

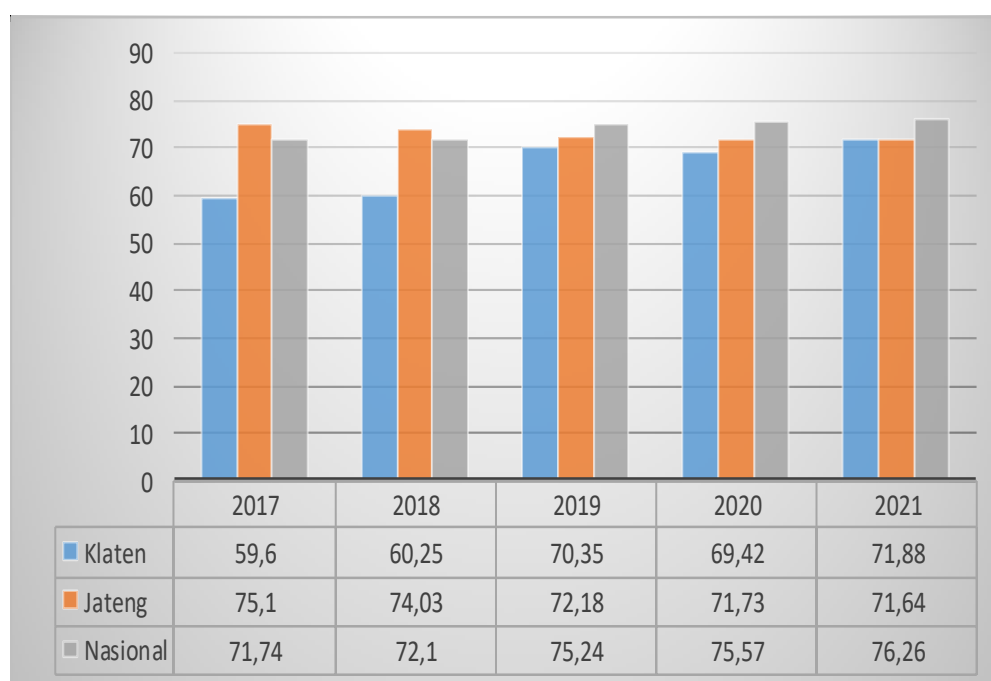
Dimensi (1)	Indikator (2)	Indeks (3)
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi Keterwakilan di Parlemen Laki-Laki dan perempuan	IDG Atau GEM
Pengambilan Keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi pekerja profesional dan teknisi, laki-laki dan perempuan	
Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Non Pertanian, Laki-Laki dan Perempuan	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan yang duduk dalam parlemen, perempuan Pengambilan Keputusan dan perempuan ikut mendistribusi pendapatan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpisah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

Adapun perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) antara Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.21

Gambar 2.21
Perkembangan IDG Klaten, Jateng, dan Nasional
Tahun 2017 - 2021



Adapun perkembangan berbanding Komponen Pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional selama Tahun 2017-2021, disajikan pada Tabel 2.71

Tabel 2.71
Komponen Pembentuk IDG Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

Komponen Pembentuk IPG	Klaten	Jawa Tengah	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
Keterwakilan perempuan dalam parlemen (Persen)	18	18,33	21,89
Perempuan sebagai tenaga profesional, manajer (Persen)	58,46	50,67	49,99
Sumbangan pendapatan	37,78	34,60	37,22
IDG	71,88	71,64	76,26

Sumber: BPS, April 2022

Berdasarkan Tabel 2.71 capaian IDG Kabupaten Klaten sudah di atas rata-rata Jawa Tengah maupun Nasional, hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan sudah tinggi, kecuali keterwakilan perempuan dalam Parlemen Klaten angkanya jauh lebih rendah dibanding Provinsi maupun nasional.

c. Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak dan perempuan ditunjukkan dengan meningkatnya penyelesaian terhadap kasus kekerasan yang berbasis gender dan anak disebabkan karena secara intensif telah dilakukan sosialisasi tentang hukum dan peraturan lainnya berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Tabel 2.72

Tabel 2.72
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Klaten 2018-2022

Tahun	Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		Trafficking		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2018	7	8	2	5	0	22	1	6	0	0	51
2019	6	7	9	3	5	15	4	8	0	0	57
2020	4	11	1	8	0	13	0	3	0	0	40
2021	10	4	4	6	2	16	0	0	0	0	42
2022	0	9	0	9	0	25	0	9	0	1	53

Sumber: DISSOSP3APPKB, Update per 12 Januari 2023.

Berdasarkan Tabel 2.72 sebagaimana tersebut di atas, selama dua tahun terakhir (tahun 2021-2022) jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) mengalami peningkatan sebesar 11 kasus dari tahun 2021 sebesar 42 kasus menjadi 53 kasus di tahun 2022, hal ini disebabkan belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak dalam menghadapi kekerasan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Peningkatan Kapasitas Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Klaten didukung dengan program:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- b. Program Perlindungan Perempuan
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- f. Program Perlindungan Khusus Anak

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- 1) Menurunnya capaian IPG yaitu tahun 2020 sebesar 96,17 menjadi 96,00 di tahun 2021;
- 2) Persentase perempuan di parlemen, berhasil ditingkatkan dari 6% menjadi 18%, namun belum memenuhi kuota 30% perempuan di parlemen sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2021 sebanyak 42 kasus, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebanyak 53 kasus (semua korbannya perempuan).

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan sosial, diantaranya:

- 1) Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten pada tahun 2022 diperkirakan mengalami perbaikan seiring adanya program stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemulihan Ekonomi pada tahun 2022, dapat dilihat dari beberapa sektor usaha dalam bidang konstruksi, perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi yang sudah mulai bangkit dalam usahanya sehingga menyerap banyak pekerja;
- 2) Peningkatan kebijakan pembangunan yang berspektif perempuan dan anak;

- 3) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- 4) Peningkatan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- 5) Peningkatan sistem kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
- 6) Peningkatan pendampingan ibu terhadap stunting anak.

14) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menandakan bahwa, perlunya melaksanakan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sebagai upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, target indikator sasaran yang ditetapkan menjadi alat ukur pencapaian keberhasilan diantaranya: indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan penegakan hukum lingkungan.

Agar kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya, serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya perlu menjaga sumber daya alam secara optimal. Sehingga dampak lingkungan hidup atau pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan perlu diminimalisir. Salah satu upayanya adalah menjaga agar Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan penegakan hukum lingkungan dalam kondisi baik.

Ukuran keberhasilan meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan diukur dengan indikator: 1) Indeks Kualitas Air, 2) Indeks Kualitas Udara, dan 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan* disajikan pada Tabel 2.73

Tabel 2.73
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Kualitas Air	55,9	28,46	36,16	36,63	47,69	130,19	37,59	126,87

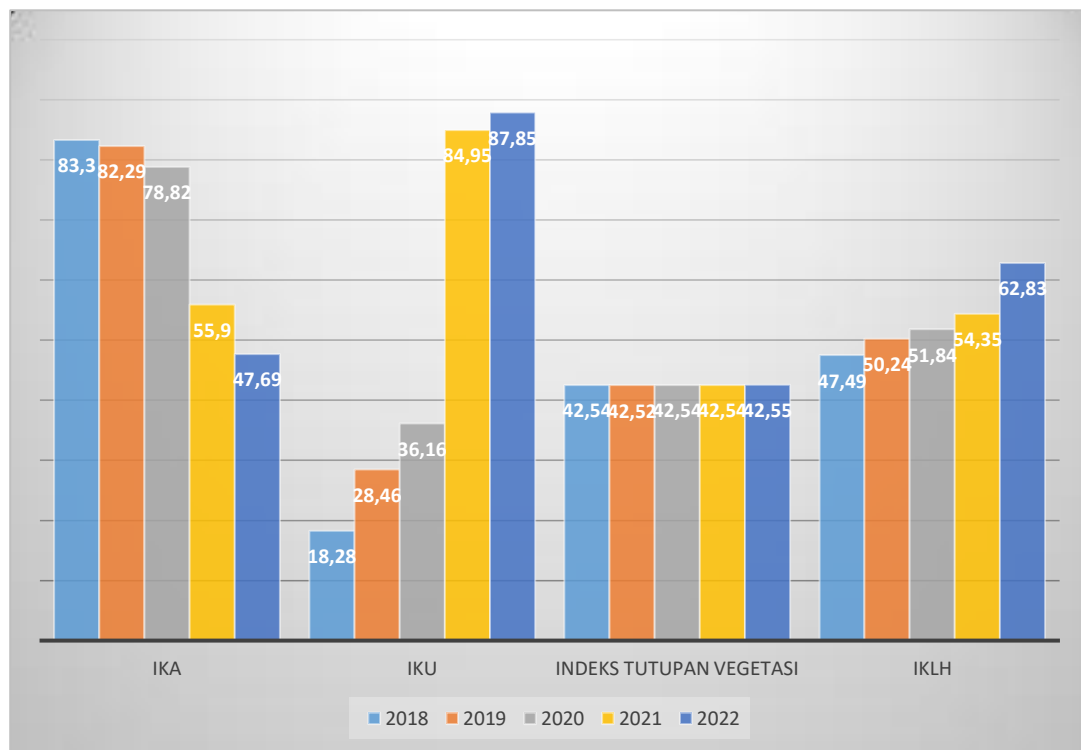
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
2	Indeks Kualitas Udara	84,95	82,29	76,82	77,80	87,85	112,92	79,76	110,14
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	42,54	83,3	42,54	42,90	42,55	99,19	43,62	97,56

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Update Terakhir 20 Pebruari 2023.

Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2022 sebesar 47,69, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 87,85, dan Indeks tutupan vegetasi/lahan sebesar 42,55. Uji sampling udara menggunakan metode pasive sampler dimana keakuratan lebih baik dan lebih mewakili uji kualitas udara di Kabupaten Klaten, pengambilan uji dilakukan selama 24 jam dengan pelaksanaan 2 kali dalam setahun pada 4 titik (kawasan padat penduduk, transportasi, industri dan perkantoran).

Pengambilan uji sampling kualitas air sungai dilakukan hanya beberapa titik menyesuaikan anggaran dan SDM yang terbatas serta antrian pada laboratorium lingkungan yang terakreditasi sangat panjang. Maka, tahun 2022 dilakukan 2 kali pengambilan sampling yaitu pada musim kemarau dan musim hujan pada 11 titik sample dari 6 sungai dan 1 Rowo Jombor yang ada di Kabupaten Klaten dari target 13 titik. Adapun sungai yang dapat dipantau mutu airnya dengan pengambilan sample adalah sebagai berikut : Sungai Rowo Jombor, Sungai Modin, Sungai Soran, Sungai Puser, Sungai Merbung, Sungai Kacang Ijo, dan Sungai Kroman. Berdasarkan capaian IKA, IKU, dan Indeks tutupan vegetasi/lahan selama tahun 2018-2022 capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) disajikan pada Gambar 2.22

Gambar 2.22
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2018-2022



Sumber: DINAS LH, Update per 30 Januari 2023.

Berdasarkan Gambar 2.22, sebagaimana di atas terlihat bahwa indeks air pada tahun 2022 sebesar 47,69 dan dibanding tahun 2021 sebesar 55,9 atau mengalami penurunan sebesar 8,21 poin dan indeks udara pada tahun 2022 sebesar 87,85 dan dibanding tahun 2021 sebesar 84,95 atau mengalami kenaikan sebesar 2,9 poin. Sedangkan Indeks tutupan lahan/vegetasi Kabupaten Klaten tahun 2022 sebesar 42,55 dan dibanding tahun 2021 sebesar 42,54 atau mengalami kenaikan sebesar 0,01. IKLH tahun 2022 sebesar 62,83 telah memenuhi target sebesar 54,68 dan dibandingkan tahun 2021 sebesar 54,35 mengalami kenaikan sebesar 8,48 poin.

Pada tahun 2022 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dari target 100% terealisasi 100%. Data perusahaan yang wajib AMDAL sejumlah 9 dan telah dilaksanakan monitoring/pengawasannya.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup** dilaksanakan dengan program:

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
3. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH;
4. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
5. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; dan

6. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

Permasalahan:

Belum optimalnya capaian Indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2022 karena disebabkan pada waktu pengisian data di website IKLH Kementerian terdapat indikator yang tidak tersedia datanya serta kurangnya penambahan luas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki lingkungan hidup antara lain:

- 1) Mengumpulkan data yang belum tersedia dari berbagai OPD baik tingkat Provinsi, Kementrian dan lainnya.
- 2) Serta menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

15) Meningkatkan Penanganan dan Pengurangan Sampah Serta Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, dan sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus berbasis hak agar penanganan sampah dapat tuntas, yakni :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Ukuran keberhasilan meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) diukur dengan indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS). Adapun capaian sasaran: Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah serta Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) disajikan pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah serta Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3)

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9) *100
1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	58,95	N/a	56,95	59,95	56,08	93,54	66,95	83,76

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana tugas dan fungsi persampahan yang semula di DPUPR dipindah Ke Dinas Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2022 realisasi IKPS sebesar 56,08 atau sebesar 93,54% dari target 59,95. Bila dibanding dengan kondisi awal RPJMD 2021-2026 dimana pada tahun 2021 mengalami penurunan yang mana IKPS sebesar 58,95 atau sebesar 1 poin. Hal ini dikarenakan terbatasnya armada dan ritasi pengangkutan sampah.

Capaian kinerja Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) ini didukung dengan Program :

1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3); dan
2. Program Pengelolaan Persampahan.

Permasalahan:

- 1) Belum optimalnya penanganan sampah yang ditangani di TPA, capaian tahun 2022 sebesar 30,68% (atau 35.366,31 kg/hari), dan pengurangan sampah sebesar 24,99% (atau 58.649,87 kg/hari).

- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana angkutan sampah, saat ini baru memiliki 21 dump truck, 4 truck armroll dan 14 mobil pick-up yang harus menjangkau sasaran 26 kecamatan.

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki lingkungan hidup antara lain:

- 1) Peningkatan kesadaran masyarakat dan layanan sosial dalam pengendalian air limbah domestik;
- 2) Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dan stakeholder terkait sehingga dapat berkerjasama mengatasi permasalahan pencemaran limbah air domestik di sungai;
- 3) Peningkatan penataan lingkungan dan penghijauan lahan serta pengawasan pemanfaatan lahan sesuai ketentuan tata ruang; dan Meningkatkan pengelolaan sampah baik pengurangan (yang melibatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat) maupun penanganan sampah di TPA.

16) Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menandakan bahwa memiliki kondisi Daerah secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Serta memperhatikan potensi terjadinya bencana, baik yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor. Oleh karena itu, mengingat Kabupaten Klaten termasuk daerah yang rawan bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana memperhatikan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Sehingga setiap warga wajib: 1) menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 2) melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan 3) memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Ukuran keberhasilan meningkatnya kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana diukur dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Adapun capaian sasaran: Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana disajikan pada Tabel 2.75

Tabel 2.75
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9) *100
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,92	N/A	0,92	0,92	0,94	102,17	0,92	102,17

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Update Terakhir 12 Januari 2023.

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan selanjutnya dapat digunakan dalam pemutakhiran peta risiko bencana. Berdasarkan atas penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang direkomendasi oleh BPBD Jawa Tengah, pada tahun 2022 IKD Klaten diperoleh hasil sebagai mana Tabel 2.76

Tabel 2.76
Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2022

No	Parameter IKD	Capaian
(1)	(2)	(3)
1	Perkuatan kebijakan kelembagaan	1
2	Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu	1
3	Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik	0,99
4	Penanganan tematik kawasan rawan bencana	1
5	Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana	1
6	Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	0,85
7	Pengembangan sistem pemulihan bencana	0,94
Skor IKD		0,94

Sumber: BPBD Jateng, Update Terakhir 12 Januari 2023.

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta risiko bencana. Penilaian IKD selanjutnya akan digabungkan dengan dokumen kapasitas masyarakat untuk menghasilkan peta kapasitas. Bersama dengan tiga dokumen lainnya, yaitu peta kerentanan, peta bahaya dan rencana

penanggulangan bencana, kemudian pemerintah daerah dapat menyusun peta risiko bencana.

Mengingat kondisi geografis, klimatologis, geologis dan hidrologi yang ada, seluruh kawasan Kabupaten Klaten berpotensi terjadinya bencana alam yang sangat kompleks, diantaranya:

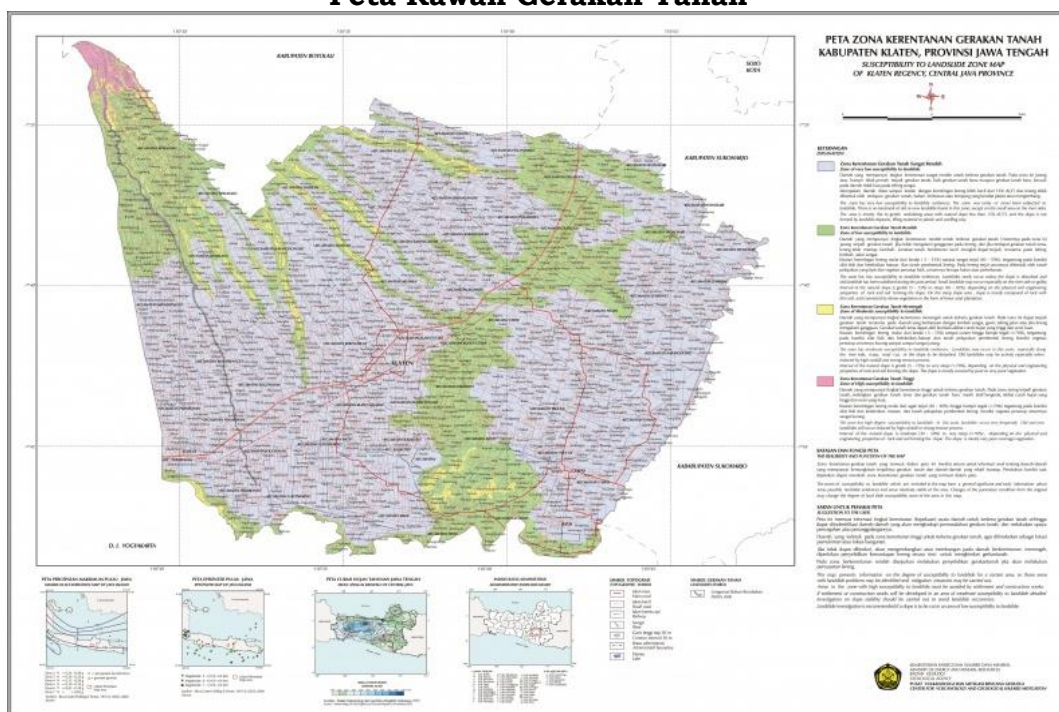
Berdasarkan kondisi geografis, klimatologis, geologis dan hidrologi seluruh kawasan Kabupaten Klaten berpotensi terjadinya bencana alam, dan beberapa kawasan rawan bencana alam adalah sebagai berikut:

a. Kawasan rawan bencana alam tanah longsor meliputi:

- 1) Kecamatan Bayat;
- 2) Kecamatan Cawas;
- 3) Kecamatan Gantiwarno;
- 4) Kecamatan Kemalang;
- 5) Kecamatan Manisrenggo;
- 6) Kecamatan Prambanan; dan
- 7) Kecamatan Wedi.

Adapun peta kawasan rawan bencana tanah longsor Kabupaten Klaten disajikan pada Gambar 2.23

Gambar 2.23
Peta Rawan Gerakan Tanah



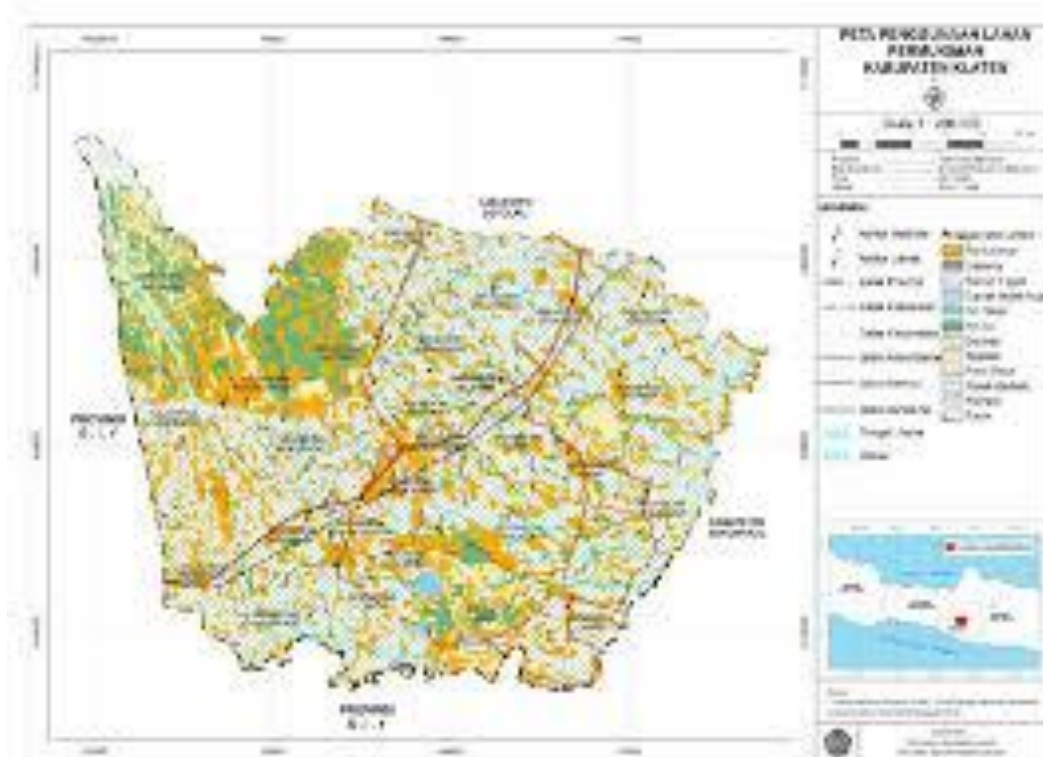
b. Kawasan rawan bencana alam banjir meliputi:

- 1) Kecamatan Bayat;
- 2) Kecamatan Cawas;
- 3) Kecamatan Ceper;
- 4) Kecamatan Gantiwarno;
- 5) Kecamatan Juwiring;
- 6) Kecamatan Karangdowo;

- 7) Kecamatan Pedan;
- 8) Kecamatan Prambanan;
- 9) Kecamatan Trucuk;
- 10) Kecamatan Wedi; dan
- 11) Kecamatan Wonosari.

Adapun Peta Kawasan Bencana Banjir Kabupaten Klaten disajikan pada Gambar 2.24

Gambar 2.24
Peta Kawasan Bencana Banjir Kabupaten Klaten



- c. Kawasan rawan bencana angin topan mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Klaten.

Potensi ancaman bencana yang terjadi di Kabupaten Klaten akan semakin membesar seiring meningkatnya kerentanan masyarakat dalam bidang: perekonomian, pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang mendorong masyarakat menjadi lebih rentan terhadap ancaman bencana.

- d. Kawasan rawan bencana angin topan dan gempa bumi yang meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Klaten.

Potensi ancaman bencana akan semakin meluas seiring meningkatnya kerentanan masyarakat di bidang perekonomian, pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup, dan penataan ruang. Kejadian bencana di Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2018 - 2022 mengalami fluktuatif. Perkembangan kejadian bencana di Kabupaten Klaten tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.77

Tabel 2.77
Perkembangan Kejadian Bencana Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Banjir	3	7	10	6	88
2	Tanah Longsor	8	5	8	15	62
3	Puting Beliung	54	100	116	82	217
4	Kekeringan	-	51	-	195	168
5	Letusan gunung Merapi	-	-	1	-	2
<i>Jumlah</i>		65	163	135	298	537

Sumber: BPBD, Update Terakhir 12 Januari 2023.

Guna meminimalisir kejadian bencana, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan mitigasi bencana baik secara struktural maupun non struktural, mitigasi bencana dilaksanakan dengan membangun zona penghalang antara potensi bencana dengan faktor risiko yang ada. Upaya mitigasi yang telah dilakukan antara lain dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan siaga bencana, pembangunan taman kebencanaan, pelatihan tanggap bencana, pembentukan dan pengembangan sekolah siaga bencana, penyelenggaraan sekolah sungai, pembentukan desa tangguh rencana, pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC).

Capaian kinerja **Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana** ini didukung dengan Program Penanggulangan Bencana.

Permasalahan:

- 1) Luasnya cakupan pelayanan bencana yang harus ditangani, sementara kejadiannya tidak bisa diprediksi;
- 2) Belum semua desa rawan bencana, memiliki kesiapan menjadi desa tangguh bencana, dan sampai dengan tahun 2021 baru 12 desa tangguh bencana, dan pada tahun 2022 menjadi 17 desa.

Solusi:

Mengingat luasan cakupan bencana di Kabupaten Klaten perlunya antisipasi kejadian bencana, dan perlindungan perempuan, anak dan kaum rentan dari bencana sehingga Klaten menjadi Kabupaten tangguh menghadapi bencana.

Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, Pemerintah Kabupaten Klaten menyiapkan 2 aplikasi :

- 1) sivabel (sistem evakuasi bencana ramah divabel) dan
- 2) Sipena (sistem pelaporan bencana dari masyarakat).

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

Untuk mengukur sejauh mana tingkat efektifitas sumber daya pelaksanaan pembangunan Daerah, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2022, diantaranya mencakup: 1) tingkat efisiensi penggunaan anggaran, dan 2) efektifitas penggunaan sumber daya aparatur. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Efisiensi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 ditetapkan 16 (empat belas) sasaran strategis dengan 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Sasaran selanjutnya untuk mengimplementasikan RPJMD, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tahun 2022, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 137 program (berdasarkan jumlah program yang ada OPD) dengan 274 kegiatan dan 782 sub kegiatan. Realisasi fisik tercapai 78,81% dari target rencana 93,8%. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp.3.020.031.884.691,28 dan terserap sebesar Rp. 2.524.601.172.404,28 (atau 83,70%). Secara rinci tingkat pencapaian efektifitas sumber daya antara sasaran dan realisasi keuangan dapat disajikan pada Tabel 2.78

Tabel 2.78
Tingkat Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
1	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan	%	100	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-		-	76.723.900	93,00	Efisien
						Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh wawasan kebangsaan	%	104	-	-	
						Persentase pelajar yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	%	77,78	-	-	
					Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-		-	1.184.569.050	99,8	Efisien
						Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu	%	154	-	-	
						Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	%	100	-	-	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	81,63	684.632.500	99,8	Efisien
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	95,89	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	2.893.451.992	97,23	Tidak efisien
						Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100			
						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	95,80			
						Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	%	100			
						Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	%	100			
					Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama tk. Desa terbentuk	%	294,12	50.984.100	96,20	Efisien
						Cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar	%	97,17	-	-	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase deteksi dini potensi konflik sosial	%	117,6	894.541.200	94,24	Efisien
						Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	%	100	-		
2	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	106,92	Program Penyelenggaraan Pengawasan	-		-	518.684.830	56,06	Efisien
						Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1	%	114,25	-	-	
						Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2	%	114,25	-	-	
						Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3	%	114,25	-	-	
						Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4	%	114,25	-	-	
						Persentase pelaksanaan pengawasan khusus	%	90,19	-	-	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				1.263.939.372	78,56	Efisien
						Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	%	100			
						Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	%	86,96			
		Opini Laporan Keuangan	Opini	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-		-	660.342.732.418	96,16	Efisien
						Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	%	100	-	-	
						Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	%	100	-	-	
						Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	%	93,8	-	-	
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	N/A	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	-		-	5.233.027.027	92,84	N/A

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
						Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo	%	100	-	-	
						Persentase penambahan akses internet di ruang publik	%	100	-	-	
						Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	-	-	
		Indeks Penerapan Sistem Merit	Indeks	127,72	Program Kepegawaian Daerah	-		-	2.001.700.677	76,57	Efisien
						Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi	%	266,25	-	-	
						Persentase Kinerja ASN bernilai baik	%	104,60	-	-	
						Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan	%	111,11	-	-	
						Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	%	329,33	-	-	
					Program Pengembangan Sumber daya Manusia	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya	%	53,48	4.602.861.749	99,57	Efisien
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	101,78	Program Pendaftaran Penduduk	-		-	619.248.019	97,38	Efisien

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
						Persentase perekaman KTP elektronik	%	100,13	-	-	
						Cakupan kepemilikan KK	%	96,31	-	-	
						Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	127,73	-	-	
					Program Pembinaan Perpustakaan	-		-	306.354.432	88,96	Efisien
						Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksemplar)	eksemplar	101,57	-	-	
						Persentase perpustakaan (desa/sekolah) yang dibina	%	120,57	-	-	
					Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	-		-	64.398.000	94,48	Efisien
						Arsip usul musnah (meter lari)	meter lari	3,33	-	-	
						Persentase arsip yang dialihmediakan	%	302,00	-	-	
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	97,42	1.055.755.654.535	77,20	Efisien

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	%	97,79	121.834.750	87,20	Efisien
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	98,75	1.756.244.365	94,27	Efisien
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	%	88,53	3.131.531.380	95,73	Efisien
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	%	98,42	1.522.102.838	90,52	Efisien
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	98,74	1.341.399.100	93,03	Efisien
						Persentase desa tertib administrasi	%	97,80	-	-	
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	-		-	754.652.579	73,27	Efisien
						Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100,36			
						Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	%	534,20			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	-		-	16.730.407.282	81,19	Efisien
						Persentase pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda	%	75			
						Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran (%)	%	100			
						Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan (%)	%	100			
4	Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	265,99	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina (%)	%	65,22	4.268.493.840	87,60	Efisien
		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	325	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	2.722.198.195	85,93	Efisien

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
						Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi	%	100,00			
						Persentase PKL yang terbina	%	24,35			
						Jumlah pendapatan retribusi pasar	Rp.	153,91			
					Program Pengembangan Ekspor	Jumlah komoditas yang mampu ekspor	Jenis	100,00	157.709.000	57,35	Efisien
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	98,77	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	-		-	4.096.071.299	95,75	Efisien
						Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kw/Ha	106,61			
						Produktivitas cabe	Kw/Ha	106,79			
						Produktivitas tembakau rajang	Kw/Ha	98,36			
						Produktivitas tembakau asepan	Kw/Ha	101,73			
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	68,67	23.375.000	93,50	Efisien
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	103,89	536.463.630	91,76	Efisien
		Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	2049,20	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	%	100	6.680.299.928	92,17	Efisien

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat intensitas promosi pariwisata	%	100,72	160.311.804	96,66	Efisien
5	Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi PMDN	%	316,00	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengembangan iklim investasi	%	100,00	223.957.150	90,67	Efisien
		Persentase peningkatan investasi PMA	%	13900,00	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Potensi investasi yang siap ditawarkan	%	100,00	391.667.390	91,42	Efisien
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan pelayanan penanaman modal	%	100,00	164.745.920	81,58	Efisien
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	%	100,00	237.557.475	87,78	Efisien
6	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	100,05	Program Penyelenggaraan Jalan	-		-	117.229.798.201	83,50	Efisien
						Persentase jalan kondisi baik	%	38,44			
						Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	88,06			
		Persentase drainase dalam kondisi baik	%	100,85	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	%	100,85	1.181.626.000	94,43	Efisien

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	108,22	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	115,48	6.819.229.498	84,99	Efisien
7	Meningkatnya capaian universal access (100-0-100)	Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	99,35	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	100	1.331.166.200	86,55	Efisien
					Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	%	100,50	7.159.451.900	99,02	Efisien
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	%	99,12	3.548.075.996	89,87	Efisien
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	103,94	3.710.384.142	91,62	Efisien
8	Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	107,50	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	-		-	800.082.796	64,83	Efisien
						Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	%	99,29			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
						Persentase pelayanan ketataruangan	%	100			
						Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	%	100			
					Program Penatagunaan Tanah	Persentase dokumen penataan guna tanah yang tersusun	%	100	754.714.800	94,10	Efisien
9	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan	Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service)	Nilai	100	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kecelakaan lalu lintas	%	145	5.324.994.930	91,96	Efisien
10	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	99,11	Program Pengelolaan Pendidikan	-		-	37.418.257.850	92,64	Efisien
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	102,71		APM SD/MI/Paket A	%	94,87			
						APM SMP/MTs/Paket B	%	95,47			
						APK PAUD	%	103,07			
						Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,96			
						Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV	%	102,28			
						Persentase SD berakreditasi minimal B	%	99,67			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
						Persentase SMP berakreditasi minimal B	%	99,93			
						Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	%	145,09			
						APK SD/MI/Paket A	%	94,87			
						APK SMP/MTs /Paket B	%	95,46			
						APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun	%	713,33			
		Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	100	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan	%	100	1.639.881.304	99,39	Efisien
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan (%)	%	100	417.669.808	98,74	Efisien
					Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Koleksi Museum yang dilestarikan (%)	%	0	0	0	
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	100,14	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-		-	68.133.791.106	90,02	Efisien
						Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil	%	93,19			
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	99,99			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	97,30			
						Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	95,16			
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	71,12			
						Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	97,78			
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	95,22			
						Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	86,77			
						Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100			
						Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	97,38			
						Persentase orang terduga TBC	%	49,82			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
						mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar					
						Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	93,58			
						Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	%	103,54			
						Cakupan STBM	%	142,86			
						Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100			
						Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100			
						Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	104,15			
						Penderita diare yang ditangani	%	731,00			
						Angka Kejadian HIV	/1000 penduduk	63,16			
						Insiden Tuberkulosis (ITB)	/1000 penduduk	342,86			
						Angka kejadian Malaria	/1000 penduduk	199,5			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
						Persentase orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	%	911,9			
						Angka Kejadian DBD (/100.000 penduduk)	/1000 penduduk	211,00			
						Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC (<i>Universal Health Coverage</i>)	%	100,42			
						Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya	%	97,00			
						Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya	%	100			
						Persentase Puskesmas terpenuhi obat dan vaksin	%	81,46			
						Persentase pelayanan lab klinis dan lab air	%	98,62			
						Persentase Sistem Informasi Kesehatan	%	100			
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	-		-	5.942.532.508	67,52	Efisien
						Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	%	91,10			
						Cakupan PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	87,96			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	-		-	3.219.197.286	55,12	Efisien
						Cakupan Anggota BKB yang menjadi peserta KB	%	84,26			
						Cakupan Anggota BKR yang menjadi peserta KB	%	61,95			
						Cakupan Anggota BKL yang menjadi peserta KB	%	35,05			
						Cakupan Anggota UPPKS yang menjadi peserta KB	%	65,73			
						Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	N/A			
12	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	%	129,46	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	98,98	1.461.464.202	88,72	Efisien
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti	%	133,09	2.268.279.816	93,00	Efisien
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	116,50	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	19,20	1.121.094.938.	95,87	Efisien

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	168,10	2.731.883.145	63,99	Efisien
		Indeks Desa Membangun	Indeks	100	Program Administrasi Pemerintahan Desa	-		-	3.890.428.764	94,43	Efisien
						Persentase BUMDes berkembang dan Maju	%	96,01			
						Persentasei desa yang telah menerapkan aplikasi SISKEUDES dalam penatausahaan keuangan	%	100			
13	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	98,01	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD (%)	%	27,5	156.753.608	94,81	Efisien
		Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	86,87	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase desa/kelurahan layak anak	%	142,65	331.800.686	98,75	Tidak efisien

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas air	Indek	130,19	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				411.820.222	84,52	Efisien
		Indeks kualitas udara	Indeks	112,92		Cakupan pemantauan kualitas air	%	100			
		Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	99,19		Cakupan pemantauan kualitas udara	%	100			
						Presentase kampung iklim yang terbentuk	%	100			
15	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	93,54	Program Pengelolaan Sampah	-		-	14.913.084.739	86,71	Efisien
						Persentase timbulan sampah yang berkurang	%	86,81			
						Persentase timbulan sampah yang tertangani	%	89,93			
16	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	102,17	Program Penanggulangan Bencana				2.213.509.560	89,69	Efisien
						Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
						Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100			
						Persentase kelompok relawan bencana yang aktif	%	100			
						Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100			

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2022 (setelah reuiu Inspektorat)

Berdasarkan Tabel 2.78 untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya dengan membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran dengan realisasi pencapaian serapan anggaran indikator kinerja program. Apabila **realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran lebih besar** daripada **realisasi serapan anggaran pencapaian indikator kinerja anggaran program**, maka dinyatakan **efisien**. Begitu juga **sebaliknya, apabila realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran lebih kecil** daripada **realisasi serapan pencapaian indikator kinerja anggaran program**, maka dinyatakan **tidak efisien**. Atas dasar pengukuran tersebut, dari 34 (tiga puluh empat) indikator sasaran dengan sebanyak 62 (enam puluh dua) program pendukung visi-misi bupati dan 1 (satu) program yang tidak dianggarkan yaitu Program Pengelolaan Permuseuman sehingga diperoleh hasil yang efisiensi sebanyak 59 program (atau 95,16%), yang tidak efisiensi sebanyak 2 program (atau 3,23%) yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan yang N/A sebanyak 1 program (atau 1,61%) yaitu pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

2) Efektifitas Sumber Daya

Pengertian efektif adalah [1] ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); [2] dapat membawa hasil; [3] berhasil guna. Menurut [2], efektivitas adalah suatu keadaan dimana kemampuan suatu sistem sesuai dengan keinginan pengguna. Menurut [3] efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan.

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Menurut Richard Steer, efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum. Efektivitas diukur dengan menggunakan standar sesuai dengan acuan Litbang Depdagri (1991) seperti pada Tabel 2.79

Tabel 2.79
Rasio Efektifitas Sumber Daya

No	Rasio Efektifitas	Tingkat Capaian	Kodefikasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	< 40	Sangat Tidak Efektif	
2	40 – 59,99	Tidak Efektif	
3	60 – 79,79	Efektif	
4	> 80	Sangat Efektif	

Sumber: Litbang Depdagri (1991).

Sehingga untuk mengukur tingkat sumber daya berdasarkan capaian indikator sasaran strategis tahun 2022 dengan mengacu Tabel 2.80 disandingkan dengan Tabel 2.79, maka tingkat efektifitas sumber daya dapat disajikan pada Tabel 2.80.

Tabel 2.80
Efektifitas Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Efektifitas
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	1.1	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (<i>Ipoleksosbud</i>) yang diselesaikan	%	100	100	100,00	Sangat efektif
		1.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	95,89	95,89	Sangat efektif
2	Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah	2.1	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	71	75,91	106,92	Sangat efektif
		2.2	Peringkat/ Nilai SAKIP	Nilai	62	65,14	105,06	Sangat efektif
		2.3	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100	Sangat efektif
		2.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,2	N/A	N/A	N/A
		2.5	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	202	258	127,72	Sangat efektif
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82	83,46	101,78	Sangat efektif
4	Mengoptimalkan Sektor Unggulan Dalam Pertumbuhan Ekonomi	4.1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	1,47	3,91	265,99	Sangat efektif
		4.2	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	1,24	4,03	325	Sangat efektif
		4.3	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	1,63	1,61	98,77	Sangat efektif
		4.4	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	3,13	64,14	2049,20	Sangat efektif
5	Meningkatnya Investasi Daerah	5.1	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	%	50	158	316,00	Sangat efektif
		5.2	Persentase Peningkatan Investasi PMA	%	1	139	13900,00	Sangat efektif
6	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah	6.1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	91,06	91,11	100,05	Sangat efektif
		6.2	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	61,47	61,99	100,85	Sangat efektif
		6.3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	41,5	44,91	108,22	Sangat efektif
7	Meningkatnya Capaian Universal Acces (100-0-100)	7.1	Persentase Capaian <i>Universal Access</i> (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	98,32	97,68	99,35	Sangat efektif
8	Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang	8.1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	88,40	95,03	107,50	Sangat efektif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Efektifitas
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalulintas Penyelenggaraan Angkutan	9.1	Kinerja Lalu Lintas (<i>Level Of Service</i>)	Nilai	0,62	0,62	100,00	Sangat efektif
10	Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing	10.1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,52	13,40	99,11	Sangat efektif
		10.2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,85	9,09	102,71	Sangat efektif
		10.3	Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	5	5	100,00	Sangat efektif
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	11.1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76.84	76,95	100,14	Sangat efektif
12	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	12.1	Persentase PMKS yang tertangani	%	67,5	87,39	129,46	Sangat efektif
		12.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,16	4,31*)	116,50	Sangat efektif
		12.3	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7034	0,7034	100,00	Sangat efektif
13	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak	13.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	73,34	71,88	98,01	Sangat efektif
		13.2	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	725	629,80	86,87	Sangat efektif
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	14.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	36,63	47,69	130,19	Sangat efektif
		14.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	77,80	87,85	112,92	Sangat efektif
		14.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	42,90	42,55	99,18	Sangat efektif
15	Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah Serta Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3)	15.1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	59,95	56,08	93,54	Sangat efektif
16	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	16.1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,92	0,94	102,17	Sangat efektif

Sumber: Capaian RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2022 (setelah reviu Inspektorat)

*) Angka Sementara

Berdasarkan Tabel 2.80 dapat disimpulkan tingkat efektifitas sumber daya, dengan perincian:

1. Sangat efektif sebanyak 33 (atau 97,06% dari 34 indikator sasaran),
2. Tidak ada hasil (N/A) 1 (atau 2,94% indikator sasaran).

g. Analisa Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Target Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.81

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Target Kinerja

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja
		Indikator	Satuan	Renca na	Reali sasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan	%	100	100	100	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
							Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
							Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	95,89	95,89	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja
		Indikator	Satuan	Renca na	Reali sasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
								Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
							Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
							Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
2	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	71	75,91	106,92	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
								Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		Peringkat/ Nilai SAKIP	Nilai	62	65,14	105,06	Program Administrasi Umum (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)	Penataan Organisasi
							Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
								Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja
		Indikator	Satuan	Renca na	Reali sasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
								Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
								Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,2	N/A	N/A	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
								Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Indeks Penerapan Sistem Merit	Indeks	202	258	127,72	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
								Mutasi dan Promosi ASN
								Pengembangan Kompetensi ASN
								Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja
		Indikator	Satuan	Renca na	Reali sasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Program Pengembangan Sumber daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis
								Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82	83,46	101,78	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
								Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
							Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
								Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
							Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
								Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
								Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja
		Indikator	Satuan	Renca na	Reali sasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
								Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
								Administrasi Umum Perangkat Daerah
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja
		Indikator	Satuan	Renca na	Reali sasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
								Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
							Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
								Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
							Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
							Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
							Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
								Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
								Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
								Pengembangan Inovasi dan Teknologi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja
		Indikator	Satuan	Renca na	Reali sasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
								Pembahasan Kebijakan Anggaran
								Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
								Peningkatan Kapasitas DPRD
								Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
								Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
								Fasilitasi Tugas DPRD
4	Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	1,47	3,91	265,99	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	1,24	4,03	325	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
								Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
							Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja
		Indikator	Satuan	Renca na	Reali sasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	1,63	1,61	98,77	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
								Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
							Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
							Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
								Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	3,13	64,14	2049,20	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
								Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
								Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
								Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
							Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja
		Indikator	Satuan	Renca na	Reali sasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi PMDN	%	50	158	316,00	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
								Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
		Persentase peningkatan investasi PMA	%	1	139	13900,00	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
							Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
							Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	91,06	91,11	100,05	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
		Persentase drainase dalam kondisi baik	%	61,47	61,99	100,85	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	41,5	44,91	108,22	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja
		Indikator	Satuan	Renca na	Reali sasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
								Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
7	Meningkatnya capaian universal access (100-0-100)	Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	98,32	97,68	99,35	Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
								Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
							Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja
		Indikator	Satuan	Renca na	Reali sasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	88,4	95,03	107,50	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
								Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
							Program Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
9	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan	Kinerja Lalu Lintas (<i>Level Of Service</i>)	Nilai	0,62	0,62	100	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
								Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
								Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
								Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
								Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
								Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
								Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
								Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
								Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
10	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,52	13,40	99,11	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
								Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
								Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
								Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja
		Indikator	Satuan	Renca na	Reali sasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,85	9,09	102,71	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
								Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
								Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
								Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	5	5	100	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
								Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
							Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
								Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,84	76,95	100,14	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
								Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja
		Indikator	Satuan	Renca na	Reali sasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
								Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
							Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
								Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
								Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
								Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja
		Indikator	Satuan	Renca na	Reali sasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
								Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
12	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	%	67,5	87,39	129,46	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
							Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
								Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,16	4,31	116.50	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
								Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja
		Indikator	Satuan	Renca na	Reali sasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
								Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
								Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
								Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7034	0,7034	100	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
13	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,34	71,88	98,01	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
								Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
								Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja
		Indikator	Satuan	Renca na	Reali sasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	725	629,80	86,87	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
								Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas air	Indeks	36,63	47,69	130,19	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Indeks kualitas udara	Indeks	77,80	87,85	112,92		
		Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	42,90	42,55	99,19		
15	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	59,95	56,08	93,54	Program Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja
		Indikator	Satuan	Renca na	Reali sasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,92	0,94	102,17	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
								Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
								Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2022 (setelah rewiu Inspektorat), diolah

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dengan alokasi dana berasal dari pemberi tugas, yang dilaksanakan oleh daerah dan ataupun desa.

1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Peraturan perundang-undangan yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten adalah :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/ PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/ Pmk.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Alokasi dana tugas pembantuan kepada Kabupaten merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi yang diberikan sesuai dengan beban dan jenis penugasan, dengan kewajiban Kabupaten melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada

kementerian/lembaga/Pemerintah Provinsi yang memberikan penugasan. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2022 adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten

B. Program dan Kegiatan

Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten. Program dan Kegiatan dalam Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

A. Bidang Sarana dan Prasarana pertanian

- a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian
- b) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

B. Bidang Tanaman Pangan

- a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas terdiri dari Kegiatan Pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan dan Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan.
- b) Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan.

C. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.220.559.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.219.899.500,00 atau sebesar 99,97%. Adapun rincian pelaksanaan Tugas Pembantuan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Bidang Sarana dan Prasarana pertanian

- a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Adapun alokasi anggaran program tersebut sebesar Rp2.110.033.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.109.533.000 sehingga persentase capaian anggaran sebesar 99,98%.

b) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Adapun alokasi anggaran program tersebut sebesar Rp78.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp78.490.500,00 sehingga persentase capaian anggaran sebesar 99,99%.

B. Bidang Tanaman Pangan

a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas terdiri dari Kegiatan Pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan dan Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan. Adapun alokasi anggaran Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp16.306.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.156.000,00 sehingga persentase capaian anggaran sebesar 99,08%.

b) Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan. Adapun alokasi anggaran Program tersebut sebesar Rp.15.720.000,- dan terealisasi sebesar Rp 15.720.000,- sehingga persentase capaian anggaran sebesar 100%.

3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Diselenggarakan oleh Daerah

Kabupaten/Kota

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Klaten tidak mendapat Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Diselenggarakan oleh Daerah

Kabupaten/Kota

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas pembantuan Provinsi yang diterima Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten selama tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel 3.1. Dari Tabel terlihat bahwa capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebesar 100% artinya target yang dicanangkan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini seluruhnya tercapai.

3.1.1 Target Kinerja

Target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh Provinsi atas pelaksanaan Tugas Pembantuan dapat dilihat dalam tabel 3.1

3.1.2 Realisasi

Realisasi program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Kabupaten Klaten atas pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Provinsi dapat dilihat dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi
yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/062 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/036 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Pada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022	1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Klaten	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten		2.110.033.000	2.109.533.000	99,98			
			<i>a. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian</i>				<i>1.545.000.000</i>	<i>1.545.000.000</i>	<i>100</i>			
			1).Pembangunan Embung Pertanian			1 unit	120.000.000	120.000.000	100	1 unit	100	
			2). Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier			19 unit	1.425.000.000	1.425.000.000	100	19 unit	100	
			<i>b. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian</i>				<i>15.000.000</i>	<i>15.000.000</i>	<i>100</i>			

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
			1). Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian			Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian	15.000.000	15.000.000	100	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian	100	
			<i>c. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida</i>				<u>533.985.000</u>	<u>533.485.000</u>	<u>99,91</u>			
			1). Penyusunan e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi			Penyusunan e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	300.475.000	300.475.000	100	Terlaksananya penyusunan e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	100	
			2). Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi			Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi	233.510.000	233.010.000	99,79	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi	100	

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
			<i>d. Fasilitas Pembiayaan Pertanian</i>				<u>16.048.000</u>	<u>16.048.000</u>	<u>100</u>			
			1). Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Asuransi Pertanian			Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Asuransi Pertanian	16.048.000	16.048.000	100	Terlaksananya Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Asuransi Pertanian	100	
			2. Program Dukungan Manajemen				78.500.000	78.490.500	99,99			
			<i>a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian</i>				<u>78.500.000</u>	<u>78.490.500</u>	<u>99,99</u>			
			1). Layanan Umum			Layanan Umum	78.500.000	78.490.500	99,99	Terlaksananya Layanan Umum	100	
2.	Bidang Tanaman Pangan	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/062 Tahun	1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi	Klaten	Dinas Ketahanan Pangan dan		16.306.000	16.156.000	99,08			

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET	
		2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/036 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Pada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022	Pangan Berkualitas		Pertanian Kabupaten Klaten								
	<i>a. Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan</i>						<u>10.036.000</u>	<u>9.986.000</u>	<u>99,50</u>				
	1). Sosialisasi, Pembinaan dan Monev Kegiatan Akabi Kab. Klaten		Sosialisasi, Pembinaan dan Monev Kegiatan Akabi Kab. Klaten			10.036.000	9.986.000	99,50	Terlaksananya Sosialisasi, Pembinaan dan Monev Kegiatan Akabi Kab. Klaten	100			
	<i>b. Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal dan Tanaman Pangan</i>					<u>6.270.000</u>	<u>6.170.000</u>	<u>98,41</u>					

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
			1). Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi			Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	6.270.000	6.170.000	98,41	Terlaksananya Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	100	
			2. Program Dukungan Manajemen				15.720.000	15.720.000	100			
			<i>a. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen TP</i>				<i>15.720.000</i>	<i>15.720.000</i>	100			
			1). Pengelolaan Perbendaharaan Kabupaten			Pengelolaan Perbendaharaan Kabupaten	15.720.000	15.720.000	100	Terlaksananya Pengelolaan Perbendaharaan Kabupaten	100	
JUMLAH							2.220.559.000	2.219.899.500	99,97			

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun 2023

3.3 Permasalahan dan Kendala

Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak ditemukan hambatan/permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak ditemukan hambatan/permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan. Saran dan Tindak Lanjut secara umum adalah dengan meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi sebagai pemberi tugas pembantuan dan Pemerintah Kabupaten sebagai penerima Tugas Pembantuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang ada.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Bidang pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, urusan Pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki 3 jenis layanan dasar SPM yang harus dipenuhi. Jenis pelayanan dasar urusan Pendidikan tersebut yaitu :

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Jenis Pemenuhan mutu Pelayanan Dasarnya adalah :

- a. Buku gambar;
- b. Alat mewarnai;
- c. Penyediaan biaya personil Peserta Didik;
- d. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV;
- e. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV.

2) Pendidikan Dasar

Jenis Pemenuhan mutu Pelayanan Dasarnya adalah :

- a. Buku teks pelajaran;
- b. Perlengkapan belajar;
- c. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV;
- d. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat;
- e. Jumlah rombongan belajar di satuan Pendidikan;
- f. Penyediaan biaya personil peserta didik;
- g. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV;
- h. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C.

3) Pendidikan Kesetaraan

Jenis Pemenuhan mutu Pelayanan Dasarnya adalah :

- a. Modul belajar;

- b. Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- c. Penyediaan biaya personil peserta didik;
- d. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV;
- e. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV;
- f. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat;
- g. Perlengkapan belajar;
- h. PKBM Terakreditasi minimal C.

4.1.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada lampiran huruf A Nomor 5.b mengenai target dan indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota, bahwa telah ditetapkan target capaian setiap tahunnya yaitu 100% untuk setiap jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaiannya. Berikut tabel rencana target capaian dan indikator penerima layanan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022.

Tabel 4.1
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan
Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	160.182	Setiap tahun	1) Buku teks pelajaran 2) Perlengkapan belajar 3) Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV 4) Kualitas tenaga	1)29.418 set 2)2.108 pkt 3)654 orang 4)1.164 org	Setiap tahun	37.884.105,78
		Rata-rata kemampuan literasi	1. Rata-rata kemampuan literasi	Setiap tahun				

		dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	sebesar 2,05 2.Rata-rata kemampuan numerasi sebesar 1,90		kependidikan (Tenaga Admin/ Tenaga Lab/ Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat			
					5) Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	5) 6.793 Rmb		
					6) Penyediaan biaya personil peserta didik	6) 82.134 anak		
					7) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	7) 9.147 orang		
					8) Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	8) 845 sklh		
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.586	Setiap tahun	1) Modul belajar 2) Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 3) Penyediaan biaya personil peserta didik 4) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV 5) Kualitas tenaga	1) 1.586 set 2) 12 rombel 3) 1.210 orang 4) 122 orang 5) 8 orang	Setiap tahun	331.856,70

		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	1. Rata-rata kemampuan literasi sebesar 2,05 2. Rata-rata kemampuan numerasi sebesar 1,90	Setiap tahun	kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV 6) Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/se derajat 7) Perlengkapan belajar 8) Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	6)15 orang 7)1.210 org 8)12 PKBM		
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	34.678	Setiap tahun	1) Buku gambar 2) Alat mewarnai 3) Penyediaan biaya personil Peserta Didik 4) Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV 5) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1)32.595 pkt 2)32.595 pkt 3)18.754 anak 4)681 orang 5)1.770 orang	Setiap tahun	2.607.673,825

Pada pelayanan dasar pendidikan anak usia dini dengan indikator Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD target sasaran penerima layanan dasar sebanyak 34.678 anak dan

mendapatkan mutu minimal pelayanan dasar dengan anggaran sebesar Rp.2.607.673.825,-

Pada pelayanan dasar pendidikan dasar dengan indikator Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, target sasaran penerima layanan dasar sebanyak 160.182 siswa dan mendapatkan mutu minimal pelayanan dasar dengan anggaran sebesar Rp.37.884.105.784,-

Pada pelayanan dasar pendidikan kesetaraan dengan indikator Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan target sasaran penerima layanan dasar sebanyak 1.586 siswa dan mendapatkan mutu minimal pelayanan dasar dengan anggaran sebesar Rp. 331.856.700,-

4.1.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah. Berikut ini tabel realisasi capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022:

Tabel 4.2
Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	34.678	34.678	100	2.607.673,83	2,442.669,53	93,67
2.	Pendidikan Dasar	160.812	160.812	100	37.884.105,78	35.456.688,54	93,59
3.	Pendidikan Kesetaraan	1.586	1.586	100	331.856,70	294.156,58	88,64

Tabel 4.3
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	34.678	34.678	100	80
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Buku gambar	32.595	32.595	100	20
2.	Alat mewarnai	32.595	32.595	100	20
3.	Penyediaan biaya personil Peserta Didik	18.754	18.754	100	20
4.	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	681	681	100	20
5.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.770	1.657	93,62	18,72
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					19,74

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Dasar	160.812	16.0812	100	80
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Buku teks pelajaran	29.418	29.418	100	20
2.	Perlengkapan belajar	2.108	2.108	100	20

3.	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	654	654	100	20
4.	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	1.164	1.164	100	20
5.	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	6.793	6.793	100	20
6.	Penyediaan biaya personil peserta didik	82.134	82.134	100	20
7.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	9.147	9.147	100	20
8.	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	845	845	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Kesetaraan	1.586	1.586	100	80
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Modul belajar	1.586	1.586	100	20
2.	Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	12	12	100	20
3.	Penyediaan biaya personil peserta didik	1.210	1.210	100	20
4.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	122	122	100	20
5.	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	8	8	100	20

6.	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	15	15	100	20
7.	Perlengkapan belajar	1.210	1.210	100	20
8.	PKBM Terakreditasi minimal C	12	4	33,33	6,66
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					18,33

Tabel 4.4
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	80+19,74 = 99,74	TUNTAS PARIPURNA
2.	Pendidikan dasar	80+20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
3.	Pendidikan Kesetaraan	80+18,33 = 98,33	TUNTAS UTAMA

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2022 di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan sebesar Rp. 40.823.636.309,- dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022

NO	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.000)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	-	2.607.673,83	
2.	Pendidikan Dasar	-	37.884.105,78	
3.	Pendidikan Kesetaraan	-	331.856,70	

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022 sebanyak 13.393 orang. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan
Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SD/ sederajat	-
2	SMP/ sederajat	-
3	SMA/SMK/ sederajat	742
4	DILOMA	727
4	Strata 1	11.715
5	Strata 2	209
	Jumlah	13.393

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan, dan langkah- langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Berikut ini tabel permasalahan yang dialami dalam penerapan dan SPM Bidang Pendidikan.

Tabel 4.7
Kendala Yang Dihadapi Bidang Pendidikan

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
	Eksternal		
1.		Partisipasi anak usia sekolah jenjang pendidikan anak usia dini masih rendah dibandingkan dengan partisipasi pendidikan dasar serta masih terdapat anak usia sekolah yang putus atau tidak sekolah.	1.Perluasan akses pendidikan anak usia dini melalui program 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) lembaga PAUD 2.Perluasan akses pendidikan dasar melalui kegiatan penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas rusak sedang/berat. 3.Melakukan pendataan Anak Tidak Sekolah berkerjasama dengan instansi terkait
2.		Belum semua pendidik terutama pada jenjang PAUD yang memiliki kualifikasi pendidikan sarjana	Mendorong pendidik untuk menempuh pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.
3.		Belum semua PKBM terakreditasi minimal C, disebabkan pada saat dilakukan penilaian oleh asesor, kendala utama adalah pemenuhan sarana prasaran yang tidak memadai	Pemenuhan sarana prasaran PKBM secara bertahap dan mendorong lembaga PKBM menjalin kerjasama dengan pihak lain melalui program CSR.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, urusan Kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki 12 indikator SPM yang harus dipenuhi. Jenis pelayanan dasar urusan kesehatan tersebut yaitu :

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Jenis Pemenuhan mutu Pelayanan Dasarnya adalah :

- a. Vaksin Tetanus Difteri (Td);
- b. Tablet Tambah Darah;
- c. Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin;
- d. Kartu ibu/rekam medis ibu;
- e. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- f. Dokter/dokter spesialis kebidanan;
- g. Bidan;
- h. Perawat.

2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Jenis Pemenuhan mutu Pelayanan Dasarnya adalah :

- a. Formulir Partograf;
- b. Kartu ibu (rekam medis);
- c. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- d. Dokter/dokter spesialis kebidanan;
- e. Bidan;
- f. Perawat.

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Jenis Pemenuhan mutu Pelayanan Dasarnya adalah :

- a. Vaksin Hepatitis B0;
- b. Vitamin K1 injeksi;
- c. Salep/tetes mata antibiotik;
- d. Formulir bayi baru lahir;
- e. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM);
- f. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- g. Dokter/dokter spesialis Anak;
- h. Bidan;
- i. Perawat.

4) Pelayanan Kesehatan Balita

Jenis Pemenuhan mutu Pelayanan Dasarnya adalah :

- a. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku;

- b. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK);
- c. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA);
- d. Vitamin A Biru;
- e. Vitamin A Merah;
- f. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella;
- g. Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella;
- h. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP);
- i. Peralatan Anafilaktik;
- j. Bidan;
- k. Dokter;
- l. Perawat;
- m. Ahli Gizi;
- n. Guru PAUD;
- o. Kader Kesehatan.

5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Jenis Pemenuhan Pelayanan Dasarnya adalah :

- a. Buku raport kesehatanku;
- b. Buku pemantauan Kesehatan;
- c. Kuesioner skrining Kesehatan;
- d. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah;
- e. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah;
- f. Dokter/Dokter gigi;
- g. Bidan;
- h. Perawat;
- i. Ahli Gizi;
- j. Tenaga Kesehatan Masyarakat;
- k. Guru;
- l. Kader Kesehatan.

6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Jenis Pemenuhan Pelayanan Dasarnya adalah :

- a. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE);
- b. Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes;
- c. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM);
- d. Dokter;
- e. Bidan;

- f. Perawat;
 - g. Ahli Gizi;
 - h. Tenaga Kesehatan Masyarakat;
 - i. Tenaga Non Kesehatan Terlatih.
- 7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
- Jenis Pemenuhan Pelayanan Dasarnya adalah :
- a. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol;
 - b. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G);
 - c. Buku kesehatan lansia;
 - d. Dokter;
 - e. Bidan;
 - f. Perawat;
 - g. Ahli Gizi;
 - h. Tenaga Kesehatan Masyarakat;
 - i. Tenaga Non Kesehatan Terlatih.
- 8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- Jenis Pemenuhan Pelayanan Dasarnya adalah :
- a. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE);
 - b. Tensimeter;
 - c. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM);
 - d. Dokter;
 - e. Bidan;
 - f. Perawat;
 - g. Tenaga Kesehatan Masyarakat.
- 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- Jenis Pemenuhan Pelayanan Dasarnya adalah :
- a. Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet;
 - b. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM);
 - c. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE);
 - d. Dokter;
 - e. Bidan;
 - f. Perawat;
 - g. Ahli Gizi;
 - h. Tenaga Kesehatan Masyarakat.

10) Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat

Jenis Pemenuhan Pelayanan Dasarnya adalah :

- a. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia);
- b. Kit berisi 2 Alat Fiksasi;
- c. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan;
- d. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE);
- e. Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.

11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis

Jenis Pemenuhan Pelayanan Dasarnya adalah :

- a. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner);
- b. Reagen Zn TB;
- c. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95;
- d. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering;
- e. Catridge tes cepat molekuler;
- f. Formulir pencatatan dan pelaporan;
- g. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru;
- i. Perawat;
- j. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM);
- k. Penata Rontgen;
- l. Tenaga kesehatan masyarakat;
- m. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai.

12) Pelayanan Kesehatan Pada Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

Jenis Pemenuhan Pelayanan Dasarnya adalah :

- a. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner);
- b. Tes cepat HIV (RDT) pertama;
- c. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesua;
- d. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK;
- e. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin;
- f. Perawat ;
- g. Bidan;
- h. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM);

i. Tenaga Kesehatan Masyarakat;

j. Tenaga Non Kesehatan Terlatih/mempunyai kualifikasi tertentu

4.2.2 Target Pencapaian SPM

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan standar pelayanan minimal bidang Kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							ANGGARAN (Rp .000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil	100% (13.447 orang)	Setiap tahun	Alat deteksi resiko Ibu Hamil	100 %	(13.447 buah)	Setiap tahun	2.553.072,535
					Buku KIA	100 %	(13.447 orang)	Setiap tahun	
					Vaksin Td	100 %	(13.447 orang)	Setiap tahun	
					Tablet tambah darah	100 %	(13.447 orang)	Setiap tahun	
					Kartu ibu/rekam medis ibu	100 %	(13.447 orang)	Setiap tahun	
					Dokter/Dokter Spesialis Kandungan	100 %	(383 orang)	Setiap tahun	
					Bidan	100 %	(912 orang)	Setiap tahun	
					Perawat	100 %	(2.240 orang)	Setiap tahun	
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (KF3)	100% (13.288 orang)	Setiap tahun	Buku KIA	100 %	13.288 orang	Setiap tahun	676.291
					Formulir Partograf	100 %	(13.288 orang)	Setiap tahun	
					Kartu ibu (rekam medis)	100 %	(13.288 orang)	Setiap tahun	
					Dokter/Dokter Spesialis Kandungan	100 %	(383 orang)	Setiap tahun	
					Bidan	100 %	(912 orang)	Setiap tahun	
					Perawat	100 %	(2.240 orang)	Setiap tahun	

3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN3)	100% (12.966 orang)	Setiap tahun	Buku KIA	100 %	(12.966 orang)	Setiap tahun	138.858
					Formulir MTBM	100 %	(12.966 orang)	Setiap tahun	
					Vaksin Hepatitis B0	100 %	(12.966 orang)	Setiap tahun	
					Salep/tetes mata antibiotik	100 %	(12.966 orang)	Setiap tahun	
					Vitamin K1 injeksi	100 %	(12.966 orang)	Setiap tahun	
					Formulir bayi baru lahir	100 %	(12.966 orang)	Setiap tahun	
					Dokter/ Dokter Spesialis Anak	100 %	(383 orang)	Setiap tahun	
					Bidan	100 %	(912 orang)	Setiap tahun	
					Perawat	100 %	(2.240 orang)	Setiap tahun	
4.	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100% (64.821 orang)	Setiap tahun	Peralatan Anafilaktik	100 %	(64.821 orang)	Setiap tahun	1.949.601
					KPSP/instrumen standar lain yang berlaku	100 %	(64.821 orang)	Setiap tahun	
					Buku KIA	100 %	(64.821 orang)	Setiap tahun	
					Formulir DDTK	100 %	(64.821 orang)	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi lanjutan: DPT -HB - HIB, Campak, Rubella	100 %	(64.821 orang)	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT - HB -Hib, Campak, Rubella	100 %	(64.821 orang)	Setiap tahun	
					Vitamin A Biru	100 %	(7.048 orang)	Setiap tahun	
					Vitamin A Merah	100 %	(64.821 orang)	Setiap tahun	
					Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	100 %	(64.821 orang)	Setiap tahun	
					Bidan	100 %	(912 orang)	Setiap tahun	
					Dokter	100 %	(383 orang)	Setiap tahun	
					Perawat	100 %	(2.240 orang)	Setiap tahun	
					Ahli Gizi/Nutrisi	100 %	(128 orang)	Setiap tahun	
Kader Kesehatan	100 %	(11.458 orang)	Setiap tahun						

5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Cakupan Skrining Kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan)	100% (164.123 orang)	Setiap tahun	<i>Kuesioner skrining kesehatan</i>	100 %	(164.123 orang)	Setiap tahun	1.155.256
					<i>Buku pemantauan kesehatan</i>	100 %	(164.123 orang)	Setiap tahun	
					<i>Formulir rekapitulasi hasil PKU sekolah & remaja di luar sekolah</i>	100 %	(164.123 orang)	Setiap tahun	
					<i>Buku raport kesehatan</i>	100 %	(164.123 orang)	Setiap tahun	
					<i>Formulir rekapitulasi hasil PKU sekolah & remaja di dalam sekolah</i>	100 %	(164.123 orang)	Setiap tahun	
					<i>Dokter</i>	100 %	(383 orang)	Setiap tahun	
					<i>Dokter Gigi</i>	100 %	(81 orang)	Setiap tahun	
					<i>Bidan</i>	100 %	(912 orang)	Setiap tahun	
					<i>Perawat</i>	100 %	(2.240 orang)	Setiap tahun	
					<i>Ahli Gizi/Nutrisi onis</i>	100 %	(128 orang)	Setiap tahun	
					<i>Tenaga Kesehatan Masyarakat</i>	100 %	(115 orang)	Setiap tahun	
					<i>Kader Kesehatan</i>	100 %	(11.458 orang)	Setiap tahun	

6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Cakupan Skrining Kesehatan Sesuai Standar pada usia produktif (15-59 tahun)	100% (712.412 orang)	Setiap tahun	<i>Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)</i>	100 %	(712.412 orang)	Setiap tahun	1.111.562
					<i>Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes</i>	100 %	(712.412 orang)	Setiap tahun	
					<i>Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)</i>	100 %	(712.412 orang)	Setiap tahun	
					<i>Perawat</i>	100 %	(2.240 orang)	Setiap tahun	
					<i>Dokter</i>	100 %	(383 orang)	Setiap tahun	
					<i>Bidan</i>	100 %	(912 orang)	Setiap tahun	
					<i>Ahli Gizi/Nutrisi onis</i>	100 %	(128 orang)	Setiap tahun	
					<i>Tenaga Kesehatan Masyarakat</i>	100 %	(115 orang)	Setiap tahun	
					<i>Tenaga Non Kesehatan Terlatih (Kader)</i>	100 %	(11.458 orang)	Setiap tahun	

7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Cakupan Skrining Kesehatan sesuai standar pada lansia (>=60 tahun)	100% (201.750 orang)	Setiap tahun	<i>Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol</i>	100 %	(201.750 orang)	Setiap tahun	687.022
					<i>Buku kesehatan lansia</i>	100 %	(201.750 orang)	Setiap tahun	
					<i>Instrumen GDS, Instrumen AMT dan Instrumen ADL dalam P3G</i>	100 %	(201.750 orang)	Setiap tahun	
					<i>Dokter</i>	100 %	(383 orang)	Setiap tahun	
					<i>Bidan</i>	100 %	(912 orang)	Setiap tahun	
					<i>Perawat</i>	100 %	(2.240 orang)	Setiap tahun	
					<i>Ahli Gizi/Nutrisi onis</i>	100 %	(128 orang)	Setiap tahun	
					<i>Tenaga Kesehatan Masyarakat</i>	100 %	(115 orang)	Setiap tahun	
					<i>Tenaga Non Kesehatan Terlatih (Kader)</i>	100 %	(11.458 orang)	Setiap tahun	
					8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100% (281.225 orang)	
<i>Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)</i>	100 %	281.225 orang)	Setiap tahun						
<i>Tensimeter</i>	100 %	281.225 orang)	Setiap tahun						
<i>Dokter</i>	100 %	(383 orang)	Setiap tahun						
<i>Bidan</i>	100 %	(912 orang)	Setiap tahun						
<i>Perawat</i>	100 %	(2.240 orang)	Setiap tahun						
<i>Tenaga Kesehatan Masyarakat</i>	100 %	(115 orang)	Setiap tahun						

9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus	100% (37.610 orang)	Setiap tahun	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	100 %	(37.610 orang)	Setiap tahun	96.350
					Glukometer , Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	100 %	(37.610 orang)	Setiap tahun	
					Pedoman dan media Komuni kasi, Informasi, Edukasi (KIE)	100 %	(37.610 orang)	Setiap tahun	
					Dokter	100 %	(383 orang)	Setiap tahun	
					Bidan	100 %	(912 orang)	Setiap tahun	
					Perawat	100 %	(2.240 orang)	Setiap tahun	
					Ahli Gizi/Nutrisi onis	100 %	(128 orang)	Setiap tahun	
					Tenaga Kesehatan Masyara kat	100 %	(115 orang)	Setiap tahun	
					10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa berat	100% (2.861 orang)	
Kit berisi 2 Alat Fiksasi	100 %	(2.861 orang)	Setiap tahun						
Penyedi aan formulir pencatatan dan pelaporan	100 %	(2.861 orang)	Setiap tahun						
Media Komuni kasi, Informasi, Edukasi (KIE)	100 %	(2.861 orang)	Setiap tahun						
Dokter terlatih jiwa	100 %	(4 orang)	Setiap tahun						
Perawat terlatih jiwa	100 %	(4 orang)	Setiap tahun						

11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TBC	100% (7.133 orang)	Setiap tahun	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/ Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	100 %	(7.133 orang)	Setiap tahun	269.591
					Catridge tes cepat molekuler	100 %	(7.133 orang)	Setiap tahun	
					Formulir pencatatan dan pelaporan	100 %	(7.133 orang)	Setiap tahun	
Pedoman/ Standar Operasional Prosedur (SOP)	100 %	(7.133 orang)	Setiap tahun						
Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	100 %	(7.133 orang)	Setiap tahun						
Reagen Zn TB	100 %	(7.133 orang)	Setiap tahun						
Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	100 %	(7.133 orang)	Setiap tahun						
Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	100 %	(43 orang)	Setiap tahun						
Penata Rontgen	100 %	(77 orang)	Setiap tahun						
Tenaga non Kesehatan Terlatih (Kader Kes.)	100 %	(11.458 orang)	Setiap tahun						
Tenaga Kesehatan Masyarakat	100 %	(115 orang)	Setiap tahun						
Dokter/ Dokter Spesialis	100 %	(383 orang)	Setiap tahun						
Perawat	100 %	(2.240 orang)	Setiap tahun						

12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).	Cakupan pelayanan skrining kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100% (15.885 orang)	Setiap tahun	<i>Tes cepat HIV (RDT) pertama</i>	100 %	(15.885 orang)	Setiap tahun	763.265
					<i>Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)</i>	100 %	(15.885 orang)	Setiap tahun	
					<i>Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK</i>	100 %	(15.885 orang)	Setiap tahun	
					<i>Bahan Medis Habis Pakai, Hand schoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/ Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/ Vac utainer dan Jarum Sesuai</i>	100 %	(15.885 orang)	Setiap tahun	
					<i>Dokter/ Dokter Spesialis</i>	100 %	(383 orang)	Setiap tahun	
					<i>Perawat</i>	100 %	(2.240 orang)	Setiap tahun	
					<i>Bidan</i>	100 %	(912 orang)	Setiap tahun	
					<i>Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)</i>	100 %	(43 orang)	Setiap tahun	
					<i>Tenaga Kesehatan Masyarakat</i>	100 %	(115 orang)	Setiap tahun	
					<i>Tenaga non Kesehatan Terlatih</i>	100 %	(11.458 orang)	Setiap tahun	

4.2.3 Realisasi

Tabel 4.9
Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.447	13.447	100,00	2.553.072,535	1.637.394,723	64,13
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.288	13.287	99,99	676.291	193.878,262	28,67
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.966	12.966	100,00	138.858	46.929,364	33,80
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	64.821	61.686	95,16	1.949.601	1.328.017,479	68,12
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	164.123	154.333	94,03	1.155.256	408.360,538	35,35
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	712.412	712.412	100,00	1.111.562	803.114,143	72,25
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	201.750	201.750	100,00	687.022	408.414,808	59,45
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	281.225	281.225	100,00	129.050	57.472,988	44,54
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	37.610	37.610	100,00	96.350	72.474,987	75,22
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	2.861	2.861	100,00	193.508	108.782,099	56,22
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.133	7.133	100,00	269.591	154.796,113	57,42
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	15.885	15.885	100,00	763.265	713.659,522	93,50

Tabel 4.10
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan
Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.447	13.447	100	80
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil	13.447	13.447	100	20
2.	Buku KIA	13.447	13.447	100	20
3.	Vaksin Td	13.447	13.447	100	20
4.	Tablet tambah darah	13.447	13.447	100	20
5.	Kartu ibu/rekam medis ibu	13.447	13.447	100	20
6.	Dokter/Dokter Spesialis Kandungan	383	383	100	20
7.	Bidan	912	912	100	20
8.	Perawat	2.240	2.240	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.288	13.287	99,99	79,99
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Buku KIA	13.288	13.288	100	20
2.	Formulir Partograf	13.288	13.288	100	20
3.	Kartu ibu (rekam medis)	13.288	13.288	100	20
4.	Dokter/Dokter Spesialis Kandungan	383	383	100	20

5.	Bidan	912	912	100	20
6.	Perawat	2.240	2.240	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.966	12.966	100	80
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Buku KIA	12.966	12.966	100	20
2	Formulir MTBM	12.966	12.966	100	20
3	Vaksin Hepatitis B0	12.966	12.966	100	20
4	Salep/tetes mata antibiotik	12.966	12.966	100	20
5	Vitamin K1 injeksi	12.966	12.966	100	20
6	Formulir bayi baru lahir	12.966	12.966	100	20
7	Dokter/Dokter Spesialis Anak	383	383	100	20
8	Bidan	912	912	100	20
9	Perawat	2.240	2.240	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	64.821	61.686	95,16	76,13
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Peralatan Anafilaktik	64.821	64.821	100	20

2	KPSP/instrumen standar lain yang berlaku	64.821	64.821	100	20
3	Buku KIA	64.821	64.821	100	20
4	Formulir DDTK	64.821	64.821	100	20
5	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT -HB -HIB, Campak, Rubella	64.821	64.821	100	20
6	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	64.821	64.821	100	20
7	Vitamin A Biru	7048	7.048	100	20
8	Vitamin A Merah	64.821	64.821	100	20
9	Bidan	912	2.240	100	20
10	Dokter	383	383	100	20
11	Perawat	2.240	2.240	100	20
12	Ahli Gizi/Nutrisisionis	128	128	100	20
13	Kader Kesehatan	11458	11.458	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	164.123	154.333	94,03	75,23
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Kuesioner skrining kesehatan	164.123	164.123	100	20
2	Buku pemantauan kesehatan	164.123	164.123	100	20
3	Formulir rekapitulasi hasil PKU sekolah & remaja di luar sekolah	164.123	164.123	100	20
4	Buku raport kesehatanku	164.123	164.123	100	20

5	Formulir rekapitulasi hasil PKU sekolah & remaja di dalam sekolah	164.123	164.123	100	20
6	Dokter	383	383	100	20
7	Dokter Gigi	81	81	100	20
8	Bidan	912	912	100	20
9	Perawat	2.240	115	100	20
10	Ahli Gizi/Nutrisisionis	128	128	100	20
11	Tenaga Kesehatan Masyarakat	115	115	100	20
12	Kader Kesehatan	11.458	11.458	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	712.412	712.412	100	80
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	712.412	712.412	100	20
2	Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	712.412	712.412	100	20
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	712.412	712.412	100	20
4	Perawat	2.240	2.240	100	20
5	Dokter	383	383	100	20
6	Bidan	912	912	100	20

7	Ahli Gizi/Nutrisionis	128	128	100	20
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	115	115	100	20
9	Kader Kesehatan	11458	11.458	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	201.750	201.750	100	80
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	201.750	201.750	100	20
2	Buku kesehatan lansia	201.750	201.750	100	20
3	Instrumen GDS, Instrumen AMT dan Instrumen ADL dalam P3G	201.750	201.750	100	20
4	Dokter	383	383	100	20
5	Bidan	912	912	100	20
6	Perawat	2.240	2.240	100	20
7	Ahli Gizi/Nutrisionis	128	128	100	20
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	115	115	100	20
9	Kader Kesehatan	11.458	11.458	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	281.225	281.225	100	80
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	281.225	281.225	100	20
2	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	281.225	281.225	100	20
3	Tensimeter	281.225	281.225	100	20
4	Dokter	383	383	100	20
5	Bidan	912	912	100	20
6	Perawat	2.240	2.240	100	20
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	115	115	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	37.610	37.610	100	80
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	37.610	37.610	100	20
2	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	37.610	37.610	100	20
3	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	37.610	37.610	100	20
4	Dokter	383	383	100	20
5	Bidan	912	912	100	20
6	Perawat	2.240	2.240	100	20
7	Ahli Gizi/Nutrisionis	128	128	100	20
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	115	115	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	2.861	2.861	100	80,00
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Buku PPDGJ III atau Buku PDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	2.861	2.861	100	20
2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	2.861	2.861	100	20
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	2.861	2.861	100	20
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2.861	2.861	100	20
5	Dokter terlatih jiwa	4	4	100	20
6	Perawat terlatih jiwa	4	4	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	7.133	7.133	100	80
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	7.133	7.133	100	20
2	Catridge tes cepat molekuler	7.133	7.133	100	20
3	Formulir pencatatan dan pelaporan	7.133	7.133	100	20
4	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	7.133	7.133	100	20
5	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	7.133	7.133	100	20
6	Reagen Zn TB	7.133	7.133	100	20
7	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	7.133	7.133	100	20
8	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	43	43	100	20
9	Penata Rontgen	77	77	100	20
10	Tenaga non Kesehatan Terlatih (Kader Kes.)	11.458	11.458	100	20
11	Tenaga Kesehatan Masyarakat	115	115	100	20
12	Dokter/Dokter Spesialis	383	383	100	20
13	Perawat	2240	2240	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	15.885	15.885	100	80
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Tes cepat HIV (RDT) pertama	15.885	15.885	100	20
2	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	15.885	15.885	100	20
3	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	15.885	15.885	100	20
4	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	15.885	15.885	100	20
5	Dokter/Dokter Spesialis	383	383	100	20
6	Perawat	2.240	2.240	100	20
7	Bidan	912	912	100	20
8	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	43	43	100	20
9	Tenaga Kesehatan Masyarakat	115	115	100	20
10	Tenaga non Kesehatan Terlatih	11.458	11.458	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20

Tabel 4.11
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	79,99 + 20 = 99,99	TUNTAS PARIPURNA
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	76,13 + 20 = 96,13	TUNTAS UTAMA
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	75,23+20 = 95,23	TUNTAS UTAMA
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebesar Rp 9.723.426.535,- dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan
Tahun 2022

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.000)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	2.553.072,535	-
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	676.291,-	-
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	138.858,-	-
4	Pelayanan Kesehatan Balita	-	1.949.601,-	-
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	-	1.155.256,-	-
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	-	1.111.562,-	-
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	687.022,-	-
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	129.050,-	-
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	96.350,-	-
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	-	193.508,-	-
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	269.591,-	-
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	763.265,-	-

4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022 seperti terinci pada tabel berikut :

Tabel 4.13
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan
Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Dokter Spesialis	249
2	S1 Kedokteran	383
3	S1 Kedokteran Gigi	81
4	D3-S1 Perawat	2.240
5	D3/D4/S1 Kebidanan	912
6	D3/D4/S1 Nutrisionis	115
7	D3/D4/S1 Kesehatan Masyarakat	128
8	D3-S1 Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	43
9	D3-S1 Penata Rontgen	77
10	D3-S1 Fisioterapi	37
11	D3-S1 Teknisi Medis	103
12	D3-S1 Sanitarian	45
13	D3-S1 Apoteker	30

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.14
Kendala Yang Dihadapi Bidang Kesehatan

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal		
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Masih adanya 1 kasus persalinan yang ditolong oleh non nakes karena kehamilan yang tidak diinginkan dan disembunyikan sehingga lahir dirumah dan ditolong oleh Keluarga	Penyuluhan kesehatan reproduksi pada remaja, pendampingan ibu hamil oleh kader, optimalisasi kelas ibu hamil, melakukan advokasi ke pejabat yang berwenang untuk pengoptimalan Kepmenkes yang mengatur bidan desa domisili di desa
2.	Pelayanan Kesehatan Balita	Balita yang sudah masuk ke PAUD ada yang tidak datang ke posyandu, balita yang tidak domisili	kunjungan rumah pada balita yang tidak hadir dalam posyandu, bekerjasama dengan

		tetap sehingga tidak ketahuan apakah mendapatkan pelayanan dinilai pertumbuhan minimal 8 kali dan perkembangan 2 kali	guru PAUD untuk pelayanan balita, optimalisasi pencatatan dan pelaporan penimbangan balita di posyandu
3.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Awal tahun 2022 masih terjadi pembatasan pertemuan pembelajaran	Setelah pembelajaran dilaksanakan offline, maka mengejar target pelayanan pada usia pendidikan dasar
4.		Masih kurangnya koordinasi lintas bidang dan lintas sektor dalam penerapan SPM	Melakukan rapat koordinasi mengenai penerapan SPM
II	Eksternal		
1		Masih kurangnya koordinasi lintas bidang dan lintas sektor dalam penerapan SPM	Melakukan rapat koordinasi mengenai penerapan SPM

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- 2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Mutu pelayanan dasar dalam SPM pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penerima Layanan Dasar SPM ini adalah Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum. Mutu pelayanan dasar SPM Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari meliputi:

- a. Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)
- b. Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)
- c. Jaringan perpipaan
- d. Jaringan bukan perpipaan

Mutu pelayanan dasar dalam SPM pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Kuantitas ditunjukkan pada setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah, sedangkan Kualitas Pelayanan Dasar Domestik meliputi :

- a. Kuantitas akses pengolahan air limbah domestic
- b. Kualitas pelayanan air limbah domestic
- c. Sub-Sistem pengolahan setempat
- d. Sub-sistem pengangkutan
- e. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)
- f. Pengolahan lumpur tinja (IPAL)

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian
SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		Anggaran (Rp.000)	
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.201.063 jiwa	Setiap Tahun	Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1.201.063 jiwa	Setiap Tahun	95.000
					Kualitas air (keruh, berwarna, berbau, berbusa, berbau)	1.201.063 jiwa	Setiap Tahun	57.390
					Jaringan perpipaan	421.484 jiwa	Setiap Tahun	3.790.822
					Jaringan bukan perpipaan	779.579 jiwa	Setiap Tahun	5.000
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1.277.455 jiwa	Setiap Tahun	Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	1.277.455 jiwa	Setiap Tahun	50.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		Anggaran (Rp.000)	
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Kualitas pelayanan air limbah domestik	1.277.455 jiwa	Setiap Tahun	250.000
					Sub-Sistem pengolahan setempat	6 IPAL	Setiap Tahun	2.407.866
					Sub-sistem pengangkutan	824.000 liter	Setiap Tahun	660.000
					Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	1 IPLT	Setiap Tahun	132.076
					Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	6 IPAL	Setiap Tahun	550.000

Target penerima layanan dasar Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebanyak 1.201.063 jiwa atau 94,02% dari keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 1.277.455 jiwa. Target tersebut disesuaikan dengan target tahun 2022 pada RPJMD Kabupaten Klaten. Sedangkan untuk penerima layanan dasar Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebanyak 1.277.455 jiwa atau 100% keseluruhan penduduk.

4.3.3 Realisasi

Hasil capaian SPM urusan Pekerjaan Umum untuk Penyediaan kebutuhan pokok air minum dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16
Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.201.063 jiwa	1.190.459 jiwa	99,12	3.948.212	3.548.076	89,87
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	1.277.455 Jiwa	1.277.455 jiwa	100	4.049.942	3.710.384	91,62

Tabel 4.17
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.201.063	1.190.459	99,12	79,29
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
1	2	Jumlah Mutu barang/ jasa yang dilakukan	Jumlah Mutu Barang/ jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1.201.063 jiwa	1.190.459 jiwa	99,12	19,82
2.	Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	1.201.063 jiwa	1.190.459 jiwa	99,12	19,82
3.	Jaringan perpipaan	421.484 jiwa	415.858 jiwa	98,67	19,73
4.	Jaringan bukan perpipaan	779.579 jiwa	779.579 jiwa	100	20,00
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					19,84

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	1.277.455	1.277.455	100	80
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu barang/ jasa yang dilakukan	Jumlah Mutu Barang/ jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	1.277.455 jiwa	1.277.455 jiwa	100	20
2.	Kualitas pelayanan air limbah domestik	1.277.455 jiwa	1.277.455 jiwa	100	20
3.	Sub-Sistem pengolahan setempat	6 IPAL	6 IPAL	100	20
4.	Sub-sistem pengangkutan	824.000 liter	824.000 liter	100	20
5.	Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	1 IPLT	1 IPLT	100	20
6.	Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	6 IPAL	6 IPAL	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20

Tabel 4.18
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	79,29% + 19,84% = 99,14%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	80% + 20,00%= 100%	TUNTAS PARIPURNA

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Tahun 2022 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Sebesar Rp7.998.154.000,- dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.19
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022

NO	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.000)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	-	3.948.212	-
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	-	4.049.942	-

4.3.5 Dukungan Personil

Rincian dukungan personil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2022 sebanyak 191 PNS dan 226 THL. Dengan rincian PNS sebagai berikut:

Tabel 4.20
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)
1.	SD	7
2.	SLTP	9
3.	SLTA	77
4.	Diploma	17
5.	S- 1	72
6.	S- 2 / S-3	9
Total		191

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten terkait dengan implementasi standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum beserta solusinya antara lain:

Tabel 4.21
Kendala Yang Dihadapi Bidang Pekerjaan Umum

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal		
		Daya dukung dan kualitas air baku makin terbatas	Pemetaan dan pencarian sumber air baku dari sumur dalam yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas.
		Tidak semua desa memiliki sumber air baku.	Penggunaan sumber air baku di desa lain terdekat.
		Belum semua desa memiliki lembaga pengelola air bersih yang handal.	Pengembangan SDM dan Kelembagaan SPAM.
		Belum memiliki database air minum yang detail	Pengelolaan database air minum yang update dan detail.
		Belum tersedianya masterplan air limbah domestik.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
		IPLT yang dimiliki kapasitasnya terbatas.	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT.
		Minimnya armada dan personil sedot tinja.	Penyediaan armada truk pengangkut tinja dan personil
		Belum ada kerjasama Pemda dengan pihak swasta terkait pengelolaan air limbah domestik, diharapkan dengan kerjasama tersebut dapat memaksimalkan fungsi IPLT	Menjalin kerjasama dengan pihak swasta.
		Belum optimalnya media sosialisasi berkaitan sanitasi aman dan layak.	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
II	Eksternal		
		Keterbatasan kemampuan fiskal keuangan.	Penggunaan sumber dana lain seperti dari CSR dan menjalin kerjasama dengan pihak swasta.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri PU PR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Penyediaan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota; dan
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Fasilitasi berupa pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pelayanan informasi, dan bantuan teknis.

Mutu pelayanan dasar dalam SPM penyediaan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PU PR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Mutu pelayanan dasar SPM penyediaan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota meliputi:

- 1) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana;
- 2) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana;
- 3) Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana;
- 4) Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.

Mutu pelayanan dasar dalam SPM Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PU PR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Mutu pelayanan dasar SPM Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- 1) Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan;
- 2) Subsidi uang sewa;
- 3) Penyediaan rumah layak huni.

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan standar pelayanan minimal bidang Perumahan Rakyat dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.22
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM
Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	-	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	-	-	-
			3 Unit (12 orang)	Setiap Tahun	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	3 Unit (12 orang)	Setiap Tahun	162.500,-
			-	-	Pembaruan kembali rumah bagi korban bencana	-	-	-
			-	-	Pembaruan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	-	-	-
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	-	-	Subsidi uang sewa	-	-	-
			-	-	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	-	-	-
			1 Unit (4 orang)	Setiap Tahun	Penyediaan rumah layak huni	1 Unit (4 orang)	Setiap Tahun	127.500,-

Pada pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dengan indikator Jumlah Warga Negara korban

bencana yang memperoleh rumah layak huni terdapat di dalam mutu Rehabilitasi rumah bagi korban bencana mempunyai target 3 unit rumah atau setara 12 orang dengan anggaran Rp162.500.000,.

Pada pelayanan dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten dengan indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdapat di dalam mutu Penyediaan rumah layak huni mempunyai target 1 unit rumah atau setara dengan 4 orang dengan anggaran Rp127.500.000,-.

4.4.3 Realisasi

Tabel 4.23
Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	3 unit (12 orang)	- (tidak terjadi bencana)	100 %	162.500	61.970,9	38,14
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten	1 unit (4 orang)	- (tidak terjadi relokasi)	100 %	127.500	10.460,5	8,20

Tabel 4.24
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	3 unit (12 orang)	- (tidak terjadi bencana)	- (tidak terjadi bencana)	80 (tidak terjadi bencana)

NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	-	-	-	-
2.	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	3 unit (12 orang)	-	-	20 (tidak terjadi bencana)
3.	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	-	-	-	-
4.	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	-	-	-	-
TOTAL INDEKS MUTU LAYANAN DASAR					20
No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten	1 unit (4 orang)	- (tidak ada relokasi)	- (tidak ada relokasi)	80 (tidak ada relokasi)
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	-	-	-	-
2.	Subsidi uang sewa	-	-	-	-
3.	Penyediaan rumah layak huni	1 unit (4 orang)	-	-	20 (tidak ada relokasi)
TOTAL INDEKS MUTU LAYANAN DASAR					20

Tabel 4.25
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat
Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100% (tidak terjadi bencana)	TUNTAS PARIPURNA
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten	100% (tidak ada relokasi)	TUNTAS PARIPURNA

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2022 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Sebesar Rp290.000.000,- dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.26
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat
Tahun 2022

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.000)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana		162.500,-	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten		127.500,-	

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022 sebanyak 19 orang. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.27
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat
Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1	SMA	2
2	SMK	4
3	STM	1
4	Strata 1	9
5	Strata 2	3
Total		19

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.28
Kendala Yang Dihadapi Bidang Perumahan Rakyat

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I Internal			
1.		Belum tersedianya database perumahan dilokasi yang berpotensi terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.	Menganggarkan mengenai pendataan perumahan dilokasi yang berpotensi terkena realokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota pada tahun 2023
2.		Penganggaran sudah dilakukan, namun belum berdasarkan perhitungan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini karena tidak bisa memprediksi kejadian bencana	Tetap menganggarkan sebagai antisipasi terhadap bencana yang mungkin terjadi dan Melakukan identifikasi lebih lanjut mengenai rumah yang terletak di daerah rawan bencana
3		Kurang optimalnya Perencanaan dan Pemograman dalam upaya pencapaian SPM	Kualitas Perencanaan dan Pemograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM
4		Masih kurangnya koordinasi lintas bidang dan lintas sektor dalam penerapan SPM	Melakukan rapat koordinasi mengenai penerapan SPM
II Eksternal			
1		Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM	Mengadakan koordinasi tentang implementasi juknis SPM

4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat meliputi : Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum, Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Adapun rincian masing-masing jenis pelayanan dasar trantibumlinmas sebagai berikut:

1) Sub Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Bidang Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota jenis pelayanan dasar urusan Sub Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tersebut adalah Pelayanan

Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) dengan jenis pemenuhan mutu pelayanan dasarnya adalah:

- a. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil;
- b. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan;
- c. Standar operasional prosedur Satpol PP;
- d. Standar sarana prasarana Satpol PP;
- e. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat;
- f. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada

2) Sub Bidang Urusan Kebakaran

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Bidang Urusan Kebakaran Daerah kabupaten/kota adalah Jenis pelayanan dasar Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran pada Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/kota.

Pada pelayanan dasar Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran program Pemerintah Kabupaten dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran program Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdapat di dalam mutu pelayanan dasar sebagai berikut :

- a. Tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- b. prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- c. sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- d. kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
- e. pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
- f. pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran

3) Sub Bidang Urusan Kebencanaan

Terkait dengan penanganan dan pelayanan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan dengan risiko bencana, pemerintah telah mengatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang

Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota pasal 3 menegaskan bahwa terdapat 3 jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah yang harus dipenuhi oleh kabupaten atau kota. Tiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota bahwa Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota meliputi:

1. Pelayanan informasi rawan bencana
Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan jenis pemenuhan mutu pelayanan dasarnya adalah:
 - a. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana;
 - b. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana;
 - c. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana;
 - d. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana;
 - e. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana.
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan jenis pemenuhan mutu pelayanan dasarnya adalah:
 - a. Sarana prasarana penanggulangan bencana;
 - b. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan jenis pemenuhan mutu pelayanan dasarnya adalah:
 - a. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
 - b. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana
 - c. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana
 - d. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas
 - e. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana

4.5.2 Target Pencapaian SPM

1) Sub Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan standar pelayanan minimal bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.29
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM
Sub Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	1	Setiap Tahun	1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil 2. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan 3. Standar operasional prosedur Satpol PP 4. Standar sarana prasarana Satpol PP 5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat 6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat pene gakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1 1 15 14 138 2	Setiap tahun	3.216.952,64

Pada pelayanan dasar Ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota mempunyai target 100 % dengan anggaran Rp. 3.216.952.640,.

2) Sub Bidang Urusan Kebakaran

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan standar pelayanan minimal Sub Bidang Urusan Kebakaran dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.30
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM
Sub Bidang Urusan Kebakaran Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	111	Setiap tahun	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterima nya informasi/ laporan sampai tiba di lokasi	43	Setiap tahun	1.469.085,24
				Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	3			
				Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	350			
				Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia	36			

Pada pelayanan dasar Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran terdapat di dalam mutu jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi mempunyai target 111 kejadian kebakaran dengan anggaran Rp.1.469.085.240,-

3) Sub Bidang Urusan Kebencanaan

Tabel 4.31
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM
Sub Bidang Urusan Kebencanaan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Pelayanan Informasi rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	3.400	setiap tahun	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko	1	setiap tahun	70.000
					Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1	setiap tahun	20.000
					Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	3.400	setiap tahun	60.000
					Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	6	setiap tahun	6.000

					Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	3.400	setiap tahun	34.000
2.	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.170	setiap tahun	Sarana prasarana penanggulangan bencana	8	setiap tahun	20.000
					Peningkatan kapasitas personil/ Sumber Daya Manusia (SDM)	92	setiap tahun	1.251.329
3.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	363	setiap tahun	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	2	setiap tahun	9.000
					Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana	363	setiap tahun	283.000
					Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1	setiap tahun	259.000
					Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/ wabah zoonosis prioritas	1	setiap tahun	189.071,5
					Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	363	setiap tahun	366.458

4.5.3 Realisasi

1) Sub Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 4.32
Realisasi Capaian SPM Sub Bidang Urusan
Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	1	1	100	3.216.952,64	3.133.041,992	97,39

Tabel 4.33
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Urusan Ketentraman
dan Ketertiban Umum Tahun 2022

NO	Jenis Layanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	1	1	100	80
No	Mutu Layanan Dasar	Penerima layanan dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	1	1	100	20
2.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1	1	100	20
3.	Standar operasional prosedur Satpol PP	15	15	100	20
4.	Standar sarana prasarana Satpol PP	14	14	100	20
5.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	138	138	100	20

6.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	2	2	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20

Tabel 4.34
Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Urusan
Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	80+20=100	TUNTAS PARIPURNA

2) Sub Bidang Urusan Kebakaran

Tabel 4.35
Realisasi Capaian SPM Sub Bidang Urusan Kebakaran
tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	111	111	100	1.469.085,24	1.447.574,605	98,54

Tabel 4.36
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Urusan Kebakaran
Tahun 2022

NO	Jenis Layanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	111	111	100	80
No	Mutu Layanan Dasar	Penerima layanan dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	43	43	100	20

2.	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	3	3	100	20
3.	Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	350	350	100	20
4.	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan / Sumber Daya Manusia	36	36	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20

Tabel 4.37

Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Urusan Kebakaran Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	80+20= 100	TUNTAS PARIPURNA

3) Sub Bidang Urusan Kebencanaan

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah

Tabel 4.38

Realisasi Capaian SPM

Sub Bidang Urusan Kebencanaan Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN DASAR			ANGGARAN (dalam ribuan)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Pelayanan Informasi Rawan bencana	3.400	3.400	100	190.000	149.056,6	78,45
2.	Pelayanan Pencegahan Dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.170	1.170	100	1.271.329	1.142.016,706	89,83
3.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	363	363	100	1.006.529,5	922.436,254	91,65

Tabel 4.39
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang
Urusan Kebencanaan Tahun 2022

NO	Jenis Layanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Informasi Rawan bencana	3.400	3.400	100	80
No	Mutu Layanan Dasar	Penerima layanan dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	100	20
2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1	1	100	20
3.	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	3.400	3.400	100	20
4.	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi kawasa per jenis bencana	6	6	100	20
5.	melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana,	3.400	3.400	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20
NO	Jenis Layanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	1.170	1.170	100	80
No	Mutu Layanan Dasar	Penerima layanan dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Sarana prasarana penanggulangan bencana	8	8	100	20
2.	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	92	92	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20

NO	Jenis Layanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1.	2	3	4	5	6
3.	Pelayanan Penyelamatan evakuasi korban	363	363	100	80
NO	Mutu Layanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana,	2	2	100	20
2.	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana,	363	363	100	20
3.	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1	1	100	20
4.	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	1	1	100	20
5.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	363	363	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20

Tabel 4.40
Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Urusan Kebencanaan
Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pelayanan Informasi Rawan bencana	(80 + 20) = 100	Tuntas Paripurna
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	(80 + 20) = 100	Tuntas Paripurna
3.	Pelayanan Penyelamatan evakuasi korban	(80 + 20) = 100	Tuntas Paripurna

4.5.4 Alokasi Anggaran

1) Sub Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran tahun 2022 di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Ketentraman dan Ketertiban Umum Sebesar Rp. 3.216.952.640,- dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.41
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Sub Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022

NO	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.000)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum		3.216.952,64	

2) Sub Bidang Urusan Kebakaran

Alokasi anggaran tahun 2022 di Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sub Bidang Urusan Kebakaran Sebesar Rp.1.469.085.240,- dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.42
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Sub Bidang Urusan Kebakaran Tahun 2022

NO	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.000)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	1.469.085,24	-

3) Sub Bidang Urusan Kebencanaan

Dalam rangka pencapaian penerapan Standar pelayanan Minimal dibutuhkan pembiayaan untuk memenuhi standard mutu layanan. Adapun anggaran yang dipergunakan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Urusan bencana adalah sebagai berikut :

Tabel 4.43
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Sub Bidang Urusan
Kebencanaan Tahun 2022

NO.	Jenis Pelayanan dasar	Anggaran (Rp.000)		
		APBD	APBN	Sumber Sah Lainnya
1.	Pelayanan Informasi Rawan bencana	190.000		
2.	Pelayanan Pencegahan Dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.271.329		
3.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	1.106.529,5		

4.5.5 Dukungan Personil

- 1) Sub Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dukungan Personil yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum Tahun 2022 sebanyak 69 orang. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.44
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1	SMP	4
2	SMA	46
4	D II/III	4
5	Strata 1	14
6	Strata 2	4
JUMLAH		69

- 2) Sub Bidang Urusan Kebakaran

Dukungan personil yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Sub Bidang Urusan Kebakaran Tahun 2022 sebanyak 36 orang. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.45
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Bidang Urusan Kebakaran
Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1	SMP	4
2	SMA	25
3	D III	3
4	Strata 1	3
5	Strata 2	1
Jumlah		36

3) Sub Bidang Urusan Kebencanaan

Dukungan personil pelaksanaan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal melibatkan banyak personil lintas perangkat daerah. Namun dukungan penuh dari personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang paling utama antara lain dari Tim Reaksi Cepat, Pusdalpos, ASN, THL, dan Relawan. Adapun data personil ASN di BPBD Kabupaten Klaten sebagai berikut.

Tabel 4.46
Dukungan Personil ASN Pemenuhan SPM
Sub Bidang Urusan Kebencanaan Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)
1.	SD	-
2.	SLTP	-
3.	SLTA	5
4.	Diploma	2
5.	S- 1	10
6.	S- 2 / S-3	8
Total		25

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.47
Kendala Yang Dihadapi Bidang Trantibumlinmas
Sub Bidang Urusan Trantibum dan Damkar

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal		
1.		Belum tersedianya kajian pemetaan wilayah rawan kebakaran pada setiap desa/kelurahan/kecamatan.	Membentuk tim dan menyusun dokumen kajian Pemetaan wilayah rawan kebakaran

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
2.		Belum tersusunnya dokumen daerah dalam bentuk perda atau perbup tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Menyusun Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan.
3.		Belum terbentuknya SKKL Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan berbasis desa/kelurahan melalui optimalisasi keberadaan Relawan Damkar yang sudah terlatih dengan dukungan sarana prasarana untuk Relawan Damkar tersebut	Optimalisasi SKKL dan Relawan Pemadam Kebakaran sebagai upaya keterlibatan Pemberdayaan masyarakat.
4.		Belum tersedianya WMK Wilayah Manajemen Kebakaran pada setiap kecamatan, sehingga ketersediaan pos damkar per setiap WMK Kecamatan masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kecamatan, hal ini mengakibatkan masih adanya layanan pemadaman kebakaran diatas standar respon time / waktu tanggap 15 menit	Menyusun Wilayah Manajemen Kebakaran.
5.		Terbatasnya jumlah dan kompetensi sumber daya aparatur damkar yang memenuhi standar kualifikasi	Ketersediaan Jumlah dan Kompetensi Sumber daya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan.
6.		Terbatasnya sarana prasarana unit mobil pemadam kebakaran sesuai standard sapras damkar sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 122 Tahun 2018.	Memenuhi standar sarana prasarana untuk pelaksanaan tugas di Bidang Pemadam kebakaran dan penyelamatan.
II	Eksternal		
1.		Belum samanya pemahaman dan persepsi tentang juknis implementasi SPM	Mengadakan koordinasi tentang implementasi juknis SPM
2.		Kurangnya SDM yang paham tentang SPM	Mengadakan sosialisasi tentang SPM

Tabel 4.48
Kendala Yang Dihadapi Bidang Trantibumlinmas
Sub Bidang Urusan Kebencanaan

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I.	Internal	Data base warga Negara dikawasan rawan bencana perjenis bencana di hitung perdesa belum per warga Negara	Pencermatan data dan kerjasam dengan Disdukcapil dalam pendataan warga Negara
		Masih minimnya peralatan penanganan bencana	Penganggaran Pengadaan peralatan bencana
II.	Eksternal	Kurangnya pemahaman pentingnya Standar Pelayanan Minimal	Meningkatkan kapasitas pengampu SPM

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar untuk urusan sosial ada 5 (lima) yaitu :

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Mutu pelayanan dasar dalam SPM Urusan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dengan mutu minimal layanan dasar :
 - a. Layanan data dan pengaduan;
 - b. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti;
 - c. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru;

- d. Penyediaan permakanan;
 - e. Penyediaan sandang;
 - f. Penyediaan alat bantu;
 - g. Penyediaan perbekalan kesehatan;
 - h. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual;
 - i. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar;
 - j. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak;
 - k. Akses ke layanan pendidikan;
 - l. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga;
 - m. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga;
 - n. Layanan rujukan;
 - o. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan.
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dengan mutu minimal layanan dasar :
- a. Layanan data dan pengaduan;
 - b. Penyediaan permakanan;
 - c. Penyediaan sandang;
 - d. Penyediaan alat bantu;
 - e. Penyediaan perbekalan Kesehatan;
 - f. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual;
 - g. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar;
 - h. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak;
 - i. Akses ke layanan Pendidikan;
 - j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga;
 - k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga;
 - l. Layanan rujukan;
 - m. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti;
 - n. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru;

- o. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan.
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dengan mutu minimal layanan dasar :
- a. Layanan data dan pengaduan;
 - b. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti;
 - c. Penyediaan permakanan;
 - d. Penyediaan sandang;
 - e. Penyediaan alat bantu;
 - f. Penyediaan perbekalan kesehatan;
 - g. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual;
 - h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar;
 - i. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak;
 - j. Akses ke layanan pendidikan;
 - k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga;
 - l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga;
 - m. Layanan rujukan;
 - n. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan;
 - o. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru;
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dengan mutu minimal layanan dasar :
- a. Layanan data dan pengaduan;
 - b. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti;
 - c. Penyediaan permakanan;
 - d. Penyediaan sandang;
 - e. Penyediaan alat bantu;
 - f. Penyediaan perbekalan kesehatan;
 - g. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual;

- h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar;
 - i. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak;
 - j. Akses ke layanan pendidikan;
 - k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga;
 - l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga;
 - m. Layanan rujukan;
 - n. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan;
 - o. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru.
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota dengan mutu minimal layanan dasar :
- a. Penyediaan permakanan;
 - b. Penyediaan sandang;
 - c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi;
 - d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan;
 - e. Pelayanan dukungan Psikososial.

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, mengenai target dan indikator penerima layanan SPM Urusan Sosial, bahwa telah ditetapkan target capaian setiap tahunnya yaitu 100% untuk setiap jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaiannya. Berikut ini tabel rencana target dan indikator kinerja pencapaian SPM Urusan Sosial tahun 2022 :

Tabel. 4.49
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Urusan Sosial
Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Anggaran (Rp 000)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	144	Setiap Tahun	Layanan data dan pengaduan	64	Setiap Tahun	800.575
					Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	5	Setiap Tahun	
					Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	5	Setiap Tahun	
					Penyediaan permakanaan	5	Setiap Tahun	
					Penyediaan sandang	5	Setiap Tahun	
					Penyediaan alat bantu	20	Setiap Tahun	
					Penyediaan perbekalan kesehatan	5	Setiap Tahun	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	5	Setiap Tahun	

					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	5	Setiap Tahun	
					Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	5	Setiap Tahun	
					Akses ke layanan pendidikan	5	Setiap Tahun	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	Setiap Tahun	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	Setiap Tahun	
					Layanan rujukan	5	Setiap Tahun	
					Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	Setiap Tahun	

2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	380	Setiap Tahun	Layanan data dan pengaduan	158	Setiap Tahun	124.000
					Penyediaan permakanaan	22	Setiap Tahun	
					Penyediaan sandang	12	Setiap Tahun	
					Penyediaan alat bantu	41	Setiap Tahun	
					Penyediaan perbekalan kesehatan	12	Setiap Tahun	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	20	Setiap Tahun	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak terlantar	20	Setiap Tahun	
					Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	10	Setiap Tahun	
					Akses ke layanan pendidikan	240	Setiap Tahun	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	Setiap Tahun	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	Setiap Tahun	
					Layanan rujukan	20	Setiap Tahun	
					Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	16	Setiap Tahun	

					Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	Setiap Tahun	
					Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	Setiap Tahun	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	765	Setiap Tahun	Layanan data dan pengaduan	361	Setiap Tahun	1.024.900
					Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	35	Setiap Tahun	
					Penyediaan perma kanan	30	Setiap Tahun	
					Penyediaan sandang	30	Setiap Tahun	
					Penyediaan alat bantu	35	Setiap Tahun	
					Penyediaan perbekalan kesehatan	30	Setiap Tahun	

					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	62	Setiap Tahun	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	62	Setiap Tahun	
					Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	200	Setiap Tahun	
					Akses ke layanan pendidikan	1	Setiap Tahun	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	335	Setiap Tahun	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	35	Setiap Tahun	
					Layanan rujukan	30	Setiap Tahun	
					Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	Setiap Tahun	

					Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	Setiap Tahun	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	114	Setiap Tahun	Layanan data dan pengaduan	24	Setiap Tahun	100.792
					Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	5	Setiap Tahun	
					Penyediaan permakanaan	5	Setiap Tahun	
					Penyediaan sandang	5	Setiap Tahun	
					Penyediaan alat bantu	5	Setiap Tahun	
					Penyediaan perbekalan kesehatan	5	Setiap Tahun	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	5	Setiap Tahun	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	5	Setiap Tahun	

					Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	5	Setiap Tahun
					Akses ke layanan pendidikan	5	Setiap Tahun
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	Setiap Tahun
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	Setiap Tahun
					Layanan rujukan	10	Setiap Tahun
					Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	10	Setiap Tahun
					Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	5	Setiap Tahun

5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	318	Setiap Tahun	Penyediaan Perumahan	9	Setiap Tahun	623.034
					Penyediaan Sandang	20	Setiap Tahun	
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1	Setiap Tahun	
					Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	318	Setiap Tahun	
					Pelayanan Dukungan Psikososial	9	Setiap Tahun	

Pada jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti dengan indikator Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti mempunyai target 144 orang dalam beberapa mutu minimal layanan dasarnya dengan anggaran Rp 800.575.000,-.

Sedangkan jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti dengan indikator Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti mempunyai target 380 orang dalam beberapa mutu minimal layanan dasarnya dengan anggaran Rp124.000.000,-.

Untuk jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti dengan indikator Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti mempunyai target 765 orang dalam beberapa mutu minimal layanan dasarnya dengan anggaran Rp 1.024.900.000,-.

Dan pada jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti dengan indikator Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti mempunyai target 114 orang dalam beberapa mutu minimal layanan dasarnya dengan anggaran Rp100.792.000,-.

Selanjutnya jenis pelayanan dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten dengan indikator Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota mempunyai target 318 orang dalam beberapa mutu minimal layanan dasarnya dengan anggaran Rp623.034.000,-.

4.6.3 Realisasi

Realisasi dari target yang ditetapkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

Tabel 4.50
Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp 000)		
		Target	Realisasi	Capaian	APBD	Realisasi	Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	144	144	100	800.575	777.700	97,14
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	380	380	100	124.000	112.100	90,40
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	765	765	100	1.024.900	966.100	94,26
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	114	114	100	100.792	72.696,344	72,13
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	318	- (tidak terjadi bencana)	100	623.034	88.408	14,19

Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa realisasi capaian jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sama dengan targetnya yaitu 144 orang dengan prosentase capaian 100 %.

Sedangkan realisasi untuk jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti sama dengan targetnya yaitu 380 orang dengan prosentase capaian 100 %.

Dan realisasi untuk jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti sama dengan targetnya yaitu 765 orang dengan prosentase capaian 100 %.

Selanjutnya realisasi untuk jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti sama dengan targetnya yaitu 114 orang dengan prosentase capaian 100 %.

Kemudian realisasi untuk jenis pelayanan dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten meskipun tidak sama dengan targetnya dimana targetnya 318 orang sedangkan realisasinya 0 orang dalam artian tidak terjadi bencana maka prosentase capaian tetap 100 %.

Tabel 4.51
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	144	144	100	80
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan data dan pengaduan	64	64	100	20
2.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	5	5	100	20
3.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	5	5	100	20
4.	Penyediaan permakanan	5	5	100	20
5.	Penyediaan sandang	5	5	100	20
6.	Penyediaan alat bantu	20	20	100	20

7.	Penyediaan perbekalan kesehatan	5	5	100	20
8	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	5	5	100	20
9	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	5	5	100	20
10	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	5	5	100	20
11	Akses ke layanan pendidikan	5	5	100	20
12	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	5	100	20
13	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	5	100	20
14	Layanan rujukan	5	5	100	20
15	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	100	20
TOTAL INDEKS MUTU LAYANAN DASAR					20

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	380	380	100	80
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Layanan data dan pengaduan	158	158	100	20
2	Penyediaan permakanan	22	22	100	20
3	Penyediaan sandang	12	12	100	20
4	Penyediaan alat bantu	41	41	100	20
5	Penyediaan perbekalan kesehatan	12	12	100	20
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	20	20	100	20
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak terlantar	20	20	100	20
8	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	10	10	100	20
9	Akses ke layanan pendidikan	240	240	100	20
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	10	100	20
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	10	100	20

12	Layanan rujukan	20	20	100	20
13	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	16	16	100	20
14	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	100	20
15	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	100	20
TOTAL INDEKS MUTU LAYANAN DASAR					20

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	765	765	100	80
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Layanan data dan pengaduan	361	361	100	20

2	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	35	35	100	20
3	Penyediaan permakanan	30	30	100	20
4	Penyediaan sandang	30	30	100	20
5	Penyediaan alat bantu	35	35	100	20
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	30	30	100	20
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	62	62	100	20
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	62	62	100	20
9	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	200	200	100	20
10	Akses ke layanan pendidikan	1	1	100	20
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	335	335	100	20
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	35	35	100	20
13	Layanan rujukan	30	30	100	20
14	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	100	20

15	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	100	20
TOTAL INDEKS MUTU LAYANAN DASAR					20

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	114	114	100	80
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Layanan data dan pengaduan	24	24	100	20
2	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	5	5	100	20
3	Penyediaan permakanan	5	5	100	20
4	Penyediaan sandang	5	5	100	20
5	Penyediaan alat bantu	5	5	100	20
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	5	5	100	20
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	5	5	100	20

8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	5	5	100	20
9	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	5	5	100	20
10	Akses ke layanan pendidikan	5	5	100	20
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	10	100	20
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	10	100	20
13	Layanan rujukan	10	10	100	20
14	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	10	10	100	20
15	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	5	5	100	20
TOTAL INDEKS MUTU LAYANAN DASAR					20

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	318	- (tidak terjadi bencana)	-	80
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Permakanan	9	- (tidak terjadi bencana)	-	20
2	Penyediaan Sandang	20	- (tidak terjadi bencana)	-	20
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1	- (tidak terjadi bencana)	-	20
4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	318	- (tidak terjadi bencana)	-	20
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	9	- (tidak terjadi bencana)	-	20
TOTAL INDEKS MUTU LAYANAN DASAR					20

Tabel 4.52
Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	80 +20 = 100	Tuntas Paripurna
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	80 +20 = 100	Tuntas Paripurna

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	80 +20 = 100	Tuntas Paripurna
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	80 +20 = 100	Tuntas Paripurna
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	80 +20 = 100 (tidak terjadi bencana)	Tuntas Paripurna

Pada Indeks Pencapaian (IP) SPM diperoleh dari penjumlahan Indeks Pencapaian (IP) Layanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar dimana semua jenis pelayanan dasar mencapai 100 yang termasuk dalam kategori Tuntas Paripurna

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2022 sebesar Rp2.673.301.000,- terdiri dari Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp 2.050.267.000,- dan Program Penanganan Bencana sebesar Rp623.034.000,-

Tabel 4.53
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Sosial
Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp 000)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		800.575	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti		124.000	

3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		1.024.900	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti		100.792	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten		623.034	

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personi-personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Sumber Daya Manusia yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten pada tahun 2022 sebanyak 321 orang. Berikut ini Tabel rincian dukungan personil penerapan SPM Urusan Sosial di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten :

Tabel 4.54
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Urusan Sosial Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2	10
2.	Strata 1	205
3.	D-IV	9
4.	D-III	28
5.	SMA	55
6.	SMP	4
JUMLAH		311

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Berikut ini Tabel permasalahan yang dialami dalam penerapan dan pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.

Tabel 4.55
Kendala yang Dihadapi Bidang Sosial Tahun 2022

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I Internal			
1.		Ketersediaan data terkait anak terlantar, lanjut usia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan pengemis serta data masyarakat terdampak bencana dan korban bencana yang termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum valid	1. Melaksanakan pendataan terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara periodik didukung penganggaran yang memadai; 2. Melakukan pendataan terhadap masyarakat terdampak bencana dan korban bencana
2.		Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan belum memunculkan Indikator keterlantaran	Melakukan pendataan mandiri per jenis layanan dasar
3.		Kesulitan untuk memilah kebutuhan spesifik dari masing-masing penerima manfaat	Membuat perencanaan kebutuhan anggaran per jenis layanan dasar
4.		Perencanaan dan Penganggaran yang belum memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan SPM	Melakukan pemetaan dan perencanaan anggaran per jenis layanan dasar
5.		Sarana dan prasarana yang mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum memadai	Mengajukan usulan peningkatan sarana dan prasarana penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
6.		Keterbatasan SDM pelaksana dalam penanganan bencana	Menyiapkan relawan sosial melalui rekrutmen dan pelatihan Taruna Siaga Bencana dari masyarakat
II Eksternal			
1.		Sistem pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum terbangun secara terintegrasi	Membangun sistem pelaporan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara terintegrasi

4.7 Program dan Kegiatan

A. Urusan Pendidikan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.56
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Layanan Dasar	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2.607.673,83
		1.Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	2.307.673,83
		a.Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	2.307.673,83
		2.Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	100.000
		a.Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	100.000
		3.Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	200.000
		a.Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan b.Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	125.000 75.000
2	Pendidikan Dasar	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR	37.884.105,78
		1.Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	6.506.717,90
		a.Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus b.Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	5.656.717,90 850.000
		2.Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1.231.350
		a.Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1.231.350
		3.Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	5.521.717,90
		a.Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	5.521.717,90
		4.Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	80.000
		a.Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	80.000
		5.Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	24.544.320
		a.Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang	380.000

No	Jenis Layanan Dasar	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
		dipersyaratkan b.Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	24.164.320
3	Pendidikan Kesetaraan	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN	331.856,7
		1.Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)	150.294,7
		a.Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	90.294.7
		b.Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	60.000
		2.Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	40.000
		a.Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	40.000
		3.Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)	100.000
		a.Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	100.000
		4.Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	41.562
		a.Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	41.562

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2022

B.Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.57
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp 000)
1	2	3	4
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	2.553.072,535
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.553.072,535
		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	2.553.072,535
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	676.291
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	676.291
		Pengelolaan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	676.291

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp 000)
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	138.858
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	138.858
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	138.858
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	1.949.601
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.949.601
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.949.601
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	1.155.256
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.155.256
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1.155.256
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	1.111.562
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.111.562
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.111.562
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	687.022
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	687.022
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	687.022
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	129.050
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	129.050
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	129.050
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	96.350
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96.350

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp 000)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	96.350
10.	Pelayanan kesehatan ODGJ berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	193.508
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.508
		Pengelolaan Pelayanan kesehatan ODGJ berat	193.508
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	269.591
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	269.591
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	269.591
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	763,265
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	763,265
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	763,265

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2022

C. Urusan Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.58
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.948.212
1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.948.212
a		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	100.000

		b	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.000.000
		c	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	177.390
		d	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.670.822
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		4.049.942
		1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.049.942
		a	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.000
		b	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	50.000
		c	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	660.000
		d	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2.407.866
		e	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	132.076
		f	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	550.000

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2022

D. Urusan Perumahan Rakyat

Berikut adalah program dan kegiatan serta pendanaan penerapan SPM Perumahan Rakyat tahun 2022 :

Tabel 4.59
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3	4	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp.162.500,-	
		1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp.50.000,-
		a	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp.50.000,-
		2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp50.000,-
		a	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Rp.25.000,-
		b	Kordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Rp.25.000,-
		3	Pembangunan dan Rehabilitasi	Rp.62.500,-

		Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		a Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp.62.500,-
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp.127.500,-
		1 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp50.000,-
		a Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Rp.25.000,-
		b Kordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Rp.25.000,-
		3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp.77.500,-
		a Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp.77.500,-

Sumber : Disperakim Kabupaten Klaten Tahun 2022

E. Urusan Trantibumlinmas

Tabel 4.60
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Bidang Urusan Trantibum dan Damkar Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)	2.973.738
		1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.181.216,64
		a Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	1.644.229,64
		b Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	103.062
		c Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	7.476

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
		umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	
		d Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	122.205
		e Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	294.528
		f Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	3.220.
		g Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	6.496
		2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	773.932
		a Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	444.892
		b Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	329.040
		3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	20.590
		a Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	20.590
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.214
		4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	241.214
		a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	241.214
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	1.248.655,24

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
		1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.104.702,458
		a Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	29.717,6
		b Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	1.041.069,958
		c Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	26.439
		h Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	7.475,9
		2 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	16.628,9
		a Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	8.425,9
		b Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	8.203
		4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	16.066
		a Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	16.066
		5 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	111.257,882
		a Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	6.194
		c Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	97.163,882
		d Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	7.900

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.430
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.430
		a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.430

Tabel 4.61
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Bidang Urusan Kebencanaan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	190.000
		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	190.000
		Sub Keg Kajian Resiko Bencana	90.000
		Sub Keg. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	100.000
2.	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan	Program Penanggulangan Bencana	1.271.329
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	1.271.329
		Sub Keg Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000
		Sub Keg Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	20.000
		Pengelolaan Risiko Bencana Kab/Kota	270.000
		Sub Keg Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	250.000
		Sub Keg Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	177.420
		Sub Keg Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	323.909
		Sub Keg Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	30.000
		Sub Keg Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	100.000
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Program Penanggulangan Bencana	1.006.529,5
		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban	1.006.529,5
		Sub Keg Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	457.071,5
		Sub Keg Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	366.458
		Sub Keg Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	183.000

F. Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Tabel 4.62
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp 000)
1	2	3	4
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	800.575
1		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	800.575
a		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	484.575
b		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5.000
c		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000
d		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	300.000
e		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.000
f		Pemberian Layanan Rujukan	3.000
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	124.000
1		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	124.000
a		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	10.000
b		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5.000
c		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000
d		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	100.000
e		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.000
f		Pemberian Layanan Rujukan	2.000

3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		1.024.900
		1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.024.900
		a	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	880.900
		b	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	8.000
		c	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000
		d	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	120.000
		e	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.000
		f	Pemberian Layanan Rujukan	8.000
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		100.792
		1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100.792
		a	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	41.811
		b	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9.300
		c	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	17.400
		d	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	6.711
		e	Pemberian Layanan Kedaruratan	18.000
		f	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.650
g	Pemberian Layanan Rujukan	2.920		
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		623.034
		1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	623.034
		a	Penyediaan Makanan	180.221
		b	Penyediaan Sandang	100.000
		c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	48.500
		d	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	244.313
e	Pelayanan Dukungan Psikososial	50.000		

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2022

BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten. Laporan yang telah disusun diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan.

Kami menyadari disamping capaian keberhasilan yang telah diraih, terdapat beberapa capaian kinerja di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2022 yang hasilnya masih belum optimal. Hal tersebut menjadi catatan bagi kami untuk senantiasa mengadakan perbaikan dalam mengatasi permasalahan dan tantangan di masa yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Klaten akan terus berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan.

Akhir kata kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, selanjutnya saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan guna terwujudnya Kabupaten Klaten yang ***Maju, Mandiri dan Sejahtera***.



Klaten, Maret 2023

BUPATI KLATEN

Hj. SRI MULYANI, S.M.

LAMPIRAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022

LAMPIRAN

REALISASI ANGGARAN

BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM

DAN JENIS BELANJA TAHUN 2022

Realisasi Anggaran berdasarkan Urusan, Program dan Jenis Belanja Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
URUSAN PENDIDIKAN		994.231.692.309	26.183.946.147			758.683.991.758	26.319.846.705		
DINAS PENDIDIKAN		994.231.692.309	26.183.946.147			758.683.991.758	26.319.846.705		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	821.105.077.196,00	368.950.000			590.312.417.432	355.488.000		
2	Program Pengelolaan Pendidikan	148.257.295.113,00	25.814.996.147			144.597.439.629	25.964.358.705		
3	Program Pengembangan Kurikulum	575.000.000,00				529.029.850			
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	24.244.320.000,00				23.198.975.397			
5	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	50.000.000				46.129.450			
URUSAN KESEHATAN		425.810.673.787,28	40.845.493.061			324.368.687.428,28	30.932.911.290		
DINAS KESEHATAN		425.810.673.787,28	40.845.493.061			324.368.687.428,28	30.932.911.290		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	340.793.200.460,28	23.665.896.872			255.904.456.924,28	15.694.243.993		
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	82.080.384.119	17.179.596.189			66.003.491.540	15.238.667.297		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.872.935.448				1.650.384.238			
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	450.802.000				327.144.700			
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	613.351.760				483.210.026			
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		62.736.789.630	179.150.540.900			55.335.585.487	148.182.894.832		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		62.736.789.630	179.150.540.900			55.335.585.487	148.182.894.832		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.920.488.030	2.002.208.500			21.361.066.490	1.898.589.350		
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	4.127.353.100	3.895.860.900			3.426.989.698	3.392.239.800		

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.948.212.000				3.548.075.996			
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.000.000.000				1.900.256.950			
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.908.898.500	141.043.500			3.591.404.942	118.979.200		
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	271.369.000	980.000.000			215.471.000	966.155.000		
7	Program Penataan Bangunan Gedung	6.453.857.000	48.265.210.000			5.880.424.380	38.920.985.816		
8	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	100.548.000				65.778.600			
9	Program Penyelenggaraan Jalan	16.700.252.000	123.686.618.000			14.521.855.535	102.707.942.666		
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.054.443.000	179.600.000			622.079.796	178.003.000		
11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	251.369.000				202.182.100			
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	18.518.853.421	9.814.887.600			14.829.060.979	9.207.783.793		
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	18.518.853.421	9.814.887.600			14.829.060.979	9.207.783.793		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.207.263.421	96.341.600			6.187.826.453	95.223.800		
2	Program Pengembangan Perumahan	352.500.000	230.000.000			113.463.100	218.172.350		
3	Program Kawasan Permukiman	1.398.036.000	140.000.000			1.193.576.200	137.590.000		
4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	7.230.000.000				7.159.451.900			
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	331054000	9.348.546.000			174743326	8.756.797.643		

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	18.886.712.852	787.725.365			16.403.571.713	778.024.433		
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.011.171.499	609.576.365			9.366.286.789	603.059.433		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.223.466.572	159.780.000			5.648.889.039	158.422.433		
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.825.738.640	150.000.000			2.768.091.992	145.950.000		
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	961.966.287	299.796.365			949.305.758	298.687.000		
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
		7.875.541.353	178.149.000			7.037.284.924	174.965.000		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.407.682.853	178.149.000			4.823.775.364	174.965.000		
2	Program Penanggulangan Bencana	2.467.858.500				2.213.509.560			
	Urusan Sosial	22.204.520.916	544.897.255			16.382.490.000	493.635.000		
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
		22.204.520.916	544.897.255			16.382.490.000	493.635.000		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.945.454.214	163.240.000			5.798.087.231	154.590.000		
2	Program Pemberdayaan Sosial	1.526.813.000	120.485.000			1.343.124.202	118.340.000		
3	Program Penanganan Bencana	604.544.000	64.890.000			88.108.500	43.700.000		
4	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	116.026.000	43.015.000			105.218.329	40.115.000		
5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	10.690.358.957	35.600.000			6.881.421.922	35.140.000		
6	Program Rehabilitasi Sosial	2.321.324.745	117.667.255			2.166.529.816	101.750.000		

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN TENAGA KERJA	5.692.006.000	14.520.000	-	-	4.055.495.833			
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	5.692.006.000	4.269.336.000	-	-	4.055.495.833			
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	128139000				98173850			
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.169.445.000				1.121.094.938			
3	Program Hubungan Industrial	139.606.000				104.343.900			
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	4.254.816.000	4.269.336.000			2.731.883.145			
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	918.858.500	27.215.000			829.796.480	24.748.000		
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	918.858.500	27.215.000			829.796.480	24.748.000		
1	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	335.398.560	600.000			331.200.686	600.000		
2	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	162.591.440	2.750.000			154.003.608	2.750.000		
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	5.000.000				4.999.850			
4	Program Peningkatan Kualitas	153.567.500	11.932.500			153.527.336	10.699.000		
5	Program Perlindungan Khusus Anak	219.513.500				161.477.700			
6	Program Perlindungan Perempuan	42.787.500	11.932.500			24.587.300	10.699.000		
	URUSAN PANGAN	3.722.500.000	-	-	-	3.567.425.100			
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.722.500.000	-	-	-	3.567.425.100			

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	3.120.000.000				3.017.970.200			
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	517.500.000				477.491.400,00			
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	50.000.000				38.537.600			
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	35.000.000				33.425.900			
Urusan Pertanahan		786.432.000	50.800.000			716.344.775	50.000.000		
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		786.432.000	50.800.000			716.344.775	50.000.000		
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	15.000.000				1.647.700			
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	20.000.000				9.982.275			
3	Program Penatagunaan Tanah	751.432.000	50.800.000			704.714.800	50.000.000		
Urusan Lingkungan Hidup		32.038.758.543	7.476.476.000			27.119.171.951	6.741.613.782		
Dinas Lingkungan Hidup		32.038.758.543	7.476.476.000			27.119.171.951	6.741.613.782		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.208.595.543	372.081.000			11.290.251.461	131.410.000		
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	411.600.000	81.500.000			332.441.222	79.379.000		
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	5.129.203.000	2.077.269.000			4.424.700.220	1.977.724.000		
4	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	58.000.000	142.000.000			28.882.300	129.870.000		
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	125.548.000				27.695.488			

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100.000.000				65.173.998			
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	385.300.000	74.700.000			326.708.865	70.933.000		
8	Program Pengelolaan Persampahan	12.470.512.000	4.728.926.000			10.560.786.957	4.352.297.782		
9	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	150.000.000				62.531.440			
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Sipil	9.814.811.388	548.666.250			8.468.952.943	520.272.002		
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.814.811.388	548.666.250			8.468.952.943	520.272.002		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.729.727.388	548.666.250			7.416.871.258	520.272.002		
2	Program Pendaftaran Penduduk	635.889.000				619.248.019			
3	Program Pencatatan Sipil	366.258.000				354.520.616			
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	32.760.000				30.872.750			
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	50.177.000				47.440.300			
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.568.317.872				8.192.014.588			
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.568.317.872				8.192.014.588			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.594.688.872				3.515.622.986			

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.120.059.200				3.890.428.764			
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	813.569.800				760.623.838			
4	Program Peningkatan Kerjasama Desa	40.000.000				25.339.000			
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.072.557.000	1.240.385.000	-	-	8.798.432.760	964.366.000	-	-
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.072.557.000	1.240.385.000	-	-	8.798.432.760	964.366.000	-	-
1	Program Pengendalian Penduduk	658.619.000				601.068.966			
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.573.833.000	1.240.385.000			4.978.166.508	964.366.000		
3	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.840.105.000				3.219.197.286			
	Urusan Perhubungan	36.366.095.456	972.882.084			34.841.391.186	899.351.000		
	Dinas Perhubungan	36.366.095.456	972.882.084			34.841.391.186	899.351.000		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.495.294.540	53.100.000			30.363.392.256	52.355.000		
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.870.800.916	919.782.084			4.477.998.930	846.996.000		
	Urusan Komunikasi dan Informatika	12.772.683.854	1.678.577.163			11.311.241.333	1.412.455.815		
	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.772.683.854	1.678.577.163			11.311.241.333	1.412.455.815		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.172.581.901	772.710.913			5.097.202.210	645.023.000		

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.869.654.000				1.748.444.866			
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.730.447.953	905.866.250			4.465.594.257	767.432.815		
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21.199.052.476	901.000.000			18.250.937.061	785.561.450		
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	21.199.052.476	901.000.000			18.250.937.061	785.561.450		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.774.852.476	901.000.000			16.271.121.867	785.561.450		
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	150.000.000				123.940.644			
3	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	20.000.000				15.521.500			
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	75.000.000				49.358.800			
5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	340.000.000				221.802.700			
6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	10.000.000				5.463.500			
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.669.200.000				1.416.064.050			
8	Program Pengembangan UMKM	160.000.000				147.664.000			
	Urusan Penanaman Modal	5.767.844.448	2.120.552.500			4.645.672.235	1.971.896.740		
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.767.844.448	2.120.552.500			4.645.672.235	1.971.896.740		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.221.460.998	1.940.552.500			3.364.877.900	1.798.080.740		

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
2	Program Promosi Penanaman Modal	428.430.250				391.667.390			
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	201.937.700				164.745.920			
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	572.382.000				431.232.400			
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	90.627.500	180.000.000			63.741.475	173.816.000		
6	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	253.006.000				229.407.150			
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.443.500.000				6.299.864.140			
	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	6.443.500.000				6.299.864.140			
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	360.000.000				345.858.452			
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.083.500.000				5.954.005.688			
	URUSAN STATISTIK	101.095.000				82.420.450			
	Dinas Komunikasi dan Informatika	101.095.000				82.420.450			
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	101.095.000				82.420.450			
	URUSAN PERSANDIAN	205.822.000				198.502.870			
	Dinas Komunikasi dan Informatika	205.822.000				198.502.870			
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	205.822.000				198.502.870			
	URUSAN KEBUDAYAAN	2.106.334.632	116.665.000			2.090.989.589	112.665.000		

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.106.334.632	116.665.000			2.090.989.589	112.665.000		
1	Program Pengembangan Kebudayaan	1.548.334.632	101.665.000			1.542.216.304	97.665.000		
2	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	408.000.000	15.000.000			402.669.808	15.000.000		
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	90.000.000				86.659.875			
4	Program Pembinaan Sejarah	60.000.000				59.443.602			
	Urusan Perpustakaan	250.540.000	93.830.000			223.721.732	82.632.700		
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	250.540.000	93.830.000			223.721.732	82.632.700		
1	Program Pembinaan Perpustakaan	250.540.000	93.830.000			223.721.732	82.632.700		
	Urusan Kearsipan	4.634.040.829	73.363.975			4.191.153.589	55.164.730		
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.634.040.829	73.363.975			4.191.153.589	55.164.730		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.274.724.804	27.875.000			3.883.215.019	25.880.000		
2	Program Pengelolaan Arsip	294.155.025	42.488.975			246.540.570	26.284.730		
3	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	65.161.000	3.000.000			61.398.000	3.000.000		
	URUSAN PILIHAN								
	Urusan Kelautan dan Perikanan	644.000.000	21.000.000	-	-	614.456.030	20.880.000		
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	644.000.000	21.000.000	-	-	614.456.030	20.880.000		
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	539.000.000	21.000.000			515.583.630	20.880.000		
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	25.000.000				23.375.000			
3	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	50.000.000				48.099.400			
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	30.000.000				27.398.000			
	URUSAN PARIWISATA	8.556.172.230	5.840.512.000			7.815.889.010	5.316.110.000		
	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	8.556.172.230	5.840.512.000			7.815.889.010	5.316.110.000		

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.216.655.230	70.740.000			5.540.215.828	70.450.000		
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.477.866.140	5.769.772.000			1.434.639.928	5.245.660.000		
3	Program Pemasaran Pariwisata	165.849.000				160.311.804			
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	650.582.860				635.562.450			
5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	45.219.000				45.159.000			
URUSAN PERTANIAN		44.524.670.926	2.165.609.500			38.171.368.842	1.874.432.580		
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		44.524.670.926	2.165.609.500			38.171.368.842	1.874.432.580		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.450.720.556	98.649.500			28.799.683.406	98.613.000		
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.170.638.428	146.000.000			3.957.445.299	138.626.000		
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.143.904.442	1.899.000.000			3.070.586.916	1.620.733.580		
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.213.920.000	21.960.000			1.108.624.533	16.460.000		
5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	540.000.000				410.399.562			
6	Program Penyuluhan Pertanian	1.005.487.500				824.629.126			
URUSAN PERDAGANGAN									
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		3.936.478.014	1.017.551.586			3.197.491.809	823.211.950		
1	Program Pengembangan Ekspor	275.000.000				157.709.250			

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
2	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	825.215.000				394.703.360			
3	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	21.000.000				18.946.000			
4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.466.288.264	701.526.336			2.308.195.245	610.972.950		
5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	300.000.000				278.203.000			
6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	48.974.750	316.025.250			39.734.954	212.239.000		
URUSAN PERINDUSTRIAN		9.974.508.980	323.826.050			8.733.119.324	273.520.000		
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		9.974.508.980	323.826.050			8.733.119.324	273.520.000		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.050.800.430	274.414.000			4.426.585.484	273.520.000		
2	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	4.823.160.550	49.412.050			4.268.493.840			
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100.548.000				38.040.000			
URUSAN TRANSMIGRASI		81.474.000				34.381.500			
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		81.474.000				34.381.500			
1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	81.474.000				34.381.500			
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG									
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		52.715.389.227	6.038.613.733	-	-	44.270.322.506	5.101.640.720		
SEKRETARIAT DAERAH		52.715.389.227	6.038.613.733	-	-	44.270.322.506	5.101.640.720		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42.794.804.952	5.336.893.483			35.829.544.895	4.436.502.720		
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5.773.898.975	701.720.250			5.188.090.241	665.138.000		
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	4.146.685.300				3.252.687.370			

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
	PENGAWASAN	14.585.213.011	1.055.018.080			11.131.080.168	1.018.390.970		
	INSPEKTORAT DAERAH	14.585.213.011	1.055.018.080			11.131.080.168	1.018.390.970		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.797.740.115	1.055.018.080			8.584.260.162	1.018.390.970		
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	925.010.000				518.684.830			
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.862.462.896				2.028.135.176			
	PERENCANAAN	9.216.789.056	92.650.000			7.913.512.654	91.515.000		
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN	9.124.139.056	92.650.000			7.913.512.654	91.515.000		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.581.948.056	92.650.000			4.946.708.892	91.515.000		
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.608.845.000				1.263.939.372			
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.933.346.000				1.702.864.390			
	KEUANGAN	30.927.397.545	946.649.100	25.945.719.619	657.040.496.946	27.426.710.247	895.719.500	7.794.077.100	653.777.793.405
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	30.927.397.545	946.649.100	25.945.719.619	657.040.496.946	27.426.710.247	895.719.500	7.794.077.100	653.777.793.405
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.510.276.785	312.152.900			18.619.163.475	292.901.000		
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.757.692.000		25.945.719.619	657.040.496.946	3.049.266.313		7.794.077.100	653.777.793.405
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.067.964.600	190.000.200			2.697.143.052	181.000.000		
4	Program Pengelolaan Pendapatan	3.591.464.160	444.496.000			3.061.137.407	421.818.500		
	KEPEGAWAIAN								
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	8.399.594.230	100.000.000	-	-	6.964.710.653	61.907.000		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.785.250.230	100.000.000			4.963.009.976	61.907.000		

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
2	Program Kepegawaian Daerah	2.614.344.000				2.001.700.677			
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		4.622.960.000	-	-	-	4.602.861.749			
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	4.622.960.000	-	-	-	4.602.861.749			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.622.960.000				4.602.861.749			
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		1.020.000.000	10.000.000			744.952.579	9.700.000		
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		1.020.000.000	10.000.000			744.952.579	9.700.000		
1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.020.000.000	10.000.000			744.952.579	9.700.000		
SEKRETARIAT DPRD		61.753.636.701	616.942.650			54.364.554.444	546.332.000		
	SEKRETARIAT DPRD	61.753.636.701	616.942.650			54.364.554.444	546.332.000		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41.149.039.701	616.942.650			37.634.147.162	546.332.000		
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	20.604.597.000				16.730.407.282			
KEWILAYAHAN-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		78.465.089.970	1.211.151.050	-	-	67.547.925.764	1.100.837.750		
	KECAMATAN DAN KELURAHAN	78.465.089.970	1.211.151.050	-	-	67.547.925.764	1.100.837.750		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	68.474.756.681	1.105.203.050			58.071.301.771	1.016.335.750		
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.442.244.514	94.800.000			3.321.314.525	73.954.000		
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.271.298.573				3.161.293.380			
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.681.573.875				1.519.407.938			

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.466.046.567	600.000			1.363.321.900			
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	129.169.760	10.548.000			111.286.250	10.548.000		
Kesatuan Bangsa dan Politik		6.782.504.274	-	-	-	5.957.187.968			
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.782.504.274	-	-	-	5.957.187.968			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.826.451.614				3.065.737.218			
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	82.121.000				76.723.900			
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.186.849.500				1.184.569.050			
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	684.832.500				684.632.500			
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	53.007.160				50.984.100			
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	949.242.500				894.541.200			

LAMPIRAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

BERDASARKAN PERUBAHAN RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022

**Program dan Kegiatan berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten Tahun 2022**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
1				2
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1	01	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	01	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1	01	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	01	002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1	01	002	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1	01	002	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	01	002	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1	01	002	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	01	003		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1	01	003	2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1	01	003	2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
1	01	004		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1	01	004	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
1	01	006			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
1	01	006	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	02	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	02	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	02	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	02	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	02	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	02	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	02	001	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	002	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	002	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
1	02	002	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1	02	003	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
1	02	003	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1	02	003	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
1	02	004		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1	02	004	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1	02	004	2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
1	02	004	2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1	02	004	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1	02	004	2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
1	02	004	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
1	02	005		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1	02	005	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	005	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	005	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	03	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	03	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	03	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1	03	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	03	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	03	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
1	03	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	03	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	03	002			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1	03	002	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1	03	002	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1	03	003			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1	03	003	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
1	03	004			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
1	03	004	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1	03	005			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1	03	005	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	03	006			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1	03	006	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	03	008			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1	03	008	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1	03	009			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
1	03	009	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1	03	010			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1	03	010	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1	03	011			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1	03	011	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
1	03	012			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1	03	012	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
1	03	012	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1	03	012	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1	03	012	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	04	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	04	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	04	001	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1	04	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	04	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	04	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	04	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	04	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	04	002			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1	04	002	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	002	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	002	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	002	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
1	04	002	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1	04	002	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
1	04	003			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	003	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1	04	003	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
1	04	004		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
1	04	004	2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
1	04	005		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1	04	005	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2	10	004		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
2	10	004	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	10	005		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
2	10	005	2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	10	010		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
2	10	010	2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1	05	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	05	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	05	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	05	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	05	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	05	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	05	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	05	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
1	05	002			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	05	002	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1	05	002	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1	05	002	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
1	05	004			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
1	05	004	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	05	004	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
1	05	004	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
1	05	004	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1	05	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	05	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	05	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	05	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	05	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	05	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	05	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	05	003			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1	05	003	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
1	05	003	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1	05	003	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1	06	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	06	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	06	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	06	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	06	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	06	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	06	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	06	002			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1	06	002	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
1	06	004			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1	06	004	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1	06	004	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1	06	005			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1	06	005	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1	06	006			PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1	06	006	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1	06	006	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
1	06	007			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1	06	007	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	002			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2	08	002	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	002	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	002	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	003			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2	08	003	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	08	003	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	003	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	004			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2	08	004	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	004	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	08	004	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	08	005			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
2	08	005	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	006			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2	08	006	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
2	08	006	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	007			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2	08	007	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	08	007	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	007	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	002			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2	14	002	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2	14	002	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2	14	003			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2	14	003	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	14	003	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
2	14	003	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
2	14	003	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2	14	004			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
2	14	004	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	14	004	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2	09	002		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
2	09	002	2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	09	003		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2	09	003	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2	09	003	2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2	09	003	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2	09	004		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2	09	004	2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	09	005		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2	09	005	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	003		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3	25	003	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	25	004		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3	25	004	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3	25	004	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3	25	005		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	005	2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
3	25	006			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3	25	006	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3	27	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3	27	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	27	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	27	001	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3	27	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3	27	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	27	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3	27	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	27	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	27	002			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3	27	002	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
3	27	002	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
3	27	003			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3	27	003	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian
3	27	003	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian
3	27	003	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
3	27	004			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3	27	004	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	27	004	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
3	27	004	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	004	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
3	27	005		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3	27	005	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
3	27	007		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3	27	007	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2	11	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	11	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	11	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	11	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	11	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	11	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	11	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	11	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	11	002		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	002	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
2	11	002	2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
2	11	003		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	003	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2	11	003	2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2	11	004		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2	11	004	2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
2	11	005		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2	11	005	2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
2	11	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2	11	006	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	11	008			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2	11	008	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	11	009			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2	11	009	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	11	011			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2	11	011	2.01		Pengelolaan Sampah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	12	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	12	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	12	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	12	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	12	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	12	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	12	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	12	002			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2	12	002	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2	12	002	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
2	12	003			PROGRAM PENCATATAN SIPIL
2	12	003	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
2	12	003	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
2	12	004			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2	12	004	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
2	12	004	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	12	004	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	12	005			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
2	12	005	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	13	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	13	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	13	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	13	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	13	003			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
2	13	003	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa
2	13	004			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2	13	004	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2	13	005			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2	13	005	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2	15	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	15	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	15	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	15	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	15	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	15	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	15	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	15	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	15	002		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2	15	002	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	15	002	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2	15	002	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2	15	002	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	002	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2	15	002	2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
2	15	002	2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
2	15	002	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	002	2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	16	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	16	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	16	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	16	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	16	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	16	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	16	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
2	16	002		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2	16	002	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	16	003		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2	16	003	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	16	003	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2	20	002		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2	20	002	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2	21	002		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2	21	002	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2	17	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	17	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	17	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	17	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2	17	001	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
2	17	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	17	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	17	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	17	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	17	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	17	002		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
2	17	002	2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
2	17	002	2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	17	003		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2	17	003	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2	17	004		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
2	17	004	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	17	005		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
2	17	005	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	17	006		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
2	17	006	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	17	007		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2	17	007	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
2	17	008		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2	17	008	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3	30	002		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
3	30	002	2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
3	30	002	2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3	30	002	2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
3	30	002	2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
3	30	003		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3	30	003	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	003	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
3	30	004		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
3	30	004	2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3	30	004	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3	30	004	2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	30	005		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3	30	005	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	30	006		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3	30	006	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
3	30	007		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
3	30	007	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2	18	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	18	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	18	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	18	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	18	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	18	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	18	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	18	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
2	18	002		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2	18	002	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	18	002	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2	18	003		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2	18	003	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	18	004		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
2	18	004	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2	18	005		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2	18	005	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	18	006		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
2	18	006	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	002		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
2	19	002	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2	19	002	2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	19	003		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2	19	003	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	19	003	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	19	003	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
2	19	003	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2	22	002			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2	22	002	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	22	002	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	22	003			PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional
2	22	003	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	22	004			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2	22	004	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	22	005			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
2	22	005	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2	22	005	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3	26	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3	26	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	26	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	26	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	26	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3	26	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	26	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	26	002			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
3	26	002	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
3	26	002	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	002	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	002	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
3	26	003			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
3	26	003	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	004			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
3	26	004	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
3	26	005			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3	26	005	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2	23	002			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2	23	002	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	002	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2	24	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	24	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	24	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	24	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	24	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	24	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	24	002			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
2	24	002	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
2	24	002	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
2	24	002	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
2	24	003			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
2	24	003	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
2	24	003	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
2	24	003	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2	24	003	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
2	24	003	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2	07	002			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
2	07	002	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2	07	003			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2	07	003	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2	07	003	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
2	07	004			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2	07	004	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
2	07	004	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2	07	004	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
2	07	004	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	005			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2	07	005	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	005	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3	31	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3	31	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	31	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	31	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
3	31	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3	31	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	31	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	31	002			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3	31	002	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3	31	004			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
3	31	004	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
3	32	003			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
3	32	003	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4	01				SEKRETARIAT DAERAH
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	002			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	002	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan
4	01	002	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4	01				SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	002			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	002	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4	01				SEKRETARIAT DAERAH
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	002			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	002	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4	01				SEKRETARIAT DAERAH
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	003			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4	01	003	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
4	01	003	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4	01				SEKRETARIAT DAERAH
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	003			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4	01	003	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4	01				SEKRETARIAT DAERAH
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	003			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4	01	003	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4	01				SEKRETARIAT DAERAH
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
4	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	01	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	01	001	2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4	01			SEKRETARIAT DAERAH
4	01	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.13	Penataan Organisasi
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4	01			SEKRETARIAT DAERAH
4	01	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4	02				SEKRETARIAT DPRD
4	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4	02	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	02	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	02	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	02	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	02	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	02	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	02	001	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
4	02	001	2.16		Layanan Administrasi DPRD
4	02	002			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4	02	002	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
4	02	002	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran
4	02	002	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4	02	002	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD
4	02	002	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
4	02	002	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
4	02	002	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5	01				PERENCANAAN
5	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
5	01	002			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	002	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
5	01	002	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	002	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	003			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	003	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5	01	003	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
5	01	003	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	002			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	002	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
5	05	002	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
5	05	002	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
5	05	002	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5	02				KEUANGAN
5	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	02	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	02	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5	02	001	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5	02	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	02	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	02	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	02	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	02	002			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	02	002	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5	02	002	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
5	02	002	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5	02	002	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
5	02	003			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5	02	003	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	02	004			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	004	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5	03				KEPEGAWAIAN
5	03	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	03	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5	03	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	03	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	03	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	03	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	03	002			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	002	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
5	03	002	2.02		Mutasi dan Promosi ASN
5	03	002	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN
5	03	002	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	04	002			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	002	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis
5	04	002	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6	01				INSPEKTORAT DAERAH
6	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
6	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6	01	002	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal
6	01	002	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
6	01	003			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6	01	003	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
6	01	003	2.02		Pendampingan dan Asistensi
7					UNSUR KEWILAYAHAN
7	01				KECAMATAN
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7	01	001	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
7	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
7	01	004		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	004	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7	01	004	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7	01	005		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	005	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
7	01	006		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	01	006	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
8	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8	01	002		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
8	01	002	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8	01	003		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
8	01	003	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8	01	004		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
8	01	004	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8	01	005		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
8	01	005	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
8	01	006			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
8	01	006	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

LAMPIRAN

IKK OUTCOME

LAMPIRAN IKK OUTCOME

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	%	34.678	95,44	DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		36.335		
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	%	105.161	91,06	
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		115.488		
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	%	55.651	92,83	
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		59.951		
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	%	1.586	96,18	
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan		1.649		
2	Kesehatan	5	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan	%	1.832	0,14	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Penduduk di kabupaten/kota		1.277.455		
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	,,,,,,,%	44	93,62	
				Jumlah RS di kabupaten/kota		47		
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	,,,,,,,%	13.447	100,00	
				Jumlah ibu hamil di kabupaten		13.447		
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	,,,,,,,%	13.287	99,99	
				Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota		13.288		
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,%	12.966	100,00	
				Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota		12.966		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,.%	61.686	95,16	DINAS KESEHATAN
				Jumlah balita di kabupaten/kota		64.821		
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,.%	154.333	94,03	
				Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota		164.123		
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,.%	712.412	100,00	
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota		712.412		
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,.%	201.750	100,00	
				Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota		201.750		
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,.%	281.225	100,00	
				Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota		281.225		
		15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,.%	37.610	100,00	
				Jumlah penderita DM di kabupaten/kota		37.610		
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,.%	2.861	100,00	
				Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota		2.861		
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,.%	7.133	100,00	
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi TBC di kabupaten/kota		7.133		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	,,,,,,,,,,%	15.885	100,00	DINAS KESEHATAN
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten		15.885		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten (ha)	,,,,,,,,,,%	kewenangan wilayah sungai di Kabupaten Klaten menjadi kewenangan BBWS Bengawan Solo dalam SILPPD ditulis 1/1 (TDI)		DPUPR
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan kabupaten (ha)				
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten (ha)	,,,,,,,,,,%	Kabupaten Klaten tidak memiliki kawasan Pantai dalam SILPPD ditulis 1/1 (TDI)		
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten (ha)				
		21	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting	,,,,,,,,,,%	10.635	35,79	
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten		29.713		
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	,,,,,,,,,,%	417.438	93,19	
				Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.		447.943		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		23	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	,,,,,,,,,,%	379.926	100	DPUPR
				Jumlah rumah di Kabupaten Klaten		379.926		
		24	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya	,,,,,,,,,,%	106	100	
				Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku		106		
		25	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap (baik+sedang)	,,,,,,,,,,%	651,8	91,05	
				Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten		715,89		
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	,,,,,,,,,,%	265	100,00	
				Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota		265		
		27	rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	,,,,,,,,,,%	7	100	
				jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		7		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA		
						Elemen data	Capaian Kinerja			
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2022	,,,,,,,,,%	NA (tidak ada bencana, sudah dialokasikan anggaran namun pada tahun 2022 tidak terjadi bencana sehingga tidak terdapat rumah korban bencana yang ditangani, pada SILPPD ditulis 1/1		DISPERAKIM		
				Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2022						
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	,,,,,,,,,%	NA (tidak terdapat kegiatan fisik relokasi, status TDI (Tidak Diperoleh Informasi) dengan pengisian data pada SI LPPD 1/1.				
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan						
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	,,,,,,,,,%	19,21	100			
				Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha		19,21				
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	,,,,,,,,,%	16.264	4,28			
				Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota		379.926				
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	,,,,,,,,,%	7.302	100			
				Jumlah unit rumah kab/kota		7.302				
		5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	,,,,,,,,,%		33	100,00
						Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk			33	
34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	,,,,,,,,,%	11	100			
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi		11				

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	,,,,,,,,,,%	3.400	100	BPBD
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan		3.400		
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	,,,,,,,,,,%	1.170	100	
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana (sesuai target yang ditetapkan)		1.170		
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	363	100	
				Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana		363		
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman,penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	,,,,,,,,,,%	43	38,74	SATPOL PP dan Damkar
				Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten		111		
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		Menit	15,85	15,85 MENIT	

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
6	Sosial	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	,,,,,,,,,.%	4.641	95,20	DISSOSP3APPKB
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		4.875		
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	,,,,,,,,,.%	98	100	
				Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten		98		
7	Tenaga Kerja	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	,,,,,,,,,.%	7	77,78	DISPERINAKEK
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten		9		
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	,,,,,,,,,.%	4.838	10,999	
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan		43.987		
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) (dalam jutaan)	%	30.214.981,95	68.690,71	
				Jumlah tenaga kerja		43.987		
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	,,,,,,,,,.%	127	8,44	
				Jumlah Perusahaan		1.504		
		46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	,,,,,,,,,.%	2.586	35,30	
				Jumlah pencaker yang terdaftar		7.326		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA	
						Elemen data	Capaian Kinerja		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD	,,,,,,,,,%	17.720.557.500	0,76	DISSOSP3APPKB	
				Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD		2.337.045.668.126,28			
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi	,,,,,,,,,%	26	100		
				Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)		26			
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Per 100.000	35	5,5		
				Jumlah penduduk perempuan		642.177			
9	Pangan	50	Persentase ketersediaan pangan	Jumlah cadangan pangan kabupaten (ton)	%	400.560,18	102,56	DKPP	
				Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan		390.560,44			
10	Pertanahan	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	,,,,,,,,,%	82.522,76	100	DPUPR	
				seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)		82.522,76			
		52	Persentase penetapan tanah untuk kepentingan umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	,,,,,,,,,%	259.985	100	DISPERAKIM	
				Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		259.985			
		53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	,,,,,,,,,%	82.522,76	100	DPUPR
					Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan		82.522,76		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha	,,,,,,,,,%	Tidak ada Tanah Obyek Landreform (TOL)		DISPERAKIM DAN BPN KLATEN
				Jumlah penerima tanah obyek landreform				
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah	,,,,,,,,,%	tidak ada ajuan izin membuka tanah dari masyarakat		
				Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan				
56	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	,,,,,,,,,%	10	100			
		Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan		10				
11	Lingkungan Hidup	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		62,83	62,83	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Kualitas Pencemaran Air		47,69		
				Indeks Kualitas Pencemaran Udara		87,85		
				Indeks Tutupan Hutan/Lahan		42,55		
				IKLH = (IKA 0,376) + (IKU 0,405) + (ITH 0,219)		(0,376 x 47,69) + (0,405 x 87,85) + (0,219 x 42,55) =		
						(17,93 + 35,58 + 9,32)		
58	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Kab/Kota	Total Vol sampah yang dapat ditangani	,,,,,,,,,%	130.657,34	55,67			
		Total vol timbunan sampah Kabupaten/Kota		234.703,44				
59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten	,,,,,,,,,%	tidak ada pelanggaran terhadap PPLH dan PUU LH dari pelaku usaha yang diberi izin lingkungan				
		Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan		20				
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	60	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	,,,,,,,,,%	968.938	99,14	DISDUKCAPIL
				Jumlah penduduk 17 tahun ke atas		977.303		
		61	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	,,,,,,,,,%	197.433	63,87	
				Jumlah anak usia 0-17 tahun		309.133		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		62	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	Jumlah anak usia 0 – 18 Tahun yang sudah memiliki akta lahir	,,,,,,,,,,%	318.439	97,98	DISDUKCAPIL
				Jumlah anak usia 0 – 18 tahun		325.006		
		63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	,,,,,,,,,,%	14	27,45	
				Jumlah OPD		51		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	,,,,,,,,,,%	3	100	DISPERMASDES
				Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)		3		
		65	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	,,,,,,,,,,%	24	8,82	
				Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)		272		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,08	2,08	DISSOSP3APPKB
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern	,,,,,,,,,,%	124.337	66,08	
				Jumlah Pasangan Usia Subur		188.154		
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	,,,,,,,,,,%	33.298	17,70	
Jumlah Pasangan Usia Subur				188.154				
15	Perhubungan	69	Rasio konektivitas kabupaten	Rasio konektivitas kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)		$(5 \times 0,8) : 32 = 0,125$	0,125	DINAS PERHUBUNGAN
						$IK 1 + IK2 = 0,125 + 0 = 0,125$		
		70	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C ratio di jalan kabupaten/Kota		0,62	0,62	

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
16	Komunikasi dan Informatika	71	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	,,,,,,,,,,%	51	100	DISKOMINFO
				Jumlah PD		51		
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	,,,,,,,,,,%	15	75,00	
				Jumlah Layanan Publik		20		
		73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	,,,,,,,,,,%	980.228	100,00	
				Jumlah penduduk		980.228		
17	Koperasi dan UKM	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	,,,,,,,,,,%	223	70,79	DKUKMP
				Jumlah seluruh koperasi		315		
		75	Meningkatnya Usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	,,,,,,,,,,%	7.428	14,80	
				Jumlah usaha mikro keseluruhan		50.175		
18	Penanaman Modal	76	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota ----- x 100%	,,,,,,,,,,%	(2.555.735.371.841 : 1.654.596.685.722) x 100%	154,46	DPMPTSP
				Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota				
				Jumlah investasi tahun 2022 di kabupaten		4.210.332.057.563		
				Jumlah investasi tahun 2021 di kabupaten		1.654.596.685.722		
19	Kepemudaan dan Olahraga	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten	,,,,,,,,,,%	2.965	1,08	DISBUDPORAPAR
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten		273.597		
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	,,,,,,,,,,%	265.000	96,86	
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten		273.597		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		79	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali	28 (termasuk PON XX Papua)	28	DISBUDPORAPAR
20	Statistik	80	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	,,,,,,,,,,%	51	100	DISKOMINFO
				Jumlah PD		51		
		81	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	,,,,,,,,,,%	51	100	
				Jumlah PD		51		
21	Persandian	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	,,,,,,,,,,%	378	7.560	
				Jumlah area penilaian		5		
22	Kebudayaan	83	Terlestariannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	,,,,,,,,,,%	13	100	DISBUDPORAPAR
				Jumlah cagar budaya yang terdata		13		
23	Perpustakaan	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat		59,738	59,738	DISPERSIP
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)		13,12	13,12	
24	Kearsipan	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$		$T=(80+100+100+0)/4$	70,01	DISPERSIP
				T = tingkat ketersediaan arsip				
				a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		80		
				i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip		100		
				s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik		100		
				j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		0,02		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ T = tingkat keberandaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK		$T = (80 + 70 + 70 + 90 + 80 + 70) / 6$ 80 75 70 90 0 70	64,17	DISPERSIP
Urusan Pilihan								
25	Kelautan Perikanan	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	Ton	30.673 29.708	103,25	DKPP
26	Pariwisata	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$(\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1) / \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1 \times 100\%$ Jumlah wisatawan tahun n-1 Jumlah wisatawan tahun 2022 Jumlah wisatawan tahun 2021	,,,,,,,,, %	$((60.461 - 463) / 463) \times 100\%$ 60.461 463	12.958,53	DISBUDPORAPAR
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	$(\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1) / \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1 \times 100\%$ Jumlah wisatawan tahun n-1 Jumlah wisatawan tahun 2022 Jumlah wisatawan tahun 2021	%	$((4.777.338 - 1.632.085) / 1.632.085) \times 100\%$ 4.777.338 1.632.085	192,71	

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		91	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	,,,,,,,,,%	122.804	31,83	DISBUDPORAPAR
				Jumlah kamar yang tersedia		385.760		
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (dalam satuan rupiah)	,,,,,,,,,%	2.585.650,64	5,55	
				Jumlah total PDRB (dalam satuan juta rupiah)		46.613.428,71		
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata Tahun 2022	,,,,,,,,,%	14.452.269.721	4,04	
				Realisasi PAD Tahun 2022		358.048.103.989		
27	Pertanian	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (ton)	Ton/Ha %	605.565	698,57	DKPP
				Luas Panen (ha)		86.686		
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus hewan menular tahun berjalan (2022) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (2021)	%	0	0	
				Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2021		1		
28	Kehutanan	URUSAN KEHUTANAN MENJADI KEWENANGAN PROVINSI						
29	ESDM	96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kabupaten	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	%	Kab Klaten tidak memiliki panas bumi sudah dilampirkan surat keterangan, dan pengisian data pada SI LPPD 1/1. Status TDI		BAG. PEREKONOMIAN
				Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi				
30	Perdagangan	97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	,,,,,,,,,%	208	100,00	DKUKMP
				Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten		208		
		98	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	,,,,,,,%	1.843,576	95,93	
				RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)		1.921,769		
		99	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	,,,,,,,,,%	6.345	70,50	
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten		9.000		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
31	Perindustrian	100	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	(Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun 2022 - Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun 2021)	,,,,,,,,,%	42	0,48	DISPERINAKEK
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022		8.811		
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2021		8.769		
		101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	Rata-rata capaian RPIK	,,,,,,,,,%	339,77	84,94	
						4		
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	,,,,,,,,,%	42	100	
				Jumlah izin yang dikeluarkan		42		
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	,,,,,,,,,%	Di Kabupaten Klaten belum pernah ada yang mengajukan Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah		
				Jumlah izin yang dikeluarkan				
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	,,,,,,,,,%	Kabupaten Klaten belum memiliki kawasan Industri, berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041		
Jumlah izin yang dikeluarkan								
105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			100	100			
32	Transmigrasi							

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA		
						Elemen data	Capaian Kinerja			
33	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	106	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (realisasi)	,,,,,,,,,%	248.881.287.176	9,85	BPKPAD		
				Jumlah APBD (realisasi)		2.527.619.332.474				
		107	Rasio PAD	Jumlah PAD	,,,,,,,,,%	358.048.103.989	13,84			
				Jumlah Pendapatan pada APBD		2.587.693.432.935				
		108	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	LQA BPKP No 8/PW12/3/2020 tgl 17 Januari 2020 tentang Laporan Hasil Quality Assurance atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3 Pada Pemerintah Kab Klaten	3	INSPEKTORAT		
		109	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	LQA BPKP No PE.09.03/LHP.382/PW12/6/2022 tgl 21 November 2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Pada Inspektorat Kab Klaten	3			
				110	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures (realiasi)	,,,,,,,,,%	1.548.946.118.458,28	61,28	BPKPAD
						Jumlah belanja APBD (realisasi)		2.527.619.332.474		
111	Opini Laporan Keuangan			Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	WTP		5	5,00		
					WDP		5			
					TW					
		TMP								

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
34	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)	112	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	,,,,,,,,,%	Pada tahun 2022 tidak ada kontrak infrastruktur besar di atas 50 M		BAGIAN PBJ
				Jumlah kontrak keseluruhan tahun n		84		
		113	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	,,,,,,,,,%	9.550	229,13	
				Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif		4.168		
		114	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan	,,,,,,,,,%	830.079.841.095,28	44,5	
				total belanja operasi dan modal		1.866.086.789.030,28		
		115	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	,,,,,,,,,%	28.500.000.000	4,77	
				Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)		597.300.000.000		
				Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n)		597.300.000.000		
				Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)		625.800.000.000		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
35	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)	116	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Pendidikan Tinggi ke atas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	,,,,,,,,,%	1.171	150,71	BPKPAD
				Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		777		
		117	Rasio pegawai Fungsional % (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	,,,,,,,,,%	568	29,2	
				Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		1.948		
		118	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	,,,,,,,,,%	568	100,0	
Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				568				
119	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		((Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi : Total belanja APBD) - 1) x 100%	,,,,,,,,,%	((2.527.619.332.474,28 : 2.700.855.921.596)-1)x 100%	6,41	BPKPAD	
			Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi		2.527.619.332.474,28	Nilai absolut adalah tidak ada angka yang bernilai minus		
			Total belanja APBD (Sebelum Perubahan)		2.700.855.921.596			
36	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)	120	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	((Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi : Total PAD dalam APBD) - 1) x 100%	,,,,,,,,,%	((358.048.103.989 : 274.489.704.335)-1)x 100%	30,44	BPKPAD
				Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi		358.048.103.989		
				Total PAD dalam APBD (sebelum perubahan)		274.489.704.335		
		121	Assets management	Jumlah Asset Manajemen		4 / 100%	4 / 100%	
				Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya		
				Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya		
				Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)		Ya		
Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		Ya						

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		122	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA	,,,,,,,,,%	529.593.676.302	21,24	BPKPAD
				Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya (realisasi)		2.493.406.881.542		
37	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)	123	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	,,,,,,,,,%	2.493.406.881.542	84,53	DISKOMINFO
				Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda		2.949.643.677.710,28		
		124	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	,,,,,,,,,%	12	100	
				Total jumlah dokumen yang telah dirinci		12		

LAMPIRAN

IKK OUTPUT

LAMPIRAN IKK OUTPUT

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA			
						ELEMEN DATA	CAPAIAN				
IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD											
1	Pendidikan	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)		Unit	973	973	Dinas Pendidikan			
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	32.595	32.595				
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	18.754	18.754				
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	2.145	2.145				
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	2.306	2.306				
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini		Orang	1.657	1.657				
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	1.135	1.135				
		IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar									
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		Unit	845	845				
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	700	700				
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	28.203	28.203				
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	53.931	53.931				
		5	jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	1.119	1.119				
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	6.843	6.843				
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	2.873	2.873				
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		Orang	6.820	6.820						
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	2.971	2.971						

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	74	74	Dinas Pendidikan	
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	12	12		
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	43	43		
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	7	7		
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	6.338	6.338		
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	2.809	2.809		
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	544	544		
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	110	110		
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	869	869		
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	640	640		
IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama									
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		Unit	845	845		
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	700	700		
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	28.203	28.203		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	53.931	53.931	Dinas Pendidikan
		5	jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	1.119	1.119	
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	6.843	6.843	
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	2.873	2.873	
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		Orang	6.820	6.820	
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	2.971	2.971	
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	74	74	
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	12	12	
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	43	43	
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	7	7	
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	6.338	6.338	
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	2.809	2.809	
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	544	544	
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	110	110	
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	869	869	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	640	640	Dinas Pendidikan	
		IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan							
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Satuan Pendidikan Kesetaraan terakreditasi	Unit	4	4		
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar	Orang	1.210	1.210		
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Peserta Didik Kesetaraan Penerima Pembebasan Biaya Pendidikan	Orang	1.210	1.210		
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Kebutuhan Pendidik jenjang Kesetaraan	Orang	118	118		
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Total Pendidik Satuan Pendidikan Kesetaraan	Orang	118	118		
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Pendidik Satuan Pendidikan Kesetaraan yang memiliki ijazah D4/ S1	Orang	104	104		
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Kesetaraan yang memiliki sertifikat pendidik	Orang	10	10		
8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Kesetaraan yang memiliki ijazah D4/ S1	Orang	10	10				
2	Kesehatan	IKK Outcome : Rasio daya tampung rumah sakit rujukan						Dinas Kesehatan	
		1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		Unit	13	13		
		IKK Outcome : Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi							
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		Unit	13	13		
		IKK Outcome : Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	12	12		
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		Orang	412	412				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		IKK Outcome : Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	7	7	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		Orang	412	412	
		IKK Outcome : Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	7	7	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		Orang	412	412	
		IKK Outcome : Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	7	7	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Orang	412	412	
		IKK Outcome : Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Jenis	11	11	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		Orang	3.392	3.392	
		IKK Outcome : Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	3	3	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	435	435	
		IKK Outcome : Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	1	1	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	448	448	
		IKK Outcome : Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	3	3	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	469	469	
		IKK Outcome : Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	3	3	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	469	469	

Dinas Kesehatan

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
		IKK Outcome : Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar								
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	2	2	Dinas Kesehatan		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	68	68			
		IKK Outcome : Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar								
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	3	3			
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	129	129			
		IKK Outcome : Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar								
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	1	1			
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	593	593			
		3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK Outcome : Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota						
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)				Ha	kewenangan wilayah sungai di Kabupaten Klaten menjadi kewenangan BBWS Bengawan Solo				
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)				M					
3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)				Ha	tidak ada kawasan pantai di Kabupaten Klaten				
4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)				M					
5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/loa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota			Ada/Tidak	Ada/Tidak	kewenangan wilayah sungai di Kabupaten Klaten menjadi				
6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota			Ada/Tidak	Ada/Tidak	ada (Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan)				
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota			jumlah	Jumlah	tidak ada kawasan pantai di Kabupaten Klaten				
IKK Outcome : Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kota/Kota										
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)				Ha	kewenangan wilayah sungai di Kabupaten Klaten menjadi kewenangan BBWS Bengawan Solo				
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)				M					
3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)				Ha	tidak ada kawasan pantai di Kabupaten Klaten				
4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)				M					

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada/Tidak	Ada/Tidak	kewenangan wilayah sungai di Kabupaten Klaten menjadi		DPUPR
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/Tidak	Ada/Tidak	ada (Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan)		
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	Jumlah	Jumlah	tidak ada kawasan pantai di		
IKK Outcome : Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi								
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)	%	10.446	22,68	
				Panjang jaringan irigasi primer (m)		46.062		
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Sekunder dalam kondisi baik (m)	%	85.933	18,99	
				Panjang jaringan irigasi Sekunder (m)		452.481		
		3	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik (m)	%	762.873	31,76	
				Panjang jaringan irigasi Tersier (m)		2.401.721		
IKK Outcome : Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota								
		1	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada	Ada	
		2	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kab/kota	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada	Ada	
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD kab/kota penyelenggaraan SPAM		BUMD / UPTD	Ada	Ada	
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		Izin	167	167	
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.		Kerjasama	tidak ada	tidak ada	
IKK Outcome : Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik								
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		Rumah	1.835	1.835	
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		Rumah	4.255	4.255	
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		Rumah	6.090	6.090	
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Rumah	1.835	1.835	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		Rumah	1.835	1.835	DPUPR
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		Rumah	4.255	4.255	
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik	%	441.853	98,64	
				rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha		447.943		
		8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	%	1835	0,41	
				rumah di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha		447.943		
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	%	4255	0,95	
				rumah di wilayah pengembangan SPALD T		447.943		
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat	%	1835	0,41	
				jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S		447.943		
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	jumlah sarana pengangkutan yang tersedia	%	2	40	
				jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota		5		
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia	%	14	49,47	
				jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota		28,3		
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD	%	4255	0,95	
				jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota		447.943		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot	%	1835	0,41	DPUPR		
				jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S		447.943				
		IKK Outcome : Rasio kepatuhan IMB kab/ kota								
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana yang laik fungsi yang berlaku	%	7	9,21			
				Jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana		76				
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting		Izin	106				
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada				
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada				
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		Bangunan	13	13			
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kab/kota		Bangunan					
		7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kab/kota		Bangunan	3.233				
		8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kab/kota yang dipelihara/dirawat		Bangunan	3.233				
		IKK Outcome : Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota								
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kab/kota		KM	715,89	715,89			
		2	Panjang jalan yang dibangun		KM	151,15	151,15			
		3	Panjang jembatan yg dibangun		M	0	0			
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		KM	0	0			
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		M	47,7	47,7			
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		KM	37,52	37,52			
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi		M	25,7	25,7			
		8	Panjang jalan yang dipelihara		KM	113,63	113,63			
		9	Panjang jembatan yang dipelihara		M	22	22			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
			IKK Outcome : Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi					
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota		KEGIATAN	1	1	
		2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah Kab/kota		Orang	265	265	
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota		Orang	95	95	
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan Kab/kota yang aktif dengan data termutakhir		Ada/Tidak	Ada	sipjaki.pu.go.id	
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota		Ada/Tidak	Ada	SIRUP	
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN		Ada/Tidak	Ada		
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kab/ kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		Ada/Tidak	Ada		
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		Ada/Tidak	Ada		
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kab/Kota		Ada/Tidak	Ada	dpupr.klaten.go.id	
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		Ada/Tidak	Ada		DPUPR
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kab/ kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		Ada/Tidak	Ada		
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota		Ada/Tidak	Ada		
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota		Ada/Tidak	Tidak		
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Ada/Tidak	Tidak ada pengajuan selama Tahun 2022 karena IUJK sudah menjadi kewenangan pusat sesuai dengan surat BK 04.01 - BK/349 tanggal 19 April 2021 tentang Pengehentian Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)		
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	Ada	melalui MK proyek	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	Ada		DPUPR
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	Ada	melalui MK proyek	
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		Badan Usaha	202		
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kab/kota		Badan Usaha	Tidak ada pengajuan selama Tahun 2022 karena IUJK sudah menjadi kewenangan pusat sesuai dengan surat BK 04.01 - BK/349 tanggal 19 April 2021 tentang Pengehentian Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)		
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/kota		Badan Usaha	42		
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota		Badan Usaha			
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		izin	Tidak ada pengajuan selama Tahun 2022 karena IUJK sudah menjadi kewenangan pusat sesuai dengan surat BK 04.01 - BK/349 tanggal 19 April 2021 tentang Pengehentian Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)		
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Pengawasan	7	melalui MK proyek	
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Kecelakaan Konstruksi	0	tidak ada kecelakaan konstruksi	
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Pengawasan	7	melalui MK proyek	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IKK Outcome : Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota							DISPERAKIM	
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		Unit	120	120			
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Unit	13	13			
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		Orang	52	52			
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		Unit					
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		Unit	-	-			
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		Unit	-	-			
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		Unit	-	-			
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		Orang	-	-			
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		Ha	-	-			
		IKK Outcome : Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kab/Kota								
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	Pada tahun 2022 tidak ada relokasi program Pemerintah sehingga tidak ada warga masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah				
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT					
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT					
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT					
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT					
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		Ha					
		IKK Outcome : Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani								
		1	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh < 10 Ha		Ha	19,21	19,21			
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		Unit	14	14			
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		Ha	19,21	19,21			
		IKK Outcome : Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)								
		1	Jumlah rumah di kab/kota		Rumah	379.926	379.926			
		2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH		Rumah	1747	1747			
		3	Jumlah rumah tidak layak huni		Rumah	16.264	16.264			
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni		Rumah	Tidak Ada				
		5	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK		447.943	1,18			
				Jumlah total unit rumah		379.926				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		6	Jumlah rumah pembangunan baru			14	14	DISPERAKIM	
		IKK Outcome : Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)							
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		Perumahan	142	142		
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		Rumah	7.302	7.302		
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		Rumah	7.302	7.302		
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		Rumah	7.302	7.302		
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		Perumahan	108	108		
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		Rumah	7.302	7.302		
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		Pengembang	67	67		
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IKK Outcome : Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan							
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditangani		Jumlah	33	33	SATPOL PP DAN DAMKAR	
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		Orang	31	31		
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		Perda/perkada	11	11		
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		orang	1	1		
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		ada/tidak	ada	12		
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal		unit	ada	535		
		IKK Outcome : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana							
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	1	100	BPBD	
Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan				1					
Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%			3.400	100,00				
Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana				3.400					

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
IKK Outcome : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana								
		1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	1	100	BPBD
				Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan		1		
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	1	100	
				Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan		1		
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	1.770	100	
				Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana		1.770		
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	%	1.170	100,00	
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		1.170		
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops	%	3.400	100,00	
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		3.400		
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan	%	3.400	100,00	
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		3.400		
IKK Outcome : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana								
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	%	tidak ada KLB tahun 2022		
				Jumlah seluruh penetapan status KLB				
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	%	1	100	
				Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana		1		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	92	100	BPBD	
				Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat		92			
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	%	363	100	BPBD	
				Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana		363			
		IKK Outcome : Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran							
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kab/Kota		Layanan	364		SATPOL PP DAN DAMKAR	
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	ada/Tidak	ada/tidak	tidak ada			
		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	ada/Tidak	ada/tidak	tidak ada			
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		Pos	tidak ada			
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		Sarpras	61			
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		Orang	35			
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		Orang	96			
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran		Kegiatan	8			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
6	Sosial	IKK Outcome : Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti							DISSOSP3APPK B
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		jenis	1	1		
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM		orang	4.875	4.875		
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		Tim	1	1		
		4	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, lanjut usia yang terlantar dan gepeng dan gepeng yang dijangkau.		Orang	4.641	4.641		
		5	jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki.		unit	1	1		
		6	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket pemakaman sesuai standar gizi.		orang	133	133		
		7	Jumlah rumah singgah, shelter, tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar.		unit	1	1		
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang.		orang	133	133		
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu,		orang	59	59		
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter.		Unit	1	1		
		11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia.		Unit	-	-		
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yangh memanfaatkan paket perbekalan kesehatan.		orang	133	133		
		13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah.		orang	0	0		
		14	Jumlah pekerja social professional dan/atau TKS dan/atau relawan social yang disediakan.		orang	960	960		
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial.		orang	4.641	4.641		
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		Orang	4.641	4.641		
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan.		orang	4	4		
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlangtar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.		orang	133	133		
		19	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layananan penelusuran keluarga.		orang	133	133		
		20	jumlah penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga.		orang	65	65		
21	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk.		orang	30	30				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
			IKK Outcome : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/kota					
		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		Orang	98	98	DISSOSP3APPK B
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		Orang	98	98	
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		Penampungan	3	3	
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		Paket	328	328	
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		Orang	98	98	
		6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		Orang	960	960	
7	Tenaga Kerja		IKK Outcome : Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja					
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah disusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	Ada/Tidak	ada	Ada	DISPERINAKEK
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100%	%	207,43	207,43	
		3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	Perusahaan	59	59	
			IKK Outcome : Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi					
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun 2022	%	18	10,78	
				keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun 2022		167		
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2022	%	83	62,88	
				jumlah instruktur seluruhnya pada tahun 2022		132		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun 2022	rasio	132	4,13	DISPERINAKEP
				jumlah peserta pelatihan pada tahun 2022		3197		
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2022	%	15	12,50	
				jumlah seluruh LPK pada tahun 2022		120		
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2022	%	120	100,00	
				jumlah LPK yang terdata pada tahun 2022		120		
		6	Jumah penganggur yang dilatih		Orang	3197		
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun 2022	%	2935	100,00	
				Jumlah orang yang dilatih pada tahun 2022		2935		
		8	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2022	%	2622	89,34	
				jumlah lulusan pada tahun 2022		2935		
9	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat Kompetensi pada tahun 2022	%	2935	60,67			
		Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun 2022		4838				
10	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang	ΣCPMI dilatih	%	108	11,69			
		ΣCPMI terdaftar		924				
11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)			5				
IKK Outcome : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja								
1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun 2022	%	4	0,27			
		jumlah perusahaan pada tahun 2022		1504				
2	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).			BPS			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		IKK Outcome : Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)						
		1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2022	%	103	7,87	DISPERI NAKER
				Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih		1309		
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2022	%	24	54,55	
				Jumlah perusahaan yg memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh		44		
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		SP/SB	52		
		4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah	%	103	81,10	
				Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)		127		
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	1309	87,03	
				Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor		1504		
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih	%	26	1,73	
				Jumlah perusahaan pada tahun 2022		1504		
		7	Jumlah mogok kerja		Mogok	0	tidak ada aksi mogok	
		8	Jumlah penutupan perusahaan		Perusahaan	0	tidak penutupan perusahaan	
		9	Jumlah perselisihan kepentingan		Perselisihan	0	tidak ada perselisihan kepentingan	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		Perselisihan	0	tidak ada perselisihan antar SP/SB	DISPERI NAKER	
		11	Jumlah perselisihan PHK		Perselisihan	30	30		
		12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		pekerja	58	58		
		13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit		Perselisihan	25	25		
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	ada / tidak	ada / tidak	ada	1		
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perjanjian Bersama	%	1	3,33		
				Jumlah kasus perselisihan		30			
IKK Outcome : Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota									
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kab/Kota		Lowongan Kerja	5719	5719		
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		Orang	7326	7326		
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		BKK	35	35		
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota		Orang	34	34		
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		Orang	5	5		
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		Lembaga	0	0		
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kota		Perjanjian	88	88		
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		orang	42	42		
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	ΣCPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi	Orang	221	23,92		
				ΣCPMI/CTKI	Orang	924			
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		Orang	924	924		
		11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Σfasilitasi PMI yang dipulangkan	%	0	0		
				ΣPMI yang pulang		93			
		12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	ΣPMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	%	108	12		
				ΣPMI/TKI		924			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan dan keluarganya	Σ PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan	%	0	0	DISPERI NAKER
				Σ PMI/TKI purna dan keluarganya		93		
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Σ LTSA yang terbentuk	%	0	belum terdapat LTSA di Kabupaten Klaten	
				Jumlah daerah kantong PMI/TKI		0		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IKK Outcome : Persentase ARG pada belanja langsung APBD						DISSOSP3APKB
1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		Lembaga	115	115			
2	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		Prog/Keg	22	22			
IKK Outcome : Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kab/kota								
1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab (dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		Media Massa	0	0			
2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		Lembaga	3	3			
3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani	%	26	100			
		jumlah korban kekerasan anak di tingkat Kab/Kota		26				
4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		Lembaga	9	9			
5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)		Lembaga	4	4			
IKK Outcome : Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)								
1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		Organisasi	4	4			
2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		Orang	34583	34583			
3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		Lembaga	5	5			
4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		Lembaga	4	4			
5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		Kebijakan/Program	1	1			
6	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi		Lembaga	3	3			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan	%	35	100	DISSOSP3APPK B
				Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan		35		
IKK Outcome : Persentase ketersediaan pangan								
9	Pangan	1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan	Ada/Tidak	Foto gudang cadangan pangan dan sarana pendukungnya	Ada	DKPP
		2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/Tidak	Data penyaluran pangan pokok (beras) DKPP Kab. Klaten 2022	Ada	
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Ada/Tidak	Surat keterangan Kabupaten Klaten tidak memiliki regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak	
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada/Tidak	Laporan akhir sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal tahun 2022	Ada	
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/Tidak	Foto buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tahun 2022	Ada	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	Data penanganan daerah rentan rawan pangan Kab. Klaten tahun 2022	Ada	DKPP
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	Data penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan tahun 2022	Ada	
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada/Tidak	Laporan akhir kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022 dan Laporan hasil pengawasan pangan tahun 2022	Ada	
10	Pertanahan	IKK Outcome : Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan						
		1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses ditolak seluruhnya	%	Izin lokasi telah dirubah menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sesuai dengan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang		DPU PR DAN BPN
			Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun					
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah Penerbitan SK Penetapan Tanah obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee	%	Tidak ada Tanah Obyek Landreform (TOL)		
			Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform					

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee	%	Tidak ada Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee		DISPERAKIM	
				Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek					
		4	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah dokumen izin membuka tanah yang ditolak	%	tidak ada ajuan izin membuka tanah dari masyarakat	tidak ada ajuan izin membuka tanah dari masyarakat		
				Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun					
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik	%				
				Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun					
11	Lingkungan Hidup	IKK Outcome : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota							
		1	Hasil Perhitungan terhadap :						
			a) Indeks Kualitas Air,(IKA)			47,69	47,69		
			b) Indeks Kualitas Udara (IKU)			87,85	87,85		
			c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			42,55	42,55		
		IKK Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota							
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	ada / tidak	ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		IKK Outcome : Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota							
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/kota jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	%	20	100	Dinas Lingkungan Hidup	
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah PPLHD yang ada Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota	%	1	5,00		
		3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kotaPenetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	Jumlah MHA (masyarakat hukum adat) yg diakui Jumlah usulan MHA	%	tidak ada	tidak ada		
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg mendapatkan pelatihan Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg ada	%	tidak ada	tidak ada		
		5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat	%	0			
		6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	%	18	94,74		
		IKK Outcome : Perekaman KTP Elektronik							
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	%	508	100	DISDUKCAPIL	
		2	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta Percerian yang diterbitkan Peristiwa Perceraian yang dilaporkan	%	48	100		
		3	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan Peristiwa kematian yang dilaporkan	%	10.926	100		
		4	Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kota kota dalam satu tahun 2 dalam 1 tahun	%	100	100		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IKK Outcome : Persentase Pengentasan Desa Tertinggal							DISPER MASDES
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		Desa		7		
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		Desa	tidak ada penambahan kerjasama antar desa	0		
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		Lembaga	Rekap jumlah LK dan Lembaga adat yang terfasilitasi	40		
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		Desa	Penambahan BUMDes baru	2		
		IKK Outcome : Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri							
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		Desa		7		
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		Desa	tidak ada penambahan kerjasama antar desa	0		
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		Lembaga	Rekap jumlah LK dan Lembaga adat yang terfasilitasi	40		
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		Desa	Penambahan BUMDes baru	2		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IKK Outcome : TFR ((Angka Kelahiran Total)							DISSOSP3APPK B	
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Ada/Tidak	Ada	1			
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.		22,6				
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times 1000$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	%	8,2				
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	4089	2,17			
				Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)		188.154				
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Stakeholder / kelompok	7				
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)								
		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP	%	77	80,21			
				Jumlah faskes		96				
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB Aktif	%	124.337	66,08			
				Jumlah PUS		188.154				
		3	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	Kelompok	5				
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern)	%	5.562	41,86			
jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan				13.288						

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		IKK Outcome : Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)							
		1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah	%	22,44	22,44	DISSOSP3APPKB	
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI Jumlah Keluarga PBI	%	61.702 92.258	66,88		
15	Perhubungan	IKK Outcome : Rasio konektivitas Kabupaten/Kota							
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia	%	5	41,67	DISHUB	
				Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan		12			
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun	%	6.200	80,55		
				Jumlah kendaraan wajib uji		7.697			
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan	%	0	0		
				Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten atau kota		0			
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/kota	%	65.357	68,77		
				Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/kota		95.036			
		IKK Outcome V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota							
		1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/kota	%	65.357	68,77		
				Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/kota		95.036			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
16	Komunikasi dan Informatika	IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo								DISKOMINFO
		1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	51	100,00			
				Jumlah Perangkat Daerah		51				
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo	%	51	100,00			
				Jumlah Perangkat Daerah		51				
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ya/Tidak	Ya	ada			
		IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi								
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015)	%	156	100,00			
				Jumlah Kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah		156				
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	51	100,00			
		Jumlah Perangkat Daerah		51						

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	51	100,00	DISKOMINFO
				Jumlah Perangkat Daerah		51		
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	16	100,00	
				Jumlah layanan		16		
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	3	18,75	
				Jumlah layanan		16		
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	121	100,00	
				Jumlah sistem elektronik		121		
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	16	100,00	
				Jumlah layanan publik dan layanan administrasi		16		
8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	51	100,00			
		Jumlah perangkat daerah		51				
9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat	%	51	100,00			
		Jumlah perangkat daerah		51				
10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya	%	51	100,00			
		Jumlah perangkat daerah		51				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	%	93	61,59	DISKOMINFO		
				Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah		151				
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	51	100,00			
				Jumlah perangkat daerah		51				
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo	%	63	100,00			
				Jumlah ASN Pengelola TIK		63				
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		Ada/tidak	ada	ada			
		IKK Outcome : Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kab/Kota								
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kab/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota	Σ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Kab/Kota yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	%	5	100,00			
				Σ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah Kab/kota		5				
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	642	100,00			
				Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota		642				
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Σ Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP	%	2	100,00			
				Σ Diseminasi dan layanan informasi Publik		2				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
17	Koperasi dan UKM	IKK Outcome : Meningkatnya Koperasi yang berkualitas							DKUKMP
		1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan	%	9	4,57		
				Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam		197			
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	%	1	100		
				Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan		1			
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	%	223	24,78		
				Jumlah koperasi yang ada		900			
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannyauntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	%	12	3,81		
				Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada		315			
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	440	48,89		
				Jumlah koperasi yang ada		900			
		6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	%	440	48,89		
				Jumlah anggota koperasi yang ada		900			
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	%	223	24,78		
Jumlah koperasi yang ada				900					

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan		Tidak perlu diisi		DKUKMP
				Jumlah koperasi yang ada				
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasinya	%	203	22,56	
				Jumlah koperasi yang ada		900		
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	%	0	-	
				Jumlah koperasi yang ada		900		
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	%	0		
				Jumlah koperasi yang ada		900		
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	%	440	48,89	
				Jumlah koperasi yang ada		900		
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	%	0		
				Jumlah koperasi yang ada		900		
		IKK :Outcome : Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha						
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	%	50	0,100	
				Jumlah wirausaha yang ada		50.175		
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)	%	16.026	31,940	
				Jumlah usaha mikro yang ada		50.175		
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra	%	144	0,29	
				Jumlah usaha mikro yang ada		50.175		
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk	%	1.608	3,30	
				Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk		48.675		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	649	1,31	DKUKMP
				Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran		49.526		
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	3.444	6,86	
				Jumlah usaha mikro yang ada		50.175		
		7	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	%	1.593	3,17	
Jumlah usaha mikro yang ada				50.175				
18	Penanaman Modal	IKK Outcome : Persentase peningkatan investasi di Kab/Kota						DPMPTSP
1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	Ada/Tidak	1	1			
2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	Ada/Tidak	baru proses penyusunan Perbup	1			
3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	Jumlah Laporan	0	0			
4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	Jumlah Kegiatan	1	1			
5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah Kegiatan	1	1			
6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman moda	Jumlah Kegiatan	1	1			
7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah Konsultasi	230	230			
8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	5.915	5.915			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Realisasi (Rupiah)	9.666.605.771.328	9.666.605.771.328	DPMPTSP	
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	Jumlah Aparatur	16	16		
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Perusahaan	10	10		
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	jumlah data	Ada	Ada		
19	Pemuda dan Olahraga	IKK Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri							DISBUDPORAPAR
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Orang	85	85		
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Orang	0	0		
		IKK Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan							
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Orang	155	155		
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Orang	260	260		
		IKK Outcome : Peningkatan Prestasi Olahraga							
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga	Orang	64	64		
2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Event	3	3				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
20	Statistik	IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah								
		1	Tersedianya buku profil daerah	Ada/tidak	Ada/tidak	Ada				
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Survey	Belum Ada				
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Kompilasi	24				
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah Survey	Belum Ada				
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Jumlah Kompilasi	24				
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral	%	13	100			
				Jumlah kegiatan statistik sektoral		13				
7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah metadata indikator statistik sektoral	%	13	100					
		jumlah indikator statistik sektoral		13						
21	Persandian	IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah							DISKOMINFO	
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan	%	5	100			
				Jumlah kegiatan strategis yang ada		5				
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian	%	3	2,48			
				Jumlah SE yang ada		121				
		3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	3	2,48			
				Jumlah SE yang ada		121				
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan	%	51	100			
Jumlah titik pada PHKS				51						

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
22	Kebudayaan	IKK Outcome : Terlestarikannya Cagar Budaya							DISBUDPORAPAR
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	Obyek	3	3		
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	Obyek	5	5		
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	Obyek	4	4		
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	Orang	50	50		
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	Cagar Budaya	13	13		
		6	Perlindungan cagar budaya kab / kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	Cagar Budaya	13	13		
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya kab/kota ke luar kab/kota dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	Cagar Budaya	0	0		
		8	Pengembangan cagar budaya kab/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	Cagar Budaya	0	0		
		9	Pemanfaatan cagar budaya kab/kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	Cagar Budaya	5	5		
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan +	Koleksi	87	87		
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	Orang	278	278		
12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.			0	0				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	Tim	belum ada Tim Ahli Cagar Budaya. Mengusulkan Alokasi Anggaran untuk Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten sebanyak 5 (lima) orang dikarenakan selama ini asih meminta bantuan TACB dari Provinsi		DISBUDPORAPAR
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya kota	Jumlah pembentukan tim ahli CB	Tim			
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	Tim			
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum	Orang	8	8	
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	Orang	0	0	
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	Unit	1	1	
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	0	0	
23	Perpustakaan	IKK outcome : Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat						DISPERSIP
1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)	rasio	885.514	0,69			
				Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)		1.277.455		
2	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite	%	35.434	2,77			
				Jumlah penduduk di wilayahnya		1.277.455		
3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya	rasio	187	0,0001			
				Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)		1.277.455		
4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	1	1,01			
				Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya		99		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jenis	1.Perpus keliling, 2. CFD 3.Umum (Sekolah) 4.Bejanaku 5.Online 6. Jambu Carlin 7. Pocadi (PojoK Baca Digital)	7	DISPERSIP		
		IKK Outcome : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat								
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Naskah Kuno	0				
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Naskah Kuno	0				
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Budaya Etnis	0				
24	Kearsipan	IKK Outcome : Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan						DISPERSIP		
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	3.471	100			
				Jumlah seluruh arsip aktif		3.471				
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	154.563	100			
				Jumlah seluruh arsip inaktif		154.563				
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	66.757	100			
				Jumlah seluruh arsip Statis		66.757				
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	24	0,01			
				Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan kab/kota		230.009				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
			IKK Outcome : Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat						
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	Jumlah Arsip	65.107	65.107	DISPERSIP	
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	Jumlah Arsip	7.672	7.672		
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kec/Kelurahan yang sesuai NSPK di Kab/Kota	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	Jumlah Arsip	22.806	22.806		
		4	Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kab/Kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	Jumlah Arsip	302	302		
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Arsip	0	0		
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kab/kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Jumlah Arsip	0	0		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
Urusan Pilihan									
25	Kelautan Perikanan	IKK Outcome : Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)							DKPP
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Rumah Tangga	Data rumah tangga nelayan Kab. Klaten tahun 2022	38		
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	jumlah TPI yang operasional	%	Surat keterangan Kabupaten Klaten tidak memiliki pelabuhan perikanan dan TPI	0		
				Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah kab/kota					
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kab/ kota yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kab/ kota yang diterbitkan	Izin	Data rekap nilai investasi sektor primer sub sektor perikanan Kab. Klaten tahun 2022	46		
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun	Pembudidaya	Data jumlah peserta pelatihan kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil tahun 2022	100		
5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun	Benih	Data produksi pembenihan Kab. Klaten tahun 2022	92.923.284 ekor				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
26	Pariwisata	IKK Outcome : Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan							DISBUDPORAPAR
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Pengelola	89	89		
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Obyek	89	89		
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kab/kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kab/kota	TDUP	471	471		
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	orang	60.213	60.213		
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Kegiatan	5	5		
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Kegiatan	0	0		
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Industri	5	5		
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	%	501	25,11		
				Jumlah tenaga kerja pariwisata		1995			
9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	400	133,33				
		Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan		300					
10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi	35					

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
27	Pertanian	IKK Outcome : Produktivitas pertanian per hektar per tahun							DKPP
		1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Unit	118	113 unit, 2 paket bantuan pupuk dan 3 paket bantuan benih cabai		
		2	Prasaran pertanian yang digunakan	Jumlah Prasaran pertanian yang digunakan	Prasarana	15	15		
		3	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	Dokumen	302	302		
		4	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	%	15	100		
				Jumlah prasarana yang dibangun		15			
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kota	Jumlah usulan yang difasilitasi	%	302	100		
				Jumlah usulan usaha pertanian		302			
		IKK Outcome : Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular							
		1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi	%	4	100		
Jumlah area yang terkena bencana				4					
28	Kehutanan	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	Dokumen	Wewenang Provinsi			
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	kelompok				
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	Ha				
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	kejadian				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
29	ESDM	IKK Outcome : Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota							Bag. Perekonimian
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	izin	tidak sumber panas bumi di Kab. Klaten sehingga tidak ada ijin panas bumi	tidak sumber panas bumi di Kab. Klaten sehingga tidak ada ijin panas bumi		
30	Perdagangan	IKK Outcome : Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)							DKUKMP
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja	%	21	100,0		
				Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang doumennya lengkap dan benar		21			
				Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja		236	100,0		
				Jumlah permohonan izin toko swalayan yang doumennya lengkap dan benar		236			
		2)	Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja		21	100,0		
				Jumlah permohonan penerbitan TDG		21			
		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG	%	236	100,0		
				Jumlah gudang yang ada di Kab kota	semua gudang memiliki TDG	236			
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu		%	di dalam aplikasi OSS RB Tidak ada pengajuan permohonan STPW			
			untuk :						
			a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%				
		Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri							

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
			b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan@waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%	di dalam aplikasi OSS RB Tidak ada pengajuan permohonan STPW	DKUKMP	
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri					
		c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%				
		Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri						
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kota	%	Dalam perijinan sistem OSS RB tidak ada pengajuan SIUP Bahan berbahaya		
		Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer						
6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja 1 x 24 jam	%	dalam perijinan sistem OSS RB tidak ada pengajuan SKA				
Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar								

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$	%	$k = (0,5 + 0,5) \times 100\%$	100	DKUKMP	
				K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)					
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok					
		IKK Outcome : Persentase penanganan pengaduan konsumen							
		1	Jumlah penanganan pengaduan konsumen		Pengaduan	7	7		
		2	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi		Konsumen	7	7		
		IKK Outcome : Persentase kinerja realisasi pupuk							
		1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = a / (b \times c) \times 100\%$	%	95,72	95,72		
				X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat kab/kota sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)					
		IKK Outcome : Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku							
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan	%	5479	60,9		
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab kota		9000			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	%	41	91,1	DKUKMP	
				Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan		45			
31	Perindustrian	IKK Outcome : Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota							DISPERINAKEK
		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan		di Kabupaten Klaten belum memiliki kawasan Industri,			
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk					
		IKK Outcome : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK							
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK	%	100	100		
		IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait							
		1	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	%	42	64,62		
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk		65			
		IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri							
		1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri kecil yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan		Di Kabupaten Klaten belum pernah ada yang mengajukan Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah			
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk					

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		IKK Outcome : Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini						
		1	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil dan perusahaan kawasan industri di Kab/kota di SIINas	%	67	155,81	DISPERINAKER
				Total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di Kab/kota		43		
31	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya		Kawasan	Kabupaten Klaten tidak ada kawasan transmigrasi	Kabupaten Klaten tidak ada kawasan transmigrasi	
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		Permukiman	Kabupaten Klaten tidak ada pemukiman transmigrasi	Kabupaten Klaten tidak ada pemukiman transmigrasi	
		3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina		Permukiman	Kabupaten Klaten tidak ada pemukiman transmigrasi	Kabupaten Klaten tidak ada pemukiman transmigrasi	